



**WALIKOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 170);

39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
42. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 48);
43. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Pemerintah Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Tasikmalaya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD;
  - b. mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan

perencanaan pembangunan Daerah, baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

- c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan Daerah; dan
- d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. kedudukan, peran dan fungsi;
- b. sistematika, isi dan uraian;
- c. penyusunan RKPD; dan
- d. pengendalian dan evaluasi.

### BAB IV

#### KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI

##### Pasal 4

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

- a. secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab, yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun;
- b. secara normatif, menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan KUA PPAS yang akan diusulkan oleh Wali Kota untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD;
- c. secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
- d. secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V  
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 5

- (1) Sistematika penulisan RKPD adalah sebagai berikut :
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
dan
  - g. BAB VII Penutup.
- (2) Sistematika, isi dan uraian RKPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf e memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif.
- (2) RKPD menjadi pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan dan sub kegiatan pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, disusun berita acara kesepakatan antara Wali Kota dengan Pimpinan DPRD.
- (4) Penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akibat terjadi kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

BAB VI  
PENYUSUNAN RKPD

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPD, yang disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan RKPD;
  - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
  - c. penyusunan rancangan RKPD;
  - d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
  - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
  - f. penetapan RKPD.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 dalam

RPD, mempedomani RKP, program strategis nasional dan RKPD Provinsi.

- (3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan.

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
  - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. Bab V Penutup.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan untuk diverifikasi dan diselaraskan dengan RKPD.

### BAB VII

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 9

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2023.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian kebijakan;
  - b. pengendalian pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi hasil.
  - d.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan menghimpun dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Juli 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 28



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN  
2023

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehubungan dengan berakhirnya periode Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya pada tahun 2022, dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota Akan Dilaksanakan Secara Serentak Pada Tahun 2024. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 13 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026.

RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari RPD Tahun 2023 - 2026 yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Bagi Perangkat Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2023.

Penyusunan RKPD merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh pemangku kepentingan dengan memanfaatkan berbagai sumber

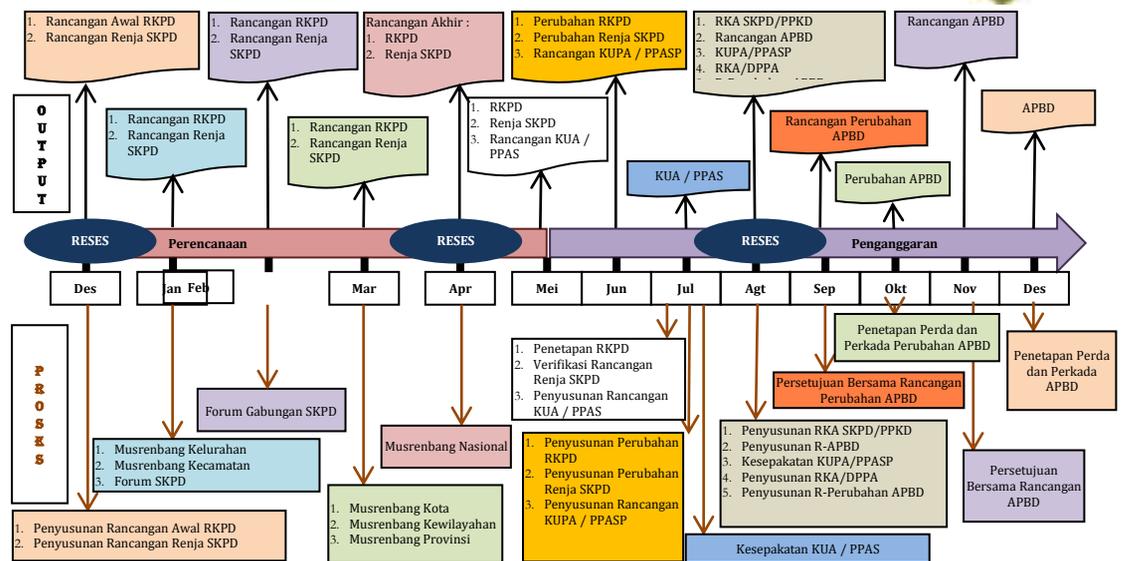


daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, *top-down* dan *bottom-up*, holistik, tematik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat dan mendorong pencapaian kinerja yang akan didanai dan bukan sekedar untuk melaksanakan tugas fungsi perangkat daerah bersifat rutinitas semata. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan dalam penyusunan RKPD dimulai dari tahap persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.



Gambar 1.1

Proses dan Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RKPD Tahun 2023

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini dengan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tasikmalaya, tentunya berakibat pada perubahan tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya. Oleh karena itu kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 terutama dalam penentuan target indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Indeks Daya Beli, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, Indeks gini dan sebagainya sehingga perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);



32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembar Daerah Nomor : 28 Tahun 2022 );
36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 170);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
42. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
43. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13)

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Adapun hubungan antara RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

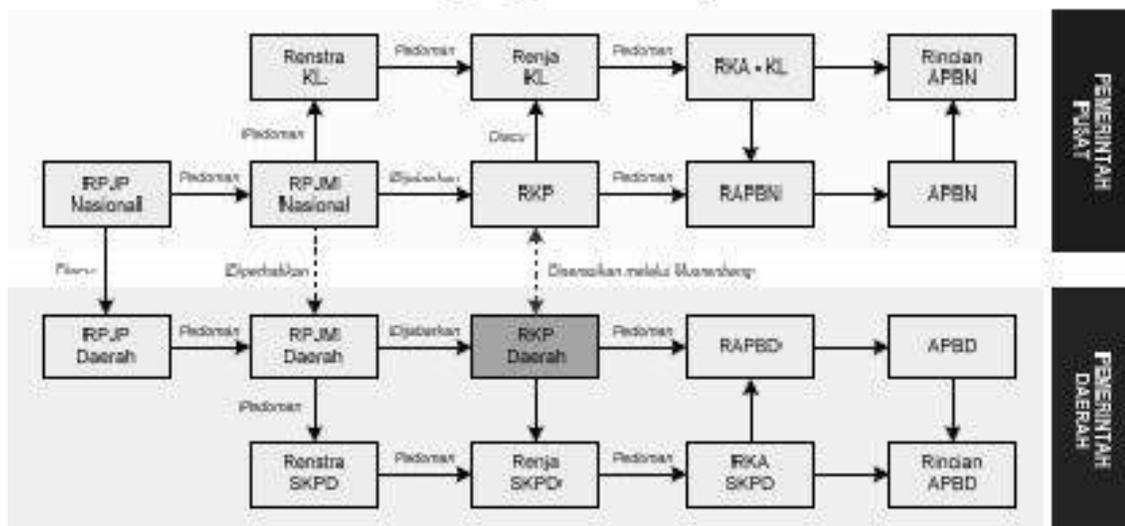
1. RKPD Tahun 2023 mengacu dan mendukung RKP dan Program Startegis Nasional Tahun 2023;



2. RKPD Tahun 2023 mengacu dan mendukung RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
3. RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026;
4. RKPD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan hasil pembangunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2012 - 2017;
5. RKPD Tahun 2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;
6. RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dengan Renja PD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling melengkapi; dan
7. RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Hubungan keterkaitan antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat digambarkan sebagai berikut.

#### Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Gambar 1.2.

Hubungan keterkaitan antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026 serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2023 dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Adapun tujuan RKPD Tahun 2023 adalah:



1. Mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah Kota Tasikmalaya;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan Tahun 2023;
3. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan mulai dari pusat, provinsi dan kota.
4. Mewujudkan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **1.5. Sistematika Dokumen**

Dokumen RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 disusun sesuai dengan sistematika yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan mengenai latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika dokumen RKPD.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta permasalahan pembangunan.

#### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang



direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional.

#### BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

#### BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menyajikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

#### BAB VII PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dan kaidah pelaksanaan RKPD.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah**

##### **2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

###### **2.1.1.1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota**

Kota Tasikmalaya terletak antara 108°08'38" BT-108°24'02" BT dan antara 7°10' LS-7°26'32" LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak ± 105 km dari Kota Bandung dan ± 255 km dari Kota Jakarta. Batas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya diatur ber Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya pasal 6 ayat (1) bahwa Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya menurut Undang-Undang seluas 17.156,20 hektar dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, terdeliniasi wilayah administrasi Kota Tasikmalaya seluas 18.422 hektar (sumber Badan Informasi Geospasial, 2017). Secara administratif, Kota Tasikmalaya terbagi atas 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Gambar 2.1.  
Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Tasikmalaya



**2.1.1.2. Topografi**

Berdasarkan bentang alamnya, Kota Tasikmalaya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl (lihat gambar 2.2).

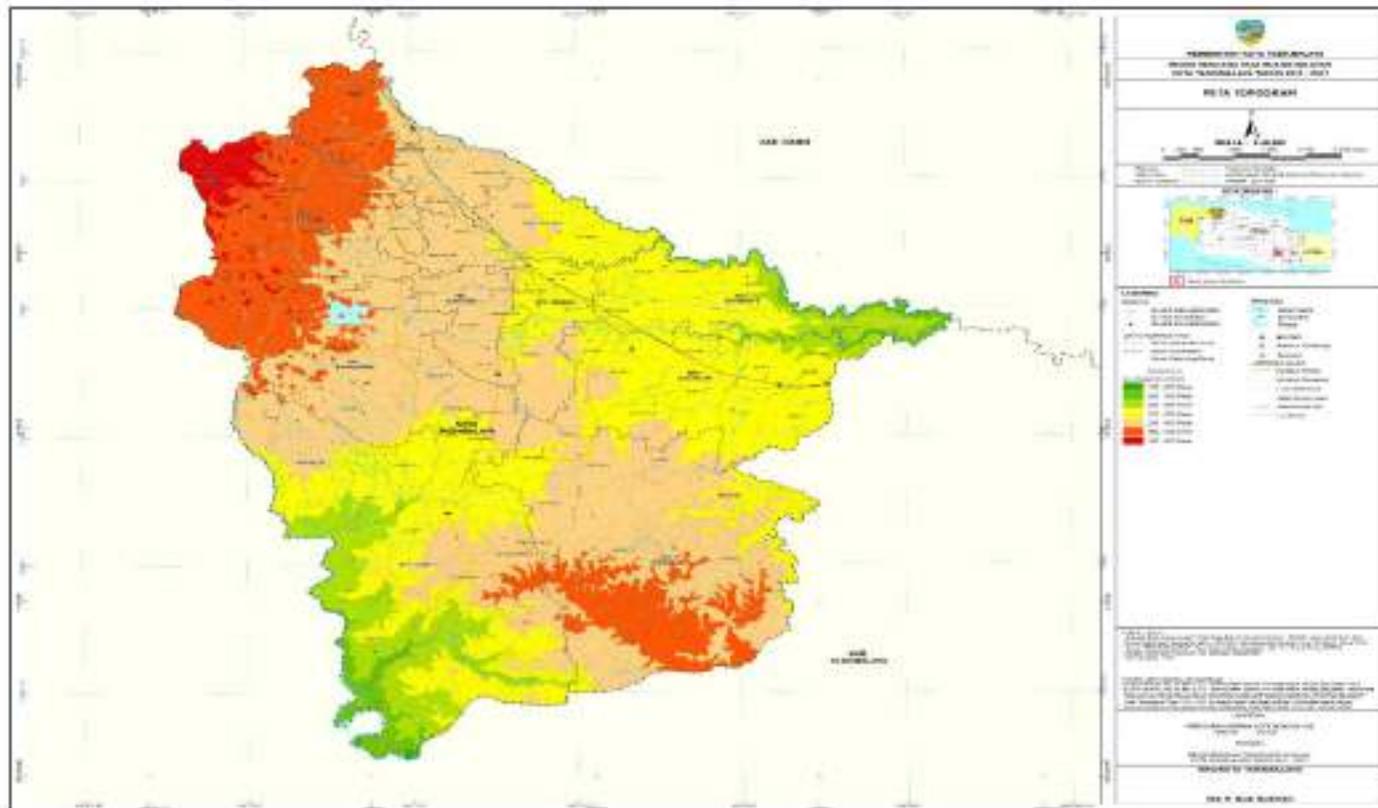
Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, sebagian besar tempat tertinggi Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara, serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Tamansari, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran.

Kondisi Rupa Bumi (geomorfologi) seperti ini membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya menjadi arah Barat Laut dan arah Selatan Kota Tasikmalaya (lihat Gambar 2.3). Kondisi fisik bentang alam ini sangat terkait dengan kondisi hidrologi, selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi topografi dan kemiringan lerengnya. Dari kondisi ini Kota Tasikmalaya terbagi kedalam dua daerah aliran sungai (DAS), yaitu di sebelah Utara hingga Timur Laut merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju kearah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Sedangkan di sebelah Barat hingga Barat Daya merupakan DAS Ciwulan dimana aliran air menuju kearah Kecamatan Sukaraja dan Tanjung Jaya di Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.1 memperlihatkan kondisi kemiringan lahan di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.1.  
Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya

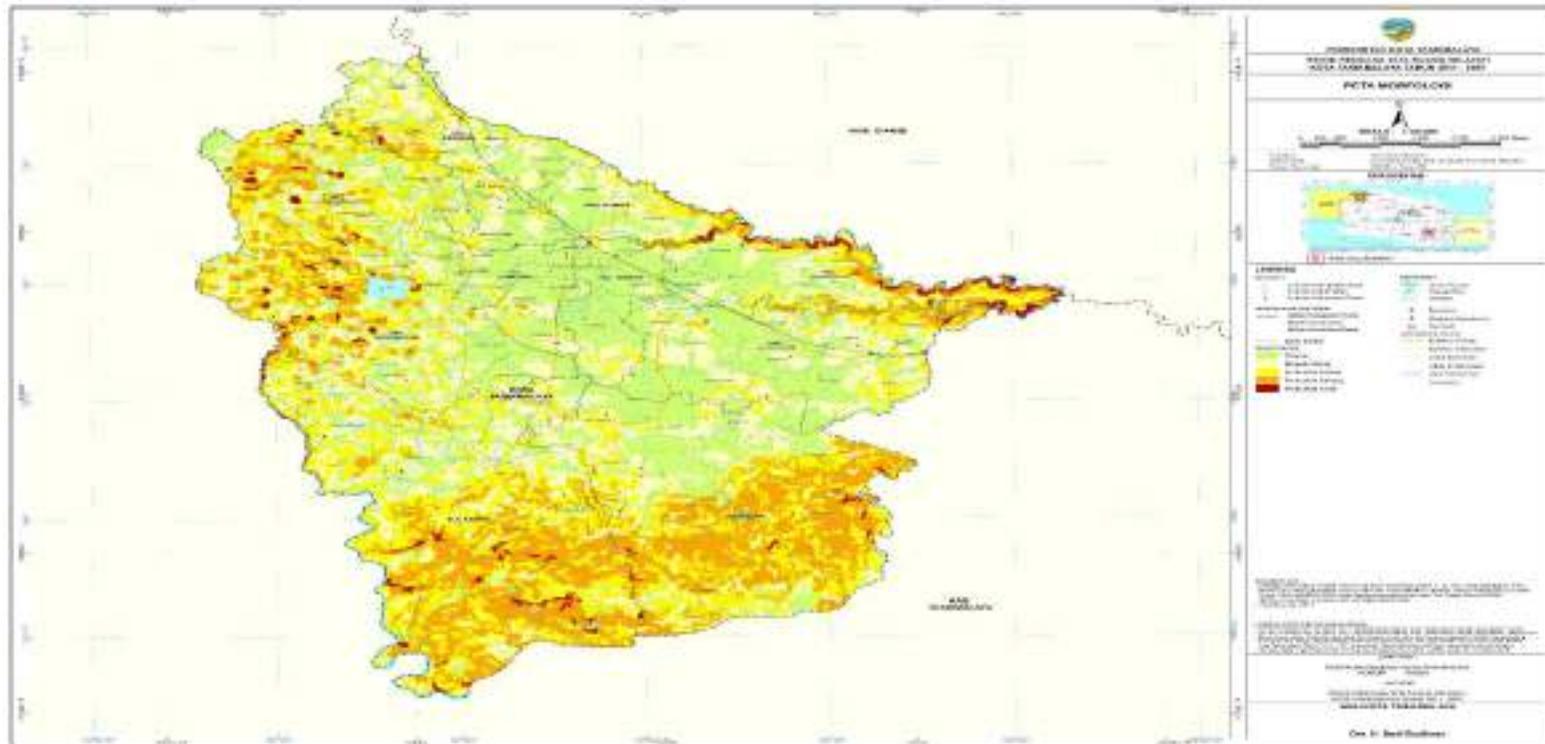
Kelas Lereng	Luas (Hektar)	% Luas
0 – 2 %	5.372,15	29,16
2 – 5 %	4.574,18	24,83
5 – 15 %	4.882,58	26,50
15 – 25 %	1.543,24	8,38
25 -40 %	1.799,53	9,77
>40 %	250,36	1,36
Total	18.422,04	100,00

Sumber : Data BIG dan Hasil Pengolahan, 2017.



Sumber : Data BIG (diolah), 2017.

Gambar 2.2.  
Peta Topografi Kota Tasikmalaya



Sumber : Data BIG (diolah), 2017.

Gambar 2.3.  
Peta Morfologi Kota Tasikmalaya



### **2.1.1.3. Geologi**

Berdasarkan hasil kajian peta geologi lembar Tasikmalaya (T. Budhitrisna, 1982), struktur geologi Kota Tasikmalaya terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Pada tingkatan gunung api muda, susunan batuan yang dihasilkan mulai dari breksi gunung api, lahar, tufa berlapis, batuan andesit sampai basal yang tersebar secara terbatas di bagian tenggara. Sedangkan pada bagian utara, tengah dan selatan terdapat sesar normal, sesar naik, serta lipatan berupa antiklin dan siklin.

Pola struktur sesar normal akan menimbulkan pemotongan pada bagian tubuh batuan dan umumnya membentuk gawir, sedangkan sesar naik disamping dapat membentuk gawir juga peralihan batuan menjadi berlipat-lipat dan hancur, bidang pemotongan ini merupakan bidang lemah yang biasanya membentuk gawir-gawir curam dan terjal dimana proses gerakan tanah ini dapat berkembang, hal ini sering terlihat pada bantaran sungai akibat pengikisan dan penyempitan.

### **2.1.1.4. Hidrologi dan Hidrogeologi**

Potensi sumber daya air dari air permukaan di Kota Tasikmalaya meliputi sungai dan air dalam cekungan (danau/situ). Di wilayah Kota Tasikmalaya mengalir 51 Daerah Irigasi yang termasuk dalam 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citanduy dan DAS Ciwulan. DAS Citanduy memiliki limpasan air sungai rata-rata bulanan sebesar 17 m<sup>3</sup>/detik atau rata-rata harian sekitar 5,5 m<sup>3</sup>/detik, sedangkan DAS Ciwulan memiliki limpasan air sungai rata-rata harian sebesar 13,7 m<sup>3</sup>/detik. Jumlah kedua limpasan adalah 1.658.880 m<sup>3</sup>/hari.

Sedangkan waduk/situ di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi menyediakan air sebesar 1.646.750 m<sup>3</sup>. Situ-situ tersebut adalah Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi (6.000 m<sup>3</sup>/detik), Situ Cibeureum, Situ Cibantaran, Situ Malingping, Situ Bojong dan Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari (6.000 m<sup>3</sup>/detik).

Selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal, karena air tanah dapat diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 3,00-10,00 m. Kedalaman sumur gali untuk bisa keluar air cukup dangkal, antara 1,50-7,00 m. Sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Mangkubumi, Bungursari, Kawalu dan Tamansari.



Ditinjau dari kondisi hidrogeologi, Kota Tasikmalaya dikategorikan sebagai daerah akuifer, alirannya didasarkan melalui celahan dan ruang antara butir yang merupakan ciri dari lereng gunung api strato. Sistem akuifer di Kota Tasikmalaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan air dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu; sistem akuifer tunggal pada unit vulkanik, sistem akuifer pada celahan-celahan batuan sedimen tersier serta sistem akuifer rekahan-rekahan yang dibentuk oleh batu gamping.

### 2.1.1.5. Klimatologi

Pada tahun 2021 suhu udara rata-rata di Kota Tasikmalaya yaitu sebesar 24,9°C. dengan suhu terendah sebesar 17,4°C yang terjadi pada bulan Januari dan tertinggi sebesar 33,0°C terjadi pada bulan Maret dan April sebesar 33,00 °C dengan kelembaban udara rata-rata 84,1% pada bulan April. Rata-rata suhu dan kelembaban udara menurut bulan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.  
Rata-rata suhu dan kelembaban udara  
Tahun 2021

Bulan Month	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	17,4	24,9	32,0	62	79	86
Februari/February	20,4	24,3	32,8	63	77	87
Maret/March	20,4	25,3	33,0	61	78	85
April/April	20,4	25,5	33,0	60	82	95
Mei/May	19,0	25,4	32,2	64	83	91
Juni/June	20,4	25,2	32,6	65	85	94
Juli/July	19,0	25,1	32,0	65	83	94
Agustus/August	19,0	24,4	31,6	71	86	94
September/September	19,0	24,4	31,4	70	87	95
Oktober/October	20,0	24,9	31,6	72	88	95
November/November	20,0	24,7	31,6	78	92	97
Desember/December	20,0	25,1	32,0	73	90	97
<b>Rata-rata/Average</b>	19,6	24,9	32,2	67,1	84,1	92,5

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, 2022.

Curah hujan paling tinggi selama tahun 2021 terjadi pada bulan Novemberyaitu 32 mm<sup>3</sup> dan paling rendah terjadi pada bulan April, Mei Juli yaitu 1 mm<sup>3</sup>. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Maret sebanyak 24 hari. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.3.  
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan  
di Kota Tasikmalaya Tahun 2021

Bulan Month	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)
Januari/January	807,7	22
Februari/February	280,4	17
Maret/March	546,3	22
April/April	192,8	12
Mei/May	131,5	9
Juni/June	347,6	12
Juli/July	137,6	8
Agustus/August	-	-
September/September	275,3	20
Oktober/October	241,9	10
November/November	491,6	27
Desember/December	413,7	19
<b>Rata-rata/Average</b>	<b>322,20</b>	<b>14,83</b>

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, 2022

#### 2.1.1.6. Penggunaan Lahan dan Tutupan Lahan

Penggunaan lahan Kota Tasikmalaya didominasi lahan sawah sebesar 35,246%, permukiman sebesar 28,646% dan hutan sebesar 19,382%. Berikut rincian penggunaan lahan kota Tasikmalaya.

Tabel 2.4.  
Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya

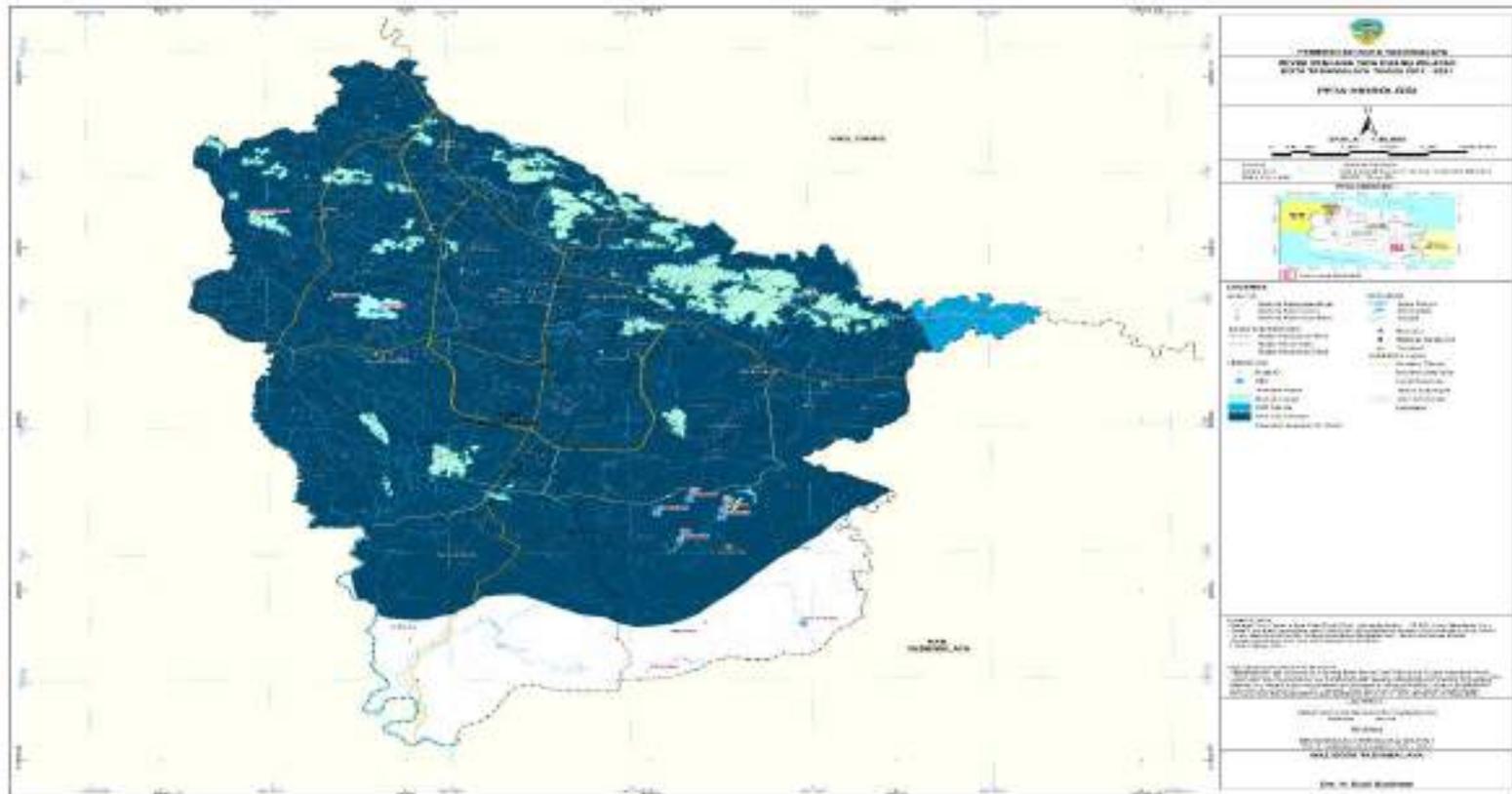
Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Bangunan Industri	58,57	0,318
Bangunan Pemerintahan	10,70	0,058
Danau/Situ	50,56	0,27
Empang	263,30	1,42
Fasilitas Peribadatan	0,87	0,005
Hutan	3570,56	19,382
Kawasan Pariwisata	4,78	0,026
Ladang	217,18	1,179
Lahan Tidak Terbangun	697,38	3,786
Lapangan	17,21	0,093
Pasar	14,30	0,078
Pemukaman	24,88	0,135
Permukiman	5277,20	28,646
Sawah	6493,10	35,246
Semak Belukar	141,22	0,767
Sungai	82,05	0,445
Terminal	7,69	0,042
Jumlah	18.422,04	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.



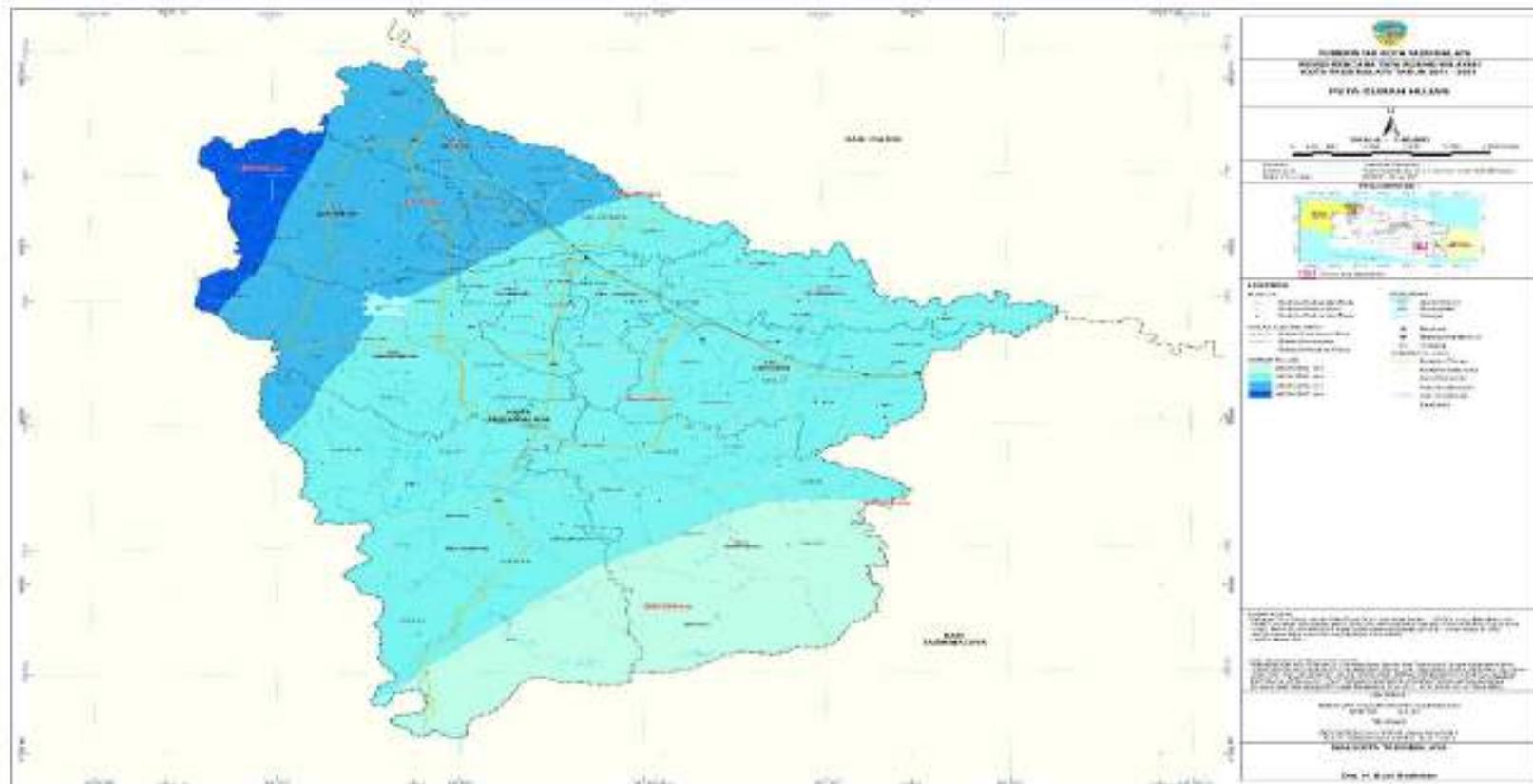
Sumber : Data BIG (diolah), 2017.

Gambar 2.4.  
Peta Geologi Kota Tasikmalaya



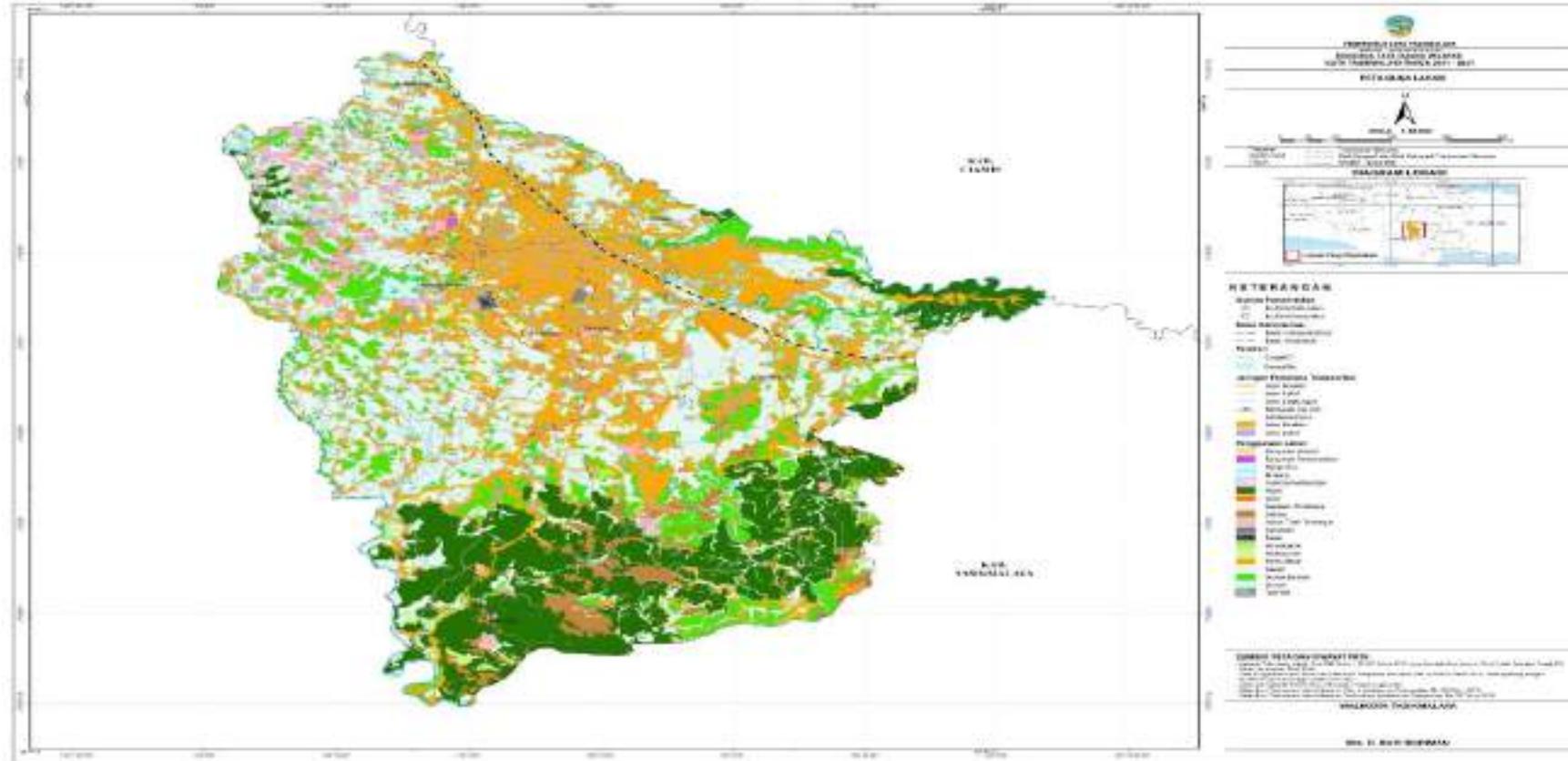
Sumber : Data BIG (diolah), 2017.

Gambar 2.5.  
Peta Hidrologi Kota Tasikmalaya



Sumber : Data BIG (diolah), 2017.

Gambar 2.6.  
Peta Klimatologi Kota Tasikmalaya



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2021.

Gambar 2.7.  
Peta Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya



#### 2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Potensi rawan bencana di Kota Tasikmalaya, diantaranya adalah bencana gempa bumi dan ikutannya, bencana alam geologi aliran lahar dan rawan gerakan tanah skala menengah.

Intensitas suatu guncangan gempa bumi pada suatu peristiwa gempa bumi pada suatu daerah atau wilayah tertentu tidak hanya tergantung pada kekuatan gempa bumi yang terjadi dan jarak daerah atau wilayah terhadap pusat gempa bumi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat. Lapisan-lapisan sedimen lunak permukaan dapat memperkuat atau mengamplifikasi gelombang gempa bumi dan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang disusun oleh batuan keras.

Kajian tentang potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2019, ada beberapa zona potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:

1. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan I**, meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Cibereum, Tamansari, Kawalu dan Mangkubumi. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari Lereng Kipas Bawah G. Galunggung dan Kipas Lahar Gunungapi Tua berupa lembah alur sungai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa sawah, kolam, semak belukar, perkebunan campuran, bangunan, pekarangan, jalan, jalur hijau, ladang, dan sebagian landasan pacu. Potensi bencana gempa bumi dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,68 g. Tingkat risiko yang dapat terjadi setara intensitas VIII-IX MMI;
2. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan II**, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 65% wilayah Kecamatan Cipedes, 60% wilayah Kecamatan Tawang, 75% wilayah Kecamatan Cihideung, 45 % wilayah Kecamatan Cibereum dan 50% wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari Lereng Kipas Tengah G. Galunggung dan Lereng Kipas Bawah G. Galunggung serta Perbukitan Bergelombang berupa kaki gunung berlereng 10°-15° hingga landai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa bangunan, danau, hutan, jalan, jalur hijau, kolam, ladang, makam, objek wisata, pekarangan, perkebunan campuran, perkebunan lain, pertambangan Galian C, rel kereta api, sawah, semak belukar, sungai, taman, tegalan dan sebagian landasan pacu (bagian selatan). Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif sedang dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,49 g;
3. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan III**, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 35% wilayah Kecamatan Cipedes, 40% wilayah

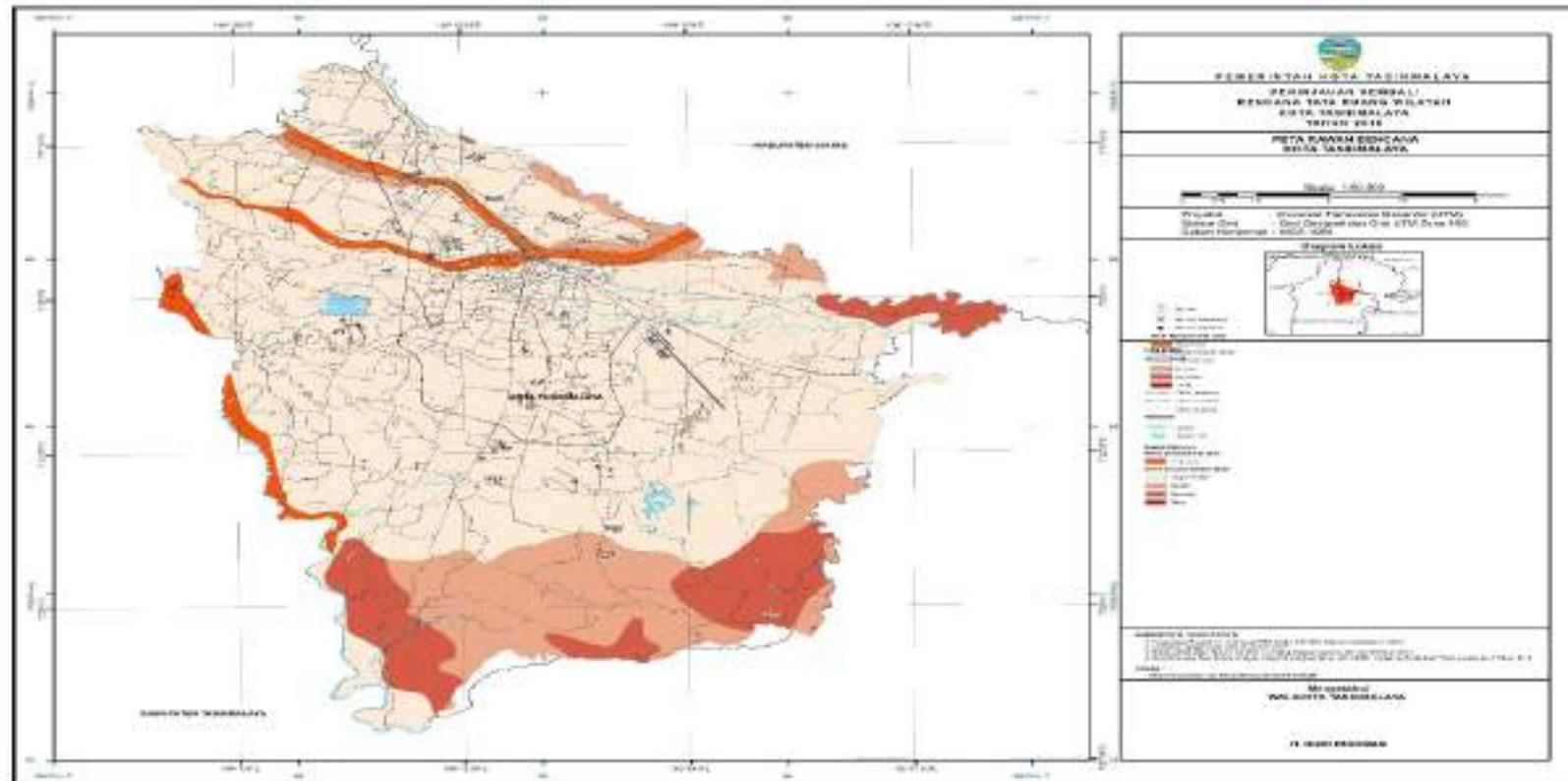


Kecamatan Tawang, 25% wilayah Kecamatan Cihideung, 40% wilayah Kecamatan Cibereum dan 25% wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari lembah Gunung Cibereum dan Kipas tengah G. Galunggung berupa lereng perbukitan dan lembah alur sungai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa bangunan, jalan, jalur hijau, kolam, ladang, lahan terbuka, makam, objek wisata, pekarangan, perkebunan campuran, perkebunan lain, pertambangan golongan C, rel kereta api, sawah, semak belukar, sungai, taman dan tegalan. Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif rendah dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,35 g.

Upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk ketiga zona tersebut adalah rekayasa lahan sebelum dilakukan pembangunan (pengerasan dan pengeringan lahan dll), menghindari lereng sungai dan tebing yang terjal berpotensi longsor (pembangunan diluar zona sepadan gawir sungai dan gawir tebing minimal 3-5 meter), pembuatan tanggul/terasering pada tebing dan tepi sungai yang terjal sebagai penahan longsor.

Potensi bencana gerakan tanah di Kota Tasikmalaya akan terjadi di sepanjang aliran sungai yang memiliki tebing sungai yang cukup terjal  $>45^\circ$ . Sungai-Sungai yang terdapat di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, memiliki ciri lembah berbentuk V, menunjukkan bahwa sungai-sungai tersebut memiliki karakter erosi makan ke hulu dan ke dasar lembah. Potensi gerakan tanah yang dapat terjadi diantaranya runtuhnya tanah penutup, jatuhnya bongkah tanah dan bongkah batuan beku. Potensi gerakan tanah di kota ini dapat juga terjadi di bukit-bukit/gunung-gunung yang telah ditambang atau digali, sehingga menyisakan bukit-bukit berlereng terjal. Mengingat batuan penyusun bukit-bukit ini yang terdiri dari campuran breksi, lava dan tufa yang bersifat lepas antara satu dengan lainnya dan tidak terkompaksi secara baik, sangat besar potensi terjadinya gerakan tanah jenis jatuhnya atau runtuhnya bongkah breksi dan lava.

Potensi bencana gunungapi sebagai potensi bencana ikutan yang mungkin dapat terjadi pada peristiwa gempa bumi kuat berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Galunggung, Jawa Barat berskala 1 : 50.000 (Direktorat Vulkanologi/PVMBG, 1983). Potensi bencana gunungapi tersebut diantaranya berupa potensi lontaran batu pijar dan hujan abu lebat pada radius 1,5 km dari pusat erupsi. Potensi terlanda lontaran batu pijar terdapat pada radius 4 km dari pusat erupsi dan potensi terlanda hujan abu vulkanik dan terkena lontaran batu pijar pada radius 8 km dari pusat erupsi. Selain itu gunungapi ini juga mempunyai daerah yang selalu berpotensi terancam aliran awan panas, lava dan gas beracun (arsir kotak-kotak), zona potensi terlanda aliran awan panas (arsir tegak), lava dan lahar hujan serta daerah potensi terlanda aliran lahar hujan (arsir mendatar).



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2021.

Gambar 2.8.  
Peta Rawan Bencana Kota Tasikmalaya



**2.1.1.8. Kondisi Kependudukan**

**1. Jumlah Penduduk**

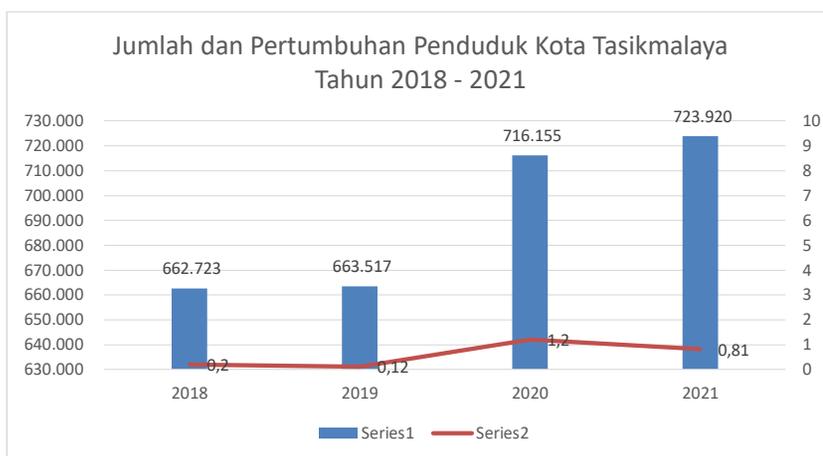
Jumlah Penduduk di Kota Tasikmalaya setiap tahunnya mengalami peningkatan yang relatif tinggi yaitu rata-rata sebesar 0,2 % per tahun, bahkan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan kenaikan sebesar 1,20 %. Berikut ini menunjukkan jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya dari tahun 2018 - 2021.

Tabel 2.5.  
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya  
Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2018	662.723	0,20
2019	663.517	0,12
2020	716.155	1,20
2021	723,920	0,81

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu tahun 2018 - 2021 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya, seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini :



Sumber : BPS, data diolah, 2022.

Gambar 2.9.  
Perkembangan Demografi Kota Tasikmalaya 2018-2021

Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 adalah sebanyak 723.920 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 367.563 jiwa dan perempuan sebanyak 356.358 jiwa. Jumlah penduduk



terbanyak terdapat di Kecamatan Mangkubumi, yaitu sebanyak 98.810 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Purbaratu sebanyak 44.850 jiwa.

Tabel 2.6.  
Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2021

Kecamatan	Penduduk (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kawalu	97,59	13,48	2.305	105,57
Tamansari	78,25	10,81	2.115	104,74
Cibeureum	69,06	9,54	3.755	102,51
Purbaratu	44,85	6,20	3.551	104,36
Tawang	60,81	8,40	8.801	99,65
Cihideung	72,73	10,05	13.345	101,60
Mangkubumi	98,81	13,65	4.119	102,82
Indihiang	58,39	8,07	5.377	102,25
Bungursari	61,55	8,50	3.493	103,50
Cipedes	81,88	11,31	9.057	103,44
<b>Kota Tasikmalaya</b>	<b>723,92</b>	<b>100,00</b>	<b>3.930</b>	<b>103,14</b>

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, data diolah, 2022.

Distribusi atau sebaran penduduk tertinggi pada tahun 2021 berada di Kecamatan Mangkubumi kemudian Kecamatan Kawalu. Jumlah penduduk tertinggi bukan berarti kepadatan penduduk di Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu juga tinggi. Kepadatan penduduk di Kota Tasikmalaya tahun 2021 mencapai 3.930 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Cihideung sebesar 13.345 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Tamansari sebesar 2.115 jiwa/km<sup>2</sup>. Dari distribusi atau sebaran penduduknya di 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Mangkubumi dengan penduduk sebanyak 98.810 jiwa pada tahun 2021 atau sekitar 13,48 persen dari total penduduk Kota Tasikmalaya, diikuti oleh Kecamatan Kawalu yang hampir setara yaitu sebanyak 97.590 jiwa 13,48 persen dan Kecamatan Cipedes 81.880 jiwa 11,31 persen. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Purbaratu yaitu sebanyak 44.850 jiwa, atau 11,31 persen dari total penduduk Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan kepadatannya, sebagian besar penduduk Kota Tasikmalaya terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yang berada di pusat kota. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-



kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Tawang 8.801 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2021, Kecamatan Cihideung 13.345 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Cipedes 9.057 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 2.115 jiwa/km<sup>2</sup> hingga 5.337 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini berarti terdapat ketimpangan sebaran penduduk yang mencolok antara 3 kecamatan kawasan pusat kota dan 7 kecamatan lainnya.

## 2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Ditinjau dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa Kota Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (sex ratio) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 101,27 sampai dengan 103,14 untuk kurun waktu tahun 2018-2021. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Tasikmalaya terdapat 103 penduduk laki-laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya menurut jenis kelamin.

Tabel 2.7.  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya  
Tahun 2018-2021

Tahun	Jenis Kelamin				Laki-laki +Perempuan	Sex Ratio
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2018	333.102	50,26	329.621	49,74	662.723	101,05
2019	333.321	50,24	330.196	49,76	663.517	100,95
2020	363.740	50,79	352.415	49,21	716.155	103,21
2021	367.563	50,77	356.358	49,22	723.921	103,14

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2021.

Data Penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2021 menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8.  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya  
Tahun 2021

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	31.122	29.643	60.765
5 - 9	28.591	27.493	56.084
10 - 14	31.819	29.646	61.465
15 - 19	31.604	30.012	61.616
20 - 24	30.414	29.696	60.110
25 - 29	29.910	28.634	58.544
30 - 34	29.274	27.652	56.926
35 - 39	27.662	26.352	54.014



KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)
40 – 44	26.324	24.577	50.901
45 – 49	23.455	22.803	46.258
50 – 54	20.341	20.322	40.663
55 – 59	17.764	17.805	35.569
60 – 64	13.605	13.779	27.384
65 – 69	10.425	10.685	21.110
70 – 74	6.089	6.817	12.906
75 +	5.341	6.499	11.840
<b>JUMLAH</b>	<b>363.740</b>	<b>352.415</b>	<b>716.155</b>

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2021.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Tasikmalaya paling tinggi berada pada usia produktif. Hal tersebut menjadi modal dasar pembangunan yang sangat potensial. Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah motor penggerak utama pembangunan.

### 3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah, dapat teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya memiliki 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu :

- a) pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa;
- b) peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan
- c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi :

- a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi:
  - peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
  - pelestarian kawasan cagar budaya; dan
  - penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota.
- b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
  - pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan



- pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien

Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut :

- a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi, meliputi:
  - kawasan pusat kota;
  - kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
  - kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari;
  - kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansari;
- b) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek lingkungan, meliputi :
  - kawasan Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi; dan
  - kawasan Wisata Alam Urug di Kecamatan Kawalu.
- c) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata.

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tabel 2.9.  
Indikator Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022

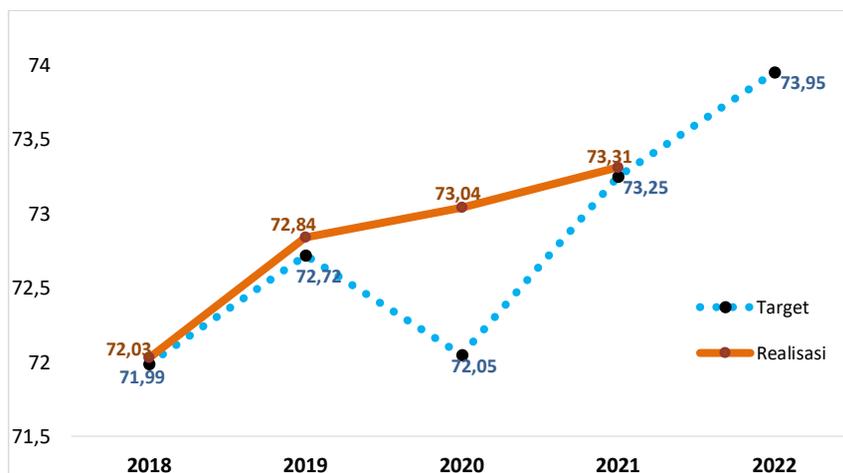
NO.	INDIKATOR	2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,99	72,03	72,72	72,48	72,05	73,04	73,25	73,31
	Indeks Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah	67,22	67,41	67,97	67,77	67,95	68,46	68,25	69,12
	Harapan Lama Sekolah	8,73	9,04	8,87	9,13	9,35	9,33	9,55	9,52
	Harapan Lama Sekolah	13,42	13,42	13,44	13,44	13,47	13,45	13,51	13,46
	Indeks Kesehatan	79,7	79,54	80,11	79,89	80,4	80,23	81,06	80,52
	Usia Harapan Hidup	71,18	71,7	72,07	71,93	72,35	72,15	72,75	72,34
	Indeks Daya Beli	69,64	69,69	70,64	71,37	55,79	70,93	57,58	70,78
	Pengeluaran per Kapita	9,84	9,86	10,16	10,41	7,63	10,26	8,57	10,213
2	PDRB Perkapita	30,6	30,14	33,7	32,78	30,23	32,51	30,77	31,56
3	PDRB ADH Berlaku Laju	20,33	20,09	22,44	21,75	22,08	21,59	22,98	22,85
4	Pertumbuhan Ekonomi	6,95	5,94	7,06	5,97	2,5	-2,01	4,5	3,57
5	Inflasi	3,76	2,3	3,53	1,72	2,5	1,61	2,25	1,17
6	Indeks gini	0,4	0,391	0,39	0,36	0,41	0,366	0,4	0,414
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,25	0,2	0,23	0,12	0,22	1,27	0,21	0,81
8	Tingkat Kemiskinan	13,8	12,71	12,8	11,6	13,5	12,97	12,5	13,13



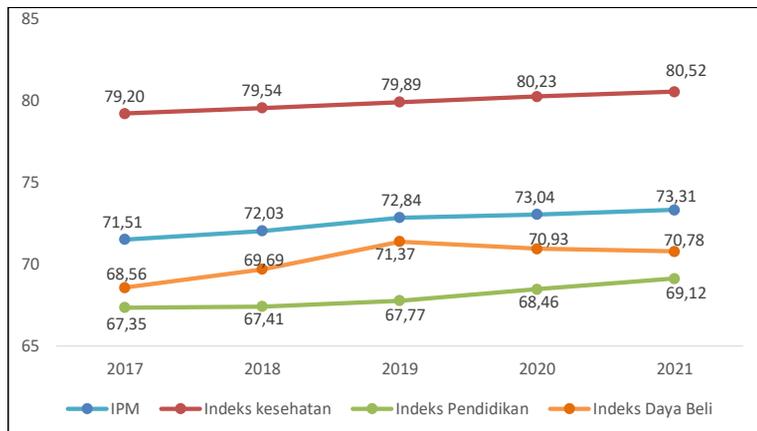
**1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak.

Capaian IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

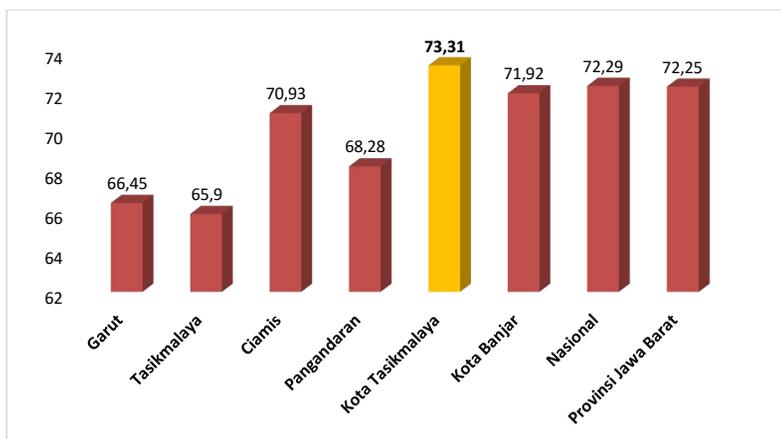


Gambar 2.10.  
Target & Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya  
2018-2022 (Point)



Gambar 2.11.  
Perkembangan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa IPM Kota Tasikmalaya terus mengalami kenaikan yaitu 71,51 poin pada tahun 2017 meningkat menjadi 73,31 poin pada tahun 2021. Adapun untuk masing-masing unsur IPM, Indeks Kesehatan dari 79,20 poin pada tahun 2017 menjadi 80,52 poin pada tahun 2021, Indeks Pendidikan 67,35 pada tahun 2017 menjadi 69,12 poin pada tahun 2020, serta Indeks Daya Beli dari 68,56 poin pada tahun 2017 menjadi 70,78 poin pada tahun 2021. Dari ketiga komponen penghitungan IPM yang mengalami penurunan hanya Indeks daya beli, hal ini diakibatkan oleh terjadinya pandemic Covid-19.



## 2. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-



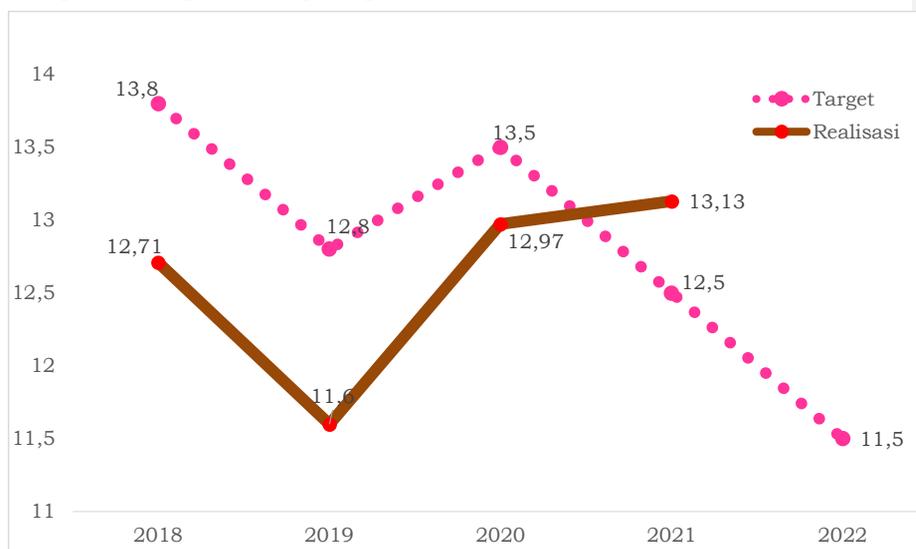
rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

Tabel 2.10.  
Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2018 - 2021

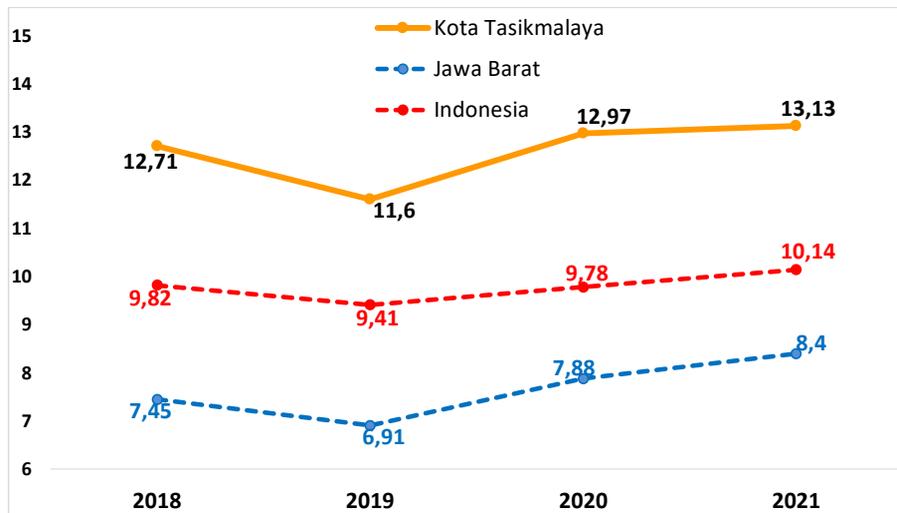
Indikator	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	12,71	11,60	12,97	13,13
Penduduk Miskin (ribu orang)	84,22	76,98	86,13	89,46
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	447,008	457.899	470.150	480.341
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,52	1,98	1,75	2,41
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,31	0,53	0,39	0,69

Sumber : BPS RI, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 13,13% pada tahun 2021. Capaian ini masih di atas kemiskinan nasional dan provinsi Jawa Barat sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



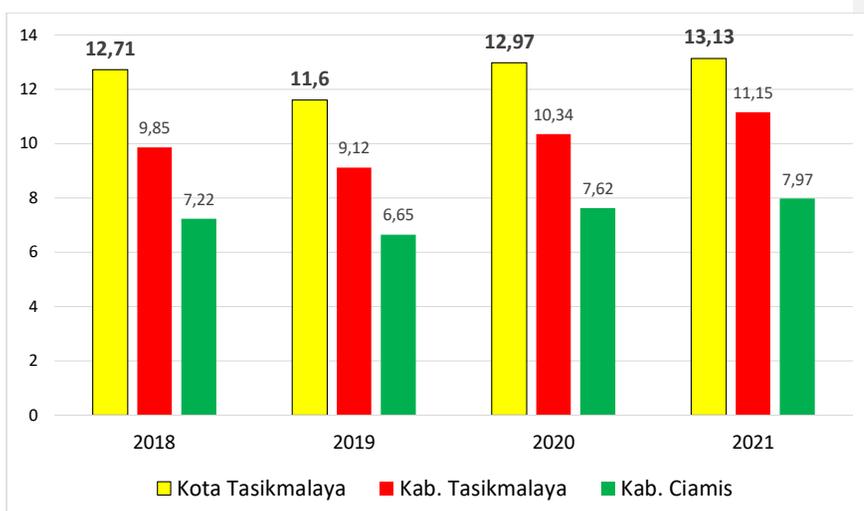
Gambar 2.12.  
Target & Realisasi Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya, 2018-2022 (Persen)



Gambar 2.13.

Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional

Kemiskinan Kota Tasikmalaya bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan daerah tetangga yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis maka dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.14

Perbandingan Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis

### 3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 19.977,6 Milyar pada tahun 2018 dan menjadi



22.845,56 pada tahun 2021. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.11. dan tabel 2.12.

Tabel 2.11.  
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)

Commented [WU1]: Perbaiki dengan data terbaru

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 011,2	1 054,8	1 079,4	1 100,18
B Pertambangan dan Pengalihan	1,7	1,7	1,8	1,91
C Industri Pengolahan	2 783,3	3 067,4	3 051,3	3 159,59
D Pengadaan Listrik dan Gas	2,8	3,0	2,9	2,99
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	76,6	82,8	90,7	96,31
F Konstruksi	3 175,1	3 474,5	3 341,1	3 700,54
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	4 493,5	4 944,1	4 719,3	4 954,11
H Transportasi dan Pergudangan	1 942,1	2 084,4	2 028,6	2 072,51
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 008,5	1 150,6	1 148,6	1 209,65
J Informasi dan Komunikasi	624,4	685,2	915,2	978,57
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2 166,2	2 245,5	2 201,9	2 396,31
L Real Estat	317,7	351,7	360,6	397,89
M,N Jasa Perusahaan	203,8	250,7	222,2	240,39
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	864,9	897,8	895,5	921,48
P Jasa Pendidikan	389,0	444,9	483,9	511,52
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	414,1	468,2	501,0	547,86
R,S,T,U Jasa Lainnya	502,8	543,7	545,5	553,75
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>19 977,6</b>	<b>21 750,9</b>	<b>21 589,5</b>	<b>22 845,56</b>

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Selain PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga dilakukan penghitungan PDRB berdasarkan Harga Konstan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.12.  
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya  
Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2018 - 2021 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	644,6	644,5	658,9	660,75



Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
B	Pertambangan dan Penggalian	1,3	1,3	1,3	1,36
C	Industri Pengolahan	2 038,7	2 196,0	2 153,5	2 194,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,6	1,7	1,6	1,68
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	52,1	54,7	59,6	63,01
F	Konstruksi	2 296,0	2 436,9	2 333,3	2 475,68
G	Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 567,9	3 812,4	3 575,0	3 681,31
H	Transportasi dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 459,4	1 543,2	1 435,1	1 439,91
I	Informasi dan Komunikasi	596,8	651,2	869,8	932,45
J	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 483,5	1 499,5	1 470,0	1 552,58
K	Real Estat	261,4	285,2	290,4	319,77
L	Jasa Perusahaan <i>Activities</i>	165,1	182,2	156,6	168,53
M,N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	565,0	585,4	579,3	591,46
O	Jasa Pendidikan	280,0	294,0	306,5	314,93
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial <i>Activities</i>	314,9	347,7	361,1	386,04
Q	Jasa Lainnya <i>Activities</i>	405,8	428,8	424,4	425,66
R,S,T,U	<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>14 859,1</b>	<b>15 746,1</b>	<b>15 430,0</b>	<b>15 981,25</b>

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

#### 4. Struktur Perekonomian

Dari besaran PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13.  
Peranan Kategorial dalam PDRB Kota Tasikmalaya  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 - 2021 (Persen)

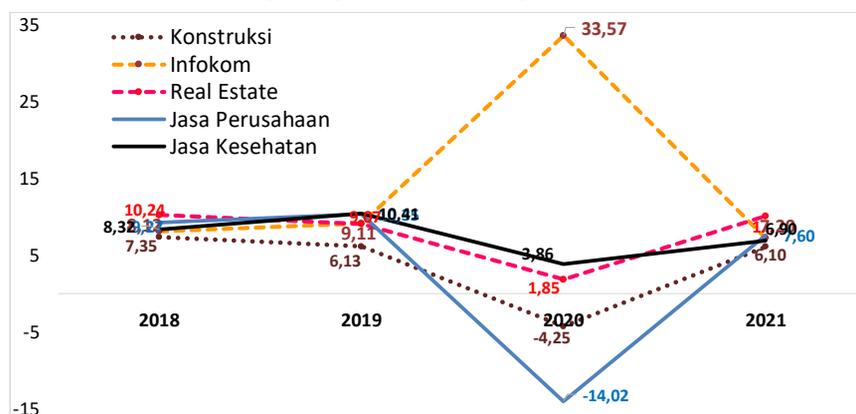
Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,06	4,85	5,00	4,82
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	13,93	14,10	14,13	13,83



Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
D	Pengadaan Listrik dan	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air; Sampah, Limbah, dan Ulang	0,38	0,38	0,42	0,42
F	Konstruksi	15,89	15,97	15,48	16,20
G	Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/	22,49	22,73	21,86	21,69
H	Transportasi dan	9,72	9,58	9,40	9,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,05	5,29	5,32	5,29
J	Informasi dan Komunikasi	3,13	3,15	4,24	4,28
K	Jasa Keuangan dan	10,84	10,32	10,20	10,49
L	Real Estat	1,59	1,62	1,67	1,74
M,N	Jasa Perusahaan	1,02	1,15	1,03	1,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	4,33	4,13	4,15	4,03
P	Jasa Pendidikan	1,95	2,05	2,24	2,24
Q	Jasa Kesehatan dan	2,07	2,15	2,32	2,40
R,S,T	Jasa Lainnya	2,52	2,50	2,53	2,42
<b>Produk Domestik Bruto/</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Selama lima tahun terakhir (2018 - 2021) struktur perekonomian Kota Tasikmalaya didominasi oleh kategori lapangan usaha; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Telah terjadi pergeseran struktur ekonomi pada periode lima tahun terakhir. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun 2018 s.d. 2021 menduduki peringkat pertama kontribusinya terhadap PDRB Kota Tasikmalaya. Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2018 s.d 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.15.

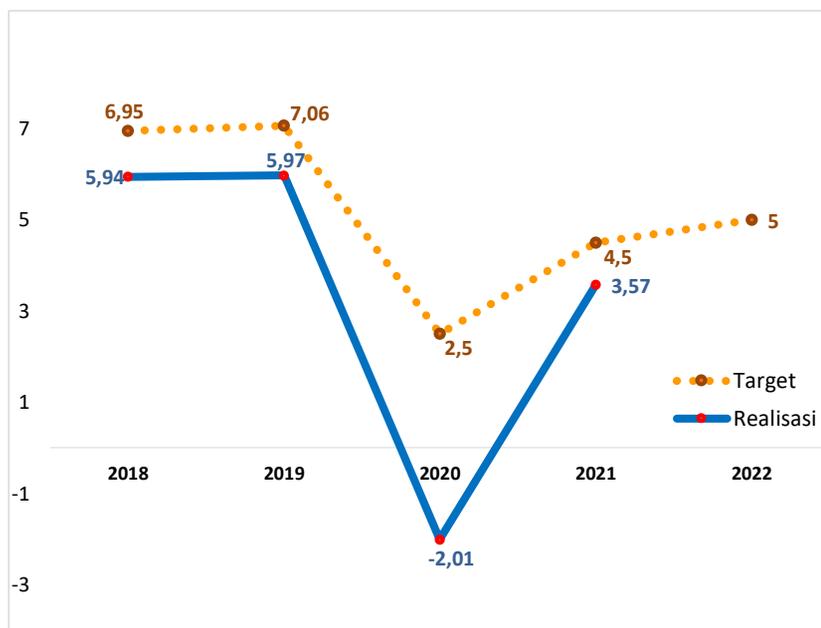
Empat Besar Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya, 2018-2020 (Persen)



Empat besar kontribusi kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kota Tasikmalaya pada tahun 2021, antara lain Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,69 persen, kemudian disusul oleh Kategori Konstruksi sebesar 16,20 persen, dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 13,83 persen serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,49 persen.

### 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. LPE Kota Tasikmalaya dalam 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun 2018 mengalami perlambatan dengan mencapai angka 5,94% namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 5,97%. Namun seiring dengan terjadinya pandemic covid-19, sektor ekonomi mengalami perlambatan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

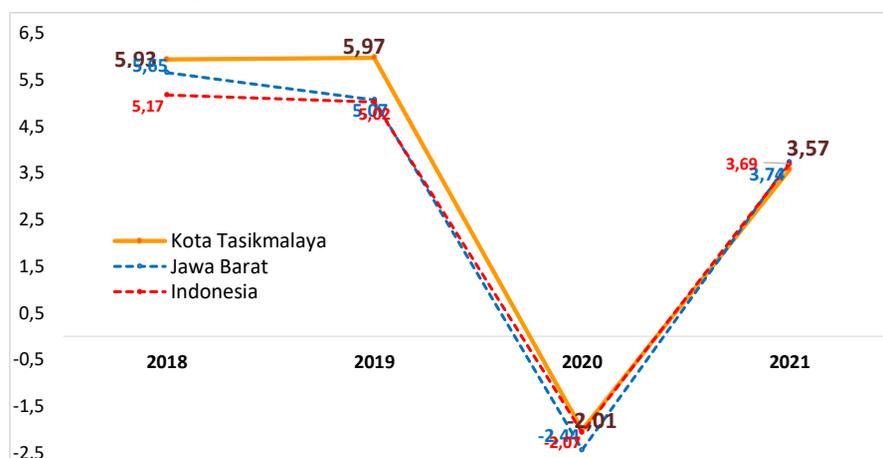


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.16.  
Target & Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya  
2018-2022 (Persen)



Bila dibandingkan dengan LPE Jawa Barat dan Nasional, LPE Kota Tasikmalaya tahun 2020 lebih baik. Berikut gambaran perbandingan LPE Kota Tasikmalaya dengan LPE Jawa Barat dan LPE Nasional.

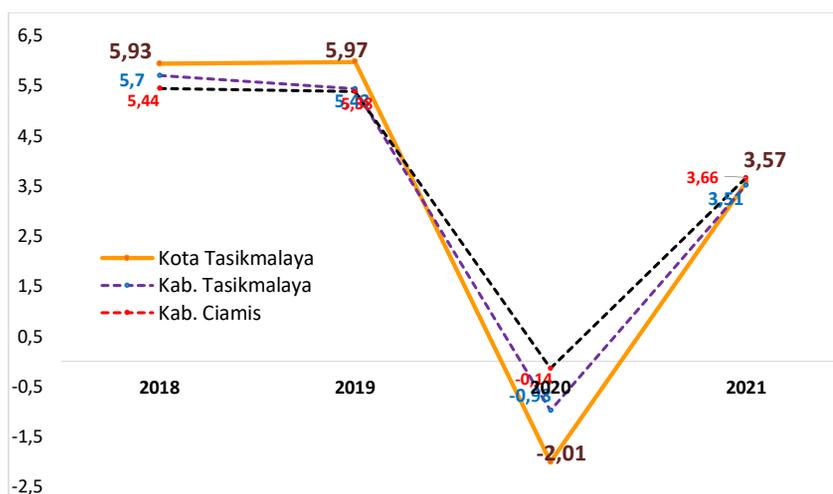


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.17.

LPE Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018 - 2021

Apabila dibandingkan dengan daerah tetangga, LPE Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.18.

LPE Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis Tahun 2018 - 2021



## 6. PDRB Menurut Penggunaan

### a. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku), maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018, setiap rumah tangga di Kota Tasikmalaya menghabiskan dana sekitar 14.502,89 milyar rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 15.710,37 miliar rupiah (2019), 15.559,84 miliar rupiah (2020) dan 15.915,40 miliar rupiah (2021). Selama periode 2018 - 2021, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB mengalami fluktuasi, yaitu 72,60 persen (2018); 72,22 persen (2019), 72,07 persen (2020) dan 69,66 persen (2021). Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 72,60 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 69,66 persen.

Sementara itu, atas dasar harga konstan (2010), konsumsi rumah tangga tumbuh pada kisaran 4,82 persen s.d. 4,88 persen, namun pada tahun 2020 dan 2021 turun -2,45 persen dan 0,69. Sedangkan konsumsi per kapita penduduk Kota Tasikmalaya tumbuh antara 4,54 persen s.d. 4,75 persen, namun untuk tahun 2020 dan tahun 2021 turun -2,52% dan -7,62.

Tabel 2.14.  
Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Kota Tasikmalaya,  
2018 - 2021

URAIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)				



a. ADHB	14.502,89	15.710,37	15.559,84	15.915,40
b. ADHK	9.879,99	10.361,74	10.107,68	10.177,77
Proporsi terhadap PDRB (persen)	72,60	72,22	72,07	69,66
Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Juta Rp)				
a. ADHB	21,88	23,68	23,43	21,98
b. ADHK	14,91	15,62	15,22	14,06
Pertumbuhan (persen)				
a. Konsumsi RT	4,71	4,88	-2,45	0,69
b. Konsumsi Perkapita	4,50	4,75	-2,52	-7,62

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

#### b. Konsumsi Lembaga Non Profit

Lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 2.15.  
Perkembangan Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT)  
Kota Tasikmalaya, 2018 - 2021

URAIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi LNPRT (Miliar Rp)				
a. ADHB	477,62	519,37	508,27	523,52
b. ADHK	347,06	362,56	350,78	356,67
Proporsi terhadap PDRB (persen)	2,39	2,39	2,35	2,28
Pertumbuhan (persen)	13,38	4,47	-3,25	1,68

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Total konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2018- 2021 mengalami fluktuasi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar



harga konstan. Pada tahun 2018 konsumsi LNPRT sebesar 447,62 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 519,37 miliar rupiah (2019), 508,27 miliar rupiah (2020) dan 523,52 miliar rupiah (2021).

Pertumbuhan konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berfluktuasi, berturut-turut sebesar 13,38 persen (2018), 4,47 persen (2019), -3,24 persen (2020) dan 1,68 persen (2021).

### c. Konsumsi Akhir Pemerintah

Secara total, konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2.270,74 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya 2.435,33 miliar rupiah (2019), 2.463,08 miliar rupiah (2020) dan 2,483,17 miliar rupiah (2021).

Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 2.16.  
Perkembangan Konsumsi Pemerintah Kota Tasikmalaya  
2018 - 2021

URAIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp)				
a. ADHB	2.270,74	2.435,33	2.463,08	2.483,17
b. ADHK	1.429,28	1.515,98	1.510,16	1.497,68
Proporsi terhadap PDRB (persen)	11,37	11,19	11,41	10,86
Konsumsi Pemerintah Perkapita (Juta Rp)				
a. ADHB	3,43	3,67	3,71	3,43
b. ADHK	2,16	2,28	2,27	2,07
Pertumbuhan (persen)				
a. Konsumsi Pemerintah	-0,71	3,21	-0,38	1,91
b. Konsumsi Pemerintah Perkapita	-0,91	1,30	-5,83	0,56

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022



**d. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**

Komponen PMTB pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi capital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 2.17.  
Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tasikmalaya, 2018 - 2021

URAIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PMTB (Miliar Rp)				
a. ADHB	6.519,97	7.121,01	6.844,41	7.573,28
b. ADHK	4.749,10	5.029,51	4.800,18	5.095,88
Proporsi terhadap PDRB (persen)	32,64	32,73	31,70	33,14
Struktur PMTB (persen)				
a. Bangunan	96,59	96,76	97,12	97,21
b. Non Bangunan	3,41	3,24	2,88	2,79
Pertumbuhan (persen)	7,12	5,90	-4,58	6,16

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

**e. Perubahan Inventori**

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki dua tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung



berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Tabel 2.18.  
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori  
Kota Tasikmalaya, 2018 - 2021

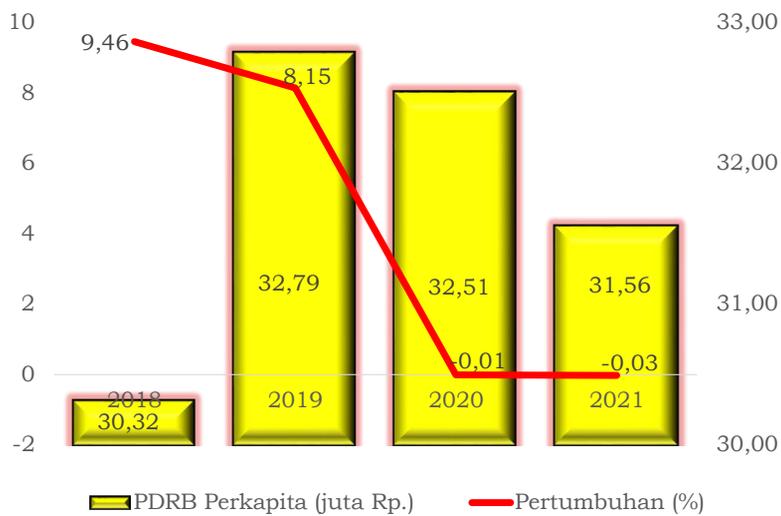
URAIAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Inventori (Miliar Rp)				
a. ADHB	733,24	752,84	293,91	-149,56
b. ADHK	442,04	447,57	167,52	-83,41
Proporsi terhadap PDRB (persen)	3,67	3,46	1,36	-0,006

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Pada tahun 2018, perubahan inventori Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku sebesar 733,24 miliar rupiah. Pada tahun-tahun selanjutnya menjadi sebesar 752,84 miliar rupiah (2019), 293,91 miliar rupiah (2020) dan -149,56 miliar rupiah (2021). Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi. yaitu sebesar 3,67 persen (2018), 3,46 persen (2019), 1,36 persen (2020) dan -0,006 persen (2021).

## 7. PDRB Perkapita

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya tahun 2020 sebesar Rp.32,51 juta mengalami penurunan sebesar -0,01%, bila dibandingkan dengan Tahun 2019 yang sebesar Rp.32,79 juta. Penurunan PDRB Perkapita ini merupakan dampak dari terjadinya pandemi covid-19, berikut capaian dari tahun 2016-2020.

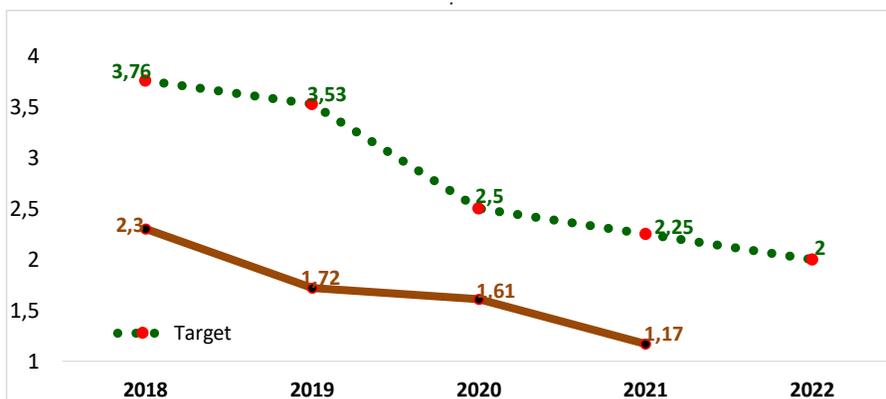


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2022.

Gambar 2.19. Pendapatan Perkapita Kota Tasikmalaya dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2018-2021

**8. Inflasi**

Angka inflasi Kota Tasikmalaya terus mengalami penurunan, pada tahun 2018 inflasi berada pada angka 2,23 selanjutnya terus menurun menjadi 1,17 pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.20.

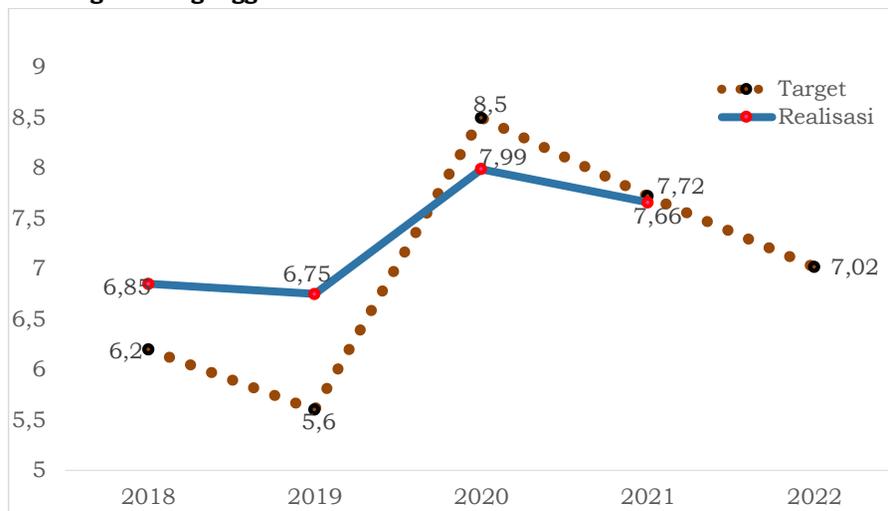


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.20. Target & Realisasi Inflasi Kota Tasikmalaya, 2018-2022 (Persen)



### 9. Tingkat Pengangguran Terbuka



Gambar 2.21

Target & Realisasi Tingkat Pengangguran Kota Tasikmalaya, 2018-2022 (Persen)

Menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS Tahun 2021, jumlah penduduk usia kerja di Kota Tasikmalaya sebanyak 521.003 orang. Dari jumlah tersebut yang termasuk dalam Angkatan Kerja sebanyak 342.585 orang 65,75%, sedangkan yang Bukan Angkatan Kerja adalah sebanyak 178.418 orang atau 33,46 %. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.19.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Kategori	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	301.619	322.887	343.285	342.585
1. Bekerja	280.959	301.081	315.844	316.349
2. Pengangguran Terbuka	20.660	21.806	27.441	26.236
Bukan Angkatan Kerja	179.049	170.976	172.612	178.418
<b>Jumlah</b>	<b>480.668</b>	<b>493.863</b>	<b>515.897</b>	<b>521.003</b>
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	93,15	93,25	92,01	92,34
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	62,75	65,38	66,54	65,75
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,85	6,75	7,99	7,66

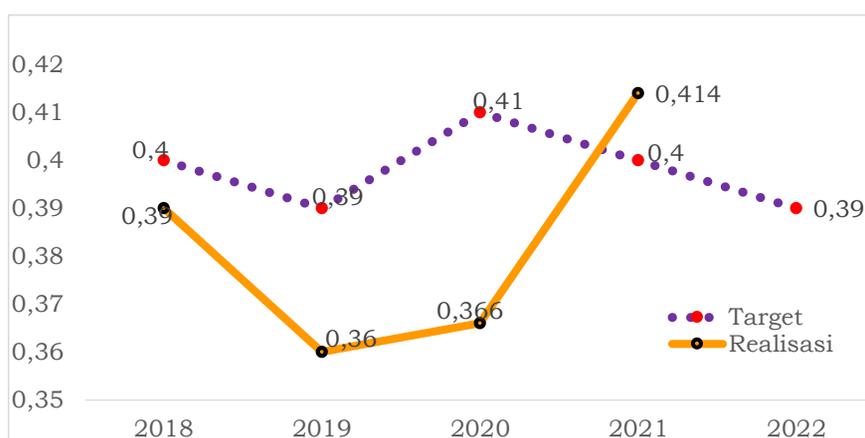
Sumber : Data Sakernas BPS



## 10. Indeks Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini (Indeks Gini). Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Koefisien Gini di Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.22.

Target & Realisasi Indeks Gini Kota Tasikmalaya, 2018-2022 (Point)

### 2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

#### 2.1.2.2.1. Pendidikan

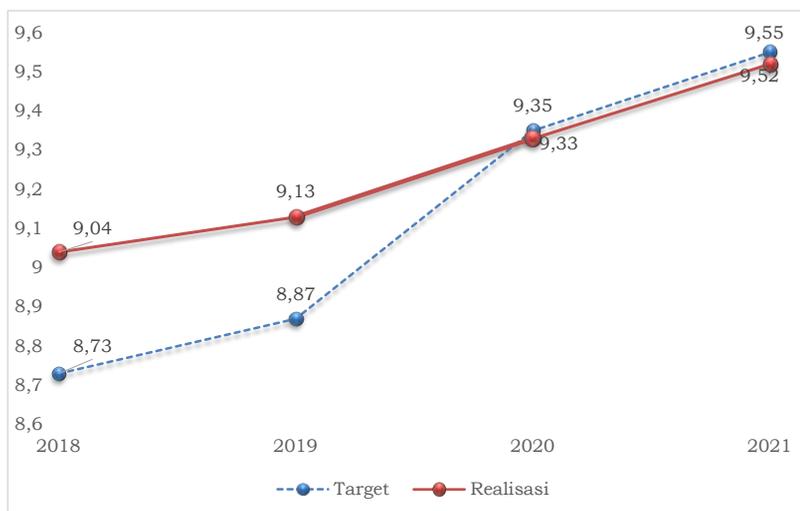
##### 1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di Kota Tasikmalaya sebesar 9,04 tahun meningkat menjadi 9,52 tahun pada tahun 2021 artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Tasikmalaya usia 15 tahun ke atas telah bersekolah selama 9,52 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas I SMA. Capaian RLS pun



dapat dilihat melampaui target yang telah ditentukan, namun pada tahun 2020 dan 2021 terdapat sedikit penurunan tetapi tidak terlalu signifikan. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.23  
Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2021

## 2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2018-2021 terus mengalami peningkatan. Angka HLS Kota Tasikmalaya berkisar pada 13,4 tahun sampai 13,46 tahun. Dengan kata lain lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga D1 atau D2. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021 terdapat selisih dari target yang telah ditentukan meskipun tidak terlalu signifikan yakni sebesar 0,02 dan 0,05 tahun. Harapan Lama Sekolah di Kota Tasikmalaya secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

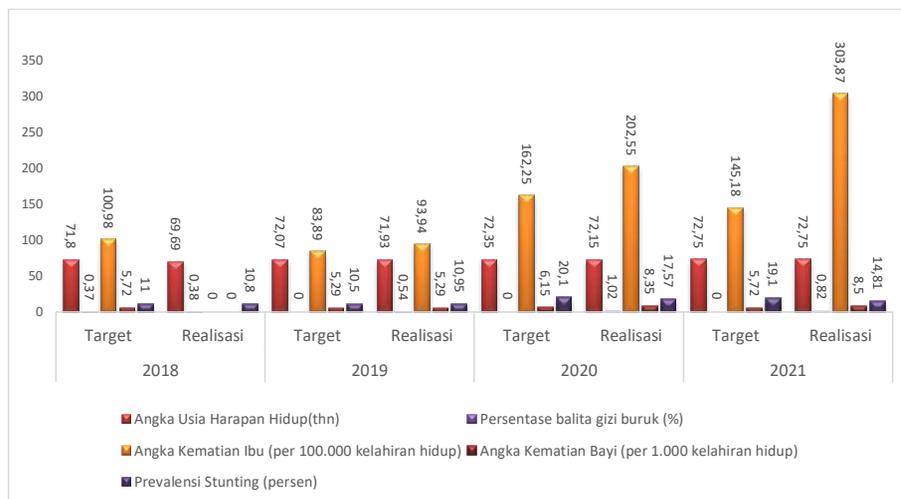


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.24.  
Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2021

#### 2.1.2.2.2. Kesehatan

Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 2018-2021 adalah sebagaimana tabel dan gambar berikut:



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.25.  
Gambaran Umum Kesehatan

Indikator makro kesehatan yang tidak bisa memenuhi target adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan persentase balita gizi buruk. Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH pada Tahun 2021 dengan target 145,18, dan realisasi 303,87. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 101,32 dari tahun 2020. Angka kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH pada Tahun 2021 adalah 8,5 persen dengan target 5,72 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan



sebesar 0,15. Sedangkan untuk persentase balita gizi buruk yang ditargetkan sebesar 0 persen, masih saja terdapat 0,82 persen di tahun 2021 walaupun mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0,2 persen. Permasalahan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya derajat kesehatan ibu hamil, rendahnya kesadaran ibu hamil memeriksakan kehamilan, masih adanya pernikahan dini dan masih adanya proses kelahiran diluar fasilitas kesehatan.

**2.1.2.2.3. Ketenagakerjaan**

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka dan Partisipasi Angkatan Kerja. Capaian hal tersebut di Kota Tasikmalaya tahun 2018 - 2021 dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut :

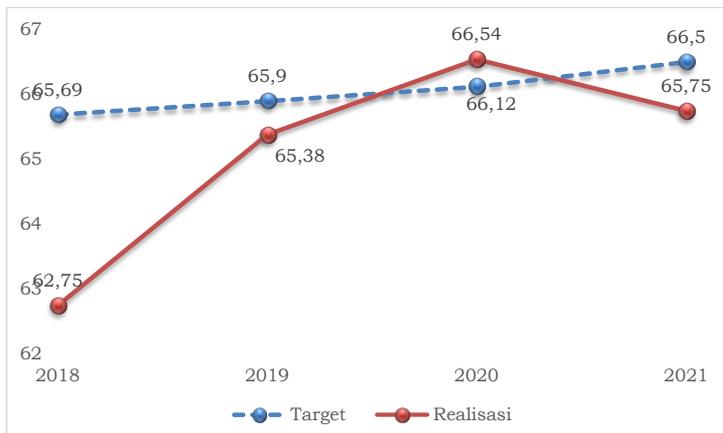


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.26.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar 0,33 persen yaitu dari 7,99 persen pada tahun 2020, menjadi 7,66 persen pada tahun 2021, demikian halnya dengan capaian target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembinaan tenaga kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil dilaksanakan.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.27.

Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Partisipasi Angkatan Kerja memiliki trend kenaikan selama tiga tahun terakhir terkecuali pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,79 persen dari 66,54 persen menjadi 65,75 persen, demikian halnya dengan target yang harus dipenuhi tidak bisa tercapai pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal salah satunya adalah angkatan kerja mengalami penurunan, kemudian penduduk angkatan kerja

#### 2.1.2.2.4. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.20.  
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya  
Tahun 2018 - 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Jumlah grup kesenian (buah)	173	173	173	173
Jumlah gedung (unit)	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, 2022.

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya klub olahraga. Dari tahun 2018 sampai dengan 2021, jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk sekitar 2 sampai 3 klub. Sementara jumlah gedung olahraga



per 10.000 penduduk hanya sekitar 0,6 gedung, artinya gedung olahraga masih kurang.

Tabel 2.21.  
Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tasikmalaya  
Tahun 2018 - 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Jumlah klub olahraga (buah)	260	260	260	260
Jumlah gedung olahraga (unit)	71	71	71	71

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, 2022.

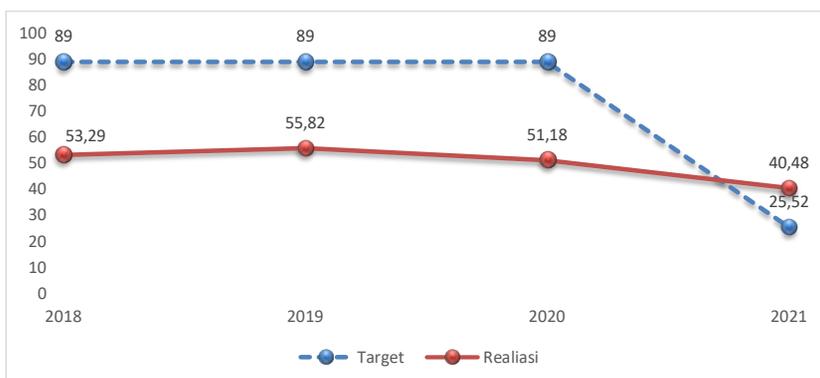
### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

##### 2.1.3.1.1. Urusan Pendidikan

##### 1. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang mengukur partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia jenjang tertentu. Capaian APK PAUD, SD, dan SMP di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.28.  
Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2018-2021

Pada tahun 2020 terjadi penurunan pada APK PAUD menjadi sebesar 51,18 persen dari tahun 2019 sebesar 55,82 persen, hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 4,46 persen. Demikian halnya di tahun 2021 kembali terjadi penurunan kembali sebesar 4,46 persen, menjadi 40,48 persen. APK PAUD dari tahun ke tahun belum bisa mencapai target yang telah ditentukan. Salah satu penyebabnya adalah penurunan jumlah anak usia PAUD yang didaftarkan pada



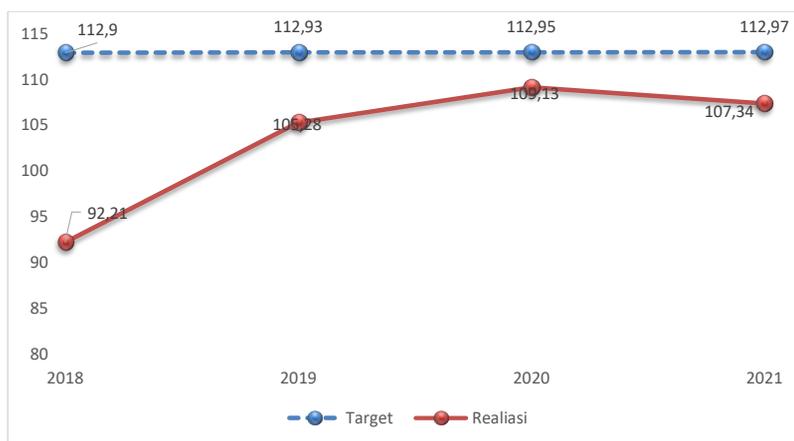
lembaga pendidikan PAUD di masa pandemi Covid 19, selain itu masih terdapat anak yang tidak disekolahkan pada semua jenjang PAUD.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.29.  
Angka Partisipasi Kasar SD Tahun 2018-2021

Pada jenjang Sekolah Dasar APK mengalami fluktuasi, terjadi penurunan pada tahun 2019 dan 2021 sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 APK SD sebesar 96,6 artinya turun sebesar 0,68 persen dari tahun sebelumnya, selain itu APK SD pun belum memenuhi target yang telah ditetapkan.



Gambar 2.30.  
Angka Partisipasi Kasar SMP Tahun 2018-2021

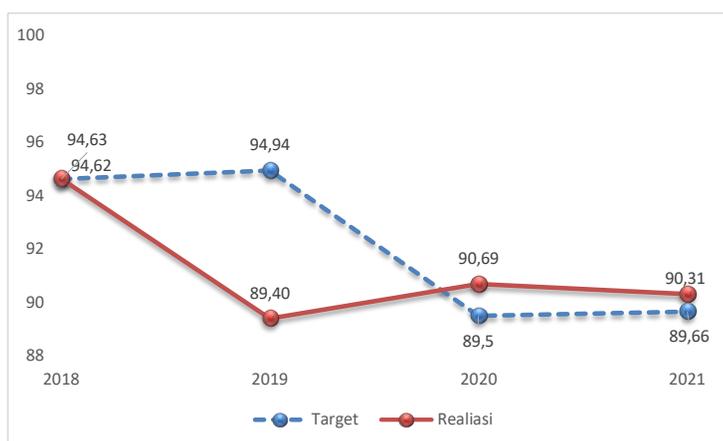
APK SMP mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. APK SMP sebesar 107,34 persen atau turun sebesar 1,79 persen dari tahun sebelumnya. Seperti



halnya APK PAUD dan SD, APK SMP pun belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

## 2. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.



Sumber : : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.31.

Angka Partisipasi Murni SD Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

APM SD/MI Sederajat pada tahun 2021 menunjukkan angka 90,31 persen sedangkan tahun sebelumnya 90,69 persen atau dengan kata lain turun sebesar 0,38 persen, yang berarti bahwa terdapat 90,31persen penduduk usia SD/MI sederajat yang mengenyam pendidikan SD/MI Sederajat. Namun jika dilihat dari target yang telah ditentukan tahun 2020 dan 2021 telah melampaui target yang ditetapkan.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.32.

Angka Partisipasi Murni SMP Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Pada jenjang SMP, APM sebesar 86,59 persen pada tahun lalu dan 86,65 persen pada tahun 2021 dengan kata lain mengalami kenaikan sebesar 0,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 86,65 persen penduduk usia SMP Sederajat yang mengenyam pendidikan SMP Sederajat. Namun APM SMP tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses ke sekolah, keharusan untuk mencari nafkah, dan lain sebagainya.

### 3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 dan 13-15 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7-12) dan usia SMP (13-15). Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.33

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Perbandingan realisasi APS yang dicapai pada tahun 2020 dan 2021 untuk usia SD/MI mengalami penurunan 06 persen, yakni dari sebesar 99,30 persen



menjadi 98,7 persen. Nilai APS sebesar 98,7 persen artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah sebesar 98,7 persen, sisanya 1,3 persen ada yang tidak/belum sekolah dan yang sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah).



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.34  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Kota Tasikmalaya  
Tahun 2018-2021

Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia SMP/MTs (13-15 tahun) sebesar 88,5 persen terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yakni 88,85 persen. Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun lebih rendah jika dibandingkan dengan 7-12 tahun dengan kata lain semakin tinggi tingkatan pendidikan semakin rendah turun tingkat partisipasi sekolahnya. Berbagai alasan yang melatarbelakangi antara lain kekurangan biaya, keterbatasan akses ke sekolah, keharusan untuk mencari nafkah, menikah dan lain-lain.

#### 4. Ketersediaan Sekolah

Ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Tasikmalaya tahun 2021 dapat dilihat Pada tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22.  
Jumlah Sekolah di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

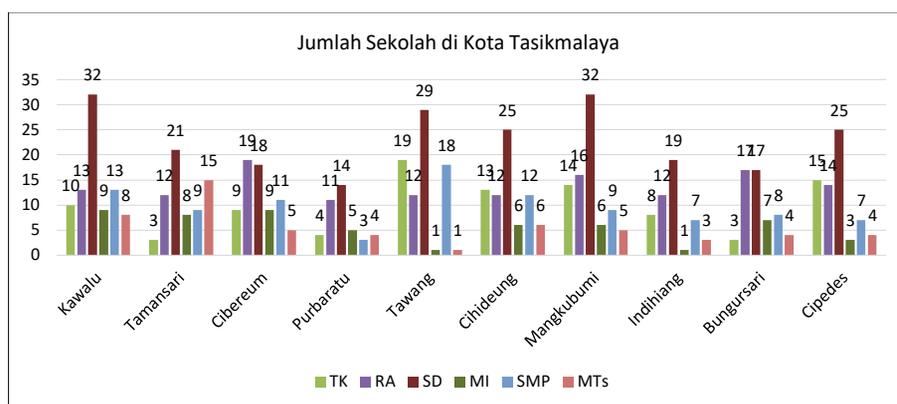
No	Tahun	SD/MI					SMP/MTs				
		SD		Jumlah SD	MI	Jumlah SD dan MI	SMP		Jumlah SMP	MTs	Jumlah SMP dan MTs
		Negeri	Swasta				Nege ri	Swast a			
1	2018	199	30	229	53	282	21	53	74	55	129
2	2019	199	30	229	53	282	21	54	75	55	130



No	Tahun	SD/MI					SMP/MTs				
		SD		Jumlah SD	MI	Jumlah SD dan MI	SMP		Jumlah SMP	MTs	Jumlah SMP dan MTs
		Negeri	Swasta				Negeri	Swasta			
3	2020	199	32	231	55	286	21	76	97	55	152
4	2021	199	33	232	55	286	21	60	81	51	132

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

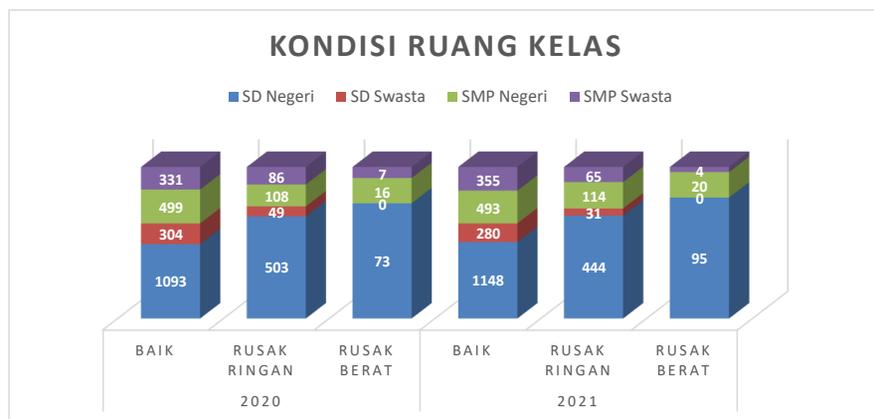
Sebaran sekolah per kecamatan dapat terlihat pada gambar 2.21, untuk tingkat SD, MI, SMP dan MTs sebarannya antar kecamatan cukup merata.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.35.  
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Tahun 2021

Selain sebaran sekolah, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup penting adalah ruang kelas. Kondisi ruang kelas SD dan SMP di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pendidikan, data diolah, 2022.

Gambar 2.36.  
Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Tahun 2020 dan 2021



## 5. Rasio Guru-Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Tabel 2.23.  
Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid  
SD di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

Tingkatan Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	2.991	64.276	2.367	1 : 21,50	1 : 27,10
2019	2.982	63.827	2.390	1 : 21,36	1 : 26,60
2020	3.234	63.475	2.398	1 : 19,60	1 : 26,50
2021	3.188	62.421	2.025	1 : 19,58	1 : 30,82

Sumber: : Data Pokok Pendidikan – Dinas Pendidikan 2022

Tabel 2.23. di atas menunjukkan bahwa untuk tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2021 di Kota Tasikmalaya rasio murid dengan guru selama periode tersebut berada pada posisi 1 : 19,58. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2021 sebesar 1: 30,82, kondisi ini belum sesuai dengan standar sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Jenjang pendidikan lanjutan (SMP) menunjukkan kecenderungan lebih baik dibandingkan dengan sekolah tingkat dasar dari sisi rasio guru dan murid serta rasio murid dan rombel walaupun kembali mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio guru dengan murid menunjukkan penurunan yaitu 1:16,17 dari tahun sebelumnya 1 :17,2. Hal ini menunjukkan bahwa satu orang guru SMP/MTs di Kota Tasikmalaya melayani 16 orang murid SMP/MTs. Dengan demikian rasio guru dan murid SMP di Kota Tasikmalaya sudah di atas standar. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2021 sebesar 1:27,19 sedangkan tahun sebelumnya 1: 23,8 hal ini masih di atas standar yaitu 1 : 32 walaupun mengalami kenaikan sebagaimana Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel 2.24.  
Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid  
SMP di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Tingkatan Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
2018	1.685	28.116	974	1 : 16,7	1 : 28,9



Tingkatan Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
2019	1.665	28.155	976	1 : 16,8	1 : 28,7
2020	1.764	28.571	1.970	1 : 17,2	1 : 23,8
2021	1.777	28.739	1.057	1 : 16,17	1 : 27,19

Sumber : Dinas Pendidikan, 2022

Selain pendidikan formal yang dilaksanakan juga dilaksanakan pendidikan non formal diantaranya pendidikan kesetaraan. Berikut data murid program kesetaraan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021.

Tabel 2.25.  
Jumlah Murid Program Paket A, B dan C  
di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

No	Kecamatan	2018			2019			2020			2021		
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Cihideung	17	35	204	7	57	262	6	33	128	10	84	271
2	Cipedes	10	43	224	-	20	131	-	112	254	-	81	217
3	Tawang		47	166	-	42	180	8	34	129	10	39	105
4	Indihiang		31	136	-	82	177	-	86	275	1	39	95
5	Kawalu	5	83	272	-	118	439	-	135	400	8	114	296
6	Cibeureum	12	147	310	7	159	377	2	175	363	-	98	281
7	Tamansari	18	91	304	19	157	431	20	201	486	1	241	464
8	Mangkubumi		3	87	-	41	151	-	69	209	2	90	248
9	Bungursari		83	132	6	53	116	-	49	110	3	45	137
10	Purbaratu		34	94	2	89	193	13	123	297	11	146	315
<b>Kota Tasikmalaya</b>		<b>62</b>	<b>597</b>	<b>1.929</b>	<b>41</b>	<b>818</b>	<b>2.457</b>	<b>49</b>	<b>1.017</b>	<b>2.651</b>	<b>46</b>	<b>977</b>	<b>2.429</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

## 6. Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan

Salah satu indikator kualitas pendidikan adalah Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan. Jumlah penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Tasikmalaya dalam rentang waktu tahun 2018 s.d.2021 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.26.  
Jumlah penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan  
Yang Ditamatkan di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 s.d. 2021

No	Tingkatan Sekolah	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Sekolah Dasar	133.838	192.197	195.569	205.221
2	Sekolah Menengah Pertama	52.437	113.427	121.863	109.851
3	Sekolah Menengah Atas	69.575	149.697	158.909	164.661
4	Perguruan Tinggi	52.493	38.592	39.556	41.270

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka (BPS), 2019 s.d. 2022



Tabel 2.26 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2021, didominasi oleh tamat Sekolah Dasar dengan persentase sebesar 39,39 persen, Sekolah Menengah Pertama sebesar 21,08 persen, Sekolah Menengah Atas sebesar 31,60 persen, dan Perguruan Tinggi sebesar 7,92 persen. Namun demikian terdapat kenaikan pada jumlah penduduk yang lulus pada tingkat Perguruan Tinggi setiap tahunnya. Iya

### 7. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

Capaian indikator kinerja urusan pendidikan pada tahun 2021 dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.27.  
Capaian Indikator Pelayanan  
Urusan Pendidikan Tahun 2018- 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Wirausaha baru sektor Pendidikan	Orang	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	89	53,29	89,00	55,82	89,46	51,18	25,52	40,48
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	102,92	97,56	102,94	95,29	102,95	97,28	102,97	96,06
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	112,90	103,55	112,93	105,28	112,95	109,13	112,97	107,34
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	94,62	94,62	94,94	89,40	89,53	90,69	89,66	90,31
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket	%	89,73	89,73	89,76	82,88	89,80	86,59	89,83	86,65
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	94,80	98,29	89	89,40	89	99,30	90	98,7
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket	%	99,13	98,01	107,80	85,99	107,83	88,85	107,85	88,5
9	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD/MI (per 10.000)	%	39,60	36,63	39,81	36,05	39,81	37,66	39,84	37,77
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP/MTs (per 10.000)	%	34,79	33,22	36,26	33,87	36,26	35,06	36,74	35,76
11	Rasio guru/murid SD/MI (per 10.000)	Poin	509,84	532,12	510,67	490,14	511,49	518,04	512,27	503,23
12	Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000)	Poin	720,34	785,11	723,80	686,57	727,60	687,64	731,11	686,61



No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI/Paket A (per 1.000)	Poin	0,22	0,22	0,22	0,20	0,22	0,20	0,22	0,19
14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs/Paket B (per 1.000)	poin	0,57	0,53	0,57	0,48	0,58	0,58	0,58	0,43
15	Sekolah pendidikan SD/MI	%	96,04	70,02	96,06	69,85	96,08	71,45	96,11	72,28
16	Sekolah pendidikan	%	96,57	84,68	96,57	78,78	96,58	78,81	96,58	78,94
17	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98,00	100,00	98,09	100,00	98,09	100,00	98,16	100
18	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,91	100,00	99,93	100,00	99,93	100,00	99,94	100
19	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kursus	%	100	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100	100
20	Persentase Wirausaha Baru sektor pendidikan yang dibina	%	100	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100	100
21	Persentase Lulusan Kesetaraan Paket A, B dan C	%	100	100,00	99,00	100,00	99,00	100,00	100	100
22	Persentase Capaian Kualitas Pendidik dan Tenaga	%	89,00	95,35	90,44	88,94	85,00	92,90	90	96,71
23	Persentase pelayanan pendidikan yang	%	90	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	90	90,91
24	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang SD dan SMP	%	7,69	35,90	7,70	16,67	30,00	11,54	30	34,78
25	Persentase Siswa SDN dan SMPN yang terlayani BOS	%	100	100,00	100,00	100,00	97,00	100,00	99	100
26	Persentase Kegiatan UPTD Pendidikan SKB ya	%	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100	100
27	Tingkat Partisipasi anak usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	6,5	7,02
28	Tingkat Kelulusan Warga Belajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	100	100



No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
29	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang PAUD	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	100	78,55
30	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	100	71,40
31	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SMP	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	100	66,48
32	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	100	70,97
33	Persentase siswa yang mengikuti pendidikan karakter /	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	100	100,00
34	Persentase capaian pengembangan	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	100	100
35	Persentase Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar yang memenuhi	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	51,35	53,23
36	Persentase Siswa berprestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	30	34,78

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

\_\* Indikator baru pada RPJMD Perubahan

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah di kota Tasikmalaya berdasarkan jumlah penduduk belum sesuai dengan yang telah ditargetkan. Realisasi dari tahun ke tahun memang mengalami kenaikan, tetapi tidak dengan target yang telah ditentukan. Capaian rasio guru murid SD/MI per 10.000 orang di kota Tasikmalaya sesuai dengan yang telah ditargetkan. Realisasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2021 terdapat penurunan. capaian rasio guru murid SD/MI per 1000 orang di kota Tasikmalaya sesuai dengan yang telah ditargetkan. Realisasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2021 terdapat penurunan. Capaian Sekolah SD/MI serta SMP/MTs kondisi bangunan baik di kota Tasikmalaya belum bisa memenuhi target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh besarnya beban pendanaan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota dan semakin berkurangnya dana transfer dari Pemerintah Pusat. Sedangkan Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kursus,



serta Persentase Wirausaha Baru sektor Pendidikan telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian persentase siswa prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang SD dan SMP pada tahun 2020 yakni dari target 30 persen terealisasi sebesar 11,54 persen, hal ini dipengaruhi oleh Pandemi Covid 19 dengan adanya pembatasan kegiatan yang mengumpulkan massa, sehingga kegiatan berjenis perlombaan banyak yang di tunda dan atau dibatalkan penyelenggaraanya.

### 2.1.3.1.2. Urusan Kesehatan

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2018-2021 secara umum mengalami fluktuasi. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.28.  
Capaian Indikator Pelayanan  
Urusan Kesehatan Tahun 2018-2021

	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
1	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan Kesehatan	%	42	40	47	42,3	67,5	29,53	76,9	40,75
2	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	6	6,72	5,29	5,29	6,15	8,35	5,72	8,5
3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	101	151,6	83,89	93,94	162,25	202,55	145,18	303,87
4	Prevalensi Stunting	%	11	10,8	10,50	10,95	20,10	17,57	19,1	14,81
5	Persentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular	%	100	100	100	100	100	43,13	100	54,15
6	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	95,45	100	95,5
7	Persentase layanan jaminan kesehatan nasional masyarakat miskin	%	80	99,01	85	99,06	90	100,00	100	80,31
8	Persentase ketersediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	60	79,3	70	85,20	80	48,57	90	66,6
9	Cakupan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja	%	100	94,9	100	97,9	100	81,62	100	100
10	Persentase Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	34	59,44	36	39,47	38	41,37	45,13	40,83
11	Persentase balita gizi buruk	%	0	0,37	0	0,545	0	1,02	0,5	0,82
12	Capaian Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga yang memenuhi standar	%	43	65,6	48	67	53	15	54,25	38,21
13	Persentase Puskesmas sesuai standar permenkes 75	%	70	66	80	81	90	36,37	95	77
14	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	%	25	24,9	40	42,5	80	40,63	80	71
15	Persentase pelayanan kesehatan keluarga	%	50	70,75	65	72,5	75	100	85	75,17



	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
16	Persentase Penyakit menular ditangani sesuai tatalaksana standar	%	100	100	100	100	100	100	100	61,5
17	Persentase penyakit tidak menular yang ditangani sesuai tatalaksana standar	%	100	100	100	100	100	100	100	50,5
19	Capaian fasilitas kesehatan tahapan pertama yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	95,45	100	95
20	Persentase Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya	%	100	94,25	100	88,05	100	100	100	100
21	Capaian Penyelenggaraan Operasional Pelayanan terhadap jumlah lab dan gudang farmasi	%	100	96,31	100	100	100	100	100	100
22	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja sesuai standar	%	80	80	100	95	100	100	100	100
23	Persentase implementasi sistem informasi kesehatan	%	100	100	95	100	100	100	100	100
24	Persentase standar pelayanan minimal rumah sakit	%	80	82,09	82	82,13	83	82,25	100	100
25	Akreditasi Rumah Sakit dr. Soekardjo	kategori	5	5	5	5	5	5	5	5
26	Cost Recovery Ratio (CRR)	%	100	80,79	100	80,77	100	100	100	100
27	Persentase capaian Mutu dan Keselamatan Pasien	%	0	63,85	81	66,15	82	82	83	83
28	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dr. Soekardjo	%	0	82,05	75	82,05	80	80	85	83,45

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022.

Pelayanan kesehatan sangat didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Berikut disampaikan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan di Kota Tasikmalaya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.29.  
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Puskesmas	No	Rumah Sakit / Faskes Lainnya
1	Kersanagara	1	RSUD dr. Soekardjo
2	Kawalu	2	RS ISLAM Hj. Siti Munaroh
3	Karanganyar	3	RS Jasa Kartini
4	Tamansari	4	RSB dr. Hj. Karmini EH
5	Cibeureum	5	RS Tasik Medika Citratama (TMC)
6	Purbaratu	6	RSB UMMI
7	Kahuripan	7	Sayang Bunda
8	Tawang	8	RSIA Widaningsih



No	Puskesmas	No	Rumah Sakit / Faskes Lainnya
9	Cihideung	9	RS Syifa Medina
10	Cilembang	10	RSIA Bunda Aisyah
11	Mangkubumi	11	RS Prasetya Bunda
12	Sambongpari	12	RS Permata Bunda Tasikmalaya
13	Indihiang	13	Fasilitas Kesehatan lainnya 6 unit
14	Parakanyasag		
15	Bungursari		
16	Sukalaksana		
17	Bantar		
18	Cipedes		
19	Panglayungan		
20	Cigeureung		
21	Urug		
22	Sangkal		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022.

Selain fasilitas kesehatan, jumlah SDM kesehatan/tenaga medis di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30.  
Jumlah Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya  
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah			Rasio terhadap Jmlh Penduduk	Standar SK Menko Kesra no 54/2013
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Dokter Spesialis	96	41	137	27,8	11
2	Dokter Umum	92	131	223	24,4	45
3	Dokter Gigi	15	52	67	7,9	13
4	Dokter Gigi Spesialis	1	3	4	3,3	-
5	Perawat	611	939	1.550	197,8	180
6	Bidan	-	742	742	89,5	120
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	55	75	7,2	16
8	Tenaga Kesehatan Lingkungan	17	19	36	6,1	18
9	Tenaga Gizi	20	72	92	12,8	14
10	Tenaga Kefarmasian	11	69	80	37,9	
	a. Tenaga Teknis Kefarmasian	-	-	-	-	24
	b. Apoteker	-	-	-	-	12

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022.



Berdasarkan data di atas, masih terdapat beberapa ketersediaan SDM kesehatan yang berada di bawah standar yaitu Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

### 2.1.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi beberapa lingkup sub urusan, yaitu jalan kota, pengelolaan sumber daya air, tata ruang, tata bangunan dan pemukiman. Adapun pembahasan mengenai tiap sub urusan sebagaimana uraian dibawah ini.

#### A. Jalan Kota

Berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 541.03/Kep.136-DPUPR/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota, dinyatakan bahwa panjang jalan kota di Kota Tasikmalaya adalah 450,742 km. Adapun kinerja infrastruktur jalan kota selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.31.  
Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2018 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Km	-*	403,910	-*	411,302	-*	379,525	-*	397,157
Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	93	89,61	91,58	91,25	97	84,2	98	88,11
Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target	Km	-*	29,100	-*	37,470	-*	16,083	-*	19,601
Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target (200 Km)	%	6	14,55	25	18,74	30	8,04	0,4	9,80
Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin	Km	-*	65,73	-*	80,42	-*	45,90	-*	42,275
Capaian panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin (target 300 Km selama 5 thn, 60 Km per tahun)	%	20	21,91	20	26,81	20	15,3	20	14,09

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.



Lebih lanjut, panjang jalan kota belum seluruhnya dilengkapi dengan bangunan pelengkap jalan terutama drainase jalan. Sehingga, pada beberapa ruas jalan mengalami genangan ketika hujan. Tabel berikut ini merupakan kinerja bangunan pelengkap jalan terdiri dari pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan dari tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 2.32.  
Kinerja Bangunan Pelengkap Jalan Tahun 2018-2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Panjang pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	Km	20	21,51	20	26,81	20	37,03	20	26,69
Capaian pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	%	79,25	71,7	89,62	80,93	94,34	123,43	88,16	88,97

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Berikut ini merupakan capaian pembangunan jalan mulai tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 2.33.  
Capaian Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2018-2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian jumlah jalan dan jembatan yang dibangun	Km	-*	0,7	-*	0,9	-*	2,45	-*	3,425
Capaian jalan dan jembatan yang dibangun terhadap target (target = panjang jalan 6,405 jembatan = 3unit)	%	3,3	10,93	14,83	14,05	33,55	38,25	88,16	53,48

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Di sisi lain, masih terdapat masalah keterbatasan kapasitas jalan yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Hal ini disiasati dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.



## B. Sumber Daya Air

Terdapat 35 Daerah Irigasi yang berada di Kota Tasikmalaya dengan luas 5.321 Hektar terdiri dari 29 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Kota (luas 1.749 Hektar, total panjang 332,53 Km), 5 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Provinsi (luas 1.445 Hektar, total panjang 81,35 Km) dan 1 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (luas 2.128 Hektar, total panjang 196 Km). Kinerja infrastruktur irigasi selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34.  
Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengairan Lainnya Tahun 2018-2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	53,47	58	60,2	68,49	66,6	79,94	72,68	84,23
Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik	KM	108,01	117,15	121,61	138,36	134,53	161,47	146,8	180,22
Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya (target 40 Km selama 5 thn)	%	20	13,9	20	27,2	20	5,95	20	25,47
Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya	Km	-*	5,56	-*	10,88	-*	2,38	-*	10,19

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

## C. Tata Ruang

Kinerja Tata Ruang selama tahun 2018-2021 mengalami peningkatan baik pada pemberian ijin maupun pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. Selain itu pada tahun 2019, terdapat 6 rencana detail tata ruang yang disusun.

Tabel 2.35.  
Capaian Kinerja Tata Ruang Tahun 2018-2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan	%	85	86	87	88	90	91	92	87,18



Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Ruangdengan RTR									
Capaian pengawasan ijin pemanfaatan ruang	%	94	95	95	96	96	97	97	97,15
Capaian dokumen rencana detail tata ruang yang disusun	Dokumen	-	-	2	6	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

#### D. Tata Bangunan

Capaian realisasi bangunan sesuai ijin bahwa pada tahun 2021 terealisasi 97,37%, hal inimenunjukkan bahwa terdapat rekomendasi teknis bangunan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat tertangani seluruhnya. Sedangkan untuk pengawasan rekomendasi teknis bangunan yang ditangani terhadap yang diajukan hanya terealisasi 94,87%. Lebih lengkapnya capaian tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36.  
Capaian Indikator Kinerja Tata Bangunan Tahun 2018 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian realisasi bangunan sesuai ijin	%	99,2	100	99,3	100	99,4	99,4	99,5	97,37
Capaian pengawasan rekomendasi teknis bangunan	%	94	100	95	95,99	96	96	97	94,87

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Untuk kondisi bangunan Pemerintahan khususnya Gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan sampai dengan tahun 2021 yang memiliki kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 11 Gedung, sedangkan yang mengalami kerusakan berat sudah berkurang menjadi 1 gedung. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 2.37.  
Kondisi Bangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan  
Tahun 2018 - 2021

No	Kondisi Bangunan	Gedung Kecamatan	Gedung Kelurahan
1	Baik	3	11
2	Rusak Ringan	4	45
3	Rusak Sedang	3	11
4	Rusak Berat	4	1
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	0	1
	Total	10	69

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

#### E. Permukiman

Sub urusan permukiman pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup infrastruktur lingkungan (jalan dan drainase), pemenuhan air minum dan akses terhadap sanitasi.

Jalan lingkungan di Kota Tasikmalaya sepanjang 1.941,759 Km, jalan lingkungan tersebut dilakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan dengan rincian dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.38.  
Kondisi Jalan Lingkungan yang ditangani dan dalam Kondisi Baik  
Tahun 2018 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jalan Lingkungan yang ditangani	Km	-*	50,324	-*	219,169	-*	219,007	-*	59,874
Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	%	18,75	25,162	21,62	109,58	21,6	25,18	27,01	28,26

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Panjang drainase yang ditangani pada tahun 2021 sepanjang 50.990 m. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 2.39.  
Kondisi Drainase Lingkungan yang ditangani dan dalam Kondisi Baik Tahun 2018 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Drainase Lingkungan yang ditangani	m	-*	19.399	-*	143	-*	27,341	-*	50,990
Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	%	20	20,77	20	20,92	20	50,20	20	54,59

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Akses masyarakat terhadap Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) di Kota Tasikmalaya berdasarkan *baseline* yang tertuang dalam RPJMD yang mengacu kepada jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 180.442 KK adalah sebesar 99.892 KK (55,36 %). Capaian untuk tahun 2021 realisasi KK yang berakses SPAL sebanyak 281 KK / 61,20%. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.40.  
Capaian Realisasi KK yang berakses SPAL Tahun 2018 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Realisasi KK berakses SPAL	KK	-*	5.945	-*	3.184	-*	130	-*	281
Capaian KK berakses SPAL	%	41,17	58,65	41,3	60,42	60,49	60,54	61,04	61,20

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Sedangkan Kepala Keluarga yang berakses air minum di Kota Tasikmalaya yang mengacu kepada *baseline* RPJMD yang mengacu kepada jumlah KK sebanyak 180.442 KK. Capaian untuk tahun 2021 capaian akses air minum sebanyak 1.894 KK / 56,23 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41.  
Capaian Realisasi KK yang berakses Air Minum Tahun 2018 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Realisasi KK berakses Air Minum	KK	-*	310	-*	3.941	-*	114	-*	1.894



Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian KK berakses Air Minum	%	53,27	53,33	53,77	55,51	54,27	55,58	55,82	56,23

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

#### 2.1.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian indikator urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.42.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian penanganan rumah tidak layak huni	%	8,6	26,66	16,6	35,25	_*	47,61	_*	54,15
Persentase penanganan kawasan kumuh	%	52,7	61,65	59,81	97,78	98,88	98,88	99,23	99,23
Jumlah PSU yang diserahkan dan Jumlah PSU yang diverifikasi	Unit	10/20	5/31	10/20	19/20	_*	0/0	_*	12/16
Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	Unit	1075	3333	1000	1075	1000	1043	1000	1320
Persentase PSU yang diverifikasi	%	7,43	15,61	14,87	22,68	22,3	22,68	30,11	28,62
Persentase PSU yang diserahkan	%	3,72	7,06	7,43	14,13	11,15	14,13	17,84	18,58
Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	52,7	61,65	59,81	97,78	98,88	98,88	99,23	99,23
Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	_*	26,66	_*	35,25	43,59	47,61	47,59	54,15
Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	_*	-	_*	-	100	100	100	100

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2022.

Target Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan RPJMD Kota Tasikmalaya 2017 – 2022 adalah sebanyak 5.000 unit rumah, realisasi tahun 2021 sebanyak 1320 unit sehingga secara total sebanyak 6.771 unit rumah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.43.



Tabel 2.43.  
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018 – 2021

Kegiatan	Satuan	Jumlah				Total
		2018	2019	2020	2021	
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni	Unit	3.333	1.075	1.043	1320	6.771

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2022.

Berdasarkan pencapaian diatas, penanganan target RTLH yang merupakan janji politik sudah terpenuhi bahkan lebih besar dari yang diperkirakan. Namun mengacu kepada pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2017 yang merupakan baseline penyusunan RPJMD jumlah RTLH yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya sebanyak 12.504 unit. Sehingga jika melihat dari penanganan RTLH sampai dengan tahun 2021 masih tersisa 5.733 unit rumah masih perlu rehabilitasi. Akan tetapi data tersebut, diperlukan pemutakhiran dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data RTLH pada aplikasi e-RTLH Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prioritas lain dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Tasikmalaya telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 050.13/Kep.374.Bappeda/2014 tentang Penetapan Sasaran Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kumuh di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2014 terdiri dari 18 (delapan belas) lokasi dengan luas total 276,17 hektar. Intervensi penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antara pemerintah baik Kota, Provinsi maupun Pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh menjadi 206,24 hektar berdasarkan identifikasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Kota Tasikmalaya yang dilakukan pada Tahun 2016. Dan pada tahun 2018 hasil Updating RP2KP-KP Program KOTAKU, sisa luasan kawasan kumuh menjadi 105,92 hektar. Untuk tahun 2019 sisa luasan kumuh sebesar 6,14 hektar dan pada tahun 2020 sisa luasan kumuh seluas 3,1 hektar dan pada tahun 2021 sisa luasan kumuh sebesar 2,13 Ha yang direncanakan akan diselesaikan pada tahun anggaran 2022.

Kemudian pada tahun 2021, dilakukan identifikasi kembali terhadap kawasan kumuh di wilayah Kota Tasikmalaya. Hasil identifikasi terdapat kawasan kumuh seluas 168,49 Hektar yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 648/Kep.733.1-Disperwaskim/2021. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.44.  
Kawasan Kumuh di Kota Tasikmalaya Berdasarkan SK Walikota Tahun 2021

No.	Nama Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)
1	ARGASARI	Argasari	Cihideung	3,78
2	CIPALAYUNG	Cipedes-Panglayungan	Cipedes	15,40
3	CIPANYIR	Cipedes-Panyingkiran	Cipedes-Indihiang	16,31
4	INDIHIANG	Indihiang	Indihiang	1,59
5	PARAKANYASAG	Parakanyasag	Indihiang	1,31
6	SUKAMAJU KALER	Sukamaju Kaler	Indihiang	2,14
7	TUGURAJA	Tuguraja	Cihideung	3,90
8	CIKALANG	Cikalang	Tawang	2,80
9	PURBARATU	Purbaratu	Purbaratu	9,30
10	SUKAJAYA	Sukajaya	Purbaratu	14,00
11	SUKAMENAK	Sukamenak	Purbaratu	9,23
12	MUGARSARI	Mugarsari	Tamansari	4,73
13	SETIAWARGI	Setiawargi	Tamansari	2,25
14	SUMERANG	Sumelap-Ciherang	Tamansari-	17,00
15	CIAKAR	Ciakar	Cibeureum	11,60
16	KOTABARU	Kotabaru	Cibeureum	6,05
17	SETIAJAYA	Setiajaya	Cibeureum	9,77
18	MARGABAKTI	Margabakti	Cibeureum	4,36
19	BUNGURSARI	Bungursari	Bungursari	3,22
20	SUKAJAYA	Sukajaya	Bungursari	1,22
21	CIBEUTI	Cibeuti	Kawalu	5,00
22	URUG	Urug	Kawalu	11,50
23	LEUWILIANG	Leuwiliang	Kawalu	2,80
24	TANJUNG	Tanjung	Kawalu	3,47
25	CIGANTANG	Cigantang	Mangkubumi	0,45
26	KARIKIL	Karikil	Mangkubumi	5,31
JUMLAH				<b>168,49</b>

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022.

Prioritas selanjutnya dalam urusan perumahan dan permukiman adalah verifikasi dan serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan formal. Dari *baseline* jumlah perumahan formal tahun 2017 sejumlah 269 unit perumahan sampai dengan tahun 2021 sudah 50 unit perumahan yang telah diserahterimakan (18,58 %) dan yang telah diverifikasi sebanyak 77 unit perumahan (28,62 %).

Tabel 2.45.  
Jumlah Perumahan yang Telah Serah dan Verifikasi  
Terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)  
Kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

Kegiatan	Satuan	Basis Data	Jumlah				Total
			2018	2019	2020	2021	
Verifikasi PSU	Unit	0	41	20	0	16	77
Serah Terima PSU	Unit	14	5	19	0	12	50

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022.



### 2.1.3.1.5. Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas

Urusan keamanan, ketertiban umum dan Linmas dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Data capaian indikator urusan keamanan, ketertiban umum dan linmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan  
Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas  
Tahun 2018 – 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian kualitas pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara	%	100	100	100	100	100	100	.*	.*
2	Persentase capaian koordinasi trantibmas dan pencegahan tindak criminal	%	100	100	100	100	100	100	.*	.*
3	Persentase penyelesaian potensi konflik kerukunan umat beragama	%	100	100	100	100	100	100	.*	.*
4	Persentase capaian pembinaan kerukunan umat beragama	%	100	100	100	100	100	100	.*	.*
5	Persentase capaian pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase capaian pendidikan politik bagi masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu	%	83	80	84	86	.**	.**	.**	.**
8	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (per 10.000)	point	1,13	1,018	1,14	1,02	1,15	0,88	1,16	2,27
9	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (per 10.000)	point	55,8	54,66	56,10	60,49	56,3	52,23	56,3	53,95
10	Persentase Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan (%)	%	27	49,26	28	22,95	29	22,95	30	26,30
11	Persentase penanganan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	70	86	75	84	80	91,83	90	100
12	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	%	65	75	70	100	75	100	80	100
13	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota (%)	%	88	100	90	100	94	100	96	100
14	Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Wilayah Kota (%)	%	0,00557	0,00557	0,00558	0,00557	0,00561	0,00529	0,00563	0,00539



No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
15	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota (%)	%	80	96,1	85	95,87	90	95,87	95	96,1
16	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	%	84	84,8	84,5	84	85	84,61	85,5	85,71
17	Persentase penegakan perda dan perkada	%	80	86	85	84,84	85	98,54	85,5	86,13
18	Persentase pembinaan dalam penegakan peraturan daerah	%	70	100	75	100	80	100	90	100
19	Persentase rekomendasi penindakan yang ditangani	%	80	81,75	85	85	90	90	95	100
20	Angka Kriminalitas	Point	3,7	5,11	3,2	5,51	3,5	5,88	3	5,88
21	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	%	88	100	90	100	94	100	96	100
22	Persentase penanganan perlindungan masyarakat	%	80	94	85	100	90	100	95	100
23	Persentase pelayanan bencana kebakaran kota yang dilayani	%	80	100	85	100	90	100	95	100
24	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	65	9,52 -65	70	1,26 - 100	75	8,76	80 - 1,5	-8,76
25	Persentase ketersediaan anggota linmas per kelurahan sesuai standar (Permendagri)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Capaian pelatihan anggota linmas	%	18	18	28	65,22	38	71,20	48	71,20
27	Capaian pos siskamling aktif per RW	%	50	50	60	94,85	70	94,85	85	94,85
28	Capaian penanganan gangguan masyarakat tingkat kelurahan	%	80	94	85	100	90	100	95	100
29	Persentase aparaturn pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi	%	23	24	25	75	30	78,26	30	76,2
30	Persentase aktifitas pencegahan rawan kebakaran yang dilakukan	%	20	20	20	100	40	100	50	100
31	Persentase pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang tangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, BPBD, KesbangPol, 2022.

Tabel 2.47.  
Kejadian Bencana Tahun 2018-2021

No.	Bencana	Kejadian			
		2018	2019	2020	2021
1.	Angin Putting Beliung	4	11	-	3
2.	Pohom tumbang	16	26	13	43
3.	Rumah Roboh	49	49	75	94
4.	Gempa bumi	1	3	2	0



No.	Bencana	Kejadian			
		2018	2019	2020	2021
5.	Longsor	20	34	28	37
6.	Banjir	11	12	2	6
7.	Tersambar petir	5	10	6	4
8.	Gerakan Tanah	3	4	12	3
9.	Kekeringan	116	-	-	-
10.	Pandemi Covid-19	-	-	1	1
	Jumlah	225	149	138	214

Sumber :BPBD Kota Tasikmalaya, 2022.

### 2.1.3.1.6. Urusan Sosial

Capaian layanan urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Sosial Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	67	66,88	70	79,89	74	79,9	77	79,9
2	Capaian Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	%	14	13,95	15	13,95	15	15	16	16
4	Capaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Memiliki Komunitas Binaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2022.

Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

### 2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS Tahun 2021, jumlah penduduk usia kerja di Kota Tasikmalaya sebanyak 521.003 orang. Dari jumlah tersebut yang termasuk dalam Angkatan Kerja sebanyak 342.585 orang 65,75%, sedangkan yang Bukan Angkatan Kerja adalah sebanyak 178.418 orang atau 33,46 %. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.49.  
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Kategori	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	301.619	322.887	343.285	342.585
1. Bekerja	280.959	301.081	315.844	316.349
2. Pengangguran Terbuka	20.660	21.806	27.441	26.236
Bukan Angkatan Kerja	179.049	170.976	172.612	178.418
Jumlah	480.668	493.863	515.897	521.003
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	93,15	93,25	92,01	92,34
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	62,75	65,38	66,54	65,75
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,85	6,75	7,99	7,66

Sumber : Data Sakernas BPS

Merujuk pada Data SAKERNAS Tahun 2021 di atas, total Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 342.585 orang. Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 316.844 orang atau 92,34 persen merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 26.236 orang merupakan pengangguran, yang artinya bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya tahun 2021 sebesar 7,66 persen.

Tabel 2.50.  
Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

Kategori	2018		2019		2020		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Bekerja	280.959	93,15	301.081	93,25	315.844	92,01	316.349	92,34
Pengangguran	20.660	6,85	21.806	6,75	27.441	7,99	26.236	7,66
Angkatan Kerja	301.619	100,00	322.887	100	343.285	100	342.585	100

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain: Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); Manufaktur; dan Jasa.

Untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan pelatihan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Latihan (LPK) yang berjumlah 58 LPK.

Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.51.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018 - 2021

No	Indikator	Satuan	TAHUN							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,20	6,85	5,6	6,75	8,5	7,99	7,72	7,66
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	65,69	62,75	65,90	65,38	66,12	66,54	66,50	66,54
3	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	%	40	45,83	45	57,55	60	23,68	100	23
4	Jumlah Wirausaha Baru	Orang	100	87	100	100	100	0	150	163
5	Persentase kesempatan kerja yang terpenuhi terhadap permintaan	%	15	n/a	17,30	17,75	17	18,83	-	-
6	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	85,70	n/a	85,70	100	_*	_*	_*	_*
7	Persentase implementasi hubungan industrial dan jaminan sosial terhadap total perusahaan	%	21,40	n/a	10	10,71	_*	-	_*	_*
8	Persentase perusahaan yang memiliki lembaga ketenagakerjaan	%	_*	_*	_*	_*	15	15,5	20	15,58
9	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	_*	_*	_*	_*	-	-	100	100
10	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	_*	_*	_*	_*	-	-	43,32	24,96

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, 2022.

#### 2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.52.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan  
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2018 - 2021

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	SKOR	500	n/a	700	699.7	Tidak dilaksanakan	n/a	800	756

Sumber : DPPKBPA Kota Tasikmalaya, 2022.

### 2.1.3.2.3. Pangan

Tugas pemerintah daerah di bidang pangan adalah mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan melalui meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan, meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, penanganan kerawanan pangan, menjaga stabilitas harga pangan pokok strategis, dan penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. PPH Kota Tasikmalaya tahun 2020 mencapai 91,6 telah mencapai nilai optimal yaitu nilai skor PPH ideal minimal 90. Kajian ini menyimpulkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kota Tasikmalaya sudah cukup berkualitas. Berikut capaian pelayanan urusan pangan Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.53.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pangan Tahun 2018 - 2021

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	75	104,35	80	110,5	85	121,6	-*	-*
2	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	92	98	95	100,6	98	100,6	-*	-*
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	%	86	86,11	87	75	88	66,67	-*	-*
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	78	33,07	81	82,09	-*	-*	-*	-*
5	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	%	68	65,17	69	43,39	-*	-*	-*	-*
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	76	80	77	80	81	100	-*	-*



No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	47	6,25	48	81,25	49	0	-*	-*
8	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point)	point	-*	-*	-*	-*	-*	-*	91	91,3
9	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Ketersediaan (point)	point	-*	-*	-*	-*	-*	-*	84	91,5
10	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun	unit	-*	-*	-*	-*	-*	-*	3	0
11	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	88	110,6
12	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG)	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	71	124,9
13	Persentase kelurahan rentan pangan yang ditangani	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	50	66,67
14	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	79	100

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2022.

#### 2.1.3.2.4. Pertanahan

Capaian layanan urusan pertanahan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54.  
Pelayanan Umum Urusan Pertanahan Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	30	58,17	32	62,68	33	62,68	34	-
2	Capaian pengelolaan data pertanahan (realisasi pendataan pertanahan terhadap target)	%	-*	10	-*	20	-*	100	-*	-
3	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	1	100	1	100	1	100	1	-
4	Penyelesaian izin lokasi	%	1	93,33	1	93,33	1	62,68	1	-
5	Persentase pengelolaan penatagunaan tanah	%	10	10	20	20	20	20	60	50

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.



### 2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Perkembangan pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.55.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup  
Tahun 2018 – 2021

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penambahan ruang terbuka hijau (Ha)	Ha	7,94	8,56	9,44	10,3	-*	-*	-*	-*
2	Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani	%	61,8	59,35	64,8	71,04	-*	-*	-*	-*
3	Capaian Indeks Kualitas Air dan Udara	Point	100	(IKA=49,03, Sedikit Memenuhi), (IKU=71.385, Cukup))	100	(IKA = 51,83 Sedikit Memenuhi), (IKU = 81,32, Cukup) / Baik	-*	-*	-*	-*
4	Cakupan Pengendalian Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	-*	-*	-*	-*
5	Persentase Pengelolaan Sampah	%	70,46	62,34	73,46	71,04	-*	-*	-*	-*
6	Capaian Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	%	27,78	22,22	50	27,78	-*	-*	-*	-*
7	Persentase Luas Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	%	13,56	23,99	38,98	46,24	-*	-*	-*	-*
8	Capaian Pemantauan Kualitas Lingkungan	%	26,04	34,38	100	35,18	-*	-*	-*	-*
9	Capaian UKM Berpotensi Pencemaran yang Ditangani	%	17,39	21,74	39,13	0	-*	-*	-*	-*
10	Capaian Volume Sampah yang terangkut ke TPA	%	57,93	56,76	59,43	58,98	-*	-*	-*	-*
11	Capaian Pengurangan Sampah	%	12,53	2,59	14,03	12,05	-*	-*	-*	-*
12	Capaian tersedianya Dokumen Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	Dokumen	-**	-**	-**	-**	-**	-**	50	50
13	Capaian Luas RTH yang dikelola	Ha	-**	-**	-**	-**	-**	-**	100	100
14	Capaian Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan Penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah	%	-**	-**	-**	-**	-**	-**	100	100
15	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	-**	-**	-**	-**	-**	-**	100	150

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

-\* Indikator Lama  
-\*\* Indikator Baru



Ruang lingkup urusan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan RTH

Dalam rangka menambah luas ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya, maka dinas lingkungan hidup melaksanakan kegiatan pembebasan bukit, dengan rincian penambahan luas ditampilkan pada tabel.

Tabel 2.56.  
Pembebasan Lahan untuk RTH

No.	Nama Gunung	Lokasi		Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Pembebasan	Ket.
		Kelurahan	Kecamatan			
1	Gunung Kokosan	Cibunigeulis	Bungursari	35.796	2008, 2009, 2011, 2015	Setda, KPLH
2	Gunung Kiara	Bungursari	Bungursari	10.162	2011	KPLH
3	Gunung Tengah	Bungursari	Bungursari	4.555	2013	KPLH
4	Gunung Pondok	Bungursari	Bungursari	5.410	2013, 2014	KPLH
5	Gunung Hanjuang	Cibunigeulis	Bungursari	6.707	2013	KPLH
6	Gunung Bondan	Sukajaya	Bungursari	1.027	2014	KLH
7	Gunung Jambore	Sukalaksana	Bungursari	3.965	2014	KLH
8	Gunung Bubut	Cipawitra	Mangkubumi	2.200	2017	DLH
9	Gunung Putri	Cibunigeulis	Bungursari	12.677	2018	DLH
10	Gunung Cilamajang	Cipawitra	Mangkubumi	20.453	2017, 2018, 2019	DLH
Jumlah				102.952		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

Selain bukit, yang termasuk dalam ruang terbuka hijau adalah Taman Pemakaman Umum (TPU). Berdasarkan hasil survey Luas TPU di Kota Tasikmalaya yaitu 101,94 Ha. Yang terdiri dari TPU milik masyarakat 89,67 Ha dan TPU Milik Pemerintah 12,27 Ha.

Tabel 2.57.  
Taman Kota Tasikmalaya Tahun 2022

No	Nama	Luas (Ha)
1	Taman Dadaha	4,2592
2	Taman Lapang Cigeureung	0,7661
3	Alun Alun Indihiang	0,6104
4	Taman STIA	0,3983
5	Taman Unsil	1,0653
6	Taman Kota	0,5524
7	Alun Alun	1,2789
8	Taman Mesjid Agung	0,2998
9	Taman Bale Wiwitan	0,3231
10	Pulau Jalan Padayungan	0,0143
11	Taman Batas Kota Indihiang	0,061
12	Taman Batas Karangresik	0,0552
13	Pulau Jalan Simpang	0,015276
14	Linggajaya	



No	Nama	Luas (Ha)
15	Pulau Jalan Tugu HZ. Mustofa	0,048531
16	Taman Kelurahan	0,478663
17	Panglayungan	
18	Pulau Rancabango	0,103591
19	Taman Warga Cigeureung	0,12254
20	Taman Kantor Kecamatan Bungursari	0,070313
21	Bungursari	
22	Taman Bale Kota	1,63562
23	Taman Rancabango	0,084054
24	Taman Lapang Sukamulya	0,386429
25	Taman Lapang Indihiang	0,71163
26	Taman Lapang Karikil	0,511412
27	Taman Lapang Singkup	0,356596
28	Taman Lapang Cibeureum	0,391096
29	Taman Lapang Kersamenak	0,621324
30	Taman Lapang Karanganyar	0,555187
31	Taman Lapang Urug	0,76202
32	Taman Lapang Sukamanah	0,444031
33	Taman Lapang Parakannyasag	0,201526
34	Taman Lapang Linggajaya	0,525796
35	Taman Lapang Mangkubumi Babakan Kadu	0,303121
36	Taman Lapang Cipari	0,434877
37	Taman Makam Pahlawan	0,842326
38	Pulau Jalan Cibogor	0,013631
39	Pulau Jalan Sutisna Senjaya	0,009486
40	Pulau Jalan Tanuwijaya	0,007839
41	Pulau Jalan Tentara Pelajar	0,004891
42	Tugu Asmaul Husna	0,003997
43	Tugu Kelom Geulis	0,006178
44	Tugu Canting Batik	0,007992
45	Pulau Jalan RE. Martadinata	0,009398
46	Tugu Simpang Lima	0,004373
47	Pulau Jalan Tarumanagara	0,001726
48	Pulau Jalan Cilolahan	0,00262
49	Pulau Jalan Gn. Sabeulah	0,001673
50	Taman Lapang Citalangu Cihurip	0,354877
	Total	19,717823

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

## 2. Pengendalian dan Pengawasan Kualitas Lingkungan

Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan, pemantauan kualitas air dan udara, penanganan pengaduan, pemantauan ijin lingkungan, dan pelaksanaan kampung iklim. Berikut beberapa data dan penjelasan mengenai pengendalian dan pengawasan lingkungan;

### Pemantauan kualitas air dan udara



Tabel 2.58.  
Perhitungan Indeks Kualitas Air Berdasarkan Lokasi Sampel Tahun 2021

No	Lokasi Sampel	IP	IKA Existing	NSF
1	Sungai Ciloseh Hulu	Ringan	Memenuhi	78,35247209
2	Sungai Ciloseh Tengah	Sedang	Ringan	66,50133187
3	Sungai Ciloseh Hilir	Ringan	Memenuhi	70,79967655
4	Sungai Cikalang Hulu	Ringan	Memenuhi	71,32647393
5	Sungai Cikalang Tengah	Sedang	Ringan	67,55471757
6	Sungai Cikalang Hilir	Ringan	Ringan	63,8308001
7	Sungai Cilamajang Hulu	Ringan	Memenuhi	73,84768157
8	Sungai Cilamajang Tengah	Ringan	Memenuhi	73,56240048
9	Sungai Cilamajang Hilir	Ringan	Memenuhi	76,93233216
10	Sungai Cibangbay Hulu	Ringan	Memenuhi	76,8981448
11	Sungai Cibangbay Tengah	Ringan	Memenuhi	76,45836893
12	Sungai Cibangbay Hilir	Ringan	Memenuhi	72,37863853
Avg NSF				72,37025321
Status				Memenuhi Baku Mutu

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

Tabel 2.59.  
Indeks Kualitas Udara Berdasarkan Lokasi Sampel Tahun 2021

Peruntukan	Tahap I Kadar SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Tahap I Kadar NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Tahap II Kadar SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Tahap II Kadar NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	Ieu SO <sub>2</sub>	Ieu NO <sub>2</sub>	Ieu NO <sub>2</sub> & SO <sub>2</sub>	IKU	Ieu Gabungan	IKU Gabungan	Ket
Pemukiman	17,50	5,20	10,13	6,32	0,69	0,14	0,42	82,37	0,49	78,20	<b>Baik</b>
Transportasi	9,85	20,45	14,12	20,98	0,60	0,52	0,56	74,53			
Industri	23,27	8,71	12,68	7,93	0,90	0,21	0,55	74,81			
Perkantoran	18,42	11,26	5,29	11,80	0,59	0,29	0,44	81,09			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

Indeks kualitas udara berdasarkan lokasi sampel Permukiman, Transportasi, Industri dan Perkantoran. Nilai IKU paling tinggi diperoleh dari lokasi kawasan permukiman dan paling rendah di kawasan transportasi. Hal tersebut menggambarkan di area permukiman memiliki kualitas udara lebih baik dibandingkan di area transportasi.

Tabel 2.60.  
Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)

No.	Indikator Kinerja	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Air	45-64 (cukup/baik)	45,83	45-64 (cukup/baik)	51,38	45-64 (cukup/baik)	72,37	45-64 (cukup/baik)	64,52



2	Indeks Kualitas Udara	45-64 (cukup/baik)	71,85	45-64 (cukup/baik)	81,32	45-64 (cukup/baik)	78,20	45-64 (cukup/baik)	83,82
---	-----------------------	-----------------------	-------	-----------------------	-------	-----------------------	-------	-----------------------	-------

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022.

Nilai IKA Kota Tasikmalaya yaitu 72,37 dengan klasifikasi predikat memenuhi baku mutu. Nilai IKU 78,20 dengan klasifikasi baik.

### Penanganan Pengaduan

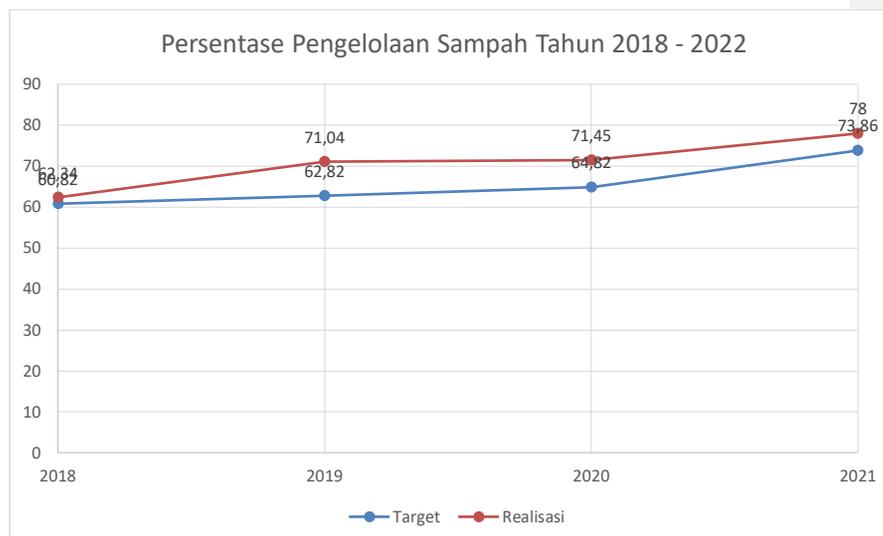
Tabel 2.61.

Penanganan Pengaduan Tahun 2018 - 2021

No.	Tahun				Jumlah
	2018	2019	2020	2021	
1	2	11	4	6	23

### 3. Pengelolaan Persampahan

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka setiap tahunnya jumlah sampah akan semakin meningkat pula. Timbulan sampah penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2021 yaitu sebesar 315,11 Ton/Hari atau 114.650,15 Ton. Sampah masuk ke TPA tahun 2021 sebanyak 70.413,33 Ton, atau 61,23 % dan sampah yang dikurangi tahun 14.519,60 Ton atau 12,61%. Rata-rata timbulan sampah masyarakat Kota Tasikmalaya 3,63 L/Jiwa/Hari (Dokumen Kajian Timbulan Sampah, 2017).



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Gambar 2.37.

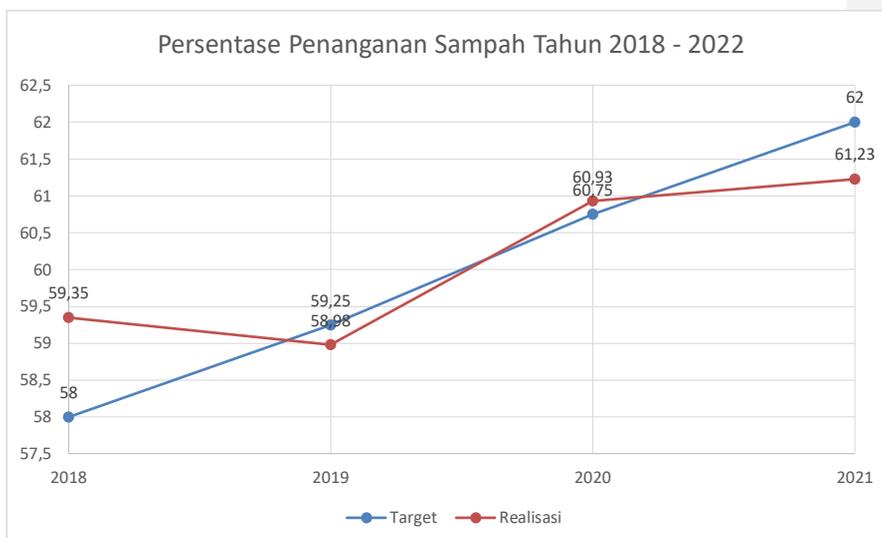
Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2018-2021

Apabila melihat Gambar 2.26. Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2018-2021, trend kinerja pengelolaan sampah Tahun 2018 mengalami kenaikan. Pada



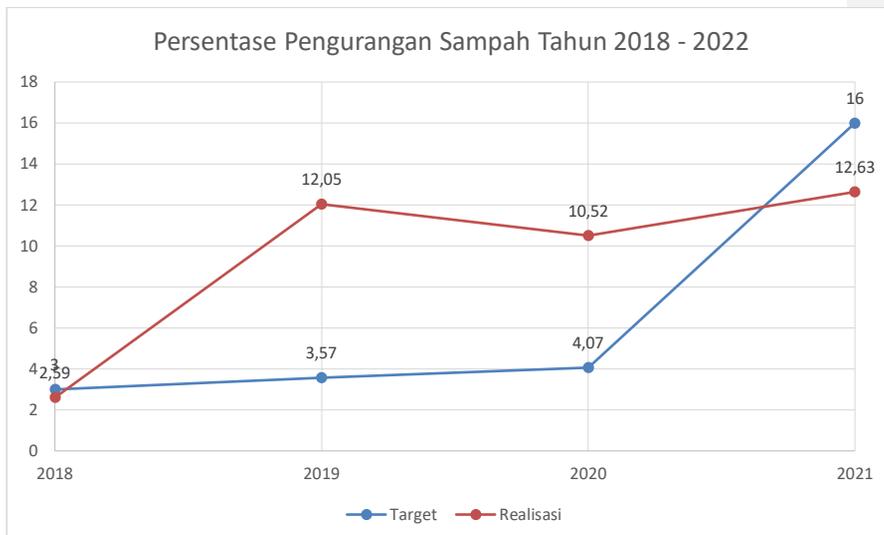
Tahun 2017 capaian pengelolaan sampah sebesar 58,82% dengan capaian pengurangan 2,57% dan penanganan 56,25%, dan di Tahun 2021 pengelolaan sampah mengalami peningkatan 15,04% atau menjadi 73,86%, dan pengurangan sampah mengalami kenaikan sebesar 10,06% menjadi 12,63%. Sedangkan untuk penanganan sampah naik sebesar 4,98% atau menjadi 61,23%.

Apabila membandingkan kenaikan capaian antara penanganan dan pengurangan sampah, maka pengurangan sampah memberikan kontribusi kenaikan sampah secara signifikan dari tahun 2018-2021. Namun jika membandingkan capaian terhadap target kedua komponen tersebut di tahun 2018, 2019 dan 2020 mencapai target, namun setelah dilakukan revisi Renstra dan melakukan perubahan target di tahun 2021 capaian kinerja pengelolaan sampah tidak memenuhi target. Hal tersebut dapat disebabkan di tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19, sehingga mempengaruhi kegiatan pengurangan sampah (terjadi penurunan capaian dari tahun 2019 ke 2020 sebesar -1,53%).



Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Gambar 2.38.  
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2018-2021



Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Gambar 2.39.  
Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2018-2021

Tabel 2.62.  
Sarana Pengangkutan Persampahan Tahun 2021

No.	Jenis	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Dump Truck	6	7	7	20
2	Arm roll		8	4	12
3	Truck Engkel			1	1
4	Pick Up			1	1
5	Motor Roda 3	7	11		18
Jumlah		13	18	13	52

Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Selain sarana pengangkutan sampah, dalam pengelolaan sampah juga diperlukan sarana alat berat. Berikut sarana alat berat yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.63.  
Sarana Alat Berat Persampahan Tahun 2021

No.	Jenis	Kondisi				Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Buldozer D31		1			1
2	Buldozer D39			1		1
3	Buldozer Jondear				1	1
4	Eksavator Liu Gong			1		1



No.	Jenis	Kondisi				Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
5	Eksavator Pindad		1			1
Jumlah			2	2	1	5

Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Kondisi TPA saat ini masih menggunakan open dumping, keterbatasan SDM dan pelaksanaan SOP yang belum maksimal menjadi kendala dalam pelaksanaan operasional TPA. Sesuai dengan sertifikat lahan, luas lahan di TPA, yaitu 6,5 Ha. Namun jika hasil pengukuran mengikuti patok yang ada di TPA yaitu seluas 8 Ha. Permasalahan luas lahan TPA perlu dilegalkan agar kepemilikan lahan TPA jelas luasnya. Selain itu, berdasarkan kajian perluasan TPA, tahun 2017, TPA Ciangir dibutuhkan perluasan 9,9 Ha. Karena seringkali di TPA terdapat pencemaran akibat kegiatan di TPA dan kapasitas TPA sudah melebihi kapasitas. Sampah masuk ke TPA tahun 2021 sebanyak 70.413,33 Ton atau di tahun 2021 sampah masuk 192,91 Ton/hari atau hamper 200 Ton/hari.

Dalam rangka optimalisasi persampahan telah dikembangkan gerakan 3R dengan melalui kegiatan bank sampah di mulai dari tingkat paling rendah yaitu tingkat RW sampai dengan tingkat kecamatan. Pada Tahun 2018 Kota Tasikmalaya memiliki 10 Bank Sampah Unit, di tahun 2018 di bentuk Bank sampah induk di Komlek Bali Wiwitan. Dan pada Tahun 2020 17 bank sampah yang tersebar di setiap kecamatan, dengan rincian 2 Bank Sampah Induk dan 15 Bank Sampah Unit dan di Tahun 2021 Bank Sampah Unit bertambah 1 (satu) menjadi 16 Unit. Berikut rinciannya.

Tabel 2.64.  
Jumlah Bank Sampah di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

Jenis Bank Sampah	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Bank Sampah Induk		1	2	2
Bank Sampah Unit	10	10	15	16
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>18</b>

Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

#### 2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2018-2020 adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.65.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Rasio penduduk berkTP per satuan penduduk (%)	%	96	98,43	96,50	99,47	97	98,77	97,5	101,1
2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	%	60	78,43	65,00	99,6	70	96,89	75	101,6
3	Jumlah pasangan yang membuat akte nikah non muslim (buah)	Lembar	178	261	190,00	331	200	400	210	471
4	Kepemilikan KTP (orang)	Orang	477.099	510.564	486.641	636.570	501.338	654.423	506.351	538.841
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (per 1.000)	Poin	373,2	317,3	385,70	226,108	410,7	398,59	373,2	410,3
6	Ketersediaan database kependudukan skala kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
8	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik
9	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	75	88,43	76,00	97,94	76	97,94	77	87,04
10	Persentase Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil	%	65	78,43	66,00	99,80	67	98,45	68	100,8
11	Persentase Akurasi Database Kependudukan	%	-	82,29	80	91,16	85	99,6	90	100,8
12	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	20	27,32	40	100	60	100	80	100
13	Persentase Penerbitan Akte Pencatatan Sipil	%	20	21,34	40	100	60	100	80	100
14	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	20	20	40	100	60	100	80	100
15	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kependudukan	%	20	20	40	40,00	60	100	80	100
16	Persentase Kerjasama Administrasi Kependudukan	%	0	2	25	66,67	75	100	100	100
17	Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	-	2	25	100	75	100	100	100
18	Persentase Lembaga Pemanfaat Data Kependudukan	%	-	2	2597	100	75	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022.

Salahsatu pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan KTP- elektronik. Sampai dengan tahun 2020 jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik adalah sebagai berikut:



Tabel 2.66.  
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-Elektronik Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Wajib KTP	Perekaman	Belum Perekaman
		L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cihideung	36.871	36.497	73.368	54.771	52.558	2.213
2	Cipedes	41.928	40.591	82.619	61.112	59.077	2.035
3	Tawang	31.858	32.029	63.887	48.533	46.378	2.155
4	Indihiang	29.108	28.500	57.608	42.509	41.063	1.446
5	Kawalu	50.234	47.618	97.852	71.112	69.082	2.030
6	Cibeureum	34.630	33.926	68.556	51.313	49.388	1.925
7	Tamansari	39.255	37.441	76.696	55.373	54.117	1.256
8	Mangkubumi	49.404	48.024	97.428	71.024	68.762	2.262
9	Bungursari	30.113	29.065	59.178	42.791	41.188	1.603
10	Purbaratu	23.290	22.272	45.562	33.658	32.949	709
<b>JUMLAH</b>		<b>365.766</b>	<b>366.691</b>	<b>356.063</b>	<b>722.754</b>	<b>514.562</b>	<b>17.634</b>

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kota Tasikmalaya Semester II Tahun 2021, 2021.

### 2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 2.67.  
Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga	Buah	69	69	69	69
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Buah	308	308	308	276
3	Jumlah LSM (buah)	Buah	218	218	218	218
4	LPM Berprestasi	Persen	50	50	-	-
5	PKK aktif	Persen	100	100	100	100
6	Posyandu aktif	Unit	819	864	-	-
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	30	-	-	-
8	Penerima Manfaat dari Program Gema Madani :					
	a. Bidang Infrastruktur	Kelompok/Paket	-	-	-	413
	b. Bidang Ekonomi	Orang	-	-	-	1.664
	c. Bidang Sosial	Orang	-	-	-	5.227

Sumber : Bappelitbangda, Diolah, 2022

Adapun untuk capaian indikator urusan pemberdayaan masyarakat tahun 2018 – 2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.68.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat  
Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	100	100

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Setda Kota Tasikmalaya

#### 2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salahsatunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan penengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.69.  
Pelayanan Umum Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2018 - 2021

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Cakupan Layanan Keluarga Berencana	%	65	72,34	66	72,37	66	72,36	67	63,60
2	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	%	65	72,34	66	72,37	72,50	72,36	67	72,37
3	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun	%	1	1,26	1	1,17	1	1,22	1	0,60
4	Persentase Peran serta masyarakat dlm pembangunan kesejahteraan keluarga	%	100	100	100	75,60	100	100	100	100
5	Cakupan data mikro keluarga yang akurat	%	100	100	100	100	100	100	100	96

Sumber : DPPKB3A Kota Tasikmalaya, 2022.

#### 2.1.3.2.9. Perhubungan

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarannya.



Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perhubungan  
Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota	%	65,49	62,59	66,75	69,84	47,25	65,06	-*	-*
2	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	%	52,76	51,73	63,45	70,98	74,23	88,21	-*	-*
3	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan sesuai yang ditargetkan	%	20	24	40	48,00	60	92	-*	-*
4	Cakupan terlayani angkutan umum	%	85,81	79,46	86,90	90,54	88,45	84,41	-*	-*
5	Cakupan Manajemen Angkutan	%	-*	79,71	84,06	85,51	86,96	85,51	-*	-*
6	Cakupan Bina Usaha Angkutan	%	-*	112,19	83,72	121,78	83,92	82,12	-*	-*
7	Cakupan Sarana dan Prasarana Angkutan	%	-*	107,69	92,91	105,06	94,49	85,62	-*	-*
8	Penurunan waktu antrian kendaraan pada jaringan jalan pusat kota	LoS	0	0,3	0,123	0,3	0,212	0,3	-*	-*
9	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas dan bersinergi dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di pusat kota	%	-*	-*	75	91,67	83,33	91,67	-*	-*
10	Capaian kualitas layanan lalu lintas pada ruas jalan pusat kota	%	-*	-*	75	91,67	83,33	91,67	-*	-*
11	Persentase kenyamanan berlalulintas dan angkutan umum	%	-**	-**	-**	-**	-**	-**	82,34	88,03
12	Persentase ruas jalan yang memenuhi	%	-**	-**	-**	-**	-**	-**	50	53,57



No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	standar keselamatan									
13	Persentase pelayanan andalin	%	..*	..*	..*	..*	..*	..*	100	160
14	Persentase pemenuhan standar keselamatan angkutan	%	..*	..*	..*	..*	..*	..*	95,25	76,7
15	Persentase Pelayanan angkutan umum	%	..*	..*	..*	..*	..*	..*	84,12	61,84

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2022.

Dari data pada tabel 2.70. secara umum, capaian indikator pelayanan urusan perhubungan meningkat dalam kurun waktu 2018 – 2021. Walaupun terdapat beberapa yang mengalami penurunan, seperti persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota, Cakupan terlayani angkutan umum, Cakupan Bina Usaha Angkutan dan Cakupan Sarana dan Prasarana Angkutan.

Capaian persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota merupakan Realisasi ruas jalan memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan sesuai SK.541.3/Kep.136-DIPUPR/2017 dengan tingkat layanan angkutan umum. Tampak pada tabel 2.48, data sampai dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan yang cukup berarti pada kinerja layanan angkutan umum, meliputi cakupan terlayani angkutan umum yang turun dari 104,11 menjadi 84,41%, kemudian cakupan bina usaha angkutan turun dari 121,78% menjadi 82,12% dan cakupan sarana dan prasarana angkutan turun dari 105,06% menjadi 85,62%. Dengan demikian, persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan turun dari 69,84% menjadi 65,06%.

Tidak tercapainya indikator di bidang angkutan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dengan adanya pandemi covid-19, kegiatan pengendalian penyebaran pandemi covid-19 dan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun yang mana dampak lanjutannya mempengaruhi terhadap capaian indikator di bidang angkutan. Capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh :

1. Menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi, berdampak terhadap disiplin pemilik/awak angkutan kota untuk memperpanjang ijin trayek;
2. Eksistensi kendaraan angkutan penumpang berbasis online/ojol;
3. Terdapat kegiatan yang mendukung secara langsung terhadap capaian di bidang angkutan tidak dilaksanakan mengingat kegiatan tidak memungkinkan dilaksanakan pada situasi masa pandemi.



Adapun untuk tahun 2021, peningkatan capaian indikator pelayanan urusan perhubungan digambarkan oleh peningkatan hasil pembangunan urusan perhubungan selama kurun waktu tahun 2017-2021 sebagaimana disajikan pada tabel 2.71, sebagai berikut :

Tabel 2.71.  
Pembangunan Urusan Perhubungan  
Dari Tahun 2018-2021

No.	Uraian	Satuan	Capaian Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rambu terpasang	Unit	1.867	1.877	2002	2006
2	Jumlah Marka Jalan terpasang	M <sup>2</sup>	1.571,2	1.571,2	3.051,2	3.622,2
3	Jumlah Traffic light terpasang	Lokasi	19	20	21	21
4	Jumlah Warning Light terpasang	Lokasi	48	49	49	49
5	Jumlah PJU terpasang	Unit	8.900	9.749	10.099	11.030
6	Jumlah Halte/shelter terbangun	Unit	27*	33	33	33
7	Jumlah Guardrail terbangun	m <sup>2</sup>	261	261	261	261
8	Jumlah ATCS terpasang	Unit	19	23	24	24
9	Jumlah Terminal terbangun	Buah	4	5	5	5

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2022.

Keterangan : \*Pembongkaran

Tabel 2.72.  
Kondisi Rambu-Rambu Lalu Lintas  
Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan	Terpasang	2020		2021		
				Kondisi		Terpasang	Kondisi	
				Baik	Rusak		Baik	Rusak
1	Jalan Nasional	230	175	120	55	175	120	55
2	Jalan Provinsi	726	256	135	121	256	135	121
3	Jalan Kota	1.750	1.571	787	784	1.575	791	784
Jumlah		2.706	2.002	1.042	960	2.006	1.046	960

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022.

Berdasarkan hasil survey, di Kota Tasikmalaya perlu dipasang rambu-rambu lalu lintas sebanyak 2.706 unit. Saat ini telah terpasang sebanyak 2.006 unit di lokasi jalan Nasional, Provinsi dan Kota, dimana 1.046 unit kondisi baik, 960 unit kondisi rusak. Dengan demikian, rambu-rambu lalu lintas yang belum terpasang sebanyak 700 unit dan 960 diperlukan perbaikan/penggantian.



Tabel 2.73.  
Marka Jalan Menurut Kondisinya Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (m <sup>2</sup> )	Terpasang (m <sup>2</sup> )	2020			Terpasang (m <sup>2</sup> )	2021		
				Kondisi				Kondisi		
				Baik (%)	Sedang (%)	Pudar (%)		Baik (%)	Sedang (%)	Pudar (%)
1	Jalan Nasional	947,2	807	50	20	30	807	50	20	30
2	Jalan Provinsi	3.654,1	1.543	30	40	30	1.543	30	40	30
3	Jalan Kota	4.022,29	701,2	60	20	20	1.272,2	85	20	20
Jumlah		8.623,59	3.051,2				3.622,2			

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Kota Tasikmalaya telah membuat marka jalan sepanjang 3.622,2 meter persegi. Marka jalan dalam kondisi baik sebagian besar terletak di Jalan Kota sebanyak 85% dalam kondisi baik, sedangkan kondisi marka yang pudar terletak disekitar jalan nasional dan provinsi sebesar 30%. Kebutuhan marka jalan yang harus dibuat sebesar 8.623,59 meter persegi yang tersebar di jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, sehingga kekurangan pembangunan marka sepanjang 5.001,39 m<sup>2</sup>.

Tabel 2.74.  
Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kondisinya Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (unit)	2020		2021	
			Terpasang (unit)	Berfungsi (unit)	Terpasang (unit)	Berfungsi (unit)
1	Jalan Nasional	552	240	232	240	232
2	Jalan Provinsi	1.844	641	417	676	452
3	Jalan Kota	11.604	9.218	8.870	10.114	10.087
Jumlah		14.000	10.099	10.519	11.030	10.771

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Jumlah PJU dibutuhkan di Kota Tasikmalaya sebanyak 14.000 unit untuk jalan Nasional, Provinsi dan Kota. Adapun PJU yang terpasang sampai dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 11.030 unit, dengan 97,65% (10.771 unit) berfungsi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, masih dibutuhkan pemasangan PJU sebanyak 2.970 unit.



Tabel 2.75.  
Fasilitas Penyebrangan (Zebra Cross) Menurut Kondisinya

No	Fasilitas	2020			2021	
		Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)	Berfungsi (buah)	Terpasang (buah)	Berfungsi (buah)
1	Jalan Nasional	30	19	Baik	20	Baik
2	Jalan Provinsi	70	43	Baik	46	Baik
3	Jalan Kota	120	81	Baik	86	Baik
Jumlah		220	143	Baik	152	Baik

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Berdasarkan hasil survey, di Kota Tasikmalaya dibutuhkan 220 buah, dan telah terpasang sampai tahun 2021 yaitu 152 buah dengan kondisi baik, sehingga masih perlu dilakukan pemasangan Zebra Cross sebanyak 68 buah.

Tabel 2.76.  
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Menurut Kondisinya Tahun 2021

No	Jenis lokasi	Dibutuhkan (buah)	2020			2021		
			Terpasang (buah)	Kondisi (buah)		Terpasang (buah)	Kondisi (buah)	
				Berfungsi	Tidak		Berfungsi	Tidak
1	Jalan Nasional	8	6	6	-	6	6	
2	Jalan Provinsi	7	4	4	-	4	4	
3	Jalan Kota	12	8	7	1	8	7	1
Jumlah		27	18	17	1	18	17	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2021

Berdasarkan kebutuhan ruas jalan yang berada di Kota Tasikmalaya, diperlukan 27 buah alat pemberi isyarat lalu lintas. Yang telah terpasang sebanyak 18 unit dengan kondisi 17 berfungsi dan 1 tidak berfungsi. Masih terdapat selisih kebutuhan alat pemberi isyarat yaitu sebanyak 9 buah

Tabel 2.77.  
Guard Rail (Pagar Pengaman) Menurut Kondisinya Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (meter)	Tahun	
			2020	2021
1	Jalan Nasional	-	-	0
2	Jalan Provinsi	700	200	200
3	Jalan Kota	300	61	61
Jumlah		1.000	261	261

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022



Tabel 2.78.  
Cermin Tikungan Menurut Kondisinya Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (buah)	Tahun	
			2020	2021
1	Jalan Nasional	4	-	0
2	Jalan Provinsi	6	-	0
3	Jalan Kota	20	2	2
Jumlah		30	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Berdasarkan kebutuhan untuk keselamatan jalan, fasilitas cermin tikungan sebanyak 30 buah, yang terpasang baru 2 buah. Sehingga masih diperlukan pemasangan cermin tikungan sebanyak 28 buah.

Tabel 2.79  
Pita Pengaduh Menurut Kondisinya Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)	
			2020	2021
1	Jalan Nasional	10	6	6
2	Jalan Provinsi	8	4	4
3	Jalan Kota	25	12	12
Jumlah		43	22	22

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Fasilitas perparkiran menurut jenis dan kondisinya sampai dengan tahun 2021 Ruang Parkir pada badan jalan direncanakan 8,8 KM dan telah digunakan 7,825 Km. Sehingga hampir keseluruhan telah digunakan (92,06%).

Tabel 2.80.  
Ruang Parkir Pada Badan Jalan  
Tahun 2021

No	Lokasi	Jml Ruas	Panjang jalan yg terdapat rambu parkir (Km)		Panjang jalan yg digunakan parkir (Km)	
			2020	2021	2020	2021
1	Jalan Nasional	-	-	-	-	-
2	Jalan Provinsi	1	-	-	0,25	0,25
3	Jalan Kota	33	8,8	8,8	7,8	7,8
Jumlah		34	8,8	8,8	7,825	7,825

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022.

Prasarana terminal angkutan penumpang pada tahun 2021\_disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.81.  
Terminal Angkutan Penumpang  
Tahun 2021

No.	Nama Terminal	Tipe	Luas (Ha)	Instansi Pengelola
1.	Terminal Indihiang	A	7,50	Kementerian PHB
2.	Terminal Pancasila	C	0,30	Dishub
3.	Terminal Padayungan	C	0,23	Dishub
4.	Terminal Cikurubuk	C	0,29	Dishub
5.	Terminal Awipari	C	1,49	Dishub

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Kota Tasikmalaya memiliki 5 terminal, 1 terminal tipe A, dan 4 terminal tipe C. Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018 - 2022, direncanakan akan dibangun terminal tipe C Batunungku. Namun sampai dengan tahun 2021 pembangunan terminal Batunungku baru terealisasi 20%.

Untuk pelayanan angkutan penumpang umum khususnya angkutan kota pada tahun 2021 terdapat 16 Tempat Pemberhentian Kendaraan (TPK) yang tersebar berdasarkan jalur/ trayek angkutan kota yaitu :

1. TPK Nyantong
2. TPK Muncang
3. TPK Cikadongdong
4. TPK Leuwidahu
5. TPK Karangresik
6. TPK Cigeureung
7. TPK Gegermoong
8. TPK Cipeusar
9. TPK Awiluar
10. TPK Gobang
11. TPK Cibunigeulis
12. TPK Asta
13. TPK Pamipiran
14. TPK Bumi Resik Panglayungan
15. TPK Sindang Galih
16. TPK Perum Kota Baru

Selain hal-hal yang telah diuraikan, Dinas Perhubungan bertugas pula untuk menguji kendaraan umum bermotor. Berikut realisasi jumlah kendaraan bermotor yang diuji pada rentang tahun 2018-2020.

Sehubungan dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas kendaraan umum untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan kebijakan program Zero ODOL (*Over Dimension Over Load*) Kendaraan Angkutan Barang dari Kementerian Perhubungan R.I, maka realisasi wajib uji dan kendaraan uji lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun rincian data ditampilkan pada tabel 2.83.



Tabel 2.82.  
Data Kendaraan Wajib Uji Tahun 2021

TAHUN	MOBIL BARANG						KERETA GANDENGAN		KERETA TEMPELAN		MOBIL BUS		KHUSUS		MOBIL PENUMPANG		TOTAL
	KECIL		SEDANG		BESAR												
	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	
2020	2240	6300	1564	2411	379	222	0	5	27	182	2196	234	72	39	218	18	16107
2021	2375	5990	1440	2277	380	194	2	4	33	191	1938	222	60	29	188	16	15339

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Tabel 2.83.  
Realiasi Kegiatan Ijin Trayek Aktif dan Jumlah Kendaraan Lulus uji  
Dinas Perhubungan 2018-2021

No.	Uraian	Satuan	Capaian Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Ijin trayek aktif	Unit	1.123	1.219	794	616
2	Jumlah kendaraan lulus uji	Unit	20.515	20.013	16.310	15.339

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

Lebih lanjut, Tabel 2.86 menunjukkan data adanya penurunan jumlah angkutan yang melaksanakan perpanjangan ijin trayek dan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Tabel 2.84.  
Data Trayek Angkutan Kota  
Tahun 2021

No	No/ kode trayek	Panjang trayek (km)	2020					2021				
			Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum Status					Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum Status				
			Alokasi	Realisasi	Aktif	Non Aktif	Sisa	Alokasi	Realisasi	Aktif	Non Aktif	Sisa
1	01	27	91	91	89	2	0	91	91	49	42	0
2	02	16	52	49	31	18	3	52	49	10	39	3
3	03	19,5	125	123	91	32	2	125	122	50	72	3
4	04	23	100	92	90	2	8	100	92	53	39	8
5	05	23,5	150	141	122	19	9	150	141	59	82	9
6	06	23	33	22	18	4	11	33	21	14	7	12
7	07	23	70	63	46	17	7	70	63	32	31	7
8	08	23	70	59	32	27	11	70	60	11	49	10
9	09	25	56	27	22	5	29	56	27	11	16	29
10	09 A	30	35	31	30	1	4	35	32	21	11	3
11	010	34,5	71	67	37	30	4	71	67	31	36	4
12	011	16	19	19	17	2	0	19	19	10	9	0
13	012	15	28	23	17	6	5	28	23	15	8	5
14	012 A	20	4	2	1	1	2	4	2	0	2	2



No	No/ kode trayek	Panjang trayek (km)	2020					2021				
			Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum					Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum				
			Alokasi	Realisasi	Status		Sisa	Alokasi	Realisasi	Status		Sisa
				Aktif	Non Aktif				Aktif	Non Aktif		
15	013	26	50	47	41	6	3	50	47	20	27	3
16	014	33	20	16	11	5	4	20	16	9	7	4
17	015	44	35	31	19	12	4	35	31	11	20	4
18	016	28	35	21	12	9	14	35	21	7	14	14
19	017	13	35	35	32	3	0	35	35	23	12	0
20	018	19,5	40	25	22	3	15	40	25	12	13	15
21	019	28	19	18	14	4	1	19	18	8	10	1
<b>Jumlah</b>			<b>1.138</b>	<b>1.002</b>	<b>794</b>	<b>208</b>	<b>136</b>	<b>1.138</b>	<b>1.002</b>	<b>456</b>	<b>546</b>	<b>136</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022

### 2.1.3.2.10. Komunikasi & Informatika

Pelaksanaan pelayanan umum urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Capaian pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2018 – 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
1	Jumlah jaringan komunikasi	Unit	209	107	300	300	-*	-*	-*	-*
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	100	100	100	100	100	100	-*	-*
4	Web site milik pemerintah daerah (ada/tidak)	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-*	-*
5	Capaian Implementasi E-Government	%	25	25	35	N/A	-*	-*	-*	-*
6	Capaian penyebarluasan informasi dan komunikasi publik	%	15	20	20	33	30	37,5	40	41,68
7	Persentase pelayanan informasi/ dokumentasi dan pengaduan	%	50	45	60	100	70	100	80	100
8	Capaian pembangunan infrastruktur TIK terhadap target	%	50	54	60	65	70	94,5	-*	-*
9	Capaian implementasi smart city	%	10	10	17	46	24	62,66	-*	-*



No.	Indikator	Satuan	Realisasi							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
10	Rasio ketersediaan tenaga TIK terhadap kebutuhan	%	10	8	25	38	50	88	.*	.*
11	Persentase penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	.*	.*
12	Persentase pengelolaan saluran informasi	%	.**	.**	.**	.**	.**	.**	100	100
14	Persentase domain dan sub domain yang dikelola	%	.**	.**	.**	.**	.**	.**	100	100
15	Capaian Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Predikat	.**	.**	.**	.**	.**	.**	2,7	(Baik) 2,68
16	Jumlah titik jaringan intranet Pemerintah Daerah	Node	.**	.**	.**	.**	.**	.**	400	400
17	Persentase penataan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	.**	.**	.**	.**	.**	.**	100	100
18	Capaian Pengelolaan Pusat Data	Tier	.**	.**	.**	.**	.**	.**	1	1
19	Jumlah sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah	Sistem	.**	.**	.**	.**	.**	.**	2	2
20	Jumlah data dan informasi elektronik	Unit	.**	.**	.**	.**	.**	.**	1	1
21	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	.**	.**	.**	.**	.**	.**	2	2
22	Jumlah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem	.**	.**	.**	.**	.**	.**	7	7
23	Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang dikelola	Paket	.**	.**	.**	.**	.**	.**	3	3
24	Capaian Government Chief Information Officer (GCIO)	Level	.**	.**	.**	.**	.**	.**	1	1

Ket : \*\* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022.

#### Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)

Sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2013 membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya. Memasuki perjalanan Tahun ke dua pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pada saat itu masih



tergabung pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) mendapatkan penghargaan dalam acara Koinfo Award sebagai juara ke-3 dari 27 pemerintahan kota dan kabupaten di Jawa Barat dalam katagori badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi publik terlengkap sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan

Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ini menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya bersungguh – sungguh dalam melaksanakan UU KIP. Penetapan Kebijakan PPID Pemerintah Kota Tasikmalaya di dukung dengan ditetapkannya peraturan Wali Kota Tasikmalaya yaitu peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 31 tahun 2013 tentang pedoman tata kerja pengelolaan informasi dan dokumentasi, perwal ini sebagai dasar operasional PPID Badan Publik di Kota Tasikmalaya, Selanjutnya Wali Kota Tasikmalaya membentuk kelembagaan PPID melalui Keputusan Keputusan Wali Kota Nomor 550/kep.119-Kominfo/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Tasikmalaya, pada tahun 2018 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku PPID Utama untuk memperlancar kegiatan PPID di kota Tasikmalaya mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 480/13/Sekretariat/2018 tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik.

Pelayanan informasi dilaksanakan melalui website <http://ppid.tasikmalayakota.go.id>, Help desk/layanan langsung/frontdesk, dan Melalui telepon dan email.

Secara operasional PPID Pemerintah Kota Tasikmalaya didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Badan Publik/ SKPD lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural yang terdiri dari :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama;
2. Perangkat Daerah sebagai PPID pembantu.

Pelayanan kebutuhan informasi publik dapat diakses melalui :

1. Layanan via website PPID Utama Pemerintah Daerah Kota Tasikmlaya melalui <http://tasikmalaya.go.id>;
2. Layanan langsung melalui help desk/ front desk yang beralamat di Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Kota Tasikmalaya;
3. Alyanan melalui telpon dan email, dengan menghubungi nomor telpon (0265) 7523616 dan email dengan alamat [ppid@tasikmalayakota.go.id](mailto:ppid@tasikmalayakota.go.id)

Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID mau dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang terdiri dari Pembina sampai pada Pejabat Fungsional.



Pada tahun 2019 Permohonan Informasi Publik sebanyak 4 permohonan dengan rincian 2 permohonan di kabulkan dan 2 permohonan ditolak. Sedangkan pada tahun 2020 permohonan informasi public sebanyak 2 permohonan dan keduanya ditidak dikabulkan.

Pada tahun 2021 terdapat permohona indormasi publik dari masyarakat yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.86.  
Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan tidak dikabulkan atau ditolak	Jumlah
2021	11	2	2	15

Hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Kabupaten/ Kota se Jawa Barat Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bahwa Kota Tasikmalaya meraih kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/ Kota yang informatif.

#### 2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Tasikmalaya baik dari jumlah koperasi dan pelaku usaha mikro kecil maupun peredaran uang di sektor ini. Berikut adalah keragaan koperasi di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.87.  
Keragaman Koperasi di Kota Tasikmalaya tahun 2021

No.	Nama Koperasi	Jml	Koperasi		RAT	Jumlah (orang)				
			Aktif	Tdk Aktif		Anggota	Pengurus	Pengawas	Karyawan	Manajer
I	Koperasi Unit Desa (KUD)	9	9	-	4	4.485	26	19	19	-
II	Koperasi Serba Usaha	105	60	45	17	9.400	335	273	164	8
III	Kop. Pondok Pesantren	45	12	33	3	6.113	146	125	11	1
IV	Koperasi Simpan Pinjam									
	4.1 KSP	94	78	16	40	20.281	305	239	173	15
	4.2 KBMT	33	12	21	3	6.153	103	91	68	7
V	Koperasi Konsumsi									
	5.1 KPRI	50	35	15	11	8.817	172	133	49	4



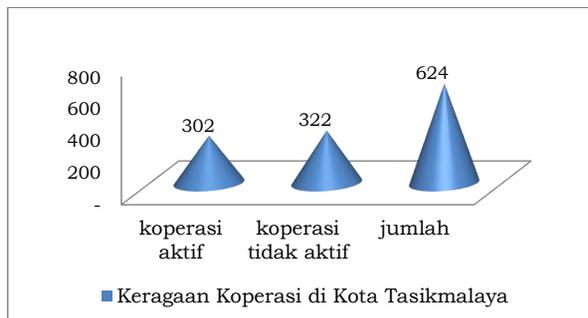
No.	Nama Koperasi	Jml	Koperasi		RAT	Jumlah (orang)				
			Aktif	Tdk Aktif		Anggota	Pengurus	Pengawas	Karyawan	Manajer
5.2	KOPKAR	39	18	21	8	5.143	118	99	28	9
5.3	Koperasi Angkatan Darat	2	2	-	1	1.640	10	6	8	-
5.4	Koperasi Angkatan Udara	1	1	-	1	171	4	2	3	-
5.5	Koperasi Kepolisian	1	1	-	1	897	3	3	2	-
5.6	Koperasi Wanita	10	6	4	2	1.320	32	24	7	1
5.7	Koperasi Wredatama	6	1	5	-	486	17	17	3	1
5.8	Koperasi Mahasiswa/Pemuda	2	1	1	-	759	8	6	-	1
5.9	Koperasi Lainnya									
5.9.1	Koperasi Warga	102	23	79	5	7.251	285	258	38	2
5.9.2	POKMAS	41	4	37	1	3.183	127	114	18	-
5.9.3	PEPABRI	1	1	-	1	436	4	3	3	-
5.9.4	Kop. Veteran	1	1	-	1	1.228	4	2	1	-
VI	Koperasi Produksi									
6.1	KOPINKRA / INKRA	26	6	20	2	1.347	81	69	20	-
6.2	Koperasi Pertanian	9	1	8	-	637	27	27	3	-
VII	Koperasi Pemasaran									
7.1	Koperasi Pasar	16	8	8	-	1.681	44	35	10	-
VIII	Koperasi Profesi	2	1	1	-	75	6	6	5	-
IX	Koperasi Sekunder	6	3	3	2	15.458	19	18	10	-
X	Koperasi Produsen	5	5	-	-	127	19	15	2	-
XI	Koperasi Konsumen	18	13	5	7	1.826	60	45	7	2
	Jumlah Total	624	302	322	110	99.013	1.955	1.628	651	51

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2021.

Sampai dengan tahun 2021 jumlah koperasi di Kota Tasikmalaya sebanyak 624 buah koperasi dengan Jumlah anggota koperasi sebanyak 99.013 orang, angka ini bertambah dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 98.903 orang. Modal yang telah terhimpun pada tahun 2021 yang merupakan modal sendiri sebanyak Rp.218,603 milyar, dan berhasil mendapat modal dari luar sebanyak Rp.160,538 milyar. Sementara volume usaha koperasi ini berjumlah Rp.274,493 milyar dengan total aset Rp.379,062 milyar. Secara umum, angka-angka di atas meningkat dari tahun sebelumnya, kecuali modal sendiri yang mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya Rp. 220,459 milyar pada tahun 2020.

Dari seluruh koperasi yang berjumlah 624 pada tahun 2021, hanya 302 unit koperasi yang merupakan koperasi aktif (48%), sisanya sebanyak 322 koperasi merupakan koperasi tidak aktif. Kondisi koperasi di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

1.



Gambar 2.40.  
Keragaman Koperasi di Kota Tasikmalaya

Sejak bulan Mei 2015, Kementerian Koperasi UKM memberlakukan Nomor Induk Koperasi (NIK) kepada Koperasi Aktif seluruh Indonesia. Dari 302 koperasi aktif pada tahun 2021 baru 192 koperasi (63,58%) yang telah berserifikat NIK dengan sebaran sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.88.  
Data Koperasi Bersertifikat NIK Per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Indihiang	18
2	Bungursari	15
3	Mangkubumi	14
4	Cihideung	28
5	Cipedes	18
6	Tawang	38
7	Kawalu	17
8	Tamansari	15
9	Cibeureum	20
10	Purbaratu	9
	Jumlah	192

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022

Usaha ekonomi produktif di Kota Tasikmalaya didominasi oleh jenis usaha mikro. Pada tahun 2021 jumlah usaha mikro di Kota Tasikmalaya yang sudah mendapatkan perizinan mencapai 9.770 pelaku usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.89.  
Jumlah Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya  
Berdasarkan Izin Usaha yang Dikeluarkan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah UKM (Unit Usaha)
1	Bungursari	701
2	Cibeureum	548
3	Cihideung	1.432
4	Cipedes	1.551
5	Indihiang	763
6	Kawalu	1.455
7	Mangkubumi	1.130



No.	Kecamatan	Jumlah UKM (Unit Usaha)
8	Purbaratu	289
9	Tamansari	15
10	Tawang	1.132
11	Lain-lain (Luar Kota)	754
	<b>Total</b>	<b>9.770</b>

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022

Adapun pencapaian kinerja pelayanan umum urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana pada table berikut:

Tabel 2.90.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Indikator	Satuan	Realisasi							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase koperasi sehat	%	4	3,14	2	8,45	2	8	24	23,00
2	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	%	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
3	Persentase usaha mikro yang bersertifikat	%	2	4,13	2	4,39	2	0,97	2	17,00
4	Jumlah Koperasi yang dibina	Buah	190	270	550	622	550	90	550	182
5	Jumlah usaha mikro yang terakses dukungan usaha	Buah	836	846	150	947	650	250	150	1.695
6	Persentase wirausaha baru yang dibina	%	100	82	100	88,5	-	25	-	-
7	Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina	%	100	100	100	200	100	25	100	100
8	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	%	.*	.*	.*	.*	.*	.*	100	100
9	Persentase koperasi aktif yang diawasi dan diperiksa	%	.*	.*	.*	.*	.*	.*	13,51	36,42
10	Persentase Bina Koperasi yang berkompeten	%	.*	.*	.*	.*	.*	.*	33	40,00
11	Persentase koperasi aktif yang dibina	%	.*	.*	.*	.*	.*	.*	100	60,26
12	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	.*	.*	.*	.*	.*	.*	65	74,50
13	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor jasa	Orang	.*	.*	.*	.*	.*	.*	100	100

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.

#### 2.1.3.2.12. Penanaman modal

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Berikut capaian pelayanan urusan penanaman modal.



Tabel 2.91.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Penanaman Modal  
Tahun 2018 - 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	M/Rp	500	520	550	1.223	200	422,6	250	1.630
2	Capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP	%	24	80,87	39	100	100	100	67	100
3	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-*	-*
4	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya		-*	-*	-*	-*	-*	-*	50	0
5	Persentase pelayanan perijinan sesuai standar pelayanan	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	100	100
6	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	5	26,4
7	Persentase pengelolaan basis data potensi investasi sesuai SOP	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	100	100
8	Persentase pengelolaan perijinan sesuai SOP	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*	100	100

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : DPMPTSP Kota Tasikmalaya, 2022.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki regulasi terkait kemudahan penanaman modal yaitu dengan telah terbitnya Perda Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Dalam meningkatkan investasi atau penanaman modal perlu dukungan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian yang memadai. Langkah lainnya untuk meningkatkan investasi di Kota Tasikmalaya, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya, karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan laju perekonomian sekaligus pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Berdasarkan hal ini di Kota Tasikmalaya terdapat kawasan yang strategis dari sudut perekonomian seperti kawasan perdagangan, hotel dan restoran di pusat kota, Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan, Kawasan Minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari, dan Kawasan Pendidikan Terpadu di Kecamatan Tamansari.

#### 2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan pelayanan umum urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.92.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Organisasi pemuda terbina	%	40	42	42	57,14	_*	_*	_*	_*
2	Persentase peran serta organisasi kepemudaan yang dibina	%	22	23	24	46,15	_*	_*	_*	_*
3	Persentase Pembinaan Cabor yang berprestasi propinsi	%	71	81	79	83,33	_*	_*	_*	_*
4	Persentase peningkatan sarpras Olahraga	%	0	52	54	58,33	_*	_*	_*	_*
5	Persentase OKP yang dibina	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	28	28,57
6	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	75	60

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

\_\* Indikator Lama

\_\*\* Indikator Baru

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kota Tasikmalaya berjumlah 91 (sembilan puluh satu) OKP dan yang telah dibina pada tahun 2021 sebanyak 26 (dua puluh enam) OKP, sedangkan OKP yang berprestasi sebanyak 3 (tiga) OKP.

Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi pada tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) cabang olahraga, tingkat nasional 7 (tujuh) cabang olahraga, dan internasional 3 (tiga) cabang olahraga, yakni taekwondo, silat serta wushu. Data perolehan medali pada cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi, nasional, dan internasional tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.



Gambar 2.41  
Perolehan Medali Cabang Olahraga Beprestasi  
Kota Tasikmalaya Tahun 2021

**2.1.3.2.14. Statistik**

Pelaksanaan urusan stasistik di Kota Tasikmalaya dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.93.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Statistik

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
1	Persentase data dan informasi statistik sektoral	%	_*	_*	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pengelolaan basis data/Informasi dan statistik terpadu	%	_*	_*	100	100	100	100	100	100

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021.

Impelementasi optimalisasi dalam pengelolaan data statistik telah dibangun Open Data Kota Tasikmalaya yang dapat diakses oleh masyarakat secara online melalui media sosial.

**2.1.3.2.15. Persandian**

Pelaksanaan urusan persandian di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Urusan persandian ini berkaitan dengan keamanan informasi kedinasan.

Tabel 2.94.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Statistik

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	15	10	20	20	_*	_*	_*	_*
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	15	10	20	21	_*	_*	_*	_*
3	Persentase Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**	50	33,33



No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4	Jumlah Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Area	_*	_*	_*	_*	_*	_*	8	N/A
5	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan/Perwal	_*	_*	_*	_*	_*	_*	2	N/A
6	Jumlah Jenis Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jenis	_*	_*	_*	_*	_*	_*	3	N/A
7	Persentase jumlah Insiden Kemanan Informasi yang tertangani	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022.

\_\* Target Lama

\_\*\_\* Target Baru

### 2.1.3.2.16. Kebudayaan

Capaian pelaksanaan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95.

Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kebudayaan Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah	%	65	63	70	65,22	_*	_*	_*	_*
2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	30	41	40	64	_*	_*	_*	_*
3	Persentase pembinaan dan pengembangan terhadap grup kesenian	%	0	61	20	28,90	_*	_*	_*	_*
4	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	57	57,97
5	Persentase pembinaan dan pengembangan seni budaya	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	20	20,23
6	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	50	50
7	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	34	35,38

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

\_\* Indikator Lama

\_\*\_\* Indikator Baru

Sebagai upaya perlindungan cagar budaya dan seni di Kota Taikmalaya telah dilaksanakan pelestarian dengan capaian sebagai berikut.



Tabel 2.96.

Data Cagar Budaya dan Kelompok Seni Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Uraian	Satuan	2020	2021
1	Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan	buah	65	65
2	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	buah	17	23
3	Jumlah Grup Kesenian Yang Dibina	buah	53	35

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

Tabel 2.97.

Data Cagar Budaya Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Nama Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya	Alamat	No dan tanggal Surat Keputusan/Ketetapan Sebagai Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya
1	Tugu Peta	Jl. Veteran	PO2018121300012
2	Tugu 0 Km	Jl. Dr. Sukarjo	PO2018121300009
3	Cilamajang Kota Tasikmalaya Jawa Barat	Cilamajang	PO2018121300018
4	Makam Gn. Subang	Lintasan Mangkubumi - Indihiang	PO2016061000161
5	Komplek Makam Syeh Tubagus Abdullah	Sukaasih	PO2016060900121
6	Makam (Mesjid) H. Bakri	H. Mustopa	PO2016061000356
7	Makam Gn Saena	Citamiang	PO2018121300019
8	Makam Eyang Cakra Ningrat	Ciseeng Babakn Arsi	PO2018121300015
9	Punden Berundak, Gunung Pa Jahim	Leuwiliang, Kawalu	-
10	Makam H Hasan	Babakan Peundeuy	PO2018121300020
11	Makam Dalem Patuakan	Tanjung Kota Tasikmalaya Jawa Barat	PO2018121300014
12	Makam Eyang Patinggi	Leuwiliang	PO2018121300016
13	Makam Dalem Kutawaringin	Lewiliang	PO2018121300017
14	Lingga Yoni	Lintasan Mangkubumi Indihiang	PO2016061000161
15	Tugu Istiwa	Citamiang	PO201812130002
16	Makam Nyimas Saena	Tanjung	PO2018121300021
17	Naskah Wasiat Sukapura (Manuskrip)	Tawang	-
18	Naskah Ndalem Patuakan	Jln. Komarasari Tawang	
19	Makam Sakarembong	Jl. Bantar, bantarsari Kota tasikmalaya	
20	Makam Eyang Jiwaraga	Kp Nagrog	
21	Makam Eyang Prabudilaya	Kota Tasikmalaya Jawa Barat	
22	Makam Syekh Abdul Gharib	Cibeas Kota Tasikmalaya	
23	Makam Eyang Cakraningrat		

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.



### 2.1.3.2.17. Perpustakaan

Pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.98.

Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perpustakaan Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kesesuaian dengan Standar Nasional Perpustakaan	%	3	3,14	4	66,67	32	32	35	35,19
2	Persentase peningkatan koleksi buku	%	0	4,94	4	5,13	4	6,86	-*	-*
3	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	0	52,07	8	20,14	0	0	14	71,52
4	Persentase pembinaan perpustakaan	%	-**	-**	-**	-**	-**	-**	5,53	5,53
5	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	%	-**	-**	-**	-**	-**	-**	50	50

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2022.

-\* Indikator Lama

-\*\* Indikator Baru

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indicator urusan perpustakaan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terdapat realisasi yang cukup besar dari target yang telah ditetapkan pada persentase peningkatan pengunjung perpustakaan karena pada tahun 2021 perpustakaan telah dibuka kembali untuk menerima pengunjung setelah sebelumnya ditutup karena PPKM yang diberlakukan di Kota Tasikmalaya.

Jumlah perpustakaan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.99.

Data Perpustakaan Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan	Jumlah Koleksi		Jumlah Pengunjung/Hari	Jumlah Anggota Perpustakaan
				Judul	Eksemplar		
<b>A</b>	<b>Perpustakaan Umum</b>	<b>80</b>	<b>251</b>	<b>65.075</b>	<b>124.128</b>	<b>145</b>	<b>1.310</b>
1	Perpustakaan Kab/Kota	1	14	26.325	46.778	66	420



No	Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan	Jumlah Koleksi		Jumlah Pengunjung/Hari	Jumlah Anggota Perpustakaan
				Judul	Eksemplar		
2	Perpustakaan Kelurahan	<b>69</b>	<b>207</b>	<b>33.750</b>	<b>67.350</b>	<b>69</b>	<b>690</b>
3	Perpustakaan Kecamatan	10	30	5.000	10.000	10	200
<b>B</b>	<b>Perpustakaan Sekolah</b>	<b>440</b>	<b>1.089</b>	<b>324.500</b>	<b>1.161.000</b>	<b>13.610</b>	<b>159.200</b>
1	Perpustakaan SD/ MI	231	462	115.500	231.000	4.620	46.200
2	Perpustakaan SMP/MPS	116	345	115.000	460.000	5.750	57.500
3	Perpustakaan SMA/ MA	93	282	94.000	470.000	3.240	55.500
<b>C</b>	<b>Perpustakaan Khusus</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>30.500</b>	<b>68.500</b>	<b>152</b>	<b>2.600</b>
1	Perpustakaan OPD Kab/Kota	46	48	23.000	59.000	92	2.300
2	Perpustakaan Bank	2	5	5.500	5.500	20	100
3	Perpustakaan Vertikal	4	4	2.000	4.000	40	200
<b>D</b>	<b>Perpustakaan Perguruan Tinggi</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>49.133</b>	<b>94.004</b>	<b>483</b>	<b>15.626</b>
1	Perpustakaan PT Negeri	3	19	13.000	26.000	160	5.000
2	Perpustakaan PT Swasta	17	30	36.133	68.004	323	10.626
<b>E</b>	<b>Perpustakaan Masyarakat</b>	<b>39</b>	<b>78</b>	<b>14.450</b>	<b>14.950</b>	<b>195</b>	<b>1.950</b>
1	Taman Baca Masyarakat	39	78	14.450	14.950	195	1.950
<b>Jumlah</b>		<b>631</b>	<b>1.524</b>	<b>483.658</b>	<b>1.462.582</b>	<b>14.585</b>	<b>180.686</b>

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2022.

#### 2.1.3.2.18. Kearsipan

Pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.100.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kearsipan  
Tahun 2018 – 2021



No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terjaganya keutuhan dan keautentikan informasi arsip masing- masing OPD	%	-*	-*	45	46,98	60	58,63	-*	-*
2	Pemahaman informasi kearsipan terhadap yang diberikan informasi	kali	-*	-*	2	5	2	3	-*	-*
3	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	%	-*	-*	25	26,32	27	27	-*	-*
4	Kenaikan Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal	poin	-**	-**	-**	-**	2	2	2	0
5	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	%	-**	-**	-**	-**	62,18	62,18	63,89	63,89

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2022.

-\* Indikator Lama

-\*\* Indikator Baru

Capaian indikator pelayanan kearsipan di Kota Tasikmalaya secara umum telah sesuai dengan apa yang ditargetkan. Namun pada dasarnya terdapat berbagai aspek yang harus ditingkatkan, misalnya dalam Penetapan Kebijakan Kearsipan, Pengelolaan Arsip Inaktif, Penyusutan Arsip, dan Sumber Daya Manusia Kearsipan dalam kaitannya dengan audit kearsipan eksternal yang akan mendongkrak Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

### 2.1.3.2. Layanan Urusan Pilihan

#### 2.1.3.3.1. Kelautan dan perikanan

Potensi areal perikanan di Kota Tasikmalaya sebesar 692,27 Ha, terdiri dari kolam pembenihan 19,49 Ha, kolam pembesaran 621,23 Ha, sawah irigasi untuk pengembangan minapadi seluas 51,42 Ha dan kolam air deras 0,14 Ha.

Aktifitas ekonomi di sektor perikanan melibatkan 393 kelompok pembudidaya ikan yang terdiri dari 375 pokdaan, 15 poklahsar dan 3 pokmaswas dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 4.842 orang.

Aktivitas di sector perikanan secara juga didukung oleh 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 1 unit pelayanan yaitu UPTD Balai Benih Ikan (BBI), UPTD Pengembangan Produksi Ikan dan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP). Selain



itu terdapat 61 Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang mendukung ketersediaan benih ikan di Kota Tasikmalaya.

Menurut kategori teknologi yang digunakan, aktivitas budidaya ikan di Kota Tasikmalaya sebagian besar dilakukan dengan semi intensif (51%), dan menggunakan teknologi yang sederhana (48,7%). Hanya 0,3% yang berbudidaya ikan secara intensif. Teknologi budidaya intensif adalah teknologi yang cukup maju dalam budidaya perairan. Budidaya Semi Intensif merupakan sistem budidaya peralihan, antara budidaya alami (esktensif/sederhana) dan budidaya intensif (buatan/perlakuan khusus). Hal ini sangat mempengaruhi terhadap produksi ikan di Kota Tasikmalaya.

Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101.  
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan  
Tahun 2017-2021

No.	Komoditas	2017 (Ton)	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)	2021 (Ton)
1	Mas	1.981,35	1.983,37	1979,75	2.074,63	2004,39
2	Nila	2.098,14	2.123,08	2.127,56	2.113,38	2188,93
3	Nilem	1.227,39	1.227,61	1.252,75	1.232,47	1243,34
4	Mujair	701,00	698,82	655,93	462,34	465,49
5	Lele	1.456,39	1.500,76	1.415,17	1.479,49	1489,55
6	Gurame	834,76	723,66	809,34	739,74	744,77
7	Tawes	980,81	1.024,32	1.001,53	1109,61	1109,16
8	Tambakan	513,06	512,79	507,56	462,34	465,48
9	Ikan Lainnya	184,23	184,83	233,03	277,41	279,28
	Jumlah	9.977,13	9.979,24	9.982,62	9.951,41	9.990,39

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022.

Pelaksanaan urusan perikanan di Kota Tasikmalaya menjadi wewenang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Berikut disajikan data pelaksanaan pelayanan umum urusan Perikanan.

Tabel 2.102.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perikanan

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Wirausaha Baru Sektor Perikanan	Orang	100	52	100	100	-	0	150	150
2	Capaian produksi perikanan budidaya	Ton	10.100	9.979,24	10.200	9.982,62	10.300	9.951,42	10.400	9.990,39
3	Angka produksi hasil perikanan	Ton	195,16	199,38	195,20	312,80	197,24	312,70	199,39	312,78
4	Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar	%	25	24,74	30	32,65	40	32,65	40	53,88



No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5	Jumlah masyarakat miskin sektor perikanan yang dibina	Orang	75	100	75	50	75	80	75	75

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022.

#### 2.1.3.3.2. Pariwisata

Pariwisata di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi pertumbuhan yang cukup besar. Secara lebih detail data objek wisata dan daya tarik wisata di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.103.  
Data Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kota Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
1	Kawalu	1. Makam Syekh Abdul Ghorib	Wisata Budaya	Kel. Gunung Gede Kecamatan Kawalu	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Air Tanjung	Wisata Alam	Jl. Air Tanjung-Tasikmalaya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Bordir Kawalu	Wisata Minat Khusus	Jl. Perintis Kemerdekaan, Karsamenak	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		4. Kampung Salapan (Hutan Urug) - Gua Sarongge - Curug Sawidak - Puncak Nangela - Cadas Ngampar	Wisata Alam	Jl. Syekh Abdul Muhyi	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		5. Bukit Lestari	Wisata Alam	RT 03 RW 03 Kel. Leuwiliang	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		6. Arung Jeram Sungai Ciwulan	Wisata Alam	Jl. Syekh Abdul Muhyi	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		7. Dalem Patuakan	Wisata Budaya	Tanjung 02/04	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		8. Makam Guning Saena	Wisata Budaya	Citamiang 06/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		9. Tugu Istiwa	Wisata Budaya	Citamiang 02/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		10. Makam H.M. Bakri	Wisata Budaya	Citamiang 02/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		11. Makam Eyang Ciseeng/ Cakraningrat	Wisata Budaya	Babakan Arsi 03/06	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		12. Makam H. Hasan	Wisata Budaya	Babakan Peundeuy 007	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		13. Makam Gn. Subang	Wisata Budaya	Cilamajang, Kawalu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		14. Makam Eyang Patinggi	Wisata Budaya	Leuwiliang, Kawalu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
2	Tamansari	1. Situ Cibeureum	Wisata Alam	Kel. Tamanjaya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Kelom Gelis	Wisata Minat Khusus	Kp. Gobras Kel. Sukahurip	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		3. Curug Tonjong	Wisata Alam	Kel. Setiawargi	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		4. Situ Malingping	Wisata Alam	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		5. Situ Cipajaran	Wisata Alam	Kel. Mugarsari	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		6. Makam Situ Malingping	Wisata Budaya	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		7. Makam Situ Kasindang	Wisata Budaya	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
3	Cibeureum	1. Petilasan Purbasari	Wisata Budaya	Jl. Letkol Basir Surya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan



		2. Pasir Pataya	Wisata Rekreasi	Kel. Ciakar	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		3. Perkebunan Salak	Wisata Minat Khusus	Peundeuy, Kel. Ciakar	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
4	Purbaratu	1. Arung Jeram sungai Citanduy	Wisata Alam	Kel. Sukajaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		2. Wisata Edukasi Bambu	Wisata Minat Khusus	Kel. Sukajaya	Produk Wisata potensial yang belum dikembangkan
		3. Makam Syekh Kusumayuda	Wisata Budaya	Kel. Sukajaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		4. Makam Tubagus Abdulah	Wisata Budaya	Purbaratu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		5. Makam Jiwa Raga	Wisata Budaya	Purbaratu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		6. Kampung Awi	Wisata Alam		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		7. Farm House	Wisata Buatan		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		8. Kerajinan Mendong	Wisata Kriya		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
5	Tawang	1. Kuliner Tawang	Wisata Minat Khusus	Jl. BKR, Jl. Kolektoran	Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		2. Titik Nol	Wisata Budaya		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		3. Mambo Kuliner	Wisata Kuliner	Jl. Mayor Utara	Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
6	Cihideung	1. Pasar Minggu Dadaha	Wisata Minat Khusus	Jl. Dadaha	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		2. Teejay Waterpark	Wisata Rekreasi	Komp. Plaza Asia Jl. KHZ mustofa	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Kolam Renang Asia	Wisata Buatan	Komplek Dadaha	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
7	Mangkubumi	1. Situ Gede	Wisata Alam	Kel. Linggajaya Kecamatan Mangkubumi	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Makam Eyang Prabudilaya	Wisata Budaya	Kel. Batarsari Kecamatan Bungursari	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Mangkubumi Water Park	Wisata Rekreasi	Jl.A.H. Nasution KM. 7	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		4. Perkebunan Buah Naga	Wisata Minat Khusus	Jl. Cibeet	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
8	Indihiang	1. Situs Linggayoni	Wisata Budaya	Kel. Sukamaju Kidul	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Payung Geulis Tasik	Wisata Minat Khusus	Kel. Panyingkiran	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		3. Wisata Ciloseh	Wisata Alam	Kel. Panyingkiran	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		4. Lapangan Minisoccer (Indosoccernesia)	Wisata Minat Khusus	Kel. Sukamaju Kidul	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		5. Batu Bangkong	Wisata Alam	Kel. Sirnagalih	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		6. Kawasan Cipanyir (Cipedes Panyingkiran)	Wisata Alam	Kel. Panyingkiran	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		7. Babakan Sanca	Wisata Alam	Kel. Sirnagalih	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
9	Bungursari	1. Makam Eyang Dalem Sakarembong	Wisata Budaya	Kel. Bantarsari	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Ma'arif Garden	Wisata Alam	Jl. Sukarindik No.71, Sukarindik	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Mutiara Aboh	Wisata Tirta	Kel. Sukamulya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan



10	Cipedes	1. Taman Rekreasi Karang Resik	Wisata Rekreasi	Jl. Mohamad Hatta, Sukamanah	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Sentra Batik	Wisata Minat Khusus	Jl. Ciroyom No.20, Nagarasari, Kec. Cipedes	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		3. Tebing Putih	Wisata Alam	Kel. Sukamanah	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		4. Budak Capetang	Wisata Buatan	Kel. Sukamanah	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022



Apabila dilihat dari capaian kinerja urusan pariwisata di Kota Tasikmalaya, jumlah kunjungan wisata ke Kota Tasikmalaya, yang meliputi wisatawan domestik dan mancanegara, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 589.000 orang pada tahun 2017, 650.553 orang pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 menjadi 695.647. Angka ini menurun pada tahun 2020, yaitu menjadi 344.423 orang. Namun pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisata mulai naik lagi yaitu sebesar 483.569 orang, seiring dengan mulai meredanya kasus Covid-19.

Tabel berikut menunjukkan jumlah kunjungan wisata di Kota Tasikmalaya selama 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel. 2.104.  
Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Tasikmalaya  
Tahun 2018 - 2021

Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)		Jumlah Total (Orang)
	Mancanegara	Domestik	
2018	221	650.332	650.553
2019	124	695.523	695.647
2020	39	344.384	344.423
2021	6	483.563	483.569

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022

Untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kota Tasikmalaya, maka dibutuhkan sarana pendukung berupa penginapan seperti hotel, guest house, hostel, dan lain sebagainya. Tabel berikut merupakan data sarana penginapan di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.105.  
Data Hotel di Kota Tasikmalaya

No.	Nama Hotel	Alamat	Kecamatan
1	PERMATA SAHID HOTEL SYARIAH	JL.BRIGJEN WASITA KUSUMAH, INDIHIANG, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT 46151	Indihiang
2	HOTEL RAMAYANA	JL.RE MARTADINATA NO.333, PANYINGKIRAN, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA 46151	Indihiang
3	ADEN 2 SYARIAH	JL.RE MARTADINATA NO.268, PANYINGKIRAN, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA	Indihiang
4	FRESH HOTEL	JL.RE MARTADINATA NO.191, PANYINGKIRAN, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA	Indihiang
5	HOTEL SRIKANDI	JL.RE MARTADINATA NO.266, PANYINGKIRAN, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA	Indihiang
6	CROWN HOTEL	JL. RE MARTADINATA NO.45	Cipedes
7	PONDOK TASYIQ GUEST HOUSE	JL.CIGANTANG, KEL.CIGANTANG, KEC.MANGKUBUMI	Mangkubumi
8	FAVE HOTEL TASIKMALAYA	JL.RE MARTADINATA 214, RT.02/07 KEL.CIPEDES, KEC.CIPEDES KOTA TASIKMALAYA KODE POS 46133	Cipedes



No.	Nama Hotel	Alamat	Kecamatan
9	HARMONI HOTEL	JL.Rd.IKIK WIRADIKARTA 51 TASIKMALAYA	Tawang
10	HOTEL MANDALAWANGI	JL.RE MARTADINATA 177, TASIKMALAYA	Cipedes
11	HOTEL HORISON	JL. YUDANAGARA NO.16	Cihideung
12	HOTEL PADJADJARAN	JL. IR.H.DJUANDA (BY PASS)	Mangkubumi
13	HOTEL SETUJU	JL.CIEUNTEUNG	Mangkubumi
14	HOTEL WIJAYA KUSUMAH	JL. IR.H.DJUANDA (BY PASS)	Bungursari
15	SURYA HOTEL	JL.SILIWANGI NO.39 TASIKMALAYA	Tawang
16	MINI GUEST HOUSE	JL. CIPEDES II NO.21A	Cipedes
17	HOTEL MERDEKA	JL.TARUMANEGARA NO.48	Tawang
18	HOTEL PRIANGAN	JL. KEBON MANGGU I, TASIKMALAYA	Cihideung
19	SHANRILLA HOTEL	JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO.93, TASIKMALAYA	Cihideung
20	HOTEL SANTIKA	JL.YUDANAGARA, NO.57	Cihideung
21	HOTEL SARTIKA	JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO.244	Kawalu
22	HOTEL SEHAT	JL.MITRABATIK NO.73	Cipedes
23	HOTEL SELAMAT	JL.EMPANG NO.26 TASIKMALAYA	Tawang
24	HOTEL TASIK	JL.KOMALASARI NO.27 RT.01 RW.02, EMPANGSARI	Tawang
25	HOTEL ABADI	JL.EMPANG NO.58 TASIKMALAYA	Tawang
26	HOTEL ASRI	JL.HZ.MUSTOFA NO.326 TASIKMALAYA	Cihideung
27	HOTEL BOROBUDUR	JL.MAYOR SL.TOBING NO.25	Cihideung
28	HOTEL CITY	JL.SUKALAYA BARAT NO.50 TASIKMALAYA	Cihideung
29	HOTEL AMARIS	JL.KHZ.MUSTOFA, TUGUJAYA, CIHIDEUNG	Cihideung
30	GRAND METRO HOTEL	JL.KHZ.MUSTOFA NO.263, NAGARAWANGI	Cihideung
31	HOTEL KENCANA	JL.YUDANAGARA NO.17 TSM	Cihideung
32	HOTEL MANGKUBUMI	JL.JENDRAL AH.NASUTION KM.7 TSM	Mangkubumi
33	HOTEL FLAMBOYAN	JL.GALUNGGUNG NO.50	Tawang

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.

Adapun untuk capaian indikator urusan pariwisata dapat dilihat sebagai berikut

:

Tabel 2.106.  
Capaian Indikator Urusan Pariwisata

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	591.000	651.000	614.000	615.988	287.049	344.423	638.000	483.569
2	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	51	55,1
3	Jumlah Wirausaha baru sub sektor ekonomi kreatif dan jasa usaha pariwisata	Orang	100	58	100	100	-	-	150	150
4	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*	41	46,15

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022.



**2.1.3.3.3. Pertanian**

Sektor pertanian meliputi sektor pertanian tanaman pangan, sektor tanaman hortikultura, sektor tanaman perkebunan dan sektor peternakan. Produktivitas sektor pertanian ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lahan. Luas lahan pertanian khususnya lahan sawah di Kota Tasikmalaya sejak tahun 2009 sampai dengan 2020 terus mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi lahan sawah ke peruntukan lain. Pada tahun 2017 luas sawah sebesar 5.826 Ha, sementara pada tahun 2021 menjadi 5.778 Ha. Berdasarkan Statistik Pertanian dan Perikanan Perkembangan data luas lahan sawah di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.107.  
Data Luas Sawah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

Tahun	Jumlah	Berkurang (Ha)
2018	5.799	27
2019	5.796	3
2020	5.790	6
2021	<b>5.778</b>	12
Jumlah		<b>406</b>

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022

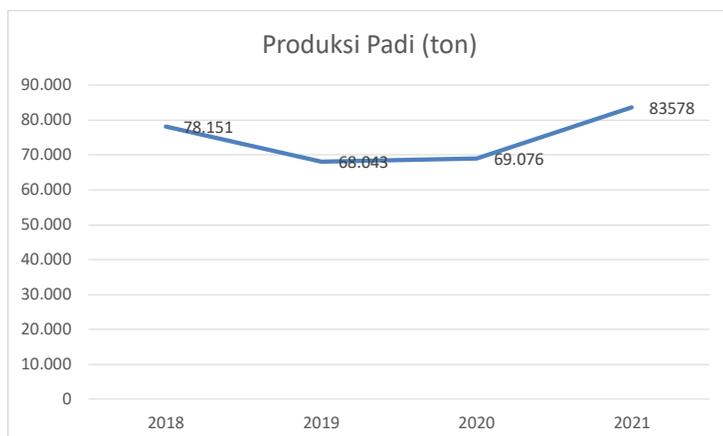
Potensi sumberdaya pertanian berbentuk kelompok tani sebanyak 644 kelompok dengan jumlah anggota kelompok tani berjumlah 27.424 orang yang terdiri dari kelompok tani dewasa 451 kelompok, kelompok wanita tani (KWT) 136 kelompok, dan taruna tani 57 kelompok. Kondisi ini meningkat dari tahun 2019. Berikut perkembangan kelompok tani di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.108.  
Kelompok Tani di Kota Tasikmalaya Tahun 2019 - 2021

Tahun	Kelompok Tani			Jumlah Anggota
	Kelompok Dewasa	KWT	Taruna Tani	
2019	452	129	44	24.782
		625		
2020	451	136	57	27.424
		644		
2021	<b>456</b>	<b>145</b>	<b>64</b>	<b>28.047</b>
		<b>665</b>		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022

Komoditas yang dihasilkan dari sektor pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, palawija serta tanaman sereal lainya. Padi merupakan komoditas pangan utama yang dikonsumsi masyarakat Kota Tasikmalaya. Produksi padi periode 2013-2021 seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022

Gambar 2.42.  
Produksi Padi Tahun 2018-2021

Jika konversi dari gabah ke beras sebesar 62,74 persen maka produksi beras di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebanyak 52.437 ton naik. Dengan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebanyak 716.155 orang, dan diasumsikan kebutuhan beras per kapita/tahun sebanyak 100 kg sehingga jumlah kebutuhan beras seluruh penduduk Kota Tasikmalaya selama satu tahun sebanyak 71.615,5 ton. Dengan demikian produksi beras di Kota Tasikmalaya belum dapat memenuhi kebutuhan makan penduduknya. Berdasarkan data tersebut produksi beras di Kota Tasikmalaya baru memenuhi 72,22 persen dari total kebutuhan. Terdapat defisit beras sebanyak 19.178,66 ton atau 27,28 persen.

Namun demikian produksi padi ini mendominasi produksi tanaman pangan di Kota Tasikmalaya dibandingkan tanaman pangan lainnya seperti jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu seperti terlihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.109.  
Produksi Tanaman Pangan di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

Tanaman Pangan	2018	2019	2020	2021
Produksi Padi (ton)	78.151	68.043	69.076	83.578
Produksi Jagung (Ton)	656	269	176	160
Produksi Kedelai (Ton)	57	-	-	-
Produksi Kacang Tanah (Ton)	132	231	406	128
Produksi Ubi Jalar (ton)	424	367	151	130
Produksi Ubi Kayu (ton)	2.300	3.060	1.119	1.388
<b>JUMLAH</b>	<b>81.720</b>	<b>71.970</b>	<b>70.928</b>	<b>85.384</b>

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022



Sektor tanaman hortikultura di Kota Tasikmalaya terdiri dari tanaman hortikultura sayuran dan tanaman hortikultura buah-buahan. Komoditas tanaman hortikultura sayuran terdiri dari komoditas cabe besar, cabe rawit, tomat, ketimun, petsai/sawi, dan kacang panjang. Sementara komoditas tanaman hortikultura buah-buahan terdiri dari komoditas salak, pisang, rambutan, mangga, pepaya, durian dan manggis. Selain itu terdapat juga komoditas tanaman perkebunan yang terdiri dari komoditas mendong, kelapa, lada, kakao, pala, kopi dan tembakau. Produksi tanaman hortikultura tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 dan sedikit menurun pada tahun 2021, sementara produksi tanaman perkebunan terus menurun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2021

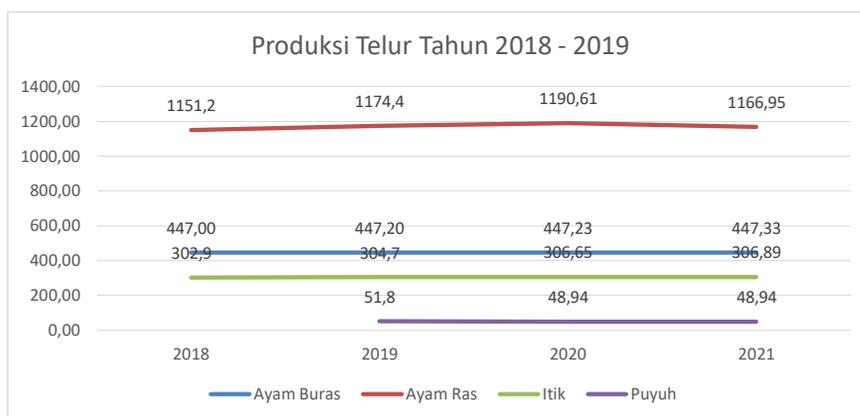
Gambar. 2.43.  
Produksi Hortikultura dan Perkebunan di Kota Tasikmalaya  
Tahun 2018-2021

Komoditas sektor peternakan terdiri dari ternak besar seperti sapi, kambing dan domba serta unggas seperti ayam, itik dan puyuh. Selain itu terdapat produksi hasil peternakan seperti daging, telur dan susu. Populasi ternak besar dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan walau dengan pertumbuhan yang lambat yaitu rata-rata 1,94 persen per tahun. Sementara produksi daging dalam 4 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang tidak stabil. Produksi daging berangsur baik pada tahun 2018 dan 2019 kemudian turun kembali pada tahun 2021. Perkembangan populasi ternak serta produksi daging di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.44.  
Perkembangan populasi ternak serta produksi daging di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021

Produksi telur dalam 4 tahun terakhir didominasi telur ayam ras petelur yang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2018-2019 dengan rata-rata pertumbuhan 7,9 persen per tahun, namun menurun pada tahun 2020 dengan pertumbuhan -0,6 persen. Produksi telur ayam ras pada tahun 2019 mencapai 1.174,2 ton, turun pada tahun 2020 menjadi 1.167,1 ton. Untuk produksi telur ayam bukan ras, itik serta puyuh relative stagnan. Perkembangan produksi telur di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.45.  
Produksi Telur Tahun 2018-2021

Di sektor peternakan, sarana prasarana milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan. Untuk memenuhi daging yang aman,



sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH dan Pasar Hewan. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini pemotongan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar, dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan.

Selain berdampak terhadap capaian angka PDRB kategori pertanian, kehutanan perikanan, kondisi di atas sangat mempengaruhi terhadap capaian pelayanan umum pada urusan pertanian. Banyak capaian target indikator urusan pertanian pada tahun 2020 yang turun dari capaian tahun 2019.

Tabel 2.110.  
Capaian Pelayanan Umum Urusan Pertanian  
Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian produksi tanaman hortikultura	Ton	-*	-*	-*	-*		5.755,3	-*	-*
2	Capaian produksi tanaman perkebunan	Ton	-*	-*	-*	-*		854,01	-*	-*
3	Jumlah petani miskin yang dibina	Orang	300	410	300	352	300	126	225	225
4	Angka produktivitas tanaman pangan utama	Ton	-*	-*	-*	-*		62,16	-*	-*
5	Capaian Produksi Tanaman Pangan	Ton	90.000	81.720	91.800	71.970	93.000	70.928	73.400	85.384
6	Jumlah Gapoktan yang dibina	Gapoktan	64	64	64	64	64	64	64	64
7	Capaian peningkatan omset hasil olahan tanaman pangan	%	5	39,41	5	21,67	5	38,67	-*	-*
8	Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	%	100	100	100	100	100	100	-*	-*
9	Persentase peningkatan populasi ternak	%	1	1,61	2	0,25	2	0,52	1	-1,59
10	Persentase peningkatan hasil produksi peternakan	%		33,81		21,44	4	1,86	-*	-*
11	Jumlah Wirusaha baru sektor pertanian	Orang	200	135	200	200	0	0	300	295
12	Capaian produksi Hortikultura dan perkebunan	Ton	1	22,82	1	-*	-*	-*	-*	-*
13	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	-**	-**	-**	-**	-**	-**	198	199
14	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar	Kwintal/hektar	-**	-**	-**	-**	-**	-**	63	62,9
15	Capaian produksi Hasil peternakan	Ton	-**	-**	-**	-**	-**	-**	8000	10.347
16	Persentase pengendalian kesehatan hewan	%	-**	-**	-**	-**	-**	-**	100	100



	dan kesehatan masyarakat veteriner									
17	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	**	**	**	**	**	**	30	4,35

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022.

#### 2.1.3.3.4. Perdagangan

Perekonomian Kota Tasikmalaya banyak didorong dan didukung oleh kategori perdagangan. Berikut capaian layanan urusan perdagangan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.111.  
Capaian Pelayanan Umum Urusan Perdagangan  
Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
1	Persentase hasil pengawasan metrologi legal dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	*	*	*	*
2	Persentase alat UTTP yang bertera sah	%	50	65,83	60	80,44	70	80,89	88	109
3	Jumlah wirausaha baru sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang		328		354		100		-
4	Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang	450	450	200	400	*	*	*	*
5	Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor	%	**	**	**	**	**	**	3	1
6	Persentase Pelaku usaha yang dibina	%	100	100	100	104	*	*	*	*
7	Persentase peningkatan omset pelaku usaha	%	5	5	5	4,58	8	*	5	-6,64
8	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	%	100	100	100	343	*	*	*	*
9	Persentase Pasar yang dibina	%	100	100	100	100	*	*	*	*
10	Nilai ekspor bersih	US\$ (ribuan)	38.000	34.000	39.000	14.993,52	40.000	35.883,71	41.000	31.459,43
11	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	**	**	**	**	**	**	100	100
12	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	%	**	**	**	**	**	**	100	80
13	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil	%	**	**	**	**	**	**	72	54,5
14	Persentase peningkatan	%	**	**	**	**	**	**	3	1



No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
	pelaku usaha yang berorientasi ekspor									
15	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan kota tasikmalaya	%	..	..	..	..	..	..	88	88,9

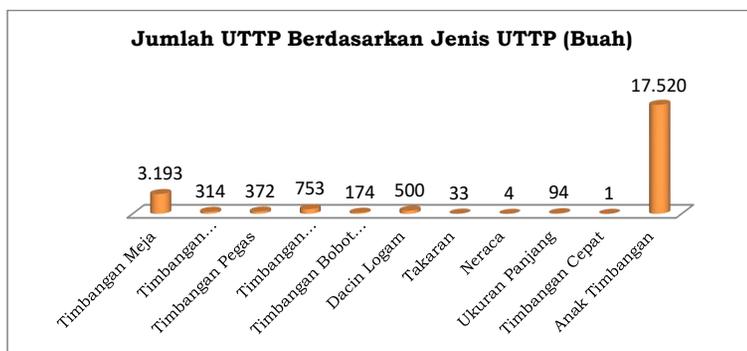
Ket: \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.

Sebagai implementasi dari amanat Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib untuk pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertujuan guna melindungi kepentingan umum sehingga mendapatkan kepastian hukum dalam hal kebenaran pengukuran.

Pada 2018 Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU). Adapun Jenis dan pemilik UTTP di Kota Tasikmalaya cukup banyak. Di lain pihak UPTD Metrologi Legal Kota Tasikmalaya juga masih melayani pemilik UTTP dari wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar melalui mekanisme Kesepakatan Bersama antar Pemerintah Daerah Tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, serta Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan Metrologi Legal karena UPTD Metrologi Legalnya belum operasional.

Jenis dan jumlah UTTP yang dimiliki pedagang di Pasar Rakyat dan Pasar Swalayan serta yang dimiliki masyarakat di 10 kecamatan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Total ada 22.958 UTTP dari berbagai jenis yang dimiliki pelaku usaha di Pasar Rakyat dan Pasar Swalayan serta masyarakat di 10 kecamatan.



Gambar 2.46.  
Jumlah UTTP Berdasarkan Jenis UTTP



Pemilik UTTP juga tersebar di SPBU, SPBE, Perum Bulog, Perusahaan Ekspedisi, Kantor Pos, Tempat Pelayanan Kesehatan dan perusahaan lainnya dengan jumlah jenis UTTP sebanyak 30 jenis sebanyak 1.059 buah. Ada juga UTTP yang terpasang di Pelanggan Air dan Listrik di 10 kecamatan sebanyak 27.467 meter air dan 220.513 kWh meter.

Pasar rakyat di wilayah Kota Tasikmalaya semakin penting sebagai pusat lalu lintas perdagangan hasil pertanian dan hasil industri kecil menengah dari dan ke berbagai wilayah kabupaten/kota sekitarnya. Saat ini, Pasar Cikurubuk menjadi pasar induk hasil bumi bagi masyarakat di wilayah Priangan Timur, yang mampu memasarkan berbagai produk hasil pertanian paling lengkap, seperti: beras, sayuran, daging, ikan, telur dan lainnya serta hasil industri kecil menengah seperti alas kaki dan bordir.

Tabel 2.112.  
Jumlah Pasar Rakyat Tahun 2021

No.	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Luas			Jumlah		
				Tanah (m2)	Bangunan (m2)	Lantai	Los	Kios	Dasaran
1	Pasar Cikurubuk	Jl. Residen Ardiwinangun, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi	1994	43.120	25.650	1	50	2.772	1.867
2	Pasar Pancasila	Jl. Pancasila, Kel. Lengkoarsari Kec. Tawang	1995	6.540	4.656	1	60	249	300
3	Pasar Indihiang	Jl. Letnan Harun, Kel. Sukamaju Kaler Kec. Indihiang	1997	10.622	743	1	0	402	50
4	Pasar Padayungan	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Tugujaya Kec. Cihideung	1995	9.000	1.968	1	0	261	20
5	Pasar Cibeutu	Jl. Raya Cibeutu Kel. Cibeutu Kec. Kawalu	1990	696	691	1	12	44	0
6	Pasar Gegernoong	Jl. Raya Tamansari Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari	1999	1.000	538	1	0	91	10
7	Pasar Burung dan Besi	Jl. Kh. Ez. Mutaqien, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi	1997	6.407	444	1	0	244	40
8	Pasar Nyemplong/Sindang Hayu	Setiawargi Kel. Setiawargi Kec. Tamansari	2016	5.650	1.364	1	26	0	37
9	Pasar Cibeureum	Jl. Kh. Khoer Affandi Kel. Margabakti Kec. Cibeureum	2018	4.630	2.989	1	128	78	0
10	Pasar Purbaratu	Belum beroperasi	2019				276	4141	2324

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.

Meskipun kategori perdagangan sudah cukup baik tetapi masih perlu peningkatan pada sarana dan prasarannya. Pasar-pasar tersebut secara bertahap harus ditingkatkan kebersihan, ketertiban dan kenyamanannya



untuk meningkatkan daya saing dengan pasar-pasar modern atau pusat perbelanjaan dan minimart yang ada.

Tabel 2.113.  
Pusat Perbelanjaan di Kota Tasikmalaya

No.	Nama Pusat Perbelanjaan	Alamat
1	Yogya HZ	Jl. HZ Mustofa No. 124 Kel. Yudanegara Kec. Cihideung
2	Asia Toserba	Jl. HZ. Mustofa No. 72 Kel. Yudanegara Kec. Cihideung
3	Yogya Mitrabatik	Jl. Mitra Batik No. 81-83 Kel. Cipedes Kec. Cipedes
4	Plaza Asia (PT. Asia San Prima Jaya)	Jl. HZ. Mustofa Kel. Tuguraja Kec. Cihideung
5	Agung Toserba	Jl. HZ Mustofa Kel. Yudanegara Kec. Cihideung
6	Giant	Jl. Pasar Wetan Komplek Mayasari Plaza Kel. Argasari Kec. Cihideung
7	Lotte Mart	Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kersamenak Kec. Kawalu
8	Mega M (PT. Matahari Putra Prima)	Jl. Veteran No. 10 Kel. Cilembang Kec. Cihideung
9	Transmart	Jl. Ir. H. Juanda Kel. Panglayungan Kec. Cipedes
10	Mayasari Plaza	Jl. Pasar Wetan Kel. Argasari Kec. Cihideung

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020.

Data lebih lanjut mengenai pelaku usaha perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.114.  
Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

No.	Jenis	Jumlah
1	Usaha Mikro yang Sudah Terdaftar	120
2	Usaha Mikro Anggota Koperasi LPM	2.332
3	PKL Kojengakang	780
4	PKL sepanjang jalan Kota Tasikmalaya (21 ruas jalan)	1.371
5	PKL Selter Lingkar Dadaha	140
6	Peserta Program Kemiskinan	600
	Jumlah	4.784

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2019.

Kota Tasikmalaya memiliki banyak potensi kerajinan dan industri kreatif yang tersebar di beberapa sentra-sentra industri Kota Tasikmalaya yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Seluruh potensi kerajinan ini perlu didukung dengan fasilitas sarana prasarana promosi dan pemasaran produk industri kreatif dengan membangun tempat pameran khususnya untuk produk industri kreatif sebagai salah satu dari pengembangan pasar melalui promosi.



#### **2.1.3.3.5. Perindustrian**

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. Jika ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas, komoditi IKM ini terus mengalami peningkatan.

Berikut ini data potensi komoditi unggulan Kota Tasikmalaya :



Tabel 2.115.  
Perkembangan Potensi Komoditi Industri Kota Tasikmalaya  
Tahun 2018-2021

No.	Komoditi	Unit Usaha				Tanaga Kerja (Orang)				Nilai Investasi (Rp.000)				Nilai Produksi (Rp. 000)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Bordir	1.407	1.424	1.430	1.423	14.097	14.097	14.097	14.097	244.404.416	244.404.416	244.404.416	244.404.416	1.067.757.116	1.067.757.116	1.067.757.116	1.067.757.116
2	Kerajinan Mendong	174	175	175	174	2.292	2.292	2.292	2.292	7.011.232	7.011.232	7.011.232	7.011.232	43.203.874	43.203.874	43.203.874	43.203.874
3	Kerajinan Bambu	75	75	75	75	660	660	660	660	1.200.038	1.200.038	1.200.038	1.200.038	5.466.606	5.466.606	5.466.606	5.466.606
4	Alas Kaki (Kelom Geulis & Sandal, sepatu)	536	551	556	570	6.213	6.213	6.213	6.213	50.586.562	50.586.562	51.246.744	710.768.562	395.566.430	395.566.430	395.566.430	395.566.430
5	Kayu Olahan	217	235	237	226	1.538	1.538	1.538	1.538	28.677.699	28.677.699	28.677.699	28.677.699	82.656.245	82.656.245	82.656.245	82.656.245
6	Batik	41	43	41	43	695	695	695	695	7.840.576	7.840.576	7.840.576	7.840.576	51.540.682	51.540.682	51.540.682	51.540.682
7	Payung Geulis	8	8	8	8	56	56	56	56	78.500	78.500	78.500	78.500	1.216.800	1.216.800	1.216.800	1.216.800
8	Makanan Olahan	656	880	939	1.66	5.143	5.143	5.143	5.143	52.860.460	52.860.460	61.809.660	5.202.060.460	950.004.830	950.004.830	950.004.830	950.004.830
9	Bahan Bangunan	323	324	326	326	4.152	4.152	4.152	4.152	216.770.677	216.770.677	217.047.677	593.770.677	561.840.403	561.840.403	561.840.403	561.840.403
10	Pakaian Jadi	172	288	318	337	1.711	1.711	1.711	1.711	24.188.800	24.188.800	25.938.800	3.374.188.800	167.930.350	167.930.350	167.930.350	167.930.350
11	Percetakan	55	56	57	58	387	387	387	387	9.566.000	9.566.000	9.876.000	319.566.000	31.521.862	31.521.862	31.521.862	31.521.862
12	Lain-Lain	130	231	297	144	3.099	3.099	3.099	3.099	69.590.084	69.590.084	83.366.166	4.292.936.366	419.972.576	419.972.576	419.972.576	419.972.576
JUMLAH		680	4.290	4.459	4.450	9.349	39.795	40.043	40.043	320.115.561	706.438.044	712.775.044	14.782.503.326	3.763.447.774	3.763.447.774	3.778.677.774	3.778.677.774

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.



Tabel 2.116.  
Perkembangan Jumlah Unit Industri Kota Tasikmalaya  
Tahun 2018 - 2021

No	Komoditi dan Klasifikasi Industri	Unit Usaha (UU)			
		2018	2019	2020	2021
A. Komoditi Unggulan :					
1	Bordir :	1.416	1.424	1.431	1.423
	a. Mikro	651	659		
	b. Kecil	652	652	1.319	1.311
	c. Menengah	113	113	112	112
	d. Besar	0	0	0	0
2	Kerajinan Mendong :	175	175	175	174
	a. Mikro	137	137		
	b. Kecil	37	37	174	173
	c. Menengah	1	1	1	1
	d. Besar	0	0	0	0
3	Kerajinan Bambu :	75	75	75	75
	a. Mikro	66	66		
	b. Kecil	8	8	74	74
	c. Menengah	1	1	1	1
	d. Besar	0	0	0	0
4	Alas Kaki (Sandal, Sepatu, Kelom Geulis) :	544	551	557	570
	a. Mikro	199	206		
	b. Kecil	323	323	535	548
	c. Menengah	22	22	22	22
	d. Besar	0	0	0	0
5	Kayu Olahan (Meubel) :	228	235	237	226
	a. Mikro	158	165		
	b. Kecil	66	66	233	223
	c. Menengah	3	3	3	3
	d. Besar	1	1	1	1
6	Batik :	41	43	43	43
	a. Mikro	20	22		
	b. Kecil	19	19	41	41
	c. Menengah	2	2	2	2
	d. Besar	0	0	0	0
7	Payung Geulis :	8	8	8	8
	a. Mikro	0	0		
	b. Kecil	8	8	8	8
	c. Menengah	0	0	0	0
	d. Besar	0	0	0	0
8	Makanan Olahan :	772	880	949	1.066
	a. Mikro	533	641		
	b. Kecil	222	222	932	1.049
	c. Menengah	17	17	17	17
	d. Besar	0	0	0	0
<b>JUMLAH A</b>		<b>3.259</b>	<b>3.391</b>	<b>3.475</b>	<b>3.585</b>
	a. Mikro	1.764	1.896		
	b. Kecil	1.335	1.335	3.316	3.427
	c. Menengah	159	159	158	158
	d. Besar	1	1	1	1
B. Komoditi Lainnya :					
1	Bahan Bangunan :	323	324	326	326
	a. Mikro	217	218		



No	Komoditi dan Klasifikasi Industri	Unit Usaha (UU)			
		2018	2019	2020	2021
	b. Kecil	90	90	310	313
	c. Menengah	13	13	13	13
	d. Besar	3	3	3	3
2	Pakaian Jadi :	226	288	339	337
	a. Mikro	149	211		
	b. Kecil	67	67	329	327
	c. Menengah	10	10	10	10
	d. Besar	0	0	0	0
3	Percetakan :	55	56	59	58
	a. Mikro	15	16		
	b. Kecil	36	36	55	54
	c. Menengah	4	4	4	4
	d. Besar	0	0	0	0
4	Lain-lain :	220	231	260	144
	a. Mikro	127	138		
	b. Kecil	73	73	240	124
	c. Menengah	20	20	20	20
	d. Besar	0	0	0	0
<b>JUMLAH B</b>		<b>824</b>	<b>899</b>	<b>984</b>	<b>865</b>
	a. Mikro	508	583		
	b. Kecil	266	266	934	818
	c. Menengah	47	47	47	47
	d. Besar	3	3	3	3
<b>TOTAL A+B</b>		<b>4.083</b>	<b>4.290</b>	<b>4.459</b>	<b>4450</b>
	a. Mikro	2.272	2.479		
	b. Kecil	1.601	1.601	4.250	4245
	c. Menengah	206	206	205	205
	d. Besar	4	4	4	4

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.

Adapun capaian pelaksanaan urusan industri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.117.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Industri  
Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Tahun							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase industri kecil menengah berkualitas	%	2	-	2	-	2	23,54	.*	.*
2	Jumlah IKM yang dibina	IKM	.*	.*	.*	.*	775	1.110	.*	.*
3	Persentase pertumbuhan industri	%	2	11,68	2	5,07	2	3,94	2	9,4
4	Jumlah sentra IKM yang dikembangkan	Buah	4	4	3	3	3	0	3	3
5	Persentase capaian sasaran rencana pembangunan industri	%	.*	.*	.*	.*	.*	.*	5	50
6	Jumlah wirausaha baru sektor industri	Orang	.*	.*	.*	.*	.*	.*	325	325
7	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor industri	Orang	.*	.*	.*	.*	.*	.*	550	500
8	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	%	.*	.*	.*	.*	.*	.*	100	0
9	Persentase IKM yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional	%	.*	.*	.*	.*	.*	.*	30	1,6

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022.



### 2.1.3.3. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### 2.1.3.4.1. Sekretariat Daerah

##### 1) Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kota Tasikmalaya. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Kota Tasikmalaya yang umumnya disebut SAKIP mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 nilai SAKIP Kota Tasikmalaya adalah 70,21 poin berada pada kriteria BB dan pada tahun 2021 nilai SAKIP Kota Tasikmalaya 71,63 poin berada kriteria BB.

Tabel. 2.118.  
Nilai SAKIP Kota Tasikmalaya  
Tahun 2018 – 2021

No	Uraian	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai SAKIP	61	70,21 (BB)	71-80 (BB)	71,09 (BB)	71-80 (BB)	70,84 (BB)	71-80 (BB)	71,63 (BB)

Sumber : Setda Kota Tasikmalaya, 2022.

##### 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nmor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 seusai amanat Peraturan Pemerintah Nmor 6 Tahun 2008. Penetapan Peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Capaian LPPD Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:



Tabel. 2.119.  
Capaian LPPD Kota Tasikmalaya  
Tahun 2018 – 2021

No.	Uraian	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian LPPD	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	N/A	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,26	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,37	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	N/A

Sumber : Setda Kota Tasikmalaya , 2022.

Capaian LPPD Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan dapat memenuhi target yang telah ditentukan (realisasi sesuai dengan range target yang telah ditentukan).

### 3) Penggunaan E-Procurement

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan resmi berdiri tanggal 01 Januari 2019 dan berada pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

BPBJ mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan dalam pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah. BPBJ mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk :

1. Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa dalam hal Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis serta pengelolaan pengadaan barang/jasa;
2. Pengelolaan LPSE, dalam hal melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
3. Pembinaan dan Advokasi PBJ, melalui melaksanakan penyiapan bahan bijakan dan petunjuk teknis dan petunjuk teknis serta pelaksanaan pembinaan advokasi pengadaan barang/jasa.

Sumber daya manusia pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.120.  
Sumber Daya Manusia pada BPBJ

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	Bersertifikat



No	Uraian	Jumlah	Keterangan
2	Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	2	2 Orang Bersertifikat
3	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	9	9 Orang Bersertifikat
4	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	5	
5	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	3	1 Orang bersertifikat
6	Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa	12	10 Orang JFU dan 2 JF
<b>TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>14 Orang Bersertifikat</b>

Kinerja BPBJ dinilai melalui Capaian MCP Pemerintah Daerah di Jawa Barat, dan Kota Tasikmalaya berada pada angka 72,74 persen, terdiri dari indikator SDM UKPBJ, pelaksanaan Tupoksi, Perangkat Pendukung, Penayangan SIRUP, serta Pengendalian dan Pengawasan. Berikut kami sajikan Indikator Kinerja BPBJ pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.121.

Capaian MCP Pemerintah Kota Tasikmalaya

No.	Indikator MCP		Capaian Tahun 2021
1.	SDM UKPBJ	Ketersediaan SDM (%)	100
		Pokja UKPBJ Permanen (%)	100
		Ketersediaan Fungsional PBJ	10
2.	Pelaksanaan Tupoksi	Advokasi PBJ	100
		Evaluasi Kegiatan PBJ	88
		Review Perencanaan PBJ	65
		Vendor Management system	38
3.	Perangkat Pendukung	Kode Etik	100
		Standar Opearsional Prosedur	100
		TPP Khusus UKPBJ	0
4.	Penayangan SiRUP	Persentase Penayanan SiRUP	82
5.	Pengendalian dan Pengawasan	Review HPS	60
		Review Kinerja UKPBJ & Tindak	85



Pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dilakukan kepada penyedia, UKPBJ, Auditor dan Intansi. Paket pengadaan barang/jasa melalui LPSE oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dari Tahun 2019-2021 sebanyak 7.130 paket. Adapun Jumlah paket lelang pada tahun 2021 sebanyak 2524 paket.

#### **2.1.3.4.2. Perencanaan**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

- 1) Tersedianya dokumen RPD tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Wali Kota)

RPD Kota Tasikmalaya disusun seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 pada Tahun 2022, seiring dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Tasikmalaya. Selain itu, Kebijakan nasional tentang pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati, Walikota akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Sehingga pada masa transisi ini, dipandang dari sisi perencanaan, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah terjadi “kekosongan”.

Dokumen RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 disusun berdasrakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. RPD ini disusun untuk mengisi kekosongan perencanaan daerah jangka menengah. RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 pada tanggal 28 April 2022.



- 2) Tersedianya dokumen RKPD telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Wali Kota)  
Dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Tasikmalaya telah ditetapkan dengan peraturan Walikota Tasikmalaya. RKPD tahun 2022 mengacu kepada RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022 dan merupakan RKPD tahun terakhir dari periode RPJMD 2017-2022. RKPD Tahun 2022 difokuskan untuk menyelesaikan target kinerja Wali Kota periode Tahun 2017-2022.
- 3) Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD  
Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan ke dalam RKPD mencapai 100 persen. Adapun untuk tahun 2020 dan 2021 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD sebesar 100 persen.
- 4) Penerapan SIPD  
Sejak beberapa tahun terakhir Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menggunakan sistem informasi berbasis online dalam proses perencanaan di Provinsi Jawa Barat. Sistem ini memuat perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.  
Pemerintah pusat memberlakukan penggunaan satu sistem perencanaan penganggaran di tingkat nasional yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebuah sistem aplikasi elektronik yang terdiri dari sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya antara lain untuk data dan informasi pembangunan, merupakan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, dengan tujuan:
  - 1) menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat;
  - 2) menghasilkan layanan informasi berbasis elektronik;
  - serta 3) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah pusat memberlakukan penggunaan satu sistem perencanaan penganggaran di tingkat nasional yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebuah sistem aplikasi



elektronik yang terdiri dari sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya antara lain untuk data dan informasi pembangunan, merupakan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, dengan tujuan: 1) menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat; 2) menghasilkan layanan informasi berbasis elektronik; serta 3) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya telah menggunakan sistem informasi perencanaan pembangunan. Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya juga telah menggunakan SIPD yang sebelumnya menggunakan sistem perencanaan mandiri (E-planning).

Adapun indikator kinerja penunjang bidang perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.122.  
Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2018 - 2021

INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	10	100
Persentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan	%	15	36,99	25	31,52	85	73,53	30	66,06
Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	%	75	77,27	85	73,53	100	100	90	67,85
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	80	83,33	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022.



#### **2.1.3.4.3. Keuangan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi perda dan peraturan Walikota. Namun bila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kota Tasikmalaya tentang APBD dan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Barat dan Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.



Tabel 2.123.  
Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kota Tasikmalaya  
Tahun 2018 - 2021

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	100	100	100	100	-*	-*	-*	-*
Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	100	100	100	100	-*	-*	-*	-*
Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	100	100*	100	100	-*	-*	-*	-*
Persentase implementasi teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	-*	-*	-*	-*
Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%	100	100	100	100	-*	-*	-*	-*
Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	-*	-*	-*	-*
Persentase penatausahaan pendapatan dan belanja daerah	%	100	100	100	100	-*	-*	-*	-*
Persentase pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	-*	-*	-*	-*
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	%	100	100	100	100	-*	-*	-*	-*
Persentase tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bersertifikat	%	36	31,66	38	40	-*	-*	-*	-*
Opini BKP atas LKPD Kota Tasikmalaya	Opini	-**	-*	-*	-*	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase laporan keuangan sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100	100



Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase waktu penetapan KUA dan PPAS	%	-**	-*	-*	-*	-**	-*	100	100
Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang ditetapkan	%	95	96,66	95	95,75	100	100	95	96,97
Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase inventarisasi aset milik daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	%	12	11,88	11	3,91	6,49	-0,39	7,01	41,68
Persentase peningkatan pajak daerah	%	11	11,80	10	19,61	-27,77	-14,60	4,49	14,06
Persentase peningkatan retribusi daerah dan pendapatan lainnya	%	7	12,30	14	-7,87	-5,72	13,44	1,95	59,35
Persentase objek pajak baru terhadap yang ditargetkan	%	-*	-*	20	20	20	97,58	20	209,70
Persentase implementasi sistem informasi pajak daerah	%	-*	-*	20	23,30	20	100	15	88,89
Persentase penanganan wajib pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh	%	-*	-*	20	43,28	20	123,88	20	146,27
Capaian pajak daerah terhadap target	%	100	101,42	100	106,18	100	112,47	100	103,71
Capaian retribusi daerah dan pendapatan lainnya terhadap target	%	100	117,13	100	90,72	100	88,31	100	96,68

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, 2022.

-\* Target Lama

-\*\* Target Baru

Transparansi Informasi APBD dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan



masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Guna mendorong keterbukaan informasi publik yang terkait pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyediakan informasi APBD hingga ke level kegiatan yang dapat diakses secara *online* oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas melalui *website* di alamat <https://data.tasikmalayakota.go.id/> pada menu badan Pengelola Keuangan Daerah.



#### 2.1.3.4.4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada tahun 2018 - 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.124.  
Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang  
Bidang Kepegawaian Tahun 2018 - 2021

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	76	49,29	77	49,62	78	52,92	78	63,26
Kesesuaian Kompetensi Aparatur dengan Jabatannya	%	73,5	74,30	75	76,99	76	76,59	78	78,01
Tingkat disiplin aparatur perangkat daerah	%	99	99,68	99	99,96	99	99,79	99	99,84



Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian implementasi SIMPEG	%	50	52,50	50	60,70	60	68,33	70	80,37
Capaian pembinaan disiplin aparatur	%	100	100,00	100	100,00	100	95,00	100	100,00
Capaian layanan kepegawaian	%	100	93,01	100	151,92	100	94,43	100	114,37
Capaian pendidikan dan pelatihan aparatur	%	100	107,63	100	120,14	100	100,38	100	100,54

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya, 2022.

#### 2.1.3.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan pada tahun sampai dengan tahun 2021 umumnya menunjukkan peningkatan. Namun, capaian indikator kinerja penelitian dan pengembangan lainnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.125.  
Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang  
Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Tahun 2018 - 2021

INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Inovasi Daerah (IID)	Kategori	-*	-*	-*	Tidak Inovatif	-*	Kurang Inovatif	-*	Inovatif

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022.

-\* Belum ada penetapan target

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dapat terelisasi sebesar 100 persen. Sedangkan untuk indikator Indeks Inovasi Daerah ada perbaikan capaian dari kurang inovatif pada tahun 2020 menjadi Inovatif pada tahun 2021.



### 2.1.3.4.6. Unsur Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Berikut capaian indicator unsur pengawasan:

Tabel 2.126.  
Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2018 - 2021

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
IKM Perangkat Daerah	Kategori	80	88	85	81,58	90	81,5	-*	-*
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	65	54	70	66,87	72	70,47	-*	-*
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	75	86	77	86,35	80	87	-*	-*
Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	-*	-*
Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	-*	-*
Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	2 (plus)	-*	-*
Persentase nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	%	..	..	..	..	60	70,52	-*	-*
Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	%	..	..	..	..	80 (BB)	83,31 (A)	-*	-*
Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan	%	..	..	..	..	..	..	75	77,85
Nilai SAKIP Kota	%	..	..	..	..	..	..	73	71
Level Maturitas SPIP Kota Tasikmalaya	Level	..	..	..	..	..	..	3	2,83
Skor PMPRB Kota Tasikmalaya	Poin	..	..	..	..	..	..	70	0
Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Predikat WBK/WBBM	Unit	..	..	..	..	..	..	3	0
Persentase Kepatuhan Pelaporan harta kekayaan aparatur	%	..	..	..	..	..	..	100	100
Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	%	..	..	..	..	..	..	100	N/A
Indeks Persepsi korupsi hasil survey eksternal	Poin	..	..	..	..	..	..	3	2,96
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti	%	..	..	..	..	..	..	100	64,01
Persentase tingkat maturitas SPIP perangkat daerah	%	..	..	..	..	..	..	100	N/A
Tingkat capaian kapabilitas APIP	%	..	..	..	..	..	..	100	N/A



Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Persentase penyelenggaraan pengawasan fungsional APIP	%	-**	-**	-**	-**	-**	-**	100	100
Persentase tindaklanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat	%	-**	-**	-**	-**	-**	-**	100	95,50

Sumber : Inspektorat Kota Tasikmalaya, 2022.

-\* Indikator Lama

-\*\* Indikator Baru

Secara umum tabel di atas menggambarkan bahwa capaian urusan pengawasan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa indikator baru yang nilai capaiannya belum tersedia dan terdapat pula indikator yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, misalnya Persentase tindaklanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat dan persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti.

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

##### 2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

###### 1. Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Angka konsumsi perkapita di Kota Tasikmalaya selama periode 2017-2020 terus meningkat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.127.

Angka Konsumsi Perkapita di Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Total Pengeluaran per kapita	13.348,35	14.459,94	15.710,37	15.068,46	15.729,30
2.	Jumlah Penduduk	661.404	662.723	663.517	716.515	723.920
3.	Rata-rata Pengeluaran perkapita (juta)	20,18	21,82	23,68	21,03	21,72

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

###### 2. Persentase Konsumsi Non Pangan Perkapita

Persentase konsumsi non pangan perkapita di Kota Tasikmalaya selama periode 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.128.

Persentase Konsumsi Non Pangan perkapita di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

No.	Kelompok Konsumsi	Satuan	2018	2019	2020	2021
1.	Makanan dan Minuman Selain Restoran (Pangan)	Milyar Rp	7.054,52	8.082,98	7.755,02	7.875,23
	Persentase	%	48,79	51,45	49,84	50,07



	Pengeluaran Pangan Perkapita	Juta Rp	10,64	11,29	10,83	10,21
2.	Non Pangan		7.405,43	7.627,38	7.804,82	7.875,23
	Persentase	%	51,21	48,55	50,16	49,93
	Pengeluaran Non Pangan Perkapita	Juta Rp	11,17	10,65	10,89	

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022.

#### 2.1.4.2. Infrastruktur Kota Tasikmalaya

##### 1. Jalan Kota

Berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 541.03/Kep.136-DPUPR/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota, dinyatakan bahwa panjang jalan kota di Kota Tasikmalaya adalah 450,742 km. Adapun kinerja infrastruktur jalan kota selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.129.  
Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2018 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Km	-*	403,910	-*	411,302	-*	379,525	-*	397,157
Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	93	89,61	91,58	91,25	97	84,2	98	88,11
Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target	Km	-*	29,100	-*	37,470	-*	16,083	-*	19,601
Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target (200 Km)	%	6	14,55	25	18,74	30	8,04	0,4	9,80
Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin	Km	-*	65,73	-*	80,42	-*	45,90	-*	42,275
Capaian panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin (target 300 Km selama 5 thn, 60 Km per tahun)	%	20	21,91	20	26,81	20	15,3	20	14,09

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Dari tabel diatas, tampak bahwa panjang jalan kondisi baik mengalami penurunan di tahun 2020. Hal tersebut diantaranya dikarenakan adanya refocusing anggaran bidang jalan. Sesuai dengan umur jalan, harus dilakukan



pemeliharaan rutin atau berkala dan peningkatan jalan untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi jalan.

Lebih lanjut, panjang jalan kota belum seluruhnya dilengkapi dengan bangunan pelengkap jalan dan apabila sudah ada belum berfungsi secara optimal terutama drainase jalan. Sehingga, pada beberapa ruas jalan mengalami genangan ketika hujan. Tabel berikut ini merupakan kinerja bangunan pelengkap jalan terdiri dari pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan dari tahun 2018 sampai dengan 2020.

Tabel 2.130.  
Kinerja Bangunan Pelengkap Jalan Tahun 2018-2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Panjang pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	Km	20	21,51	20	26,81	20	37,03	20	26,69
Capaian pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	%	79,25	71,7	89,62	80,93	94,34	123,43	88,16	88,97

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Bangunan pelengkap jalan diatas meliputi pekerjaan-pekerjaan antara lain pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaandrainase jalan, pembangunan/rehabilitasi tembok penahan tanah jalan dan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan trotoar.

Berikut ini merupakan capaian pembangunan jalan mulai tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 2.131.  
Capaian Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2018 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian jumlah jalan dan jembatan yang dibangun	Km	-*	0,7	-*	0,9	-*	2,45	-*	3,425



Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian jalan dan jembatan yang dibangun terhadap target (target = panjang jalan 6,405 jembatan = 3unit)	%	3,3	10,93	14,83	14,05	33,55	38,25	88,16	53,48

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022.

Di sisi lain, masih terdapat masalah keterbatasan kapasitas jalan yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Hal ini disiasati dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

## 2. Sumber Daya Air

Terdapat 35 Daerah Irigasi yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya dengan luas 5.321 Hektar terdiri dari 29 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Kota (luas 1.749 Hektar, total panjang 332,53 Km), 5 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Provinsi (luas 1.445 Hektar, total panjang 81,35 Km) dan 1 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (luas 2.128 Hektar, total panjang 196 Km). Kinerja infrastruktur irigasi selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.132.  
Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengairan Lainnya Tahun 2018-2021

Indikator	Satuan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	53,47	58	60,2	68,49	66,6	79,94	72,68	84,23
Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik	KM	108,01	117,15	121,61	138,36	134,53	161,47	146,8	180,22
Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya (target 40 Km selama 5 thn)	%	20	13,9	20	27,2	20	5,95	20	25,47
Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya	Km	-*	5,56	-*	10,88	-*	2,38	-*	10,19

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021.

### 2.1.4.3. Iklim Berinvestasi

#### 1. Angka Kriminalitas



Investasi dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban umum suatu daerah yang salah satu indikatornya adalah jumlah kriminalitas yang terjadi. Jumlah tindakan kriminalitas di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.133.**  
**Jumlah Kasus Kriminalitas di Kota Tasikmalaya**  
**Tahun 2018 - 2021**

No.	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kasus Narkoba	0	0	5	87
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	0	1	3	1
3	Jumlah Kejahatan Seksual	35	26	35	32
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	57	43	39	4
5	Jumlah Kasus Pencurian	108	77	69	70
6	Jumlah Kasus Penipuan	132	96	105	67
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	1	0	1
8	Jumlah Pidana Lainnya	98	122	120	109
9	Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun	430	366	376	327

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, 2021.

## 2. Jumlah Demonstrasi

Selain tingkat kriminalitas, kondisi keamanan dan ketertiban yang dapat mempengaruhi investasi daerah adalah banyaknya demonstrasi yang terjadi disuatu daerah.

Jumlah demonstrasi di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.134.**  
**Jumlah Demonstrasi di Kota Tasikmalaya**  
**Tahun 2018-2021**

No.	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Bidang Politik	1	9	10	6
2.	Ekonomi	3	7	19	6
3.	Lainnya	9	19	20	8
	Jumlah	13	35	49	20

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, 2022.

### 2.1.4.4. Kualitas Sumber Daya Manusia

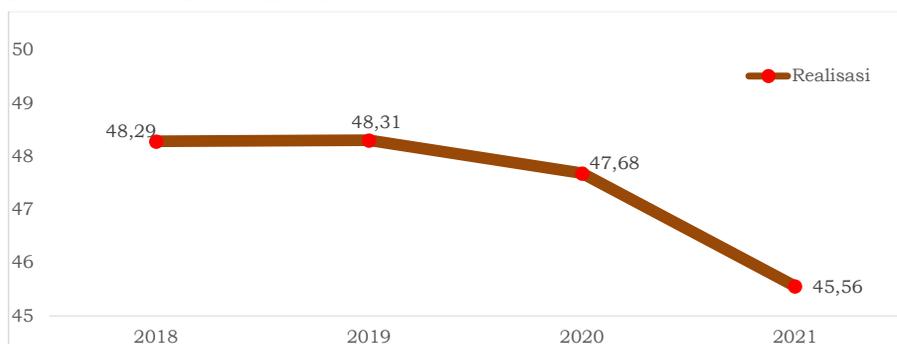
#### 1. Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*). Angka ini menggambarkan berapa besarnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Selain itu, angka ini dijadikan pula sebagai indikator yang dapat menunjukkan



keadaan ekonomi suatu daerah, apakah tergolong daerah maju atau sedang berkembang.

Angka Beban Ketergantungan penduduk di Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 sebesar 45,56. Hal ini berarti, bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas). Angka ini menyatakan bahwa masih banyak penduduk usia tidak produktif yang ditanggung penduduk usia produktif. Semakin besar angka beban ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2021.

Gambar 2.47.  
Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)  
Kota Tasikmalaya 2018-2021



## 2.2. Evaluasi RKPD TAHUN 2021

Tabel 2.135.  
Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah  
sampai dengan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (%)		Tingkat capaian Kinerja trhdp target	Tingkat capaian Keuangan trhdn	Predikat kinerja	Predikat anggaran
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Kinerja	Anggaran (Rp.)				
1	DINAS PENDIDIKAN	5	15	72	507.665.579.090	496.646.280.033	98,70	97,83	98,70	97,83	ST	ST
2	DINAS KESEHATAN	53	73	157	596.159.564.971	563.800.307.581	98,00	94,57	98,00	94,57	ST	ST
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	12	26	83	329.429.018.476	323.391.478.303	100,00	98,17	100,00	98,17	ST	ST
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	11	38	10.728.087.226	10.694.899.958	100,00	99,69	100,00	99,69	ST	ST
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	12	40	12.057.434.610	12.011.144.425	100,00	99,62	100,00	99,62	ST	ST
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	13	52	7.595.809.490	7.336.525.827	97,78	96,59	97,78	96,59	ST	ST
7	DINAS SOSIAL	6	16	57	10.065.946.090	9.939.546.367	99,00	98,74	99,00	98,74	ST	ST
8	DINAS TENAGA KERJA	4	13	41	5.382.579.140	5.286.160.310	100,00	98,21	100,00	98,21	ST	ST
9	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	10	27	65	29.953.292.825	29.453.297.928	99,00	98,33	99,00	98,33	ST	ST
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	14	40	33.582.350.450	33.210.225.973	100,00	98,89	100,00	98,89	ST	ST
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	13	42	10.132.781.111	9.945.627.496	100,00	98,15	100,00	98,15	ST	ST
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	23	58	13.252.970.837	12.327.116.862	98,39	93,01	98,39	93,01	ST	ST
13	DINAS PERHUBUNGAN	2	14	42	45.590.874.900	45.352.745.726	100,00	99,48	100,00	99,48	ST	ST
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	14	43	19.783.902.779	19.617.751.323	100,00	99,16	100,00	99,16	ST	ST
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16	32	77	50.680.365.324	44.069.930.739	96,33	86,96	96,33	86,96	ST	T
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	15	48	10.643.739.946	6.620.703.176	90,00	62,20	90,00	62,20	T	R
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	10	25	49	16.502.101.101	16.335.619.941	100,00	98,99	100,00	98,99	ST	ST
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	15	46	6.582.767.250	6.510.805.547	100,00	98,91	100,00	98,91	ST	ST



NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (%)		Tingkat capaian Kinerja trhdp target	Tingkat capaian Keuangan trhdp	Predikat kinerja	Predikat anggaran
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Kinerja	Anggaran (Rp.)				
19	SEKRETARIAT DAERAH	3	19	73	73.462.972.501	72.031.014.484	100,00	98,05	100,00	98,05	ST	ST
20	SEKRETARIAT DPRD	2	18	64	60.899.272.175	59.875.400.933	99,50	98,32	99,50	98,32	ST	ST
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	19	69	11.528.657.994	11.292.026.135	100,00	97,95	100,00	97,95	ST	ST
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	13	72	44.114.738.320	42.077.406.141	98,90	95,38	98,90	95,38	ST	ST
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	10	45	22.822.301.804	21.984.863.638	99,92	96,33	99,92	96,33	ST	ST
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	14	44	15.272.386.630	15.156.217.852	100,00	99,24	100,00	99,24	ST	ST
25	INSPEKTORAT	3	10	36	11.962.867.560	11.838.248.871	100,00	98,96	100,00	98,96	ST	ST
26	KECAMATAN CIHIDEUNG	5	15	43	10.023.319.360	9.994.732.720	100,00	99,71	100,00	99,71	ST	ST
27	KECAMATAN CIPEDES	5	17	46	8.926.453.750	8.856.834.825	100,00	99,22	100,00	99,22	ST	ST
28	KECAMATAN TAWANG	5	17	46	10.367.116.135	10.321.594.798	100,00	99,56	100,00	99,56	ST	ST
29	KECAMATAN INDIHIANG	5	17	47	10.347.294.357	10.322.223.840	100,00	99,76	100,00	99,76	ST	ST
30	KECAMATAN KAWALU	5	16	46	14.237.885.740	13.968.751.218	100,00	98,11	100,00	98,11	ST	ST
31	KECAMATAN CIBEUREUM	5	14	51	14.343.586.500	14.169.256.840	100,00	98,78	100,00	98,78	ST	ST
32	KECAMATAN TAMANSARI	5	17	46	11.988.477.828	11.856.410.241	100,00	98,90	100,00	98,90	ST	ST
33	KECAMATAN MANGKUBUMI	5	17	47	12.359.318.600	12.288.600.736	100,00	99,43	100,00	99,43	ST	ST
34	KECAMATAN BUNGURSARI	5	17	44	12.295.042.112	12.232.368.762	100,00	99,49	100,00	99,49	ST	ST
35	KECAMATAN PURBARATU	5	16	45	10.002.019.621	9.929.519.834	100,00	99,28	100,00	99,28	ST	ST
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	14	42	10.269.862.100	9.520.891.975	100,00	92,71	100,00	92,71	ST	ST
<b>JUMLAH</b>		<b>237</b>	<b>651</b>	<b>1956</b>	<b>2.081.012.738.703</b>	<b>2.010.266.531.358</b>	<b>99,32</b>	<b>96,60</b>	<b>99,32</b>	<b>96,60</b>	<b>ST</b>	<b>ST</b>

Keterangan : ST = Sangat Tinggi, T =Tinggi, S=Sedang, R = Rendah SR = Sangat Rendah



Rata-rata Realisasi kinerja dan keuangan perangkat daerah di Kota Tasikmalaya dalam predikat sangat tinggi untuk kinerja dan keuangan. Capaian pada ini mendekati target, dimana capaian kinerja sebesar 99,32%. Sedangkan untuk capaian keuangan mendakati target yaitu sebesar 96,60%. Adapun sebaran Capaian predikat perangkat daerah dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.48

#### Predikat Kinerja dan Keuangan

Berdasarkan grafik tersebut, untuk capaian Anggaran/Keuangan sebanyak 34 PD berpredikat Sangat Tinggi, 1 PD berpredikat Tinggi dan 1 PD berpredikat rendah. Adapun untuk capaian Kinerja sebanyak 35 PD berpredikat Sangat Tinggi, dan 1 PD dengan predikat Tinggi.

Untuk rincian realisasi kinerja dan anggaran masing-masing program dalam RKPD dapat dilihat sebagai berikut.



Tabel 2.136.  
Realisasi Kinerja dan Anggaran Per Program

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	arget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun n-1 (%)		
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	4		5		6		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PENDIDIKAN							
1	Dinas Pendidikan	-	507.665.579.090	255.426	496.646.280.033	88,82	97,83	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		507.665.579.090	255.426	496.646.280.033	88,82	97,83	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64 (B)	Poin/Kategori	404.669.341.776	31.250	399.141.901.582	80,15	98,63
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	81 (Baik) 103	%	102.478.353.402	223.846	97.038.200.551	64,76	67,57
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	250	%	77.679.200	250	77.492.000	100,00	99,76
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	130	%	360.204.712	28	309.122.300	88,00	90,03
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	80	%	80.000.000	80	79.563.600	100,00	99,45
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1		122.659.900	1	120.267.854	100,00	98,60
2	Dinas Kesehatan			596.159.564.971		563.800.307.581	85,59	94,57
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			596.159.564.971,00		563.800.307.581	85,589	94,57
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81	Poin/Kategori	161.872.197.321		157.449.994.109	100,00	97,27
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%	100.447.207.574		89.118.302.007	91,68	88,72
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	55	%	17.774.965.013		16.740.422.231	40,05	94,18
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100	%	327.124.040		308.697.950	91,11	94,37
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	42	%	1.517.169.600		1.505.702.600	100,00	99,24
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT	12	Sub Kegiatan	248.021.243.054		237.908.376.206	77,98	95,92
7	PROGRAM EMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAB UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12	Sub Kegiatan	66.199.658.369		60.768.812.478	95,24	91,80
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			329.429.018.476	54.028	323.391.478.303	80,42	98,17



NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDTahun n-1 (%)		
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		329.368.205.476	54.028	323.335.408.797	80,42	98,17	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81 (A)	Poin/Kategori	11.279.161.122	411	11.088.357.219	-	211,01
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	46,33	%	75.868.934.462	19.56	74.748.012.110	100,00	97,44
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	55,81904435	%	7.656.201.717	31	7.003.874.237	100,00	91,48
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	61,04	%	6.595.046.400	1.261	6.406.269.290	90,00	78,89
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	13,31		14.872.026.224	26.691	14.634.707.780	100,00	97,68
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	49,22	%	89.812.058.900	5.100	88.618.513.583	100,00	98,67
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	471		10.047.343.900	470	9.415.661.251	100,00	84,82
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	50	%	111.650.519.176	50	109.986.856.097	100,00	98,42
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	42,37	%	53.500.000	201	13.732.500	100,00	31,45
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	488	Poin	1.533.413.575	486	1.419.424.730	75,00	86,63
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
11	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	5		60.813.000	5	56.069.506	100	84,54
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	753		10.728.087.226,00	814	10.694.899.958	95,96	99,69
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	753		10.728.087.226,00	814	10.694.899.958	95,96	99,69
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	176		4.865.211.118,00	237	4.843.892.207	87,89	98,41
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	554		3.561.603.099,00	554	3.558.696.199	100	99,92
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	23		2.301.273.009,00	23	2.292.311.552	100	100
5	Satuan Polisi Pamong Praja	672		12.057.434.610,00	672	12.011.144.425	100,00	98,36
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	672		12.057.434.610	672	12.011.144.425	100,00	98,36
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	365		11.205.819.360	365	11.165.322.454	100,00	97,36
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	307		851.615.250	307	845.821.971	100,00	99,37
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.500	-	7.595.809.490	32.499	7.336.525.827	97,78	96,59
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32.500	-	7.595.809.490	32.499	7.336.525.827	97,78	96,59
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	121		3.508.884.950	32.054	3.461.822.412	100,00	98,66



NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDTahun n-1 (%)		
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	604	3.717.269.700	433	3.511.996.265	93,33	94,48	
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	12	369.654.840	12	362.707.150	100,00	98,12	
7	Dinas Sosial	68.730	10.065.946.090,00	67.775	9.939.546.367	96,36	97,59	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	68.730	10.065.946.090,00	67.775	9.939.546.367	96,36	97,59	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.030	5.675.621.790,00	979	5.606.118.667	99,27	97,65	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	258	1.187.310.700,00	190	1.169.638.348	89,88	99,22	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.646	1.555.178.400,00	5.410	1.541.665.507	96,13	99,06	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	59.582	500.045.900,00	59.582	499.239.300	100,00	99,82	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.200	923.065.300,00	1.600	916.667.300	92,86	98,98	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	14	224.724.000,00	14	206.217.245	100,00	90,81	
8	Dinas Tenaga Kerja		5.382.579.140,00	211	5.286.160.310	70,19	98,21	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	300	5.382.579.140	211	5.286.160.310	70,1933881	98	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79	4.178.560.340	79	4.130.654.513	100	99	
		73		Baik		73		100
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	100		%		57		57
		100		%		105		105
		100	%	100	100	96		
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	43	84.788.000	25	82.273.900	80,5	97	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	78	236.053.200	50	222.840.547	64,1025641	94	
		100		%		100		100
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	5.547	29.953.292.825	1.338	29.453.297.928	97,55	95,57	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.330	14.590.283.725	1.338	14.386.321.906	97,66	93,28	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	240	13.665.111.125	248	13.496.947.970	90,65	87,04	
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	566	865.126.700	566	830.046.336	100,00	90,65	
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	520	48.871.200	520	48.603.000	100,00	99,45	
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	4	11.174.700	4	10.724.600	100	95,97	



NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.377	15.363.009.100	2.217	8.076.150.109	97,44	97,87
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	537	8.309.305.500	377	8.076.150.109	94,87	96,76
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	521	7.831.669.220	361	7.609.604.383	89,74	95,71
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	16	477.636.280	16	466.545.726	100	98
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.840	7.053.703.600	1.840	6.990.825.913	100,00	98,97
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	468	3.788.575.800	468	3.762.958.100	100,00	99,26
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	20	2.069.888.000	20	2.037.696.743	100,00	98,41
9	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.224	816.589.750	1.224	813.253.370	100,00	98,63
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	128	378.650.050	128	376.917.700	100,00	100,00
10	Dinas Lingkungan Hidup		33.582.350.450		33.210.225.973	100,00	98,89
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		33.582.350.450		33.210.225.973	100,00	98,89
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	89	2.935.000	88,50	2.548.065	99,44	86,82
		81	15.458.747.450	71,51	15.345.058.988	88,28	99,26
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100	3.262.600	-	2.767.900	100,00	84,84
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	53,54	207.864.000	64,92	201.897.178	121,26	97,13
		79		83,82		105,30	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50	1.012.500	50	1.011.600	100,00	99,91
		100	1.135.981.000	100	1.097.092.200	100,00	96,58
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	100	87.837.800	100,00	86.379.650	100,00	98,34
6	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100	13.575.000	150,00	13.575.000	150,00	100,00
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	77,86	13.468.133.900	73,86	13.348.699.294	94,86	99,11
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		10.132.781.111		9.945.627.496	100,00	96,99
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		10.132.781.111		9.945.627.496	100,00	96,99
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.871.645.611		8.755.028.107	100,00	96,69
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		1.071.805.000		1.007.733.589	100,00	96,10



NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	arget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			86.597.000		85.951.700	100,00	99,25
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			102.733.500		96.914.100	100,00	95,90
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			13.252.970.837		12.327.116.862	98,39	93,01
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			11.949.555.337		11.070.764.425	98,87	94,93
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.746.461.387		4.711.437.435	96,75	99,26
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			164.200.000		163.115.686	100,00	99,34
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			5.665.339.400		4.895.204.456	98,75	86,41
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			1.373.554.550		1.301.006.848	100,00	94,72
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1.303.415.500		1.256.352.437	98,00	97,89
5	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			110.965.100		106.493.855	90,00	95,97
6	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			31.056.000		31.028.000	100,00	99,91
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			813.003.000		773.621.315	100,00	95,16
8	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			206.665.400		203.636.017	100,00	98,53
9	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			141.726.000		141.573.250	100,00	99,89
13	DINAS PERHUBUNGAN			45.590.874.900		45.352.745.726		99,48
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			45.590.874.900		45.352.745.726		99,48
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77-88 (Baik)	Nilai/Ktg	20.000.000	2	20.000.000	100	100
		81	Nilai/ktg	36.202.095.200	83,00	36.120.639.980	102,47	99,77
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	50,18	%	8.770.299.500	53,57	8.615.315.826	106,76	98
		100	%	-	160,00	-	160,00	-
		95,25	%	293.395.200	76,70	293.324.000	80,52	99,98
		84,12	%	305.085.000	61,84	303.465.920	73,51	99,47
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100	%	19.783.902.779	7	19.617.751.323	96,30	99,16
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			19.783.902.779	8,74	19.617.751.323	96,30	82,80
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100	%	19.493.292.529	6,74	19.329.950.503	92,59	76,88
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	%	4.904.154.141	20,21	4.875.363.296	100,00	77,46
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100	%	1.008.858.000	0,00	1.001.849.389	83,33	74,51



NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun n-1 (%)		
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	100	%	13.580.280.388	0	13.452.737.818	94,44	78,68
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	2,75	predikat	290.610.250	0,00	287.800.820	100,00	74,20
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			123.438.250	0	121.950.730	100,00	98,79
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100	%	123.438.250	0	121.950.730	100,00	98,79
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			167.172.000	-	165.850.090	100,00	49,60
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	50	%	167.172.000	-	165.850.090	100,00	49,60
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			50.680.365.324		44.069.930.739	-	86,96
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			12.099.621.085		12.017.046.158		99,32
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76	(BB) Kategori	10.452.758.835	77,07	10.395.370.266	101,41	99,45
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	100	%	9.941.450	100	9.826.450	100,00	98,84
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	13,5	%	82.438.500	33	82.233.300	245,28	99,75
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	24	%	64.901.000	27,5	64.855.300	114,51	99,93
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	10	%	390.304.000	16,6	389.073.974	165,56	99,68
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100	%	145.000.000	100	144.884.050	100,00	99,92
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	11,31	%	260.542.200	11,31	259.346.815	100,00	99,54
		100	Orang		100		100,00	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	74,5	%	693.735.100	74,5	680.379.203	100,00	98,07
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			38.580.744.239		32.052.884.581		83,08
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			21.220.899.165		15.750.571.823		74,22
9	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100	%	25.000.000	100	24.743.500	100,00	98,97
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	80	%	20.539.297.631	80	15.097.702.416	100,00	73,51
11	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	72	%	44.952.500	72	43.302.156	100,00	96,33
12	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	4	%	140.822.414	4	137.828.701	100,00	97,87
13	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	124	%	220.826.620	124	197.022.050	100,00	89,22
14	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	76	%	250.000.000	76	249.973.000	100,00	99,99
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			17.359.845.074		16.302.312.758		



NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
15	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5	%	17.341.325.074	5	16.284.324.958	100,00	93,90
		325	Orang		325		100,00	
		100	Orang		100		100,00	
16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	30	%	18.520.000	2	17.987.800	6,06	97,12
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			10.643.739.946,00		6.620.703.176	88,63	62,20
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	-	-	10.643.739.946,00	-	6.620.703.176	88,63	62,20
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			10.643.739.946,00		6.620.703.176	88,63	62,20
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			7.313.302.946	4.317	5.706.222.076	87,84	78,03
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			145.100.000	-	-	0,00	-
3	Program Promosi Penanaman Modal			289.220.500	-	-	0,00	-
4	Program Pelayanan Penanaman Modal			2.685.765.000		2.153.036.826	66,67	80,16
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			448.662.000		341.183.344	100,00	76,04
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal			196.010.000	-	75.956.225	100,00	38,75
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata			16.502.101.101,00		16.335.619.941		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			12.908.543.730		12.786.916.910		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75 (BB)	Kategori	5.810.367.730		5.728.822.129	100,00	98,60
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	28	%	2.018.000.000	28	2.011.745.100	100,00	99,69
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	75	%	5.080.176.000	75	5.046.349.681	100,00	99,33
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	20	%	260.000.000	20	260.000.000	100,00	100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.641.168.240		1.618.423.934		
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	57	%	313.330.000	57	308.571.500	100,00	98,48
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	20	%	942.075.160	20	932.142.284	100,00	98,95
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	50	%	40.000.000	50	40.000.000	100,00	100,00
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	34	%	85.763.080	34	77.710.150	100,00	90,61
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.952.389.131		1.930.279.097		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.952.389.131		1.930.279.097		
9	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	51	%	479.499.838	51	475.463.950	100%	99,16%



NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	arget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
10	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	430.560	Orang	365.932.285	478.331	361.245.055	111%	98,72%
11	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	41	%	1.106.957.008	41	1.093.570.092	100%	98,79%
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH			6.582.767.250		6.510.805.547		98,91
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			6.080.694.500		6.019.249.471		98,99
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	82,8	Poin (Baik)	4.928.624.500	82,94	4.893.148.268	100,17	99,28
		75	Poin (BB) (Kategori)		76,28		101,71	
2	Program Pembinaan Perpustakaan	14	%	1.129.590.000	71,52	1.104.249.155	510,88	97,76
		5,53	%		5,53		100,00	
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	50	%	22.480.000	50	21.852.048	100,00	97,21
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			502.072.750		491.556.076		97,91
4	Program Pengelolaan Arsip	2	Poin	502.072.750	0	491.556.076	0,00	97,91
		62,16	%		63,89		102,78	
19	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	73.462.972.501	0	72.031.014.484	107,68	98,05
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	-	0	73.462.972.501	-	72.031.014.484	107,68	98,05
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BB (75)	Kategori	23.180.985.830	-	23.178.944.342	126,47	99,99
0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	77-88 (Baik)	Kategori	16.751.221.859	-	16.053.410.813	94,43	95,83
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100	%	29.928.549.592	-	29.588.069.006	122,90	98,86
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100	%	1.256.565.150	-	969.583.512	106,25	77,16
		100	%	279.429.200	-	257.066.210	100,00	92,00
		100	%	865.921.860	-	834.566.677	102,00	96,38
		100	%	1.200.299.010	-	1.149.373.931	100,00	95,76
20	SEKRETARIAT DPRD	1.099.760		60.899.272.175	1.099.742	59.875.400.933	97,19	98,32
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.099.434		42.592.311.397	1.099.421	42.277.662.269	94,50	99,26
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	326		18.306.960.778	321	17.597.738.664	99,87	96,13
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			11.528.657.994		11.292.026.135		97,95
	PERENCANAAN			10.750.362.934		10.541.702.845	100,00	98,06



NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDTahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.418.837.404		9.263.909.233	100,00	98,36
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			779.391.370		733.638.263	100,00	94,13
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			552.134.160	115	544.155.349	100,00	98,55
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			778.295.060		750.323.290	100,00	96,41
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100	%	778.295.060	10	750.323.290	100,00	96,41
<b>22</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>			<b>44.114.738.320</b>		<b>42.077.406.141</b>	<b>98,90</b>	<b>95,38</b>
	KEUANGAN			44.114.738.320,00		42.077.406.141,00	98,90	95,38
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77	Baik	12.407.317.920,00	88,54	11.196.711.467,00	100,00	90,24
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100	%	29.434.551.750,00	100	28.697.240.642,00	100,00	97,50
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100	%	2.272.868.650,00	100	2.183.454.032,00	96,71	96,07
<b>23</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>			<b>22.822.301.804</b>		<b>21.984.863.638</b>	<b>99,92</b>	<b>95,15</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76,67		17.620.169.360	2,78	17.148.257.743	100,00	97,32
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,00		5.202.132.444	0,00	4.836.605.895	99,83	92,97
<b>24</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>15.272.386.630</b>		<b>15.156.217.852</b>	<b>105,68</b>	<b>99,24</b>
	KEPEGAWAIAN			12.755.986.630		12.641.186.962	107,45	99,10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78 90	BB Sangat Baik	9.880.967.480		9.826.580.562	100,00	99,45
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	80 100	% %	2.875.019.150		2.814.606.400	114,89	97,90
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.516.400.000		2.515.030.890	100,54	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100	%	2.516.400.000		2.515.030.890	100,54	99,95
<b>25</b>	<b>Inspektorat</b>			<b>11.962.867.560,00</b>		<b>11.838.248.871</b>	<b>100,00</b>	<b>98,96</b>
	INSPEKTORAT DAERAH			11.962.867.560,00		11.838.248.871	100,00	98,96
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 80	% %	10.121.294.260,00	487,00	10.027.733.030,00	100,00	99,08
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	76	%	1.116.442.200,00		1.090.387.241	100,00	97,67
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100	%	725.131.100,00		720.128.600	100,00	99,31



NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	arget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
<b>26</b>	<b>Kecamatan Cihideung</b>		<b>10.023.319.360</b>		<b>9.994.732.720</b>		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81	Katagori A	5.888.173.520	100,00	5.885.229.163	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90	Sangat Baik	253.901.200	100,00	252.542.400	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	90	%	3.643.975.140	499,67	3.619.744.257	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	%	87.779.700	13,00	87.779.500	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			149.489.800	100,00	149.437.400	100,00
<b>27</b>	<b>Kecamatan Cipedes</b>		<b>8.926.453.750</b>		<b>-</b>	<b>8.856.834.825</b>	<b>100,00</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Point	5.210.480.550	-	5.191.848.094	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90	Kategori	408.880.000	90	404.990.400	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	90%		3.213.072.700	-	3.173.587.131	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%		77.770.500	-	70.235.700	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%		16.250.000	-	16.173.500	100,00
<b>28</b>	<b>Kecamatan Tawang</b>		<b>10.367.116.135</b>		<b>-</b>	<b>10.321.594.798</b>	<b>100,00</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Point	6.552.544.960	-	6.534.676.102	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90	Kategori	295.091.200	-	279.031.900	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	90%		3.420.572.775	-	3.409.179.646	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%		91.844.600	-	91.644.550	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%		7.062.600	-	7.062.600	100,00
<b>29</b>	<b>Kecamatan Indihiang</b>		<b>10.347.294.357</b>		<b>-</b>	<b>10.322.223.840</b>	<b>93,30</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.302.706.647	-	6.350.398.209	99,85
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			367.824.000		357.499.000	91,67
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			3.550.022.360		3.523.412.231	75
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			90.866.350		56.164.600	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			35.875.000		34.749.800	100,00
<b>30</b>	<b>Kecamatan Kawalu</b>	<b>36.826</b>		<b>14.237.885.740</b>	<b>33.227</b>	<b>13.968.751.218</b>	<b>99,05</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.701		8.695.594.200	28.701	8.614.782.100	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13		272.281.600	13	270.423.900	100,00



NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDTahun n-1 (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.057	5.138.281.340	4.468	5.059.460.968	95,24	98,47
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13	108.000.000	4	8.000.000	100,00	7,41
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42	23.728.600	41	16.084.250	66,67	67,78
<b>31</b>	<b>Kecamatan Cibereum</b>	<b>100,00</b>	<b>14.343.586.500,00</b>	<b>-</b>	<b>14.169.256.840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,78</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82,00	% 9.043.205.050,00	27.112	8.964.358.961,00	100,00	99,13
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.50	Kategori 280.090.750,00	10,00	270.572.336,00	104,55	96,60
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4.873.041.650		4.814.421.013	100,00	98,80
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		116.400.000		90.227.350	100,00	77,51
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		30.849.050		29.677.180	50	96
<b>32</b>	<b>Kecamatan Tamansari</b>		<b>11.988.477.828</b>		<b>11.856.410.241</b>	<b>100,00</b>	<b>98,90</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.106.068.064	26.986	7.044.416.209	100,00	93,54
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		305.646.260	3	304.032.947	100	99,47
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4.144.851.344	-	4.084.914.340	100	98,55
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		127.460.000	62	124.443.800	100	97,63
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		304.452.160	5	298.602.945	100	98,08
<b>33</b>	<b>Kecamatan Mangkubumi</b>	<b>20.459</b>	<b>12.359.318.600</b>	<b>5.496</b>	<b>12.288.600.736</b>	<b>99,89</b>	<b>99,43</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18584	7.630.474.500	3631	7.603.762.653	99,44	99,65
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48	267.524.100	38	267.432.300	100,00	99,97
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1791	4.327.110.500	1791	4.302.216.933	100,00	99,42
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33	104.067.500	33	86.184.650	100,00	82,82
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3	30.142.000	3	30.000.000	100,00	96,23
<b>34</b>	<b>Kecamatan Bungursari</b>		<b>12.295.042.112</b>	<b>5.478</b>	<b>12.232.368.762</b>	<b>80,00</b>	<b>99,49</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77	Point 7.810.893.670	26.134	7.780.869.484	-	99,62
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		273.701.140	32	273.041.050	100	99,76
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	90	% 3.934.609.802	1.219	3.904.191.728	100	99,23
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	% 85.636.000	2	84.788.600	100	99,01
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	% 190.201.500	4	189.477.900	100	99,62



NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun n-1 (%)		
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
<b>35</b>	<b>Kecamatan Purbaratu</b>		<b>10.002.019.621</b>	<b>342</b>	<b>9.929.519.834</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BB (77)	Kategori	6.240.652.400	342	6.216.002.540	100,00%	99,61%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sangat Baik	Kategori	242.599.361		239.024.000	100,00%	98,53%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	90	%	3.397.547.860		3.354.056.894	100,00%	97,91%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	%	112.960.000		112.210.400	100,00%	99,34%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	%	8.260.000		8.226.000	100,00%	99,59%
<b>36</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		<b>10.269.862.100</b>		<b>9.520.891.975</b>	<b>100,00</b>	<b>92,71</b>	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		10.269.862.100		9.520.891.975	100,00	92,71	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12	Bulan	2.730.232.100	3	2.690.915.422	100	98,56
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	200	Orang	124.138.400	200	115.736.065	100	93,23
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	280	Orang	1.573.886.000		1.358.369.368	100	86,31
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2210	Orang	5.603.588.900	2.266	5.131.003.350	100,00	91,57
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2	Kali	57.025.300	50	56.115.660	100	98,40
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8	Kali	180.991.400	75	168.752.110	100,00	93,24

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2021, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022.



## **2.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

Berdasarkan uraian capaian program tersebut di atas, dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Faktor pendorong pencapaian kinerja dan anggaran antara lain :

- 1) Kapasitas aparatur pelaksana kegiatan;
- 2) pengadaan program sarana dan prasarana penunjang;
- 3) proses pengadaan barang/jasa yang sudah baik;
- 4) serta proses pengadministrasian keuangan yang baik.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan pada tahun 2021 ini adalah :

- 1) akibat terjadinya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan pandemic covid-19, sehingga harus merubah Perencanaan Kegiatan yang telah ada. Hal ini berdampak pada mundurnya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
- 2) Peralihan penggunaan sistem informasi yang digunakan dalam penatausahaan keuangan sehingga perlu adanya adaptasi kembali dalam penatausahaan keuangan;

## **2.3. Kendala yang dihadapi**

Tingkat capaian kinerja dan keuangan yang dicapai pada Tahun 2021, tidak terlepas dari faktor pendorong dan faktor penghambat/kendala yang dihadapi. Adapun faktor penghambat atau kendala yang dihadapi antara lain :

1. Adanya refocusing dan realokasi anggaran sebagai akibat pandemic covid-19 sehingga kegiatan menumpuk di Tahun 2021;
2. Adanya perubahan kebijakan Bantuan Keuangan Provinsi mengalami perubahan sehingga harus direncanakan kembali kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi tersebut;
3. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
4. Ketersediaan barang pada e-katalog yang tidak ada sesuai dengan kebutuhan sehingga pengadaan tidak dapat dilaksanakan

## **2.4. Capaian Indikator Kunci Utama (IKU)**

Indikator kunci utama (IKU) merupakan indikator yang dijadikan ukuran pencapaian pelaksanaan pembangunan. Berikut capaian IKU Kota Tasikmalaya pada tahun 2021.



Tabel 2.137.  
Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2017-2022  
Tahun 2021

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2021		KET
		Target	Realisasi	
<b>Misi 1: Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal</b>				
T1 : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Capaian implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius (%)	87	87	Sekretariat Daerah
S1 : Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Jumlah isu/ potensi konflik SARA (kasus) yang ditangani	0	0	Badan Kesbangpol
P1 : Program Magrib Mengaji	<u>Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti Program Magrib Mengaji (%)</u>	90	90	Sekretariat Daerah
P2 : Program Tasik Berkarakter	Persentase siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti pendidikan karakter (%)	100	100	Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan
	<u>Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan berwawasan kebangsaan (%)</u>	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan hari besar keagamaan (%)	75	75	Sekretariat Daerah
T2 : Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah	<u>Persentase budaya daerah yang dilestarikan (%)</u>	57	57,97	Dinas Porabudpar
S2 : Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah	Persentase kelompok seni budaya aktif (%)	75	75,14	Dinas Porabudpar
P3 : Program Tasik Berbudaya	Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah (%)	57	57,97	Dinas Porabudpar
	Persentase pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah tingkat kota (%)	100	100	Dinas Porabudpar
<b>Misi 2: Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat</b>				
T3 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	<b>12,5</b>	<b>13,13</b>	BPS
S3 : Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Penanganan PMKS (%)	85,75	87,64	Dinsos



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2021		KET
		Target	Realisasi	
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	100	100	Dinsos
P4 : Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase rumah tangga miskin yang terlayani program jaminan dan perlindungan sosial (%)	95	99	Dinas Sosial
P5 : Program Tasik Bersedekah	Jumlah sedekah yang terkumpul (milyar rupiah)	2,80	2,89	Sekretariat Daerah
P6 : Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif)	Jumlah sasaran penerima Program Gema Madani (kelompok/orang)	5000	4388	Sekretariat Daerah
P7 : Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)	Jumlah keluarga miskin yang mendapat program P3KK	600	600	Dinas KUMKM dan Perindag (200),
				Dinas Sosial (100),
				DKP3 (300)
T4 : Mekuatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	<b>4,5</b>	<b>3,57</b>	BPS Kota Tasikmalaya
	PDRB a.d.h Berlaku (triliun rupiah)	<b>22,98</b>	22,85	BPS Kota Tasikmalaya
	PDRB Perkapita a.d.h Berlaku (juta rupiah)	<b>30,77</b>	31,56	BPS Kota Tasikmalaya
	Pengeluaran Perkapita (juta rupiah)	8,57	10,21	BPS Kota Tasikmalaya
	Inflasi daerah (%)	<b>2,25</b>	<b>1,17</b>	BPS Kota Tasikmalaya
	Indeks Gini (point)	<b>0,40</b>	<b>0,414</b>	BPS Kota Tasikmalaya
S4 : Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa	Indeks Daya Beli (point)	<b>57,58</b>	<b>70,78</b>	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan (%)	4,38	1,91	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran (%)	4,68	2,97	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	4,61	2,39	BPS Kota Tasikmalaya



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2021		KET
		Target	Realisasi	
	Nilai investasi daerah (milyar rupiah)	250	1.630	DPMPTSP
	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	430.560	483.569	Dinas Porabudpar
P8 : Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah	Persentase Koperasi sehat (%)	24,00	27,48	Dinas KUMKM dan Perindag
	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil (%)	1	0	Dinas KUMKM dan Perindag
	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang meningkat omsetnya (%)	3	10	Dinas KUMKM dan Perindag
	Persentase Industri Kecil Menengah berkualitas (%)	3	10,7	Dinas KUMKM dan Perindag
	Capaian penerbitan Perizinan Terpadu tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	DPMPTSP
S5 : Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,72	7,66	Dinas Tenaga Kerja dan BPS Kota Tasikmalaya
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	66,50	65,75	
P9 : Program Pencetakan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru (orang)	1.523	1.608	Dinas KUKM Perindag
				DKP3
				Dinas Tenaga Kerja
				Dinas Pendidikan
				Dinas Porabudpar
P10 : Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten (%)	60	23	Dinas Tenaga Kerja / data sementara
S6 : Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	0,07	0,28	BPS Kota Tasikmalaya
	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point)	91	91,3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2021		KET
		Target	Realisasi	
P11 : Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian (%)	0,07	10,98	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Ketersediaan (point)	84	91,5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
<b>Misi 3: Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan</b>				
T5 : Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan	Persentase infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas (%)	76,83	71,05	DPUTR, Disperwaskim, Dishub dan DLH
S7 : Meningkatnya layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan inklusif	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	80,00	88,10	DPUTR dan Dishub
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	58,71	DPUTR
P12 : Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	80	88,10	DPUTR, dan Dishub
	Rasio Jaringan Irigasi (point)	0,0704	0,087	DPUTR
S8 : Meningkatnya kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	Persentase KK/RT yang berakses SPALD	61,04	61,20	DPUTR, Disperwaskim dan Dinas Kesehatan
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	100	100	Disperwaskim
P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)	99,23	99,23	Disperwaskim
S9 : Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	74,20	63,85	DLH
P14 : Program Tasik Resik	Penambahan ruang terbuka hijau (Ha)	12,14	10,30	DLH
	Indeks Kualitas Air	53,54	65,75	DLH
	Indeks Kualitas Udara	79,00	83,45	DLH



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2021		KET
		Target	Realisasi	
	Persentase Penanganan Sampah (%)	77,86	73,86	DLH
<b>Misi 4: Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia</b>				
T6 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indek Pembangunan Manusia (point)	73,25	73,31	BPS Kota Tasikmalaya
S10 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (point)	68,25	69,12	BPS Kota Tasikmalaya
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	100	58,61	Dinas Pendidikan
P15 : Program Tasik Cerdas	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,55	9,52	BPS Kota Tasikmalaya
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,51	13,46	BPS Kota Tasikmalaya
S11 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indek Kesehatan (point)	81,06	80,52	BPS Kota Tasikmalaya
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100,00	48,09	Dinas Kesehatan
P16 : Program Tasik Sehat	Usia Harapan Hidup (tahun)	72,75	72,34	BPS Kota Tasikmalaya
	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	145,18	303,87	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	5,72	8,5	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (%)	19,10	14,48	Dinas Kesehatan
S12 : Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga (%)	13	14	Dinas Porabudpar
P17 : Program Tasik Muda Berprestasi	Jumlah prestasi bidang kepemudaan (buah)	3	3	Dinas Porabudpar
	Persentase peningkatan nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat (%)	3	4	Dinas Porabudpar
S13 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (point)	3	4,46	Satpol PP
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100	98,47	Satpol PP dan BPBD



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2021		KET
		Target	Realisasi	
	Persentase Penanganan Bencana Daerah (%)	100	100	BPBD
P18 : Program Tasik Siaga (Siap, Aman Terjaga)	Persentase penegakan Peraturan Daerah (%)	86	86,13	Satpol PP
	Persentase penanganan bencana daerah (%)	100	100	BPBD
T7 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender	Persentase Keluarga Sejahtera (%)	86	63,77	DPPKBP3A
	Indeks Pembangunan Gender/IPG (point)	91,52	91,74	BPS Kota Tasikmalaya
	Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (point)	62,95	59,51)*	BPS Kota Tasikmalaya
S14 : Meningkatnya keluarga berencana dan pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,21	0,81	BPS Kota Tasikmalaya
	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (point)	2,06	2,03	DPPKBP3A
P19 : Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT yang tertangani (%)	100	100	DPPKBP3A
	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%)	72,60	72,37	DPPKBP3A
<b>Misi 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</b>				
T8 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	61-70 (B)	57,58 (CC)*	Sekretariat Daerah
S15. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori)	77-88 (Baik)	83,32 (baik)	Sekretariat Daerah
	<u>Capaian Predikat Indeks SPBE</u>	Baik (2,75)	Baik (2,68)	Diskominfo
P20 : Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan dan Akuntabel)	Cakupan IKM Perangkat Daerah (%)	95	97,22	Semua Perangkat Daerah



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2021		KET
		Target	Realisasi	
S16 : Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	WTP	WTP*	BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Sekretariat Daerah,
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	21,79	41,68	BPKAD, BAPENDA
	Nilai Evaluasi SAKIP (kategori)	70-80 (BB)	70,81 (BB)*	Sekretariat Daerah
	Nilai Evaluasi LPPD (kategori)	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,37 (sangat Tinggi)*	Sekretariat Daerah
	Tingkat Maturitas SPIP (level)	2,75	2,83	Inspektorat
P21 : Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur	Cakupan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (%)	73	91,67	Semua Perangkat Daerah
	Cakupan nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah (%)	65	100	Semua Perangkat Daerah

Sumber : LKPJ Wali Kota Tasikmalaya tahun 2021.

### 2.3. Capaian Janji Politik

#### A. Pencetakan 5.000 wirausaha baru

Program Wirausaha Baru (WUB) adalah program pembangunan ekonomi strategis yang diselenggarakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan target di RKPD tahun 2020 sebanyak 1.000 wirausaha baru. Program WUB bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui penyiapan pelaku usaha, kegiatan fasilitas pembiayaan modal usaha dan kegiatan fasilitasi subsidi kredit/margin modal usaha.

Program WUB dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah dengan target 1000 orang, Namun pada tahun 2020 dikarenakan ada refocusing anggaran target WUB diubah menjadi 105 orang pada RPJMD Perubahan dan 205 orang pada RKPD Perubahan Tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021 Program WUB dilaksanakan dengan target 1.523 Orang.

Berikut ini perkembangan Program Pencetakan WUB yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut:

#### 1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan



Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan Program WUB yang secara operasional dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp.975.000.000,00 dengan 2 kegiatan yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sektor Jasa Perdagangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 487.500.000,00 dengan target pencetakan WUB sebanyak 375 orang. Sektor usaha yang dikembangkan adalah Tata Rias, Digital Marketing, Menjahit, dan Jas Service HP. Realisasi anggaran sebesar Rp.478.091.250,0 atau 98,07%. Realisasi fisik yaitu peserta yang mendapat sertifikat 375 orang.
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sektor Home Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 487.500.000,00 dengan target pencetakan WUB sebanyak 375 orang. Sektor usaha yang dikembangkan adalah Makanan Olahan, Alas Kaki, dan Konveksi. Realisasi anggaran sebesar Rp.476.775.000,00 atau 97,80% dan realisasi fisik yaitu peserta yang mendapat sertifikat 375 orang

## **2) Dinas Pertanian dan Perikanan**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan Program WUB yang secara operasional dilaksanakan melalui Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Pertanian dan Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Perikanan dengan total anggaran sebesar Rp.675.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Pertanian dengan pagu anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dengan target pencetakan WUB sebanyak 300 orang yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu :
  - Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan pagu anggaran Rp. 337.500.000,- dengan target 225 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp.321.390.350,- atau 96,23% dan realisasi fisik 100%. Capaian target pencetakan wirausaha baru pada sektor tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan dari target sebanyak 225 orang dapat terealisasi sebanyak 225 orang atau tercapai 100%;
  - Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Peternakan dengan pagu anggaran Rp.112.500.000,- dengan target 75 orang. Realisasi



anggaran sebesar Rp.105.507.000,- atau 93,78% dan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk capaian target pencetakan Wirausaha baru pada sektor peternakan dari target sebanyak 75 orang dapat terealisasi sebanyak 70 orang atau sebesar 93,33%, hal tersebut dikarenakan pada pelaksanaannya terdapat 5 orang peserta yang mengundurkan diri ketika program sedang berjalan sehingga peserta tersebut tidak dapat mengikuti seluruh tahapan program sesuai dengan yang disyaratkan dan tidak berhak mendapatkan sertifikat peserta program wirausaha baru. Atas kekurangan pencapaian target tersebut akan ditambahkan pada target program wirausaha baru pada tahun 2022;

2. Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Perikanan pagu anggaran sebesar Rp 225.000.000,- dengan target pencetakan WUB sebanyak 150 orang yang dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Perikanan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 207.285.850,- atau 92,13 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk capaian target pencetakan Wirausaha baru pada sektor perikanan dari target sebanyak 150 orang dapat terealisasi sebanyak 150 orang atau sebesar 100%

### **3) Dinas Pendidikan.**

Program WUB di Dinas Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan Pencetakan Wirausaha Baru dengan target 100 orang dan alokasi dana sebesar Rp.139.320.000,00. Sektor usaha yang dikembangkan meliputi Pelatihan , Tata Busana, Tata Kecantikan rambut. Realisasi anggaran sebesar Rp. 139.320.000,00 realisasi fisik yaitu yang mendapat sertifikat 100 orang.

### **4) Dinas Tenaga Kerja**

Program WUB di Dinas Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan kegiatan Pencetakan Wirausaha Baru, dengan target 163 WUB dan pagu anggaran sebesar Rp. 203.677.000,00. Sektor usaha yang dikembangkan meliputi tata boga, tata busana, tata kecantikan dan tata rias. Realisasi anggaran sebesar Rp. 186.137.760 atau 91,38 % realisasi fisik yaitu yang mendapat sertifikat 163 orang

### **5) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata**

Program WUB di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan di Bidang Pariwisata melalui Program



Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sub kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan target 150 orang dan alokasi dana sebesar Rp. 190.370.000,00. Sektor usaha yang dikembangkan yaitu media digital 52 orang dan Barista 60 orang serta fashion 38 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp. 188.289.382,00 atau 98,91% realisasi kinerja 100%.

Realisasi program WUB sampai dengan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah mencapai 3.484 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.138.  
Realisasi Program Wirausaha Baru berdasarkan Perangkat Daerah  
Tahun 2018 – 2021

No	Perangkat Daerah	2018	2019	2020	2021	Total
1	Dinas Pendidikan	95	100	105	100	400
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87	100	0	163	350
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan	58	100	0	150	308
4	Dinas Pertanian dan Perikanan	189	300	0	445	934
5	Dinas KUMKM	328	354	60	750	1.492
Jumlah		757	954	165	1.608	3.484

Sumber : Bappelitbangda, Data diolah, 2022.

## B. Rehabilitasi 5.000 rumah tidak layak huni

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selama periode RPJMD Tahun 2017 – 2022 ditargetkan sebanyak 1.000 unit per tahun. Sampai dengan tahun 2021, RTLH di wilayah Kota Tasikmalaya yang direhabilitasi sudah sebanyak 6.771 unit. Sebanyak 1.320 unit RTLH direhabilitasi pada Tahun 2021, capaian tersebut melebihi yang ditargetkan yaitu 1.000 unit. Sebaran lokasi rehabilitasi RTLH sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.139.  
Daftar Lokasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni  
Di Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Kecamatan	Kelurahan	Rutilahu Prov	BRS DAK	RTLH Kota	BSPS	Jumlah Per Kec
1	Cihideung	Argasari			2		43
		Cilembang		15	1		
		Nagarawangi			2		
		Tugujaya	20		1		
		Tuguraja			2		
2	Cipedes	Cipedes	30		1		114



No	Kecamatan	Kelurahan	Rutilahu Prov	BRS DAK	RTLH Kota	BSPS	Jumlah Per Kec
		Nagarasari	30		1		
		Panglayungan	20		1		
		Sukamanah	30		1		
3	Tawang	Cikalang	30		1		83
		Empangsari			2		
		Kahuripan	30		1		
		Lengkongsari		15	2		
		Tawangsari			2		
		Sukamaju Kidul			2		
4	Indihiang	Parakannyasag			2		12
		Indihiang			2		
		Panyingkiran			2		
		Sirnagalih			2		
		Sukamaju Kaler			2		
		Cibeuti			2		
5	Kawalu	Cilamajang			2		314
		Gunung Gede	30		1		
		Gunung Tandala	30	40	1		
		Karanganyar	30		1		
		Karsamenak			2		
		Leuwiliang	30		1	50	
		Talagasari			2	10	
		Tanjung Urug	30		1	10	
		Awipari	30		1		
		Ciakar	30		1		
6	Cibeureum	Ciherang	30		1		269
		Kersanagara	30		1		
		Kotabaru	30		1		
		Margabakti	30		1		
		Setiajaya	30		1		
		Setianegara	30		1		
		Setiaratu	20		1		
		Mugarsari			2		
		Mulyasari	30		1		
7	Tamansari	Setiamulya			2		74
		Setiawargi			2		
		Sukahurip			2		
		Sumelap			2		
		Tamanjaya			2		
		Tamansari	30		1		
		Cigantang	30		1	10	
		Cipari	30		1	10	
8	Mangkubumi	Cipawitra	30		1	10	202
		Karikil			2		
		Linggajaya			2	10	
		Mangkubumi			2	10	
		Sambongjaya	30		1	10	
		Sambongpari			2	10	
		Bantarsari	30		1		
9	Bungursari	Bungursari	20		1		149
		Cibunigeulis			2		
		Sukajaya	30		1		
		Sukalaksana	30		1		
		Sukamulya			2		
		Sukarindik	30		1		
10	Purbaratu	Purbaratu	20		1		60
		Singkup			2		
		Sukaasih			2		
		Sukajaya			2		
		Sukamenak			2		
<b>JUMLAH</b>		<b>1000</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>1.320</b>	



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2022

### **C. Pembangunan Jalan Lingkar Utara Dan Perintisan Jalan Lingkar Selatan.**

Pembangunan Jalan Lingkar Utara sepanjang kurang lebih 3,85 km yang menghubungkan persimpangan Lanud Wiriadinata - Jalan Mohamad Hatta, estimasi biaya saat ini memerlukan anggaran sebesar Rp. 401 Miliar.

Sampai dengan tahun 2021, pembangunan Jalan Lingkar Utara secara keseluruhan baru terealisasi sebesar 33,43%, meliputi pembangunan Jembatan Fly Over, Jembatan Cikalang, Jembatan Dalem Suba, pembangunan jalan dan bangunan pelengkap jalan. Sedangkan untuk Jembatan Ciloseh saat ini sedang tahap pelaksanaan konstruksi yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR yang bersumber dari APBN, dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022.

Selanjutnya untuk perintisan lingkaran selatan baru pada tahap Feasibility Study (FS) dan Penyusunan DED pembangunan jalan lingkar selatan pada tahun 2017. Belum ada tindak lanjut, karena saat ini pembangunan masih diprioritaskan untuk penyelesaian Jalan Lingkar Utara.

### **D. Pembangunan Pusdai / Tasikmalaya Islamic Center**

Sampai dengan akhir tahun 2021, masih belum ada tindak lanjut terkait kendala status kepemilikan lahan. Oleh karena itu, pembangunan Pusdai/Tasikmalaya Islamic Center masih belum terlaksana. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk Pembangunan Pusdai/Tasikmalaya Islamic Center telah disusun pada tahun 2017 kemudian dilanjutkan pembangunan pagar batas tanah dan pematangan lahan di tahun 2018. Pada saat pelaksanaan penyusunan DED dan pekerjaan tersebut, terkendala terkait surat izin dari Bupati Tasikmalaya

### **E. Pembangunan Pusat Promosi Dan Pemasaran Produk Unggulan/ Industri Kreatif**

Pembangunan pusat promosi dan pemasaran produk unggulan/industri kreatif sudah terbangun di tahun 2021 yang berlokasi di Pusat Promosi dan pemasaran produk unggulan/ Industri Kreatif (PPIK). Untuk promosi produk unggulan, gedung ini memiliki fungsi sebagai pusat sarana informasi dan promosi produk unggulan Kota Tasikmalaya. Showroom ini menampilkan informasi mengenai proses pembuatan, display produk hasil pengembangan desain dan diversifikasi produk serta



produk yang akan dipromosikan dari produk-produk unggulan Kota Tasikmalaya. PPIK Kota Tasikmalaya secara umum berfungsi sebagai tempat pelatihan-pelatihan seperti pelatihan teknik produksi, pelatihan desain produk, serta fasilitasi pemasaran dengan adanya showroom.

#### **F. Mengurangi kemiskinan sebesar 5 persen**

Persentase penduduk miskin di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 tercatat 13,13 persen, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 12,97. Kondisi ini disebabkan oleh Pandemi covid-19 yang terjadi di Kota Tasikmalaya sejak Maret 2020 sampai dengan tahun 2021 yang mengakibatkan kinerja perekonomian terkontraksi. Kenaikan ini tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya namun terjadi hampir pada seluruh kabupaten/kota. Capaian Angka Kemiskinan Tahun 2021 masih di atas target RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu sebesar 12,5 persen. Apabila dilihat dari kenaikan persentase angka kemiskinan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen, dibandingkan dengan rata-rata kenaikan angka kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,52 persen. Dengan demikian kenaikan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih dibawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

#### **G. Beasiswa Sarjana bagi masyarakat miskin berprestasi dan dokter Spesialis**

Beasiswa dokter spesialis dilaksanakan di RSUD dr. Soekardjo sebanyak 1 orang, sedangkan program beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi baru dilaksanakan pada tahap penyusunan regulasi, dan realisasinya akan dilaksanakan pada tahun ini.

Adapun untuk beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 untuk 90 orang masyarakat miskin.

#### **H. Peningkatan bantuan operasional/insentif dan sarana prasarana Posyandu**

Bantuan operasional posyandu yang disalurkan pada tahun 2021 sebesar Rp.818.400.000,00 untuk 5.456 kader posyandu se-Kota Tasikmalaya atau Rp.150.000,00 per Orang.



#### **I. Peningkatan bantuan operasional/insentif RT dan RW**

Pada tahun 2021 bantuan operasional/insentif RT dan RW yaitu untuk RT sebesar Rp.125.000,00/bulan dan untuk RW sebesar Rp.150.000,00/bulan.

#### **J. Peningkatan bantuan bidang keagamaan**

Bantuan bidang keagamaan Pemerintah Kota Tasikmalaya terdiri dari:

##### **1. Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah**

Pada tahun 2021 jumlah penerima insentif sebanyak 5.448 orang masing-masing sebesar Rp.600.000,00/orang dengan jumlah total anggaran Rp.3.268.000.000,00.

##### **2. Realisasi bantuan hibah sarana keagamaan tahun 2021 sebesar Rp.17.085.000.000,00 untuk 124 lembaga**

#### **K. Revitalisasi Pasar Rakyat**

Pada tahun 2021 pemerintah Kota Tasikmalaya telah membangun pasar rakyat pancasila dengan anggaran Rp.15.932.281.000,00 dan realisasi sebesar Rp.15.041.669.616,00. Pembangunan yang telah dilaksanakan terdiri dari 2 lantai dengan 270 kios, 64 los, ruang laktasi dan ruang pelengkap lainnya. Sehingga sejak tahun 2018 pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 5 pasar yaitu Pasar Indihiang, Pasar Cibeuti, Pasar Cibeureum, Pasar Purbaratu dan Pasar Pancasila

#### **L. Implementasi e-government**

Implementasi e-government di Kota Tasikmalaya tahun 2021 dibuktikan dengan capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Capaian indeks SPBE Kota Tasikmalaya untuk tahun 2021 adalah 2,68 dengan predikat baik, yang meliputi:

1. Kebijakan internal SPBE, yaitu diterbitkannya Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
2. Tata kelola SPBE, dengan adanya arsitektur dan peta rencana SPBE dalam dokumen masterplan dan enterprise arsitektur smart city; tersedianya pusat data dan jaringan intra pemerintah yang terhubung ke seluruh OPD dan kelurahan,



Puskesmas dan Pustu, SD dan SMP, serta area publik dengan jumlah total 414 titik; dan penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk integrasi aplikasi.

3. Penerapan manajemen SPBE, yang meliputi penerapan manajemen risiko, keamanan informasi, data, asset TIK, kompetensi SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE.
4. Audit TIK yang meliputi audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan SPBE.
5. Layanan SPBE, yang terdiri dari:
  - a. Layanan administrasi, yang meliputi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang milik daerah, layanan pengawasan internal pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, dan layanan kinerja organisasi.

Layanan publik yang meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, layanan JDIH, layanan bidang pendidikan, layanan bidang komunikasi dan layanan administrasi kelurahan.

#### **2.4. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya. Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Keamanan dan Ketertiban Umum, dan Sosial. Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Tasikmalaya pada tahun 2021



Tabel 2.140.  
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Tasikmalaya  
Tahun 2021

No.	Bidang Layanan	Satuan	Pencapaian SPM	
			Target	Capaian
1.	SPM Bidang Pendidikan	%	100	49,78
2.	SPM Bidang Kesehatan	%	100	66,34
3.	SPM Bidang Pekerjaan Umum	%	100	58,71
4.	SPM Bidang Perumahan	%	100	100
5.	SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	%	100	96,14
6.	SPM Bidang Sosial	%	100	24,71

Sumber : Laporan SPM Kota Tasikmalaya Tahun 2021, Setda Kota Tasikmalaya, 2022.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 6 (enam) SPM yang harus dipenuhi dengan target 100 persen, hanya SPM Bidang Perumahan yang dapat mencapainya. Berbagai kendala dalam penerapan SPM di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan SPM Pendidikan masih terkendala oleh adanya sekolah yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga pada masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi terutama sekolah yang dikelola oleh Masyarakat/Yayasan pada jenjang PAUD, hal tersebut berdampak pada capaian mutu pendidikan yang belum memenuhi standar. Kemudian kekurangan Guru Kelas SD/MI, SMP/MTs serta kualitas tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi SI/DIV. Pada Pendidikan Kesetaraan permasalahan terdapat pada penyelenggara Paket A, B dan C melalui lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dalam pengelolaannya belum memenuhi standar yang ditetapkan sehingga masih terdapat lembaga PKBM belum terakreditasi;
2. Penerapan SPM Kesehatan terkendala oleh belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, misalnya pada layanan ibu melahirkan belum seluruh puskesmas dapat melayani persalinan dan perlunya peningkatan kualitas *home care*. Kemudian pelayanan



kesehatan bayi baru lahir pelayanan kesehatan neonatal sesuai standar belum maksimal, pelayanan kesehatan pada usia produktif misalnya kader Posbindu PTM belum semua mendapatkan pelatihan terutama di tingkat RW, dan lain sebagainya;

3. Penerapan SPM Pekerjaan Umum terkendala oleh belum adanya Data Base SPAM terintegrasi Kota Tasikmalaya;
4. Penerapan SPM Bidang Perumahan meskipun pencapaiannya sudah 100 persen tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi yakni kegiatan yang mendukung SPM belum menjadi prioritas pada Perangkat Daerah bersangkutan;
5. Penerapan SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum dengan realiasi target mencapai 96,14 persen bukan tanpa hambatan semakin berkembangnya tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan, gepeng, dan penyakit masyarakat lainnya di lapangan menjadikan penertiban akan semakin sulit dilakukan;
6. Penerapan SPM Bidang Sosial masih terkendala oleh alat bantu layanan bidang sosial yang belum terpenuhi, sehingga capaian SPM masih jauh dari yang ditargetkan.

#### **2.5. Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *"No-one Left Behind"*. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. Capaian implementasi SDGs/TPB di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.141.  
Capaian SDGs/TPB Kota Tasikmalaya Tahun 2021

Tujuan Pembangunan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun							
Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs 2021	Capaian SDGs 2021
1.2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Persentase	12,79	12,5	13,13
	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINKES	Persentase	79,40	75	80,31
1.3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKER	Persentase	N/A	N/A	10,95
	1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	DINSOS	Jiwa	37.034	N/A	35.820
1.4	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Dinkes, DPUTR Disperkimtan, Dishub	Persentase	PM	PM	
	1.4.1* - 2	Persentase Penduduk dengan Layanan Air Minum	DPUTR	Persentase	90,21	92,81	83,8
	1.4.1* - 3	Persentase Penduduk dengan Layanan Sanitasi	DPUTR	Persentase	79,53	79,43	89,99
	1.4.1* - 7	Indeks akses pada fasilitas penyehatan dasar	DINKES	Persentase	95,45	100	100,00
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DINKES	Persentase	95,3	95,5	18,43
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPPKBP3A	Persentase	72,36	72,60	72,37
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	DISPERAWASKIM	Persentase	47,61	47,59	54,15
1.5	1.5.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD				
	1.5.1* - 1	Korban Meninggal	BPBD	Orang		PM	2
	1.5.1* - 2	Korban Hilang	BPBD	Orang		PM	0
	1.5.1* - 3	Korban Terluka	BPBD	Orang		PM	5
	1.5.1* - 4	Korban Mengungsi	BPBD	Orang		PM	57
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen		1	1	
Tujuan Pembangunan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINKES	Persentase	1,02	8,3	5,87
	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINKES	Persentase	17,57	19,1	14,81
	2.2.2(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DKP3	Persentase	91,60	91,00	91,30



2.4	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	DKP3	Persentase	4,64	4,64	4,64
Tujuan Pembangunan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Seluruh Usia							
3.1	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).*	DINKES	Kematian Per 100000 Kelahiran Hidup	202,55	145,18	303,87
3.2	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Kematian Per 1000 Kelahiran Hidup	N/A	19,5	1,74
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Kematian Per 1000 Kelahiran Hidup	N/A	4,44	7,2
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Kematian Per 1000 Kelahiran Hidup	2,02	19,5	8,5
	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINKES	Kasus Baru per 1000 penduduk tidak terinfeksi	N/A	0,21	0,09
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINKES	Kasus Baru per 10000 penduduk	N/A	252	149
3.3	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	DINKES	API/1000 Penduduk	N/A	0,31	0,01
3.4	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINKES	Persentase	N/A	34,1	51,38
3.7	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPPKBP3A	Persentase	72,36	72,60	72,37
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DPPKBP3A	Persentase	2,08	2,06	2,03
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINKES	Persentase	77,99	81,3	79,40
3.b	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINKES	Persentase		95	66,6
Tujuan Pembangunan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
4.1	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DISDIK	Persentase	N/A	95	97,91
	4.1.1.(b)*	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DISDIK	Persentase	N/A	95	93,38
4.5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	BPS/DISDIK	Breakdown Indikator	Breakdown Indikator	Breakdown Indikator	Breakdown Indikator
	4.5.1* - 1b	Rasio APM SD pedesaan/ perkotaan	BPS/DISDIK	Persentase	90,69	89,66	90,31
	4.5.1* - 2b	Rasio APK SMP pedesaan/ perkotaan	BPS/DISDIK	Persentase	86,59	89,83	86,85



Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs 2021	Capaian SDGs 2021
<b>Tujuan Pembangunan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan</b>							
5.1	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DPPKBP3A	Dokumen	1	1	1
	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DPPKBP3A	Persentase	100	100,00	100
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DPPKBP3A	Persentase	100	100	100
5.5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	SETWAN	Persentase	6,67	19,32	6,67
<b>Tujuan Pembangunan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua</b>							
6.1	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DPUTR	Persentase	55,58	55,82	56,23
6.2	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DPUTR	Persentase	60,54	79,43	61,20
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DPUTR	Persentase	N/A	61,04	61,20
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	DPUTR	Persentase	7,07	PM	15,44
<b>Tujuan Pembangunan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</b>							
8.1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK)	BPS	Persentase	-2,01	4,50	3,57
	8.1.1.(a)	PDRB per kapita. (ADHB)	BPS	Juta Rupiah	21,59	22,98	22,85
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DISNAKER/BPS	Persentase	N/A	50	46,71
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	DISNAKER/BPS	Persentase	4,78	N/A	5,50
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis Jenis kelompok Umur	DISNAKER/BPS	Persentase	7,99	7,72	7,66
<b>Tujuan Pembangunan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</b>							
9.2	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan Perkapita	BPS	Persentase	14,13	19,8	13,83
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS	Persentase	-1,94	15,91	1,91
<b>Tujuan Pembangunan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara</b>							
10.1	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS/DINSOS	Persentase	12,97	12,5	13,13
10.3	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	SETDA	Kasus/Aduan	n/a	30	34
10.4	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKER	Persentase	40,84	41,64	10,95



Tujuan Pembangunan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan							
	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD				
11.5	11.5.1* - 1	Korban Meninggal	BPBD	Orang	N/A	N/A	2
	11.5.1* - 2	Korban Hilang	BPBD	Orang	N/A	N/A	0
	11.5.1* - 3	Korban Terluka	BPBD	Orang	N/A	N/A	5
	11.5.1* - 4	Korban Mengungsi	BPBD	Orang	N/A	N/A	57
11.6	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	DLH	Persentase	71,45	76	77,86
Tujuan Pembangunan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan							
Target	Kode	Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs 2021	Capaian SDGs 2021
12.4	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	Persentase	71,45	77,86	73,86
	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DLH	Persentase	N/A	25	25
Tujuan Pembangunan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati							
15.1	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH	INDEKS	N/A	23	23,35
16.3	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	SETDA	Perkara	N/A	34	34
16.6	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	BPKAD	WTP	WTP	WTP	WTP
	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP > B	INSPEKTORAT	Persentase	N/A	30	33,33
	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB > B	INSPEKTORAT	Nilai (Kategori)	N/A	50	58,33
	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SETWAN	Persentase	6,67	30	6,67
16.9	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM	Persentase	3,7	35	6,45
	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	DISDUKCAPIL	Persentase	N/A	93,00	58,33
Tujuan Pembangunan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan							
17.1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKAD	Persentase	N/A	9,50	10,61
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda	Persentase	N/A		2,91



## **2.6. Evaluasi Capaian Kemiskinan Ekstrem**

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024, Kota Tasikmalaya menjadi lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022.

## **2.7. Revitalisasi Pasar**

Pada tahun 2021 pasar yang direvitalisasi di Kota Tasikmalaya yaitu Pasar Pancasila. Dampak yang dirasakan secara umum akibat dari revitalisasi tersebut diantaranya adalah :

1. Bangunan menjadi lebih baik, bersih dan nyaman
2. Jumlah kios/los bertambah, yang awalnya berjumlah 249 kios dan 60 los menjadi 270 kios dan 64 los
3. Bertambahnya beberapa sarana pendukung yang sudah dibangun seperti : ruang satpam, wc yang lebih representatif, ruang laktasi, dll.
4. Para pedagang mendapatkan kios yang permanen, bersih dan nyaman, namun luasannya kecil (semuanya diseragamkan).
5. Para pedagang relatif lebih meningkat pendapatannya
6. Lebih nyaman dan lebih lengkap berbelanja barang yang dibutuhkan

## **2.8. Permasalahan Pembangunan**

### **2.8.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah**

Permasalahan daerah yang dianggap memiliki nilai prioritas yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar;
2. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
3. Melambatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat;
4. Kurang optimalnya penyediaan infrastruktur perkotaan, permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Belum optimalnya pelayanan publik dan kinerja aparatur.

### **2.8.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah**

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap



Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan data yang ada dan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

**a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

**1) Pendidikan**

- a. Belum optimalnya capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- b. Masih terdapat anak usia pendidikan dasar yang belum bersekolah pada jenjang SMP
- c. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai
- d. Masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan

**2) Kesehatan**

- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
- b. Masih terdapat puskesmas yang belum terakreditasi
- c. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan nasional
- d. Belum optimalnya ketersediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar
- e. Masih terdapatnya balita dengan kondisi gizi buruk
- f. Belum optimalnya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga
- g. Belum optimalnya sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar
- h. Belum optimalnya kesehatan keluarga, penanganan penyakit menular dan tidak menular
- i. Masih kurangnya Tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu antara lain Sub spesialis dan spesialis tertentu;

**3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju lahan pertanian.
- b. Ketersediaan data sektoral urusan Pekerjaan Umum belum lengkap.
- c. Masih diperlukan pemeliharaan serta peningkatan jalan, jembatan dan drainase;
- d. Masih terdapat jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan;
- e. Masih ada gedung kantor perangkat daerah yang belum representatif dan sesuai dengan standar;



- f. Masih belum optimalnya capaian rumah tangga yang dapat mengakses air minum, dan memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik.

#### **4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- a. Terdapat kawasan kumuh seluas 168,49 Hektar berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 648/Kep.733.1-Disperwaskim/2021.
- b. Masih terdapat rumah tidak layak huni;
- c. Masih terdapat Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan formal yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

#### **5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat**

- a. Masih terdapat masyarakat yang kurang patuh terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

#### **6) Sosial**

- a. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- b. Belum optimalnya pemberdayaan fakir miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

### **b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

#### **1) Tenaga Kerja**

- a. Masih tingginya angka pengangguran
- b. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja
- c. Belum adanya sarana Balai Latihan Kerja (BLK)
- b. Kurang optimalnya hubungan industrial, pengantar kerja dan instruktur pelatihan ketenagakerjaan
- c. Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan;
- d. Belum optimalnya *link and match* antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha
- e. Belum optimalnya penempatan kerja bagi pencari kerja terdaftar.

#### **2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

#### **3) Pangan**

- a. Belum optimalnya implementasi konsumsi keragaman pangan dan gizi
- b. Belum optimalnya pengelolaan pangan dan gizi
- c. Belum optimalnya pengelolaan distribusi pangan
- d. Belum optimalnya infrastruktur ketahanan pangan
- e. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah.



#### **4) Lingkungan Hidup**

- a. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan
- b. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif
- c. Belum tercapainya proporsi Ruang Terbuka Hijau

#### **5) Kependudukan dan Catatan Sipil**

- a. Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

#### **6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Belum optimalnya layanan keluarga berencana
- b. Belum optimalnya capaian Total Fertility Rate ( TFR )
- c. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan BKB
- d. Masih kurangnya wawasan reproduksi bagi remaja.

#### **7) Perhubungan**

- a. Belum optimalnya kenyamanan berlalulintas dan angkutan umum
- b. Belum optimalnya ketersediaan ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
- c. Belum optimalnya pengelolaan parkir
- d. Perlunya optimalisasi tata kelola terminal type C;

#### **8) Komunikasi dan Informatika**

- a. Belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi public
- b. Belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- c. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi belum memadai;

#### **9) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil**

- a. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat
- b. Belum optimalnya pembinaan koperasi
- c. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil (UMK) baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;

#### **10) Penanaman Modal**

- a. Belum tersedianya rencana umum penanaman modal
- b. Belum optimalnya pengendalian penanaman modal

#### **11) Kepemudaan dan Olahraga**



- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan sehingga pencapaian bidang keolahragaan belum optimal;
- c. Belum optimalnya pengembangan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemuda.

#### **12) Kebudayaan**

- a. Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya tradisional;
- b. Belum optimalnya pelestarian terhadap nilai sejarah, seni dan budaya daerah seperti pelestarian terhadap benda, situs dan cagar budaya

#### **13) Perpustakaan**

- a. Belum optimalnya layanan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan;

#### **14) Kearsipan**

- a. Belum tersedianya Depo Arsip yang memenuhi standar baku
- b. Belum optimalnya penerapan standar baku kearsipan pada perangkat daerah;

### **c. Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **1) Kelautan dan Perikanan.**

- a. Belum optimalnya pemanfaatan minapolitan

#### **2) Pariwisata.**

- a. Belum tersedianya dokumen perencanaan kepariwisataan yang terintegrasi

#### **3) Pertanian.**

- a. Menurunnya populasi ternak
- b. Belum optimalnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya
- c. Belum optimalnya kenaikan kelas petani

#### **4) Perdagangan.**

- a. Menurunnya omset pelaku usaha
- b. Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat dan terbatasnya jumlah pasar rakyat
- c. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- d. Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat



ukur

- e. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- f. Belum tersedianya pusat pemasaran produk unggulan.

**5) Perdagangan.**

- a. Masih minimnya IKM yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional
- b. Belum optimalnya pengendalian izin usaha industri

**b. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

**1) Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**

- a. Capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) masih berada pada kategori kurang inovatif.

**2) Keuangan**

- a. Belum optimalnya penatausahaan barang dan aset daerah

**3) Kepegawaian**

- a. Belum optimalnya pemetaan SDM ASN Kota Tasikmalaya
- b. Belum optimalnya kompetensi ASN;



### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya Pasal 156 dinyatakan bahwa : (i) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur APBD. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 1 tahun mendatang. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di atas.

Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu dicermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Tasikmalaya baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan keuangan daerah menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023.

Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Tasikmalaya.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

#### **3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah**

Tantangan dan prospek perekonomian Kota Tasikmalaya tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian global, nasional, regional Jawa Barat maupun kondisi lokal Kota Tasikmalaya.

##### **1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Global dan Nasional**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di tengah peningkatan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Hal tersebut tercermin



pada pertumbuhan ekonomi triwulan I 2022 yang tetap kuat, yakni 5,01% (yoy), tidak jauh berbeda dengan capaian triwulan sebelumnya 5,02% (yoy). Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan tetap terjaganya kinerja ekspor. Perbaikan ekonomi nasional terjadi pada mayoritas lapangan usaha serta seluruh wilayah. Ke depan, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan terus berlanjut hingga mencapai 4,5-5,3% untuk keseluruhan tahun 2022, didukung oleh akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi yang semakin luas, serta stimulus kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya.

Dari sisi pengeluaran, pemulihan ekonomi pada triwulan I 2022 terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,34% (yoy), jauh lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,55% (yoy). Kinerja positif tersebut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang lebih longgar pada triwulan I 2022 dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi. Investasi tumbuh sebesar 4,09% (yoy), terutama ditopang oleh investasi nonbangunan, di tengah pertumbuhan investasi bangunan yang tetap terjaga. Sementara itu, konsumsi Pemerintah berkontraksi 7,74% (yoy) sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya belanja barang dan bantuan sosial khususnya untuk penanganan Covid-19 dan mitigasi dampaknya terhadap masyarakat. Kinerja ekspor tercatat tetap baik, tumbuh 16,22% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat di tengah masih terbatasnya dampak ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Adapun impor pada triwulan I 2022 tumbuh sebesar 15,03% (yoy) sejalan kinerja ekspor yang tetap baik dan permintaan domestik yang meningkat.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2022 menunjukkan pertumbuhan positif. Perbaikan kinerja LU terutama didorong oleh beberapa LU, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan, seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang terjadi di seluruh wilayah. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Jawa, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Kalimantan.

Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim,



7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Sinergitas rencana pembangunan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan RKP 2023 sangat penting. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan. Visi, Misi, dan Sasaran dalam RPJM Nasional 2020-2024 adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah 5 tahun yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya

Tidak hanya itu, dalam RKP 2023 juga diharapkan tidak hanya menampilkan pendanaan yang tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi dari sumber lainnya seperti BUMN dan swasta. Investasi akan menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi pada 2023. Hal ini karena investasi menciptakan lapangan kerja lebih besar dan mengembalikan kembali kondisi sebelum pandemi di mana terdapat lapangan pekerjaan yang layak. Tidak hanya itu, beberapa faktor yang dapat mendorong pemulihan ekonomi adalah ekspor yang kembali membaik dan sektor industri pengolahan yang kembali beroperasi seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas di 2023.

Untuk mencapai target pemulihan ekonomi pada 2023, perlu juga dilakukan pendekatan pembangunan yang berbasis kewilayahan. Untuk itu, setiap daerah perlu mengkaji potensi masing-masing wilayahnya yang dapat digali atau dioptimalkan. Memastikan apa yang menjadi target nasional bisa tampil di daerah. Misalnya pertumbuhan ekonomi, potensi apa yang bisa dikembangkan, sumber daya berkualitas, karena semua hal berkaitan. Hal ini dilakukan untuk memastikan transformasi ekonomi yang inklusif. Terlebih salah satu target pembangunan adalah memastikan pertumbuhan di wilayah barat dan timur Indonesia seimbang.

## **2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Regional Jawa Barat**

### **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan IV 2021 tumbuh positif sebesar 6,21% (yoy) meningkat signifikan dibandingkan triwulan III 2021, dan searah dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut merupakan cerminan dari kemajuan pemulihan ekonomi yang semakin membaik, khususnya pasca pelonggaran PPKM Jawa-Bali dan ditopang oleh meningkatnya permintaan global dan domestik pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,76% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2021 yang tumbuh 0,78% (qtq). Jawa Barat masih menjadi penopang perekonomian nasional dengan pangsa 13,02%, tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta (17,17%) dan Jawa Timur (14,46%).

Dari sisi permintaan, peningkatan terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor. Konsumsi yang merupakan kontributor utama terhadap perekonomian Jawa Barat pada triwulan IV 2021 tumbuh positif sebesar 2,52% (yoy). Adapun menguatnya demand global memberikan dampak yang sangat baik pada permintaan ekspor ke Jawa Barat sehingga tumbuh tinggi mencapai 26,03% (yoy).



Sementara dari sisi lapangan usaha, peningkatan terjadi pada sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan besar & eceran, serta transportasi & pergudangan. Sejalan dengan ekspor yang meningkat, kinerja industri pengolahan juga terakselerasi sebesar 9,15% (yoy), terutama yang ditopang oleh industri utama yakni TPT, elektronik, dan otomotif.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun perkembangan kasus Covid-19, serta progress vaksinasi, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di tahun 2021 tercatat sebesar 3,74% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,56% (yoy).

### **Keuangan Pemerintah**

Realisasi belanja APBN di Jawa Barat tahun 2021 sebesar Rp44,7 triliun atau 95,68% dari total anggaran. Realisasi belanja tersebut tumbuh sebesar 8% (yoy) atau lebih tinggi jika dibandingkan realisasi tahun 2020 yang tercatat sebesar 95,10%. Adapun realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai 95,51% atau sebesar Rp37,66 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar 87,08%. Tingginya realisasi belanja Pemerintah baik pusat maupun daerah sejalan dengan berbagai stimulus fiskal yang masih berlanjut, terutama untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

### **Perkembangan Inflasi**

Inflasi Jawa Barat pada tahun 2021 tetap terkendali sebesar 1,69% (yoy) dan berada di bawah rentang target ( $3 \pm 1\%$ ), sejalan dengan pembatasan secara selektif aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan belum optimalnya daya beli masyarakat. Berdasarkan kota pembentuk IHK di Jawa Barat, laju inflasi Kota Bogor menjadi yang tertinggi sebesar 1,94% (yoy), sementara Kota Tasikmalaya menjadi kota dengan laju inflasi terendah yakni sebesar 1,17% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi pada sebagian besar kelompok pengeluaran barang dan jasa tahun 2021 cukup terkendali. Dari 11 kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,16% (yoy), kelompok pendidikan sebesar 2,77% (yoy), dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,67% (yoy).

Inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2022 sampai dengan April berada dalam nilai 2,5 masih dalam rentang target sasaran inflasi 2022 yakni  $3 \pm 1\%$ , namun cenderung bias ke bawah seiring dengan pembatasan aktivitas ekonomi akibat gelombang ketiga Covid-19.

### **Stabilitas Keuangan Daerah & Pengembangan Akses Keuangan Dan UMKM**

Stabilitas sistem keuangan Jawa Barat pada triwulan IV 2021 dalam kondisi terjaga. Di tengah momentum perbaikan perekonomian, kredit di Jawa Barat pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh lebih tinggi dari periode sebelumnya. Perbaikan tampak pada komponen kredit investasi yang merupakan sinyal kuat bahwa sektor ekonomi utama di wilayah Jawa Barat khususnya industri sudah mulai bangkit. DPK juga tercatat meningkat terutama dari komponen giro pemerintah yang antara lain disebabkan belum tersalurkannya dana PEN secara penuh hingga akhir 2021.



Lebih lanjut, penyaluran kredit untuk berbagai proyek yang berlokasi di Jawa Barat pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar Rp767,61 triliun yang berasal dari kredit oleh perbankan yang berlokasi di Jawa Barat sebesar Rp496,82 triliun (65% dari total kredit) dan 35% didanai oleh perbankan di luar Jawa Barat. Peningkatan kredit juga tercatat pada kredit sektor rumah tangga dan kredit kepada UMKM.

Rasio NPL gross tercatat lebih baik dari triwulan sebelumnya dengan nilai yang mencerminkan risiko pembiayaan yang masih terjaga. Hal ini menunjukkan kondisi yang baik mengingat peningkatan kinerja penyaluran kredit perbankan didukung oleh pengelolaan risiko kredit yang baik.

### **Perkembangan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah**

Pada triwulan IV 2021 aliran uang kartal di Jawa Barat di sisi inflow tercatat sebesar Rp12,41 triliun dan di sisi outflow berada di angka Rp13,77 triliun. Angka outflow ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang menyebabkan terjadinya net-outflow. Demikian pula transaksi non tunai melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan pembayaran menggunakan Uang Elektronik (UE) yang juga tumbuh positif dibandingkan triwulan sebelumnya.

Nilai transaksi BI-RTGS dari nasabah di wilayah Jawa Barat tercatat sebesar Rp309,70 triliun, tumbuh sebesar 27,70% (yoy) atau meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh di angka 23,89% (yoy). Nilai transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Jawa Barat pada triwulan IV 2021 sebesar Rp55,46 triliun atau tumbuh sebesar 2,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang berkontraksi sebesar -4,29% (yoy). Sementara dari sisi Uang Elektronik (UE), berdasarkan volumenya transaksi masih tumbuh positif sebesar 22,04% (yoy). Hal ini juga sejalan dengan peningkatan volume dan nilai transaksi dari APMK – Kredit yang penggunaan terbesarnya adalah transaksi online. Peningkatan ini terjadi seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi akibat pelonggaran kebijakan PPKM Darurat di Jawa – Bali.

### **Perkembangan Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan**

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat pada triwulan IV 2021 diperkirakan berangsur membaik, searah dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tumbuh lebih tinggi. Pada September 2021, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 7,97%, menurun dibandingkan September 2020 (8,43%) dan Maret (8,40%). Sementara itu tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2021 tercatat sebesar 9,82%, atau turun sebesar 0,64% poin dibandingkan keadaan pada Agustus 2020.

Namun demikian, penurunan tingkat kemiskinan justru disertai dengan kenaikan ketimpangan atau gini ratio menjadi 0,406 pada September 2021. Pada level yang lebih mikro, tingkat kesejahteraan petani yang tercermin oleh Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan sebesar 1,62 poin pada triwulan IV 2021. Subsektor dengan peningkatan terbesar adalah tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat, hal tersebut disebabkan oleh pelonggaran PPKM Jawa- Bali yang mendorong perbaikan permintaan akan komoditas pada subsektor tersebut.



## Prakiraan Perekonomian Ke Depan

Perekonomian global tahun 2022 diproyeksikan tumbuh lebih tinggi dari tahun 2021, namun mengalami koreksi ke bawah seiring dengan berbagai tantangan yang dihadapi, terutama berlanjutnya penyebaran varian Omicron di berbagai negara. Perlambatan disebabkan oleh revisi proyeksi yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi negara maju, khususnya Amerika Serikat akibat kekurangan pasokan yang berkelanjutan dan tekanan inflasi yang cukup tinggi.

Perekonomian Indonesia 2022 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4,7%-5,5% (yoy) lebih tinggi dibandingkan 2021 sebesar 3,69% (yoy). Momentum perbaikan ekonomi nasional diperkirakan terus berlanjut pada 2022 meskipun peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron pada kuartal pertama perlu diwaspadai. Berbagai stimulus kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif tetap menjadi salah satu katalis utama untuk mendukung pemulihan ekonomi agar terus berjalan pada 2022.

Selanjutnya ekonomi Jawa Barat 2022 diproyeksikan tumbuh pada rentang 5,0%-5,8% (yoy). Namun demikian, mempertimbangkan risiko divergensi pemulihan ekonomi dan masih cukup besarnya tantangan penyelesaian third wave Omicron baik di Jawa Barat sendiri maupun di negara counterpart, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 akan cenderung bias ke rentang bawah. Ekonomi diperkirakan tertahan pada kuartal pertama 2022, namun berpeluang kembali membaik secara gradual mulai kuartal kedua hingga akhir tahun 2022.

Sementara itu, tekanan inflasi Jawa Barat pada tahun 2022 diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan 2021, dengan kondisi kumulatif pada bulan April 2022 inflasi telah mencapai 2,5 dan diharapkan selama periode tahun 2022 tidak melebihi angka 5.

### 3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Tasikmalaya

Secara geografis, Kota Tasikmalaya terletak di jalur selatan Pulau Jawa di wilayah Provinsi Jawa Barat, dimana posisi tersebut sangat strategis di jalur utama yang menghubungkan Bandung dengan wilayah Priangan Timur dan Jawa Tengah serta menghubungkan antara Kabupaten Garut, Ciamis, dan sekitarnya.

Perbandingan data makro yang dicakup selama 2 (dua) tahun dibawah ini, yaitu pada masa pandemik COVID-19 sampai tahun 2021 menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Tasikmalaya mengalami koreksi yang cukup signifikan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan yang tidak ringan secara ekonomi bagi Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menjadi potensi untuk berfikir lebih cerdas untuk menggerakkan roda perekonomian Kota Tasikmalaya ke arah yang lebih maju dengan program pembangunan diseluruh sektor yang harus dijalankan dengan pertimbangan kondisi masa Pandemi Covid-19.

Tabel 3.1

Indikator Pembangunan Ekonomi Tahun 2020 - 2021

Indikator Pembangunan	2020	2021
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	73,04	73,31
Angka Kemiskinan (%)	12,97	13,13
Angka Pengangguran (%)	7,99	7,66
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,01	3,57



Indikator Pembangunan	2020	2021
Inflasi (%)	1,61	1,17
Pendapatan per Kapita ( Juta Rupiah)	32,51	31,56
PDRB (Triliun)	21,59	22,85
Rasio Gini (indeks)	0,366	0,414

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2021.

Disamping kondisi tersebut diatas yang merupakan keadaan yang tidak menguntungkan diharapkan menjadi pendorong kekuatan dalam pembangunan perekonomian Kota Tasikmalaya, demikian pula dengan kendala dan tantangan yang tentunya harus diminimalisir oleh pemerintah daerah, salah satunya seperti terbatasnya sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berkualitas, daya beli yang masih rendah, tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan faktor lainnya.

### 3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

RKP Tahun 2023 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu

- (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2) peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan;
- (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job;
- (4) mendorong pemulihan dunia usaha;
- (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan
- (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

RKP 2023 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Indikator Pembangunan	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3 - 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5
Rasio Gini (indeks)	0,375 - 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31 – 73,49
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	27,02 %



Indikator Pembangunan	Target 2023
*menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)	

Sumber: RKP Tahun 2023.

### 3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, hasil identifikasi permasalahan di tingkat regional dan nasional serta memperhatikan arah kebijakan dan program unggulan Kepala Daerah, maka tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah “Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”. Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk mencapai kemandirian setelah menghadapi pandemi COVID-19.

Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), yang diimplementasikan dengan:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah, dengan 7 (tujuh) tujuan, dan 21 (dua puluh satu) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, dana umat, dan hibah, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta
4. Melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Tabel 3.3  
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan  
Provinsi Jawa Barat Disandingkan Dengan Nasional Tahun 2023

Indikator Pembangunan	Nasional*	Jawa Barat
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	73,31 *	73,05**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,90	5,45***
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,00	9,09***
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,24	7,40***
Rasio Gini (indeks)	0,375 *	0,395***
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	-	1,12***
Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)		49,58***

Keterangan :

\* Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 – 2024 (nilai terbawah)

\*\* Berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

\*\*\* Hasil sangat sementara (pembahasan dalam Desk Kewilayahan Rakortekbang 24 Feb 2022)



Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan pada Tabel 3.3 di atas, strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi perlu disiapkan sedemikian rupa menuju pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan tentunya tetap mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang tertera pada RPJMD Tahun 2018-2023.

Sementara Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yaitu

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi
3. Penguatan system ketahanan pangan berkelanjutan
4. Reformasi system perlindungan social
5. Reformasi system pendidikan dan pemajuan kebudayaan
6. Reformasi system kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana
7. Inovasi pelayanan public dan penataan daerah
8. Gerakan membangun desa
9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
11. Pengembangan Destinasi dan infrastruktur pariwisata

Dengan demikian Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan tersebut menjadi based line dari arah kebijakan pembangunan untuk setiap daerah di provinsi Jawa Barat.

### 3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah dan memperhatikan arah kebijakan dan kondisi ekonomi nasional dan regional (“pasca pandemi covid 19”), maka sasaran dan target pembangunan ekonomi makro daerah Kota Tasikmalaya tahun 2023 antara lain :

Tabel 3.4  
Target Indikator Pembangunan Ekonomi Tahun 2022–2023

Indikator Pembangunan	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	5,12
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,02	7,35
Tingkat Kemiskinan (%)	11,50	12,33
Rasio Gini (indeks)	0,360	0,365
Inflasi (%)	2,00	2,47
PDRB (Triliun)	23,61	25,02
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	31,04	35,54
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	73,95	74,32

Sumber: RPJMD Kota Tasikmalaya 2017-2022  
RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026



Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi tahun 2023 sebagaimana tema pembangunan *“Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas untuk Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”* dengan target sesuai dengan proyeksi di atas, dengan Prioritas Pembangunan daerah adalah berikut ini :

1. Pemenuhan standar pelayanan minimal pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar.
2. Penanggulangan Kemiskinan, diantaranya :
  - a. Pengelolaan data base dan pelayanan keluarga miskin;
  - b. Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
  - c. Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin;
  - d. Pemberdayaan keluarga miskin;
  - e. Beasiswa bagi mahasiswa dari rumah tangga miskin.
3. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal, diantaranya :
  - a. Pelayanan kesehatan dalam rangka penurunan prevalensi stunting;
  - b. Pembinaan keluarga dan ketahanan remaja;
  - c. Penyediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
  - d. Penyediaan sanitasi keluarga yang layak.
4. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
  - a. Peningkatan kompetensi pencari kerja;
  - b. Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perijinan;
  - c. Peningkatan produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, ternak dan ikan;
  - d. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Usaha Mikro;
  - e. Pembinaan dan Pengembangan sarana distribusi perdagangan;
  - f. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sektor Industri.
5. Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan dengan prioritas :
  - a. Penyelesaian jalan lingkar utara;
  - b. Pengembangan sarana dan prasarana air limbah;
  - c. Pengembangan sarana dan Prasarana air minum;
  - d. Peningkatan pengelolaan persampahan;
  - e. Penataan kawasan permukiman kumuh;
  - f. Pembangunan dan reabilitasi gedung pelayanan publik;
  - g. Penyelesaian revisi rencana tata ruang.
6. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak serta Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi, dengan prioritas:
  - a. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada;
  - b. Percepatan implementasi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi;
  - c. Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
  - d. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang,



termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pada bagian ini menyajikan mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama satu tahun yang didukung oleh kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Kebijakan keuangan tersebut memberikan gambaran tentang anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2023 dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan APBD. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah kedepan. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Penganggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Selain pendanaan yang bersumber dari APBD, dukungan APBD Provinsi dan APBN serta pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

Berikut ini disajikan realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 3.5.  
 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Tasikmalaya  
 Tahun Anggaran 2017 – 2023

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.823.755.593.550,40</b>	<b>1.837.915.314.476,09</b>	<b>1.930.257.962.702,47</b>	<b>1.760.907.421.698,25</b>	<b>2.029.687.967.700,92</b>	<b>1.852.535.540.685,00</b>	<b>1.852.652.164.212</b>
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>354.840.203.843,40</b>	<b>280.014.887.927,09</b>	<b>290.966.425.997,47</b>	<b>314.307.017.302,25</b>	<b>445.403.761.863,92</b>	<b>320.233.626.747,00</b>	<b>323.028.594.900</b>
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	107.452.892.030,00	120.013.770.765,00	143.552.632.283,00	122.595.847.691,00	139.830.453.627,00	153.175.711.947,00	156.708.275.000
1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.004.394.854,46	11.665.110.328,00	11.153.194.801,00	10.008.826.528,00	9.302.738.040,00	17.371.712.000,00	17.434.117.000
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.573.086.951,00	5.418.000.000,00	5.921.762.644,00	6.458.363.839,00	6.221.179.774,00	6.405.414.000,00	6.405.414.000
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	229.809.830.007,94	142.918.006.834,09	130.338.836.269,47	175.243.979.244,25	290.049.390.422,92	143.280.788.800,00	142.480.788.000
2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.468.915.389.707,00</b>	<b>1.492.462.626.549,00</b>	<b>1.573.389.976.705,00</b>	<b>1.376.288.904.396,00</b>	<b>1.514.206.250.837,00</b>	<b>1.443.548.013.938,00</b>	<b>1.440.869.669.312</b>
2.1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.159.420.562.585,00</b>	<b>1.145.172.887.845,00</b>	<b>1.162.971.853.458,00</b>	<b>1.091.272.112.424,00</b>	<b>1.123.833.404.816,00</b>	<b>1.051.960.060.000,00</b>	<b>1.080.129.714.000</b>
2.2	Dana Perimbangan	1.114.721.743.585,00	1.145.172.887.845,00	1.140.745.750.458,00	1.083.301.230.424,00	1.104.792.686.816,00	1.046.835.700.000	1.051.960.060.521
	<i>Dana Transfer Umum</i>	<i>855.669.608.911,00</i>	<i>845.240.117.969,00</i>	<i>883.495.134.029,00</i>	<i>843.976.429.187,00</i>	<i>847.402.128.072,00</i>	<i>808.652.011.000</i>	<i>808.652.011.521</i>
	<i>1. Dana Bag Hasil</i>	<i>75.596.163.911,00</i>	<i>65.166.672.969,00</i>	<i>54.063.700.029,00</i>	<i>90.659.677.187,00</i>	<i>105.304.188.072,00</i>	<i>66.554.071.000</i>	<i>66.554.071.521</i>
	<i>2. Dana Alokasi Umum</i>	<i>780.073.445.000,00</i>	<i>780.073.445.000,00</i>	<i>829.431.434.000,00</i>	<i>753.316.752.000,00</i>	<i>742.097.940.000,00</i>	<i>742.097.940.000</i>	<i>742.097.940.000</i>
	<i>Dana Transfer Khusus</i>	<i>259.052.134.674,00</i>	<i>299.932.769.876,00</i>	<i>257.250.616.429,00</i>	<i>239.324.801.237,00</i>	<i>257.390.558.744,00</i>	<i>238.183.689.000</i>	<i>238.183.689.000</i>
	<i>Dana Insentif Daerah</i>	<i>44.698.819.000,00</i>	<i>-</i>	<i>22.226.103.000,00</i>	<i>-</i>	<i>19.040.718.000,00</i>	<i>5.124.360.000</i>	<i>5.124.360.000</i>
2.3	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7.970.882.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Dana Penyesuaian</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7.970.882.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.4	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>309.494.827.122,00</b>	<b>347.289.738.704,00</b>	<b>410.418.123.247,00</b>	<b>285.016.791.972,00</b>	<b>390.372.846.021,00</b>	<b>391.587.953.938,00</b>	<b>388.909.608.791</b>
<b>B</b>	<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	<i>98.981.716.444,00</i>	<i>107.954.217.239,00</i>	<i>115.983.579.026,00</i>	<i>107.126.150.296,00</i>	<i>109.356.089.659,00</i>	<i>118.132.372.098</i>	<i>113.909.608.791</i>
1	<i>Bantuan Keuangan</i>	<i>210.513.110.678,00</i>	<i>239.335.521.465,00</i>	<i>294.434.544.221,00</i>	<i>177.890.641.676,00</i>	<i>281.016.756.362,00</i>	<i>273.455.581.840</i>	<i>275.000.000.000</i>



No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
1.1	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	-	<b>65.437.800.000,00</b>	<b>65.901.560.000,00</b>	<b>70.311.500.000,00</b>	<b>70.077.955.000,00</b>	<b>88.753.900.000,00</b>	<b>88.753.900.000</b>
1.2	Pendapatan Hibah	-	65.437.800.000,00	65.901.560.000,00	70.311.500.000,00	70.077.955.000,00	88.753.900.000,00	
1.3	Dana darurat	-	-	-				
1.4	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-				88.753.900.000

Sumber: RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026



Tabel 3.6.  
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Tasikmalaya  
Tahun Anggaran 2017 – 2023

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
1.6	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.864.800.183.998,00</b>	<b>1.914.915.379.888,00</b>	<b>1.920.408.722.428,00</b>	<b>1.743.157.214.090,00</b>	<b>1.942.803.908.023,00</b>	<b>1.931.356.880.136,00</b>	<b>2.010.071.292.102</b>
2	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.439.043.565.016,00</b>	<b>1.540.319.320.830,00</b>	<b>1.474.908.780.283,00</b>	<b>1.372.725.283.236,00</b>	<b>1.544.299.528.302,00</b>	<b>1.555.376.297.607,00</b>	<b>1.597.134.292.264</b>
2.1	Belanja Pegawai	819.612.484.380,00	806.445.197.344,00	800.475.508.832,00	755.420.130.459,00	781.454.927.968,00	821.855.030.090,00	841.685.897.848
2.2	Belanja Barang dan Jasa	546.525.701.966,00	636.559.897.304,00	608.851.914.843,00	579.136.136.658,00	683.637.096.308,00	633.135.752.320,00	651.764.382.508
2.3	Belanja Bunga	1.517.869.330,00	1.255.205.122,00	999.564.108,00	435.748.720,00	443.405.362,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000
	Belanja Subsidi	-	30.520.000,00	62.240.000,00	25.552.600,00	<b>41.906.200,00</b>	250.000.000,00	250.000.000
<b>C</b>	Belanja Hibah	67.789.559.340,00	80.672.851.060,00	61.681.013.500,00	35.005.833.200,00	<b>75.572.192.464,00</b>	97.846.515.197,00	97.329.011.908
<b>1</b>	Belanja Bantuan Sosial	3.597.950.000,00	15.355.650.000,00	2.838.539.000,00	2.701.881.599,00	<b>3.150.000.000,00</b>	1.289.000.000,00	5.105.000.000
1.1	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>425.367.687.732,00</b>	<b>374.596.059.058,00</b>	<b>445.499.942.145,00</b>	<b>321.922.174.799,00</b>	<b>373.887.020.203,00</b>	<b>372.210.937.449,00</b>	<b>400.954.449.838</b>
1.2	Belanja Tanah	4.142.796.054,00	4.941.486.325,00	2.296.713.172,00	768.153.000,00	2.505.755.160,00	5.466.796.354,00	2.500.000.000
1.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.933.014.590,00	71.873.847.318,00	67.330.515.560,00	44.266.893.889,00	80.891.195.217,00	119.757.054.329,00	66.333.394.677
1.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.561.943.669,00	74.180.581.001,00	94.900.612.328,00	108.042.766.208,00	67.619.037.887,00	60.658.402.510,00	140.535.362.360
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	192.940.310.705,00	207.040.716.863,00	272.080.679.260,00	158.063.079.655,00	221.987.373.959,00	185.800.988.256,00	190.525.887.901
2.1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.789.622.714,00	16.559.427.551,00	8.891.421.825,00	3.585.696.548,00	883.657.980,00	527.696.000,00	1.059.804.900
	Belanja Modal BLUD				7.195.585.499,00			
2.2	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>388.931.250,00</b>	-	-	<b>47.267.443.525,00</b>	24.617.359.518,00	<b>3.769.645.080,00</b>	<b>11.982.550.000</b>
2.3	Belanja Tidak Terduga	388.931.250,00	-	-	47.267.443.525,00	24.617.359.518,00	3.769.645.080,00	11.982.550.000
2.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>				<b>1.242.312.530,00</b>			

Sumber: RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026



Tabel 3.7.  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Tasikmalaya  
Tahun Anggaran 2017 – 2023

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
<b>E</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(41.044.590.447,60)</b>	<b>(77.000.065.411,91)</b>	<b>9.849.240.274,47</b>	<b>17.750.207.608,25</b>	<b>86.884.059.677,92</b>	<b>(78.821.339.451,00)</b>	<b>(157.419.127.890)</b>
		(2,25)	(4,19)	0,51				7,83
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>143.993.535.934,27</b>	<b>93.322.653.358,67</b>	<b>25.542.009.873,76</b>	<b>14.048.311.867,23</b>	<b>32.530.576.485,48</b>	<b>78.821.339.451,00</b>	
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>146.457.535.934,27</b>	<b>107.728.014.703,67</b>	<b>79.534.816.943,76</b>	<b>77.418.838.521,23</b>	<b>76.516.452.975,48</b>	<b>116.321.339.451,00</b>	<b>183.919.127.890</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	136.457.535.934,27	102.948.945.486,67	16.369.648.304,76	35.397.875.408,23	31.798.519.475,48	106.321.339.451,00	173.919.127.890
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	4.779.069.217,00	63.165.168.639,00	42.020.963.113,00	42.485.876.490,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	2.232.057.010,00	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2.464.000.000,00</b>	<b>14.405.361.345,00</b>	<b>53.992.807.070,00</b>	<b>63.370.526.654,00</b>	<b>43.985.876.490,00</b>	<b>37.500.000.000,00</b>	<b>26.500.000.000</b>
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.600.000.000,00	6.066.002.245,00	53.992.807.070,00	61870526654	42.485.876.490,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	864.000.000,00	8.339.359.100,00	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	7.500.000.000,00	1.500.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	20.000.000.000,00	10.000.000.000
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>102.948.945.486,67</b>	<b>16.322.587.946,76</b>	<b>35.391.250.148,23</b>	<b>31.798.519.475,48</b>	<b>119.414.636.163,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026



Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi APBD tersebut diantaranya :

**A. Pendapatan Daerah**

1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan :
  - a. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi
  - b. Adanya peningkatan tarif untuk beberapa ayat pajak dan retribusi
  - c. Adanya peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB
2. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat dan kejadian luar biasa, diasumsikan adanya kenaikan dana transfer setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak seiring peningkatan penerimaan negara
  - b. Adanya kenaikan DAU, terutama adanya kebijakan penambahan penerimaan pegawai baru dan kenaikan gaji pegawai;
  - c. Adanya kenaikan DAK baik fisik maupun non fisik untuk membantu percepatan pembangunan daerah
  - d. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi seiring peningkatan penerimaan provinsi
  - e. Adanya kenaikan bantuan keuangan untuk membantu percepatan pembangunan kabupaten/kota
3. Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah diantaranya adanya kenaikan bantuan hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seiring dengan meningkatnya jumlah siswa dan kenaikan harga satuan pendidikan dana BOS

**B. Belanja Daerah**

1. Besaran belanja pegawai paling tinggi sebesar 30% dari APBD tidak termasuk tunjangan guru, yang dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun kedepan, sehingga dimungkinkan pertumbuhan pegawai tidak ada penambahan (*zero growth*);
2. Besaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit sebesar 40% dari APBD di luar transfer ke daerah bawahannya dan desa;
3. Belanja subsidi untuk pembayaran jasa bagi hasil pinjaman modal kerja dari lanjutan program pencetakan wirausaha baru;
4. Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasikan untuk membantu penyelenggaraan pembangunan daerah;
5. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat untuk mendanai program prioritas daerah;
6. Alokasi belanja untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024;
7. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

**C. Pembiayaan Daerah**

1. Penganggaran defisit sesuai peraturan perundang-undangan
2. Proyeksi penerimaan SiLPA dan pencairan dana cadangan
3. Penambahan penyertaan modal untuk PT. BPRS Al-Madinah dan Bank Jabar Banten
4. Pembayaran Pokok Utang pada pinjaman yang dilakukan oleh BLUD.

**3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk



meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah:

- 1) Penggalan dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
- 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah :

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Transfer;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain :

Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui:

- 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- 2) Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
- 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan;
- 6) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 7) Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya, antara lain: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan;
- 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 9) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, terutama



dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;

- 10) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.

Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui:

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya, serta bukan pajak lainnya
- 2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
- 3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat ditempuh melalui :

- 1) Sosialisasi mengenai pungutan pajak yang dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak meteorologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.

### **3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti :

1. Pemenuhan belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai;
2. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional kantor perangkat daerah;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
4. Pemenuhan alokasi anggaran untuk urusan dan bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*);
5. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19 terutama sektor kesehatan dan pangan;
6. Penganggaran belanja kegiatan dan program prioritas secara proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (*Money Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial*);
7. Pemenuhan alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan daerah dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses;
8. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;



9. Alokasi Belanja untuk pemilukada
10. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat.

### **3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada :

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah;
3. Pengelolaan hutang terutama untuk menjaga arus kas pada BLUD.

### **3.2.4. Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah Lainnya**

1. Dana Belanja DIPA Kementerian/Lembaga (Tugas Pembantuan dan Satker) di Daerah.

Salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang program Pembangunan di Daerah, yaitu dengan memanfaatkan dana DIPA Kementerian/Lembaga, berupa dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan dana Satker melalui Kementerian/Lembaga yang ada di daerah.

Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Prinsip Pengelolaan Dana TP antaralain (1) Pendanaan Dekon dan Tugas Pembantuan hanya dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah (PP 38/2007), (2) Pendanaan Dekon/TP seluruhnya bersumber dari APBN, (3) Kementerian/Lembaga tidak diperkenankan meminta Daerah menyediakan dana pendamping (cost sharing), (4) Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada RKP dan Prioritas Nasional (5) Pendanaan Dekon/TP memperhatikan keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan pembangunan daerah agar tepat sasaran dan tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu (6) K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebelum pelimpahan/penugasan dalam rangka mendukung terwujudnya sinergisitas pusat dan daerah (7) Pengelolaan Dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel guna mewujudkan LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian.

Karakteristik Kegiatan Tugas Pembantuan Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya, Kegiatan bersifat fisik lainnya antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya yang diserahkan kepada pemerintah daerah serta Pengadaan aset Belanja Barang Fisik Lainnya.

Sedangkan Dana Satker (Satuan Kerja) di daerah terbagi kedalam 2 (dua) Jenis Satker, Yaitu Satker Pusat, adalah satker yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan



tugas pokok dan fungsi kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga yang lokasinya dapat berada di pusat dan atau di daerah serta Satker/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Negara/Lembaga, yaitu instansi vertikal di daerah yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berasal dari kantor pusat.

Satker dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintahan. Untuk membiayai pelaksanaan fungsi tersebut, pemerintah menyediakan alokasi dana melalui mekanisme penganggaran Satker yang ada di Daerah. Peran Koordinasi Pemerintah Daerah mutlak diperlukan dalam rangka koordinasi memberikan input menyusun rencana kerja dan anggaran satker secara jelas, terencana dan berkesinambungan (expenditure framework) dalam menghasilkan layanan bagi masyarakat (public services) di daerah.

## 2. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR)

Sumber alternatif lainnya yang dapat digunakan dalam membiayai pembangunan daerah adalah pelibatan pihak swasta melalui penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR).

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah membentuk regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Kota Tasikmalaya

TJSL dan PKBL diarahkan untuk melaksanakan program pembangunan sebagai berikut :

- a) Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b) Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
- c) Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kota Tasikmalaya dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
- d) Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- e) Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
- f) Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;



- g) Sarana dan prasarana keagamaan; dan
- h) Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Pemerintah Daerah

Dalam rangka terus mendorong minat pihak swasta untuk berkerjasama dalam pembangunan daerah melalui Program TJSL dan PKBL dilakukan melalui upaya-upaya:

- a) Sosialisasi program Program TJSL dan PKBL kepada pihak swasta dan perusahaan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
- b) Meningkatkan koordinasi dan sinergi program pembangunan dengan perusahaan-perusahaan yang telah bermitra dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya
- c) Memberikan penghargaan bagi pihak swasta dan perusahaan yang telah berkerjasama dan melaksanakan program Program TJSL dan PKBL
- d) Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi Program TJSL dan PKBL dalam meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan perusahaan

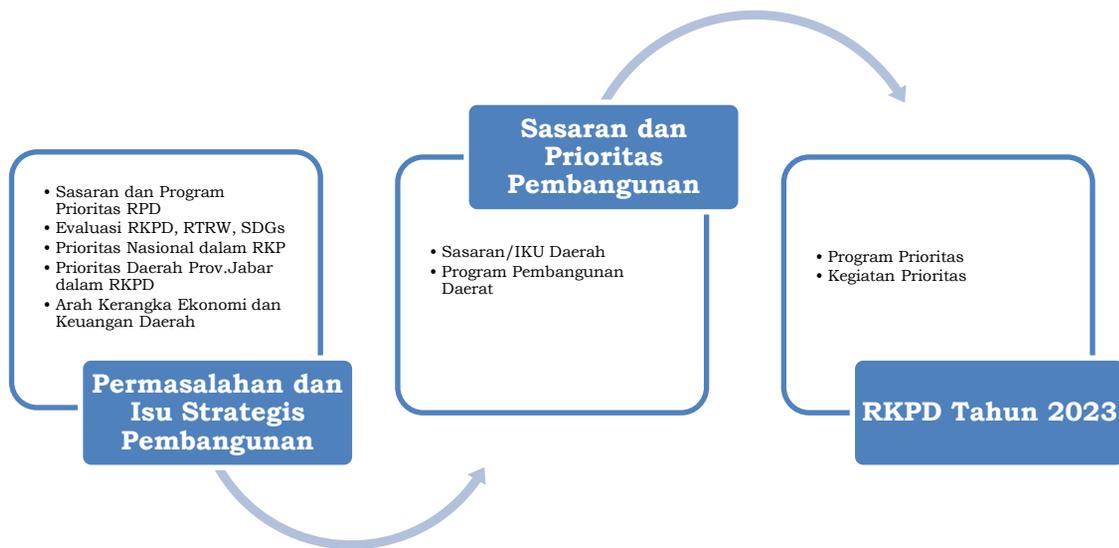
### 3. Pemanfaatan Dana Umat.

Pemanfaatan dana umat yang himpun oleh lembaga-lembaga keuangan non pemerintah seperti LAZNAS, yayasan untuk mendukung pembangunan melalui cara mengsinergikan sasaran program lembaga tersebut dengan sasaran pembangunan kota.



## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan perencanaan pembangunan Tahun 2023 disajikan dalam bentuk kerangka pikir perencanaan pembangunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023, seperti terlihat pada Gambar 4.1 berikut :



Gambar 4.1  
Kerangka Pikir Rumusan RKPD Kota Tasikmalaya

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya tahun 2023 merupakan tahap pembangunan pertama dari RPD 2023-2026. Sesuai dengan arah kebijakan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, tema atau fokus pembangunan daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas untuk Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Perencanaan pembangunan Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 diimplementasikan dengan: (1) tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, dengan 5 (lima) tujuan, dan 11 (sebelas) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kota dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;



Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 mengacu pada (1) Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026, (2) hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, (3) RTRW 2011-2031, (4) SDGs dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026, (3) Prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan Awal RKP (4) Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat (5) identifikasi permasalahan pembangunan dan mempertimbangkan rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis, yang akan dijadikan sebagai salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2023, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Kota Tasikmalaya.

Dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu efisiensi dan realokasi anggaran pada tahun 2021, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022. Efisiensi dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net).

Untuk memulihkan turunnya indikator makro pembangunan daerah, sejalan dengan prioritas pemulihan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional, maka konsentrasi prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2023 tetap bertumpu pada stimulus pemulihan sektor kesehatan dasar dengan mengoptimalkan dukungan penanganan pandemi covid-19 serta penanganan dan penurunan penyakit lainnya. Demikian juga untuk mendorong pemulihan perekonomian daerah, pada tahun 2023 pemulihan ekonomi akan dikonsentrasikan pada pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan kualitas dan produksi industri, usaha mikro serta koperasi, revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan, dan pemulihan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perijinan.



#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

##### 4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;



6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedang isu strategis yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan :

- a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam;
- b) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi;



- c) Transformasi Struktural Berjalan Lambat;
  - d) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan :
- a) Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI);
  - b) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaan;
  - c) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa;
  - d) Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan;
  - e) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing:
- a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
  - b) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk;
  - c) Pemenuhan Layanan Dasar;
  - d) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
  - e) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan :
- a) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa;
  - b) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia;
  - c) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti;
  - d) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama;
  - e) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan;
  - f) Belum Optimalnya Peran Keluarga;
  - g) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar :
- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar;
  - b) Infrastruktur Ekonomi;



- c) Infrastruktur Perkotaan;
  - d) Energi dan Ketenagalistrikan;
  - e) Transformasi Digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim :
- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
  - c) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik :
- a) Konsolidasi Demokrasi;
  - b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
  - c) Penegakan Hukum Nasional;
  - d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
  - e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Adapun agenda pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain hal tersebut, dalam RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi



makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi 2,07 persen, pertama kali sejak krisis tahun 1998. Belajar dari pengalaman krisis di Indonesia tahun 1998, diperlukan upaya yang kuat dan konsisten untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomi seperti sebelum krisis. Dengan menggunakan skenario business as usual (BAU), pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca COVID-19 diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2045. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Penurunan produktivitas tersebut harus segera diatasi melalui redesign transformasi ekonomi Indonesia. Urgensi redesign transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah-panjang. Pascapandemi COVID-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi dari rata-rata 5,7 persen menjadi 6,0 persen sampai dengan tahun 2045 untuk keluar dari MIT dan menjadi negara maju.

Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

Redesain transformasi ekonomi juga untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomasi dan digitalisasi, artificial intelligence (AI) dan big data, disrupti rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi telework. Selain itu, paradigma pembangunan beralih kepada ekonomi hijau.

Pada tahun 2022, pemerintah melalui kebijakan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural mendorong sisi permintaan dan sisi penawaran untuk memulihkan utilitas dan mengembalikan pertumbuhan potensial pada level



sebelum pandemi. Selanjutnya, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut akan menjadi landasan dalam mendorong proses transformasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain masih terdapatnya scars akibat krisis COVID-19, yaitu learning loss, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perlu dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Selain itu, pemerintah saat ini perlu meninggalkan legacy pembangunan sebagai landasan bagi pemerintahan berikutnya untuk lepas landas sehingga penciptaan lapangan kerja, penciptaan efek pengganda terhadap perekonomian dan peningkatan produktivitas perekonomian jangka menengah-panjang tetap berkelanjutan. Tanpa adanya intervensi kebijakan strategis, produktivitas dan daya saing Indonesia diperkirakan akan semakin menurun. Untuk mengejar gap pertumbuhan agar tetap sejalan dengan target keluar dari middle-income trap maka transformasi ekonomi yang didorong melalui peningkatan produktivitas menjadi semakin penting.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat



pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 sebagai berikut.

- 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% - 5,9%;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3% - 6,0%;
- 3) Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378 poin;
- 4) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02%;
- 5) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31 – 73,49 poin;
- 6) Tingkat kemiskinan sebesar 7,5%-8,5%;
- 7) Nilai Tukar Petani sebesar 103-105 poin;
- 8) Nilai Tukar Nelayan sebesar 106 - 107 poin.

#### **4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

RKPD tahun 2023 Provinsi Jawa Barat merupakan RKPD tahun ke-5 dari RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Visi : ***“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”***

Misi :

1. Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;



5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Adapun tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban, mempunyai tujuan : terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
2. Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif, mempunyai tujuan :
  - 1) meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran :
    - a. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
    - b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
    - c. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
    - d. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
    - e. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga, dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional.
  - 2) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran :
    - a. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan local
    - b. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
3. Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah, mempunyai tujuan :
  - 1) terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran :
    - a. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok



- b. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
  - c. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
  - d. Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan
- 2) Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
  - b. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestic
  - c. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
4. Misi 4 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan, mempunyai tujuan : terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran :
- a. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri
  - b. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
  - c. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat
  - d. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
5. Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, mempunyai tujuan : terwujudnya *good governance dan whole of government*, dengan sasaran :
- a. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel
  - b. Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.



#### **4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023 merupakan RKPD tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya 2023-2026. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual.

Visi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tasikmalaya (RPJPD) tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

**“DENGAN IMAN DAN TAKWA KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI PUSAT  
PERDAGANGAN DAN INDUSTRI TERMAJU DI JAWA BARAT”**

Visi tersebut mengandung makna :

1. Visi Kota Tasikmalaya tersebut merupakan arah dan gambaran masa depan (2025) yang akan dituju oleh segenap masyarakat guna mensejahterakan dirinya melalui fungsi dan kegiatan-kegiatan perdagangan dan industri dengan modal nilai-nilai iman dan taqwa.
2. Dipilihnya aktivitas perdagangan dan industri sebagai aktivitas utama Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Kota Tasikmalaya yang dikenal sebagai pedagang dan pelaku industri (khususnya perdagangan dan industri kecil) yang tangguh.
3. Yang dimaksud dengan “pusat” pada pernyataan visi di atas adalah suatu kawasan yang melayani wilayah lain.
4. “Termaju di Jawa Barat” pada pernyataan visi di atas mengandung arti bahwa Kota Tasikmalaya termasuk salah satu kota/kabupaten termaju di Jawa Barat pada sektor perdagangan dan industri

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum.
2. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global.
3. Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri,



perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.

5. Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada *good governance* dengan berlandaskan pada prinsip *government entrepreneurship* sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya.
6. Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya kesejahteraan sosial, dengan 1 (satu) sasaran yaitu:

S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan;

Tujuan 2 : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal, yang terdiri dari 5 (lima) sasaran yaitu:

S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat;

S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender;

S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah;

S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

Tujuan 3 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu :

S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;

S8. Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Tujuan 4 : Terwujudnya infrastruktur dan penataan ruang yang mendukung kota nyaman huni berwawasan lingkungan, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:

S9. Meningkatnya layanan infrastruktur kota yang berkualitas;

S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Tujuan 5 : Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi, yang terdiri dari 1 (satu) sasaran yaitu:



S11. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi.

Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tasikmalaya ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024. Keterkaitan sasaran pembangunan daerah dalam RPD 2023 dengan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024.

Tabel 4.1. Keselarasan Sasaran RPD Kota Tasikmalaya  
2023-2026 dengan Sasaran RPJMN 2020-2024

Sasaran RPJMN 2020-2024	Sasaran RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026
Sasaran nasional 1: “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;
	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha
Sasaran nasional 2: “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian”	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;
	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha
Sasaran nasional 3: “Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera”	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;
	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha
	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Sasaran nasional 4: “Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan”	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender;
Sasaran nasional 5: “Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk”	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Sasaran nasional 6: “Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan”	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
Sasaran nasional 7: “Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda”	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender;



Sasaran RPJMN 2020-2024	Sasaran RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026
Sasaran nasional 8: “Terwujudnya pengentasan kemiskinan”	S1.Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Sasaran nasional 9: “Meningkatnya produktivitas dan daya saing”	S7.Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;
Sasaran nasional 10: “Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya”	S5. Meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah
Sasaran nasional 11: “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan”	S5. Meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah
Sasaran nasional 12: “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial”	S6. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.
Sasaran nasional 13: “Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat”	S6. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.
Sasaran nasional 14: “Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa”	S6. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.
Sasaran nasional 15: “Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif”	S2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat
Sasaran nasional 16: “Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar”	S2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat
Sasaran nasional 17: “Meningkatnya konektivitas wilayah”	S9. Meningkatkan layanan infratraktur kota yang berkualitas
Sasaran nasional 18: “Meningkatnya layanan angkutan umum asal di 6 (enam) kota metropolitan”	S9. Meningkatkan layanan infratraktur kota yang berkualitas
Sasaran nasional 19: “Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien”	S9. Meningkatkan layanan infratraktur kota yang berkualitas
Sasaran nasional 20: “Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	S9. Meningkatkan layanan infratraktur kota yang berkualitas



Sasaran RPJMN 2020-2024	Sasaran RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026
Sasaran nasional 21: “Peningkatan kualitas lingkungan hidup”	S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
Sasaran nasional 22: “Peningkatan ketahanan bencana dan iklim”	S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
Sasaran nasional 23: “Pembangunan rendah karbon”	S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
Sasaran nasional 24: “Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik”	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

Tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.2.  
 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi*		Target Capaian	
					2020	2021	2022	2023
1	T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial		<b>IT.1. Angka kemiskinan</b>	(%)	<b>12,97</b>	<b>13,13</b>	11,50	<b>12,33</b>
		S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IS.1. Angka kemiskinan	(%)	<b>12,97</b>	<b>13,13</b>	11,50	12,33
			IS.2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	(%)	100	100	100	100
2	T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal		<b>IT.2. Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Poin</b>	<b>73,04</b>	<b>73,31</b>	73,95	<b>73,95</b>
		S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	IS.3. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,33	9,52	9,70	9,76
			IS.4. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,45	13,46	13,54	13,50
			IS.5. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	%		69,12	100	72
		S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IS.6. Usia Harapan Hidup	Tahun	72,15	72,34	73,15	72,57
			IS.7. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%		48,09	100	75
		S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	IS.8. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,27	0,81	0,20	0,71
			IS.9. Indeks Pemberdayaan Gender	poin		59,51	62,96	60,00



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi*		Target Capaian	
					2020	2021	2022	2023
			IS.10. Indeks Pembangunan Gender	poin		91,74	91,54	91,84
		S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	IS.11. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan tingkat provinsi	%	-	-	-	2,20
			IS.12. Persentase Capaian Prestasi Olahraga tingkat provinsi	%	-	-	-	34,15
			IS.13. Persentase Pelesetarian Kebudayaan	%			80	63,73
		S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS.14. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	Poin		98,47	100	100
			IS.15. Indeks Resiko Bencana	Poin		Sedang (117,37)	Sedang (117,15)	Sedang (117,15)
3	<b>T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas</b>		<b>IT.3. PDRB adh Berlaku</b>	<b>Triliun</b>	21,59	22,85	23,61	24,40
S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan		IS.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,01	3,57	5,00	5,15	
		IS.17. PDRB Perkapita	Juta / Tahun/Kapita	32,51	31,56	32,46	33,40	
		IS.18. Pengeluaran Per Kapita	Juta / Tahun/Kapita	10,26	10,21	9,86	10,424	
		IS.19. Indeks Gini	Poin	0,366	0,414	0,390	0,390	
		IS.20. Inflasi	%	1,61	1,17	2,00	2,47	
IS.21. Tingkat Pengangguran Terbuka		%	7,99	7,66	7,02	7,35		



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi*		Target Capaian	
					2020	2021	2022	2023
		S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	IS.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku	(milyar)	-	-	-	8.002,90
4	T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan		<b>IT.4. Indeks kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Poin</b>	-	-	-	70,53
		S9. Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas	IS.23. Indeks Persentase kemantapan jalan	poin	-	-	-	12,10
			IS.24. Indeks kawasan permukiman layak huni	poin	-	-	-	2,77
			IS.25. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%				100
			IS.26. Indeks Pencapaian Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman	%				100
		S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	77,33	63,85	74,40	57,94/57,726
			IS. 28. Persentase Pengelolaan sampah	%	71,45	73,86	83,45	99
			IS.29. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	-	-	-	98
5	T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi		<b>IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Kategori/Poin</b>	57,81 (CC)	57,58	61-70 (B)	CC (57,58-60,00)
		S11. Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;	IS.30. Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori/Poin	82,06 (baik)	83,32	77-88	Baik (83,32 - 85,80)
			IS.31. Indeks Inovasi Daerah	Kategori/Poin	-	Inovatif (36,43)	-	Inovatif (46,43)



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi*		Target Capaian	
					2020	2021	2022	2023
			IS.32. Indeks SPBE	Kategori/Poin	n/a	2,68	Sangat Baik (3,00)	Baik (2,9)
			IS.33. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	(Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP
			IS.34. Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/Poin	71,09 (BB)	70,81	81-90 (A)	BB (72,50-75,00)
			IS.35. Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	3,37 (sangat Tinggi)	3,37	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	Sangat Tinggi
			IS.36. Tingkat Maturitas SPIP	Level	2,5	2,83	3	3

Sumber : RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026



Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah sebanyak 24 (dua puluh empat) sasaran. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

## **4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023**

### **4.2.1. Telaahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”**, dengan sasaran pembangunan tahun 2023 adalah :

- (1) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Berikut target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Perurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105 Poin; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107 poin.



Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan yakni:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi : penguatan sistem jaminan sosial; percepatan modernisasi pertanian dan; peningkatan pemerataan pembangunan.
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, dilaksanakan melalui strategi: penguatan sistem kesehatan nasional; peningkatan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter)
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*, dilaksanakan melalui strategi perluasan penyediaan lapangan usaha.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha, dilaksanakan melalui strategi: percepatan revitalisasi pariwisata dan; memeperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dilakukan melalui strategi: percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri; penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim), dilakukan melalui strategi: mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon dan; percepatan transisi energi.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, dilakukan melalui strategi: peningkatan penyediaan air bersih sanitasi; percepatan pemerataan infrastruktur digital; percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilakukan melalui strategi percepatan penyediaan fasilitas dasar di IKN.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Berikut ini merupakan 7 (tujuh) PN dan sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;

Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut :



- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
  - 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan.

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
  - 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI).
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut :

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.
  - 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
  - 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan.
  - 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
  - 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.
  - 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut :

- 1) Menguatkan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.
- 2) Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial.
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa.



- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan dasar.
  - 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan menuju akses pelayanan dasar.
  - 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan.
  - 4) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
  - 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim.
  - 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline.
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpelihara kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal.
- 2) Optimalisasi kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional.
- 3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap.
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- 5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



#### 4.2.2. Telaahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahunan untuk perwujudan misi pembangunan RPJMD. Tema pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagai tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yakni: “Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023. Terdapat 11 (sebelas) prioritas pembangunan yang merupakan janji Kepala Daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 terdiri dari 11 dengan memperhatikan isu strategis daerah sebagaimana tabel di bawan ini :

Tabel 4.3.

Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	P1 Reformasi Sistem Kesehatan Daerah
	P5 Reformasi Sistem Pendidikan Pemajuan Kebudayaan
	P9 Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	P2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan berbasis Inovasi
	P3 Penguatan Sistem ketahanan Pangan Berkelanjutan
	P10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	P11 Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	P8 Gerakan Membangun Desa
Kemiskinan, pengangguran, dan	P4 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial



Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
Masalah social	P8 Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
Reformasi birokrasi	P7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Penjelasan lebih rinci mengenai prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, sebagai berikut:

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Jawa Barat. Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dilakukan melalui 28 (dua puluh delapan) strategi dan 54 arah kebijakan yang tersebar ke dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

### 1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah

Sasaran dari Reformasi Sistem Kesehatan Daerah adalah Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan.

Kebijakan dan strategi yang perlu dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penguatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi mulai dari fasilitas layanan primer (puskesmas atau klinik swasta) sampai ke fasilitas layanan tingkat lanjut yaitu rumah sakit rujukan termasuk laboratorium kesehatan berbasis data kependudukan;
- b. Penguatan jejaring rujukan laboratorium berdasarkan 5 (lima) kewilayahan di Provinsi Jawa Barat yang meliputi: wilayah Purwasuka, Bandung Raya, Priangan Timur, Bodebek, dan Ciayumajakuning;
- c. Penguatan kapasitas sumberdaya kesehatan, baik SDM maupun sarana prasarana pelayanan kesehatan;
- d. Menjamin pembiayaan layanan kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- e. Penguatan penelitian dan pengembangan kesehatan (Litbangkes);
- f. Pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. Pengawasan pergerakan transportasi sesuai ketentuan pemerintah terkait



kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19.

## **2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi**

Sasaran dari prioritas ini adalah :

- a. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat
- b. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
- c. Meningkatnya Aksesibilitas Dari dan Ke Sentra Perdagangan, Perindustrian, dan UMKM
- d. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat

Untuk mengatasi dampak Pandemi Covid 19 dibutuhkan program pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, dan pariwisata serta mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 khusus untuk memulihkan kondisi yang terdampak pandemi, diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi serta melakukan reformasi pada sistem kesehatan daerah, sistem perlindungan sosial, dan sistem ketahanan bencana.

Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dilakukan melalui 2 (dua) aspek, yakni :

- a. Pemulihan ekonomi
- b. Pemulihan investasi

## **3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan**

Sasaran dari prioritas ini adalah :

- a. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- b. Meningkatkan Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Pertanian

Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pangan dan pertanian di tahun 2020 relatif kecil dibandingkan sektor lainnya, namun tetap ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (*supply chain*) dan terpuruknya permintaan. Oleh karena itu



tetap diperlukan upaya-upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui sistem pangan berkelanjutan yang terdiri dari aspek:

- a. Ketersediaan Pangan, dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, penggunaan teknologi yang bersifat sustainable dan pemberdayaan masyarakat bersifat padat karya
- b. Akses pangan, terdiri dari :
  - 1) meningkatkan distribusi, logistik, dan perbaikan tata niaga pangan melalui pembenahan distribusi dan pemasaran, optimalisasi BUMD, pemanfaatan sistem informasi, pengaturan distribusi pangan;
  - 2) membenahi struktur pasar melalui penguatan pengaturan distribusi pangan, optimalisasi peran BULOG sebagai lembaga penyangga untuk mendukung stabilisasi harga pangan, serta penyediaan alternatif pasokan komoditas strategis;
  - 3) pemanfaatan pangan dalam meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

#### **4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial**

Sasaran dari prioritas ini adalah Meningkatkan Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat.

Pandemi COVID-19 di Jawa Barat memberikan tekanan yang cukup berat bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Strategi perlindungan sosial yang komprehensif yang dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), akses permodalan usaha melalui kredit MESRA, pelatihan kewirausahaan dll; dan
- b. Penurunan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan miskin dilakukan dengan SPP gratis, beasiswa siswa miskin, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (PBI JKN KIS), pelayanan gratis bagi masyarakat miskin di RS Provinsi, pelayanan panti, pembangunan rutilahu (rumah tidak layak huni), pemasangan listrik gratis, dan perlindungan sosial bagi korban bencana.

#### **5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan**

Sasaran dari prioritas ini adalah Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan. Strategi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi adalah itu pola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) melalui sistem daring (online). Selain itu, reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan



merupakan prioritas dan langkah strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perbaikan sistem pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan merujuk kepada perbaikan tatakelola pendidikan, pemenuhan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas mutu lulusan yang berdaya saing. Untuk memberikan kemudahan akses pendidikan kepada masyarakat dan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dilakukan melalui pengembangan sekolah terintegrasi, dan revitalisasi SMK dilakukan sebagai peningkatan kualitas pendidikan vokasi.

## **6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana**

Sasaran dari prioritas ini adalah Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana. Strategi dan kebijakan untuk penguatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Barat yaitu melalui peningkatan kesiapsiagaan, terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu: 1). Ketangguhan Masyarakat dan Komunitas (*Resilience Citizen*), 2). Ketangguhan Ilmu Pengetahuan (IPTEK) dan Kearifan Lokal (*Resilience Knowledge and Local Wisdom*), 3). Ketangguhan Kelembagaan dan Kebijakan (*Resilience Institutional and Policy*), 4). Ketangguhan Pendanaan (*Resilience Financing*), 5). Ketangguhan Infrastruktur (*Resilience Infrastructure*), serta 6). Ketangguhan Ekologi (*Resilience Ecology*).

Strategi dan kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dalam kerangka kerja untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Barat, yang dikategorikan ke dalam 9 (sembilan) aktivitas yaitu: 1) Penilaian resiko, 2) Rencana kontijensi, 3) Kelembagaan, 4) Sistem informasi, 5) Mobilisasi sumberdaya, 6) Peringatan dini, 7) Mekanisme respon, 8) Pendidikan dan pelatihan publik, serta 9) Gladi/simulasi.

## **7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah**

Sasaran dari prioritas ini adalah Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah merupakan prioritas untuk menjawab isu reformasi birokrasi. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Misi 3 dan 5 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

## **8. Gerakan Membangun Desa**

Sasaran dari prioritas ini adalah Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Gerbang Desa merupakan prioritas untuk menjawab isu kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia, kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, produktivitas



dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 2, Misi 3 dan Misi 4 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

### **9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara**

Sasaran dari prioritas ini adalah Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara merupakan prioritas untuk menjawab isu strategis Jawa Barat yaitu peningkatan kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 1 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023.

### **10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Sasaran dari prioritas ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
- b. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
- c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat

Infrastruktur konektivitas wilayah merupakan prioritas untuk menjawab isu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 3 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023.

### **11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata**

Sasaran dari prioritas ini adalah Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif. Strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 antara lain dengan mengaktifkan pembangunan pariwisata, dimana pariwisata merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi. Arah kebijakan yang diambil adalah dengan melaksanakan program yang dapat menyerap tenaga kerja terutama yang kehilangan pekerjaan, membangkitkan kembali usaha terdampak COVID-19 dan membangun usaha baru untuk meningkatkan investasi dan serapan tenaga kerja. Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan beberapa kegiatan antara lain peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan promosi wisata pada originasi yang sudah pulih; peningkatan eventevent seni, budaya dan olah raga; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi



prioritas, peningkatan sarana prasarana pendukung dan standar layanan; serta pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

#### **4.2.4.3. Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031. RTRW ini harus menjadi acuan dan sejalan dengan rencana pembangunan daerah.

##### **1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah**

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;



- h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- i. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : *Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priangan Timur - Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri kreatif termaju di Jawa Barat. Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft).*

## **2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah**

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.

### **a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang**

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa
- 2) peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan
- 3) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana dan utilitas umum

Strategi pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) strategi pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa meliputi: penetapan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang dan mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala regional
- 2) strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan meliputi: peningkatan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat-pusat pelayanan, penembangan jalan lingkar dalam dan jalan lingkar luar, peningkatan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pelayanan, pengembangan sistem transportasi massal, peningkatan fungsi terminal



angkutan umum, dan peningkatan integrasi sistem antar moda transportasi.

- 3) strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana dan utilitas umum melalui pendistribusian sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan sesuai fungsi dan hierarki pelayanan, pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi, pengembangan prasarana sumber daya air, peningkatan sistem pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan, peningkatan prasarana pengelolaan air limbah, dan pengembangan sistem prasarana drainase secara terpadu.

b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kota Tasikmalaya

Kebijakan pengembangan pola ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung; dan
- 2) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya

Adapun kebijakan pengelolaan kawasan lindung meliputi:

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :
  - a) Penetapan kawasan yang berfungsi lindung
  - b) Mengembalikan fungsi kawasan yang berfungsi lindung yang telah menurun
  - c) Meningkatkan konservasi kawasan yang berfungsi lindung
- (2) Kebijakan pelestarian kawasan cagar budaya, dengan strategi sebagai berikut:
  - a) Penetapan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi sebagai kawasan cagar budaya
  - b) Memelihara kelestarian kawasan cagar budaya
- (3) Kebijakan penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
  - a) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang telah ada;
  - b) menetapkan persyaratan penyediaan RTH pada setiap fungsi kegiatan;
  - c) mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi; dan



- d) mengembangkan pola-pola kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

Sedangkan kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi:

- (1) pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang dilaksanakan melalui strategi:
  - a) mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan pinggiran pusat kota; dan
  - b) mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota.
- (2) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien, dilaksanakan dengan strategi:
  - a) mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
  - b) menerapkan insentif dan disinsentif.

c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis dalam dokumen RTRW Kota Tasikmalaya 2011-2031 adalah kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan yang meliputi:

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup;
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan keamanan negara

Kebijakan pengembangan kawasan strategis di Kota Tasikmalaya meliputi:

- (1) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yang dilaksanakan melalui strategi:
  - a) menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa skala regional
  - b) pengembangan kawasan industri dan pergudangan skala regional
  - c) pengembangan sentra bisnis baru
  - d) pengembangan dan penataan sentra-sentra produksi pertanian dan industri kecil dan menengah. Antara lain yaitu pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari, Kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansar



- (2) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui strategi:
  - a) mengatur pemanfaatan kawasan konservasi dengan memadukan perlindungan lingkungan hidup dan pengembangan kawasan, yaitu di Kawasan Situ Gede; dan
  - b) mengintegrasikan fungsi pelestarian lingkungan hidup dengan fungsi-fungsi lainnya tanpa mengganggu fungsi utama kawasan, yaitu di Kawasan Wisata Alam Urug.
- (3) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
  - a) menetapkan kawasan strategis pendidikan; dan
  - b) mengintegrasikan kegiatan sosial budaya dengan fungsifungsi penunjangnya dan/atau fungsi-fungsi lain yang terkait.
- (4) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
  - a) menata kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
  - b) mengoptimalkan fungsi kawasan dengan mengintegrasikan fungsi pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi komersial tanpa mengganggu fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara, yaitu di kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata.

Indikasi Program Utama RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, pada Tahap III (2021-2025) adalah sebagai berikut :

#### A. Perwujudan Struktur Ruang

1. Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan Kota
  - 1.1. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Priatim-Pangandaran (PKW)
    - a. Pengembangan Pasar Induk Cikurubuk sebagai Pasar Induk Komoditi Regional.
    - b. Pengembangan TPPAS Ciangir.
  - 1.2. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK)
    - a. Pengembangan Pusat pelayanan pemerintahan Kota Tasikmalaya.
    - b. Pengembangan Pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa.
  - 1.3. Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPK), Penyediaan Sarana Pelayanan
  - 1.4. Pengembangan Pusat Lingkungan (PL), Penyediaan Sarana Pelayanan



2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kota
  - 2.1. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Di Wilayah Kota
    - 2.1.1. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Raya
      - a. Pembangunan jaringan jalan arteri sekunder
      - b. Peningkatan jaringan jalan kolektor
      - c. Pembangunan jaringan jalan kolektor
      - d. Pengembangan Flyover atau Interchange, dan atau Underpass
      - e. Peningkatan Ruas Jalan Ibukota Kecamatan
      - f. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
      - g. Pengembangan Sistem Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan (Off Street)
      - h. Pembangunan Halte/ Shelter
      - i. Pembangunan Jembatan Penyebrangan
    - 2.1.2. Pengembangan Angkutan Umum
      - a. Pengembangan Angkutan Umum Trayek
      - b. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
  - 2.2. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
    - a. Pengembangan BTS Terpadu
    - b. Pengembangan Sistem Informasi
    - c. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tasikmalaya
    - d. Penyediaan Database Kota Tasikmalaya
    - e. Pembentukan dan Pembinaan Komunitas Informasi Masyarakat
    - f. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Tasikmalaya
    - g. Pembinaan Pengelolaan Website OPD
    - h. Penyediaan Akses Internet di Ruang Publik
  - 2.3. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
    - 2.3.1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
      - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya
      - b. Peningkatan Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya
    - 2.3.2. Program Penanggulangan Banjir
      - a. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cikalang-Cidongkol
      - b. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cicantel
      - c. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir Irigasi Bengkok - S. Closeh
      - d. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cihideung- S. Ciromban
      - e. Penanggulangan Sungai Kota Tasikmalaya
  - 2.4. Rencana Sistem Infrastruktur
    - 2.4.1. Sistem Penyediaan Air Minum
      - a. Pengembangan pelayanan air minum



- b. Perlindungan dan pemanfaatan mata air
- 2.4.2. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah
  - a. Pembuatan Tangki Septik Komunal/ SANIMAS
  - b. Rehabilitasi IPLT
  - c. Pembuatan IPAL
  - d. Pemasangan perpipaan SPAL
  - e. Pengembangan Kawasan Permukiman
  - f. Pengembangan IPAL industri di Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan
- 2.4.3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
  - a. Pengadaan Pewadahan Sampah
  - b. Pengadaan Alat Transportasi dan Kendaraan operasional
  - c. Koordinasi Penilaian Kota / Adipura
  - d. Pemeliharaan TPS Mini, Bak Sampah, Transfer depo, Container, Roda Sampah
  - e. Pengadaan Pakaian Kerja
- 2.4.4. Sistem Jaringan Drainase
  - a. Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder (drainase pengumpul) pada setiap sisi jalan utama dengan menggunakan lapis perkerasan (lining)
  - b. Pembuatan sistem saluran drainase tersier
  - c. Lanjutan Pembuatan Trotoar dan drainase
  - d. Pemeliharaan Trotoar dan drainase Kota Tasikmalaya
- 2.4.5. Pengembangan Sistem Evakuasi Bencana
  - a. Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
  - b. Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran
- B. Perwujudan Pola Ruang
  - 1. Perwujudan Kawasan Lindung
    - a. Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat
      - i. Pengembangan Sempadan Sungai
        - a. Rehabilitasi reboisasi dan konservasi kawasan sempadan sungai
        - b. Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan sungai
      - ii. Pengembangan Sempadan Danau
        - a. Rehabilitasi, reboisasi dan konservasi kawasan sempadan danau
        - b. Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan danau
      - iii. Pengembangan Sempadan Mata Air
        - a. Rehabilitasi, reboisasi dan konservasi kawasan sempadan mata air
        - b. Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan mata air
    - b. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau



- i. Pengembangan RTH jalur Hijau Jalan
    - a. Rencana Jalan Lingkar Utara
  - c. Pengembangan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
2. Perwujudan Kawasan Budi Daya
- a. Pengembangan kawasan permukiman
  - b. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa
    - a). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Perumahan
    - b). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Lingkungan/  
Kelurahan
    - c). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Kecamatan
    - d). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala SWK
    - e). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Kota / Regional
    - f). Pengembangan Pasar Induk Agribisnis
  - c. Pengembangan Perkantoran
    - i. Bantuan Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung
    - ii. Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Dinas Badan Lembaga Kantor  
(Dibaleka) Pemerintah Kota Tasikmalaya
  - d. Pengembangan Industri, Penataan kawasan peruntukan industri dan pergudangan
  - e. Pengembangan Kawasan Pariwisata, Pengembangan wisata belanja
  - f. Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
    - a). Pengembangan RTNH pada Sub-Kawasan
    - b). Pengembangan RTNH pada Wilayah Kota
    - c). Pengembangan RTNH pada Fungsi Tertentu
    - d). Pengembangan dan Penyediaan Lahan Parkir
  - g. Pengembangan Ruang Peruntukan Sektor Informal, Pengawasan dan penertiban Ruang Peruntukan Sektor Informal
  - h. Pengembangan Kawasan Pertanian
    - i. Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
    - ii. Pengembangan pertanian tanaman pangan
    - iii. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura
    - iv. Pengembangan kawasan perkebunan
    - v. Pengembangan Kawasan Perikanan
    - vi. Pengembangan Kawasan Peternakan

#### **4.2.3. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Penyusunan RKPD harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian



permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengejawantahkan kewajibannya sebagai representasi masyarakat Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, demikian pula halnya ketentuan yang diatur pada Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tasikmalaya, bahwa DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat/konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kegiatan dalam rangka penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya dilakukan berdasarkan hasil kegiatan reses 45 Anggota DPRD, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mitra kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya dan hasil kunjungan kerja dalam daerah alat-alat kelengkapan DPRD Kota Tasikmalaya.

#### 1. Kegiatan Reses

Kegiatan reses dilaksanakan dilaksanakan dalam 3 kali masa reses yang disesuaikan dengan 3 kali masa sidang. Dimasa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan melakukan kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing sambil menyerap informasi dan aspirasi rakyat yang diwakilinya sebagai bahan penyusunan laporan reses dan kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Lokasi Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) anggota dewan terdiri dari 4 lokasi yaitu :

- a. Wilayah Dapil I meliputi : Kecamatan Cihideung; Kecamatan Tawang; dan Kecamatan Bungursari.
- b. Wilayah Dapil II meliputi : Kecamatan Cipedes; dan Kecamatan Indihiang.
- c. Wilayah Dapil III meliputi : Kecamatan Cibeureum; Kecamatan Tamansari; dan Kecamatan Purbaratu
- d. Wilayah Dapil IV meliputi : Kecamatan Mangkubumi; dan Kecamatan Kawalu.



Tujuan pelaksanaan kegiatan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan mengundang peserta reses yaitu para penerima dampak langsung dari kelompok masyarakat kemudian oleh anggota dewan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan keinginan dalam bentuk masalah dan usulan kegiatan menjadi rekomendasi sebagai laporan reses setiap anggota dewan, disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, sebagaimana dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

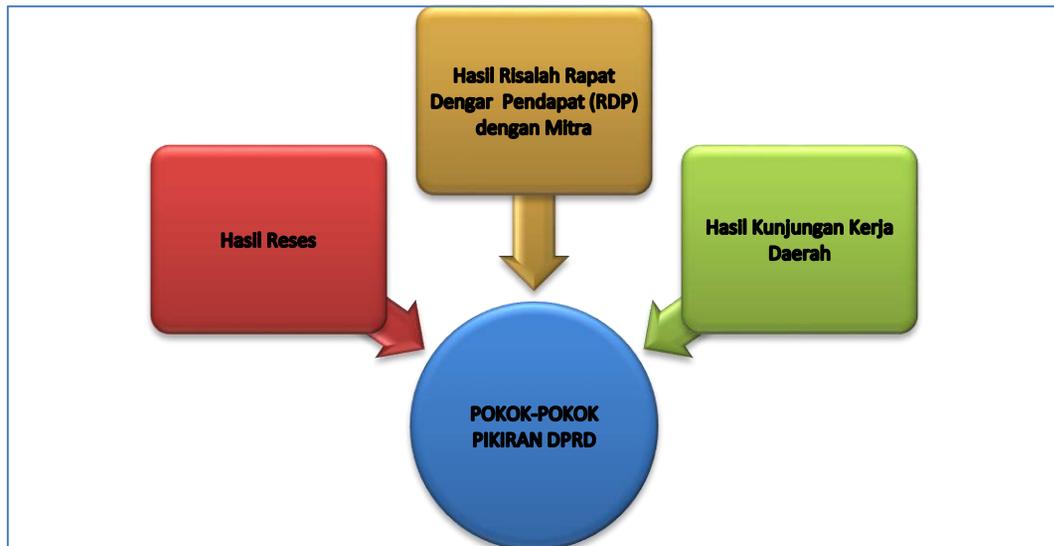
## 2. Rapat Dengar Pendapat

Rapat Dengan Pendapat (RDP) dilakukan dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan penyerapan aspirasi yang harus segera diselesaikan secara politis, pesertanya adalah kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi, OPD yang terkait dan Komisi DPRD yang menjadi mitra kerjanya, serta pihak-pihak yang terkait yang dapat menyelai masalah yang tersampaikan melalui selama proses rapat dengan pendapat. Lapornya adalah hasil risalah rapat dengan kesimpulannya disajikan bahan rekomendasi dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

## 3. Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja DPRD adalah kegiatan selain kegiatan reses anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen yang lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok.

Prosesnya kunjungan kerja dilakukan dengan komunikasi dua arah dengan konstituen secara berkala, dengan melibatkan OPD mitra kerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai bentuk perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan, membuat laporan sebagai bahan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran dalam hubungan dengan pengawasan pembangunan.



Gambar 4.2.

Skema sumber data Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD  
Kota Tasikmalaya Tahun 2022

Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, hasil dengar pendapat, hasil audiensi, hasil reses atau penjangkauan aspirasi masyarakat langsung yang dilakukan oleh anggota DPRD, yang diperoleh dari DPRD melalui sekretariat DPRD. DPRD telah menyampaikan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 170/ Kep.01/DPRD 2022 tentang Pokok - Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Beberapa pokok pikiran DPRD antara lain adalah :

1. Mengoptimalkan pelayanan bidang pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan Ruang Kelas Baru dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik;
2. Mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan terutama jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan khususnya untuk Rumah Sakit Purbaratu dan Rumah Sakit Dewi Sartika dan seluruh fasilitas kesehatan milik Pemerintah pada umumnya, dan peningkatan jumlah SDM kesehatan.
3. Mengoptimalkan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman seperti penanganan banjir, pembangunan drainase terintegrasi, penyediaan infrastruktur sanitasi, serta rehabilitasi gedung kantor kelurahan;
4. Mengoptimalkan bidang perumahan dan permukiman diantaranya mempermudah penyerahan fasum dan fasos, serta melaksanakan penataan kawasan kumuh;



5. Meningkatkan penegakan peraturan daerah dan penciptaan keamanan dan ketertiban umum melalui menguatkan kelembagaan SatpolPP, sosialisasi, dan operasi penegakan keamanan dan ketertiban umum;
6. Meningkatkan penanganan PMKS mulai dari pendataan, penyediaan fasilitas pelayanan dan pembinaan serta penyediaan rumah singgah;
7. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja melalui kerjasama pelatihan dan penempatan kerja, penyediaan balai latihan kerja, serta mengadakan bursa kerja.
8. Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak terutama dalam penanganan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
9. Perlu dibangunnya kawasan pangan lestari serta menyediakan pemasaran produk pangan secara online;
10. Perlu peningkatan pelayanan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu perlu juga adanya penambahan ruang terbuka hijau;
11. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi;
12. Melakukan peningkatan pengelolaan perparkiran dan pengaturan lalu lintas serta pendataan penerangan jalan umum;
13. Peningkatan kapasitas koperasi dan peningkatan wirausaha baru yang profesional dan didukung dengan keilmuan yang mumpuni;
14. Optimalisasi dalam penggalian potensi dalam menjaring investasi serta meningkatkan pelayanan perijinan salahsatunya dengan pembentukan Mall Pelayanan Publik;
15. Perlunya peningkatan pembinaan atlet terutama atlet usia dini pada semua cabang olahraga;
16. Perlunya menyediakan sarana budaya sebagai tempat pementasan seni dari berbagai sanggar seni serta perlunya peningkatan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Tasikmalaya;
17. Penyediaan perpustakaan digital untuk mendorong minat baca masyarakat serta peningkatan koleksi buku yang ada di perpustakaan;
18. Peningkatan budidaya perikanan dan pertanian diantaranya guna meningkatkan produktivitas perikanan dan pertanian melalui peningkatan SDM perikanan dan pertanian, alat teknologi pertanian, ketersediaan pakan, pupuk dan obat-obatan;



19. Optimalisasi kepariwisataan melalui penggalan potensi pariwisata serta peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana kepariwisataan yang telah ada;
20. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus intens dalam pembinaan wira usaha, sosialisasi program, pelatihan, bantuan modal, bantuan bahan baku dan yang terpenting adalah bantuan pemasaran yang berdaya saing;
21. Pemerintah kota tasikmalaya harus melakukan verifikasi dan validasi data industri kecil menengah yang ada di Kota Tasikmalaya
22. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus membuat sistem informasi data yang terintegrasi kepada semua OPD yang - 19 - berbasis teknologi agar penyajian data dan perencanaan pembangunan tepat sasaran;
23. Pemerintah Kota Tasikmalaya membuat perencanaan karir ASN secara periodik serta penempatan jabatan struktural maupun fungsional berdasarkan bidang keahlian/keilmuan sehingga tercipta tata kerja yang baik dilingkungan pemerintah kota tasikmalaya.

#### **4.2.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023**

##### **4.2.4.1. Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Tasikmalaya**

Perumusan isu strategis Kota Tasikmalaya tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2022, arah kebijakan dari RPD, arah kebijakan RKP dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti fenomena Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah pandemi COVID-19. Secara umum permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan pada :

##### 1. Kemiskinan dan permasalahan sosial

Angka Kemiskinan pada tahun 2018-2021 di Kota Tasikmalaya menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu pada angka 12,97 persen dan 13,13 persen. Kemiskinan ini disebabkan diantaranya oleh masih rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, akses ekonomi, sanitasi dan pola hidup masyarakat serta rendahnya daya beli masyarakat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kemiskinan berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha serta tingkat pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan sebagai dampak dari pandemi Covid 19. Selain



kemiskinan, permasalahan sosial lainnya diantaranya masih banyaknya anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, korban penyalahgunaan Napza, dan keluarga berumah tak layak huni.

## 2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya yang mencapai 716.155 jiwa menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kota Tasikmalaya mampu bersaing secara regional, dan nasional. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain belum optimalnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh capaian rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 9,52 tahun dan harapan lama sekolah yang baru mencapai 13,46 tahun.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan masih tingginya prevalensi stunting. Pemberdayaan perempuan di Kota Tasikmalaya saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kota Tasikmalaya sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Kota Tasikmalaya.

Pembangunan dalam bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan masih kurang optimal. Prestasi bidang kepemudaan dan olahraga baik ditingkat Provinsi maupun nasional masih kurang optimal, selain itu ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang masih kurang serta sarana dan prasarana kebudayaan seperti gedung kesenian dan kegiatan seni budaya masih sedikit.



Sebagai sebuah kota yang cukup heterogen, kerukunan hidup masyarakat menjadi permasalahan yang harus diperhatikan sehingga tercipta masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan damai yang ditunjang oleh keamanan dan keteriban umum sehingga dapat tercipta masyarakat yang aman dan tertib.

### 3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka semakin berdampak terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya. Hal ini ditandai dengan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,01 persen.

Beberapa permasalahan perekonomian Kota Tasikmalaya diantaranya belum optimalnya perkembangan UMKM, khususnya pada akses permodalan, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi berbasis digital literacy, belum meratanya penerapan standar produk usaha mikro dan kecil. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif.

Belum optimalnya iklim penanaman modal yang disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan perijinan, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan dan akses pasar, SDM petani masih terbatas, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian kota Tasikmalaya.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, distribusi dan sarana prasarana perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu masih rendahnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi. Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur kawasan industri belum



terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik, peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi.

#### 4. Infrastruktur dan penataan ruang

Meskipun pembangunan infrastruktur di Kota Tasikmalaya pada periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, namun pembangunan infrastruktur masih perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung infrastruktur sanitasi, air minum, pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur lanjutan periode sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan seperti penyelesaian lingkaran utara Kota Tasikmalaya.

Penataan ruang di Kota Tasikmalaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan perencanaan penataan ruang. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan penyesuaian regulasi penataan ruang, perlu adanya penyesuaian rencana tata ruang dan wilayah yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan.

Dalam proses pembangunan, lingkungan hidup berperan sangat penting dalam kelangsungan kehidupan manusia dan pemanfaatannya seharusnya berjalan dengan seimbang dengan pembangunan, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan, masih terbatasnya taman kehati dan perlindungan kawasan lindung serta proposi Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya.

#### 5. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Tasikmalaya masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama dalam pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yaitu : manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan organisasi, penataan SDM aparatur, Deregulasi kebijakan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antarlain masih perlu ditingkatkan profesionalisme aparatur, dan belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan



dampak dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya.

Selain itu, identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya serta aspek daya saing. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan RPJMD tahun 2017-2022, maka isu strategis pembangunan daerah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan permasalahan sosial
2. Kualitas SDM berbasis kearifan lokal
3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi
4. Infrastruktur dan penataan ruang
5. Implementasi Reformasi birokrasi

Berdasarkan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2023, maka perlu ditetapkannya strategi dan kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2023 guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2023, mengacu pada strategi dan arah kebijakan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut



Tabel 4.4.  
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan  
Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T.1. Meningkatnya kesejahteraan sosial	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan dan rehabilitasi sosial,</li> <li>Pemberdayaan masyarakat miskin,</li> <li>Sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya.</li> <li>Peningkatan program penanggulangan kemiskinan pada sektor sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, usaha dan industri serta perdagangan mikro kecil, pertanian, perikanan dan sektor lainnya,</li> </ol>
T.2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan local	S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar</li> <li>Peningkatan jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan,</li> <li>Peningkatan kurikulum/metode pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berkarakter, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi</li> <li>Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan minat baca masyarakat</li> </ol>
	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan</li> </ol>
	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan	Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender serta memperkuat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.</li> </ol>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	pengarusutamaan gender	ketahanan dan pemberdayaan keluarga	2. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	Meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalan potensi pemuda dan olahraga.</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya</li> </ol>
	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda dengan melibatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda secara humanis dan komprehensif,</li> <li>2. Peningkatan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan</li> </ol>
T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi, usaha dan industri mikro kecil.</li> <li>2. Revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah.</li> <li>4. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah</li> <li>2. Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa.</li> <li>3. Peningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah.</li> <li>4. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.</li> <li>5. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif</li> </ol>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta mendorong geliat sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif</p> <p>5. Meningkatkan pengendalian pasokan, distribusi, harga komoditas barang untuk menjaga stabilitas inflasi daerah</p>	
	<p>S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan, pengembangan, promosi dan pengendalian penanaman modal</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja</li> <li>3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan.</li> <li>2. Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal.</li> <li>3. Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja.</li> <li>4. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja</li> </ol>
<p>T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan</p>	<p>S9. Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi</li> <li>2. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menunjang keselamatan berlalulintas.</li> <li>2. Peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama ari minum dan air limbah yang layak.</li> <li>3. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat</li> </ol>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan ;	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup.</li> <li>3. Penataan RTRW yang komprehensif dan mendukung pembangunan daerah</li> </ol>
T.5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	S11.Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi informasi serta Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai .</li> <li>2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah</li> <li>3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.</li> <li>4. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah</li> </ol>

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, fokus pembangunan Kota Tasikmalaya atau Tema Pembangunan Tahun 2023 adalah:

**“Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas untuk Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

**4.2.4.2. Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2023**

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah bertujuan untuk mengutamakan dan memfokuskan rencana pembangunan dalam rangka percepatan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta indikator kinerja pembangunan. Prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Tahun 2022 dan prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.



Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, isu strategis, dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan isu strategis pembangunan, pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 difokuskan pada prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan permasalahan sosial, yang meliputi :
  - a. Peningkatan Pelayanan Pengurangan Kemiskinan, dengan sasaran:
    - 1) Pemenuhan SPM Bidang Sosial;
    - 2) Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
    - 3) Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
    - 4) Penguatan program penanggulangan kemiskinan;
    - 5) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
  - b. Perlindungan Sosial Terintegrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan sasaran:
    - 1) Integrasi Program Jamkeskinda dan BPJS Kesehatan;
    - 2) Dukungan Program Perlindungan Sosial (PIS, PIP, PKH, BPNT);
    - 3) Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas;
  - c. Peningkatan Koordinasi dan Peran Serta Pemangku Kepentingan, dengan sasaran :
    - 1) Penguatan Regulasi dan Program Penanganan Kemiskinan;
    - 2) Penguatan Peran TKPK (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi);
    - 3) Peningkatan Peran Serta Pemangku Kepentingan (Pentahelix);
2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan local yang meliputi :
  - a. Penurunan AKI, AKB dan Stunting, dengan sasaran :
    - 1) Pemenuhan SPM bidang kesehatan;
    - 2) Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan;
    - 3) Peningkatan Kesehatan dan Ketahanan Keluarga;
  - b. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Serta Kesehatan Lingkungan, dengan sasaran :
    - 1) Dukungan penanganan pandemi covid19;
    - 2) Penanganan dan penurunan DBD, TBC, penularan HIV AIDs;
    - 3) Pengendalian Penyakit degeneratif;
    - 4) Peningkatan PHBS Masyarakat;
  - c. Apresiasi Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya Daerah, dengan sasaran:
    - 1) Pemenuhan regulasi pemuda dan kebudayaan;
    - 2) Peningkatan sarana prasarana kepemudaan, olahraga, seni dan budaya;



- 3) Optimalisasi pembinaan pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah;
- d. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, dengan sasaran :
  - 1) Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan;
  - 2) Peningkatan sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan Penyetaraan;
  - 3) Peningkatan Kurikulum Pendidikan Karakter;
  - 4) Peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan;
  - 5) Optimalisasi layanan perpustakaan.
3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang meliputi :
  - a. Peningkatan Produktivitas Pertanian Perikanan, dengan sasaran:
    - 1) Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasaran pertanian perikanan;
    - 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian perikanan;
    - 3) Peningkatan kapasitas SDM yang bergerak di sektor pertanian perikanan;
    - 4) Pengembangan/budidaya komoditas unggulan;
    - 5) Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
  - b. Peningkatan Investasi Daerah, dengan sasaran:
    - 1) Pengembangan iklim investasi, promosi dan pengendalian penanaman modal;
    - 2) Peningkatan pelayanan penanaman modal terpadu melalui Mall Pelayanan Publik;
  - c. Peningkatan kualitas dan produksi industri, Usaha Mikro serta Koperasi, dengan sasaran:
    - 1) Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan koperasi;
    - 2) Peningkatan kualitas produk IKM, Usaha Mikro dan koperasi;
    - 3) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;
    - 4) Peningkatan peran dan fungsi Pusat Pengembangan Industri Kerajinan (PPIK);
  - d. Revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dengan sasaran :
    - 1) Revitalisasi dan rehabilitasi pasar rakyat serta fasilitasi perdagangan;
    - 2) Peningkatan pengawasan perdagangan;
  - e. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha dengan sasaran :
    - 1) Peningkatan kapasitas pencari kerja berdasarkan kompetensi;
    - 2) Penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja dengan skema kolaborasi;
  - f. Pengembangan Pariwisata Kota dengan sasaran :



- 1) Peningkatan kapasitas sumberdaya pariwisata;
  - 2) Pengembangan Pariwisata Perkotaan dan Kampung Wisata;
  - 3) Peningkatan Promosi Pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - 4) Peningkatan kapasitas sumberdaya pariwisata;
4. Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan yang meliputi :
- a. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, dengan sasaran :
    - 1) Peningkatan cakupan layanan air minum, air limbah dan pengelolaan persampahan;
    - 2) Peningkatan kualitas jalan dan jembatan perkotaan serta bangunan pelengkapannya;
    - 3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Air;
    - 4) Peningkatan pelayanan angkutan dan fasilitas perlengkapan jalan;
    - 5) Optimalisasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG);
    - 6) Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum;
  - b. Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran :
    - 1) Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman;
    - 2) Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
    - 3) Peningkatan PSU perumahan;
    - 4) Pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan, dengan sasaran :
    - 1) Peningkatan jumlah RTH;
    - 2) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
    - 3) Peningkatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
  - d. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan sasaran :
    - 1) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang;
    - 2) Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
    - 3) Peningkatan koordinasi tata ruang;
5. Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi yang meliputi :
- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai;
  - b. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah;
  - c. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan;
  - d. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.



Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5  
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023	Arah Kebijakan RPD Tahun 2023-2026
1. Pengurangan kemiskinan dan permasalahan sosial	1. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. 2. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan pada sektor sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, usaha dan industri serta perdagangan mikro kecil, pertanian, perikanan dan sektor lainnya,
2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan local;	1. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar 2. Peningkatan jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, 3. Peningkatan kurikulum/metode pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berkarakter, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi 4. Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan minat baca masyarakat 5. Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 6. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga. 7. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak



<p><b>Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023</b></p>	<p><b>Arah Kebijakan RPD Tahun 2023-2026</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalian potensi pemuda dan olahraga.</li> <li>9. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya</li> <li>10. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda secara humanis dan komprehensif</li> <li>11. pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan</li> </ul>
<p>3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah</li> <li>2. Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa.</li> <li>3. Peningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah.</li> <li>4. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.</li> <li>5. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif</li> <li>6. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan</li> <li>7. Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal.</li> <li>8. Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja.</li> </ul>



Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023	Arah Kebijakan RPD Tahun 2023-2026
	9. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja
4. Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menunjang keselamatan berlalulintas.</li> <li>2. Peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama ari minum dan air limbah yang layak.</li> <li>3. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat</li> <li>4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup.</li> <li>5. Penataan RTRW yang komprehensif dan mendukung pembangunan daerah</li> </ol>
5. Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai .</li> <li>2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah</li> <li>3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan</li> <li>4. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah</li> </ol>

Sumber : hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022.

Prioritas pembangunan tahun 2023 disusun untuk menjawab isu strategis pembangunan sesuai dengan permasalahan pembangunan daerah. Berikut keterkaitan prioritas pembangunan dengan isu strategis pembangunan tahun 2023.



Tabel 4.6.  
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1. Kemiskinan dan Permasalahan Sosial	Pengurangan kemiskinan dan permasalahan sosial
2. Kualitas SDM berbasis kearifan lokal	Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan local;
3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
4. Infrastruktur dan penataan ruang	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan
5. Implementasi birokrasi	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi

Sumber : hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022.

Selain berkaitan dengan isu strategis pembangunan, prioritas pembangunan tahun 2023 juga memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Tasikmalaya sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4.7  
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan
<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja melalui kerjasama pelatihan dan penempatan kerja, penyediaan balai latihan kerja, serta mengadakan bursa kerja.</li> <li>Meningkatkan penanganan PMKS mulai dari pendataan, penyediaan fasilitas pelayanan dan pembinaan serta penyediaan rumah singgah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengurangan kemiskinan dan permasalahan sosial</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan pelayanan bidang pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan Ruang Kelas Baru dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik;</li> <li>Mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan terutama jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan khususnya untuk Rumah Sakit Purbaratu dan Rumah Sakit Dewi Sartika dan seluruh fasilitas kesehatan milik Pemerintah pada umumnya, dan peningkatan jumlah SDM kesehatan.</li> <li>Meningkatkan penegakan peraturan daerah dan penciptaan keamanan dan ketertiban umum melalui menguatkan kelembagaan SatpolPP, sosialisasi, dan operasi penegakan keamanan dan ketertiban umum;</li> <li>Perlunya peningkatan pembinaan atlet terutama atlet usia dini pada semua cabang olahraga;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan local;</li> </ol>



Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pelunya menyediakan sarana budaya sebagai tempat pementasan seni dari berbagai sanggar seni serta perlunya peningkatan pelesetarian benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Tasikmalaya;</li> <li>6. Penyediaan perpustakaan digital untuk mendorong minat baca masyarakat serta peningkatan koleksi buku yang ada diperpustakaan;</li> <li>7. Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak terutama dalam penanganan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dibangunnya kawasan pangan lestari serta menyediakan pemasaran produk pangan secara online;</li> <li>2. Peningkatan kapasitas koperasi dan peningkatan wirausaha baru yang profesional dan didukung dengan keilmuan yang mumpuni;</li> <li>3. Optimalisasi dalam penggalian potensi dalam menjangkau investasi serta meningkatkan pelayanan perijinan salahsatunya dengan pembentukan Mall Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peningkatan budidaya perikanan dan pertanian diantaranya guna meningkatkan produktivitas perikanan dan pertanian melalui peningkatan SDM perikanan dan pertanian, alat teknologi pertanian, ketersediaan pakan, pupuk dan obat-obatan;</li> <li>5. Optimalisasi kepariwisataan melalui penggalian potensi pariwisata serta peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana kepariwisataan yang telah ada;</li> <li>6. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus intensif dalam pembinaan wira usaha, sosialisasi program, pelatihan, bantuan modal, bantuan bahan baku dan yang terpenting adalah bantuan pemasaran yang berdaya saing;</li> <li>7. Pemerintah kota tasikmalaya harus melakukan verifikasi dan validasi data industri kecil menengah yang ada di Kota Tasikmalaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman seperti penanganan banjir, pembangunan drainase terintegrasi, penyediaan infrastruktur sanitasi, serta rehabilitasi gedung kantor kelurahan;</li> <li>2. Mengoptimalkan bidang perumahan dan permukiman diantaranya mempermudah penyerahan fasum dan fasos, serta melaksanakan penataan kawasan kumuh;</li> <li>3. Perlu peningkatan pelayanan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu perlu juga adanya penambahan ruang terbuka hijau;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan</li> </ol>



Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan
4. Melakukan peningkatan pengelolaan perparkiran dan pengaturan lalu lintas serta pendataan penerangan jalan umum;	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi;</li> <li>2. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus membuat sistem informasi data yang terintegrasi kepada semua OPD yang - 19 - berbasis teknologi agar penyajian data dan perencanaan pembangunan tepat sasaran;</li> <li>3. Pemerintah Kota Tasikmalaya membuat perencanaan karir ASN secara periodik serta penempatan jabatan struktural maupun fungsional berdasarkan bidang keahlian/keilmuan sehingga tercipta tata kerja yang baik dilingkungan pemerintah kota tasikmalaya.</li> </ol>	5. Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi

*Sumber : hasil analisa Bappelitbangda, 2022.*

Prioritas pembangunan tahun 2023 selanjutnya diimplementasikan melalui program prioritas pembangunan daerah yang dalam operasionalnya dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program-program perangkat daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



Tabel 4.7.  
Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran dan Program Prioritas

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah	
1	<b>Pengurangan Kemiskinan dan Permasalahan Sosial</b>										
	a	Peningkatan Pelayanan Pengurangan Kemiskinan	S1 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IS.1. Angka kemiskinan	(%)	12,33	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Aktif	%	100	Dinas Sosial
	b	Perlindungan Sosial Terintegrasi dan Pemberdayaan Masyarakat		IS.2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	(%)	100	Program Rehabilitasi Sosial	persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	100	Dinas Sosial
	c	Peningkatan Koordinasi dan Peran Serta Pemangku Kepentingan					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	Dinas Sosial
							Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	%	100	Dinas Sosial
							Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	Dinas Sosial



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta (UHC)	%	100	Dinas Kesehatan
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	1,36%	Disperwaki m
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	2	Dinas KUMKM Perindag
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	%	15	DKP-3
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap/Tahun	22,25	DKP-3



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah	
							Produksi produk olahan perikanan	Ton	300	DKP-3	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak	%	1 %	DKP-3	
							Produksi Hortikultura dan perkebunan	Ton	5.900	DKP-3	
							Produksi Tanaman Pangan	Ton	70.000	DKP-3	
2											
	A	<b>Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan local</b>	S.2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	IS.3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		9,76	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Non Formal /Kesetaraan Terakreditasi B	%	51,85	Disdik
								Persentase PAUD Terakreditasi B	%	35,76	Disdik
								Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	%	67,38	Disdik
								Persentase SD Terakreditasi A	%	60,26	Disdik



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
							Persentase SMP Terakreditasi A		58,19	Disdik
			IS.4. Harapan Lama Sekolah (Tahun)		13,5	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase capaian pengembangan kurikulum	%	100	Disdik
			IS.5. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (%)		100	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	%	51,45	Disdik
						Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	%	25,03	Disdik
						Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pembinaan perpustakaan	%	4,42	Dispusipda
							Persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar	%	38	Dispusipda



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
							nasional perustakaan			
						Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	23,81	Dispusipda
	B	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IS.6. Usia Harapan Hidup (Tahun)	%	72,57	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Faskes dengan SIK terinterasi	%	100	Dinkes
							Cakupan Kinerja Layanan P2P	%	100	Dinkes
							Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan	%	70.9	Dinkes
							Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	25,1	Dinkes
							Cakupan penelitian kesehatan	%	100	Dinkes
							Cakupan Rumah Sakit Kelas C, D dan	%	100	Dinkes



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
							Faskes Tk.Kota yang diberi ijin			
							Capaian Penyelenggaraan Operasional Puskesmas laboratorium dan gudang farmasi	%	100	Dinkes
							Indeks Keluarga Sehat	poin	0,4	Dinkes
							Indeks Pencapaian SPM kesehatan masyarakat	%	100	Dinkes
							Pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta (UHC)	%	82,0	Dinkes
							Rasio Faskes terhadap penduduk	%	1,1	Dinkes
			IS.7. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (%)	%	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%	91	Dinkes



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	77	Dinkes
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan GERMAS	%	25	Dinkes
		S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	IS.8. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	%	0,71	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	dok	1	DPPKBP3A
			IS.9. Indeks Pemberdayaan Gender (poin)	Poin	60,00	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kepesertaan KB MKJP	%	0,9	DPPKBP3A
							Persentase Kepesertaan Unmet Need	%	13,5	DPPKBP3A
			IS.10. Indeks Pembangunan Gender (poin)	Poin	91,84	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota BKB yang ber-KB	%	82,53	DPPKBP3A
							Cakupan Anggota BKL yang ber KB	%	74,97	DPPKBP3A



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
							Cakupan Anggota BKR yang ber KB	%	76,61	
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Sistem Data Gender dan Anak	%	100	DPPKBP3A
						Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase capaian PUG SKPD yang Responsif Gender	%	100	DPPKBP3A
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	100	DPPKBP3A
						Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus	%	100	DPPKBP3A
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pembinaan Lembaga yang Peduli dalam Pemenuhan Hak Anak (PHA)	%	100	DPPKBP3A
						Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus anak	%	100	DPPKBP3A



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
	C Apresiasi Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya Daerah	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	IS.11. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan tingkat Provinsi (%)	%	2,20	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda / OKP yang dibina	%	29,67	Disporabudpar
			IS.12. Persentase Capaian Prestasi Olahraga tingkat Provinsi (%)	%	34,15%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	34,15	Disporabudpar
			IS.13. Persentase Pelestarian Kebudayaan (%)	%	63,73	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	63,73	Disporabudpar
						Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	25	Disporabudpar
						Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal yang Dilestarikan	%	25	Disporabudpar
						Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	46,15	Disporabudpar



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
	E Pengembangan pariwisata kota	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS.14. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%)	%	100	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengawasan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	93	SatPolPP
							Presentase PPNS Yang di Bina		80	SatPolPP
							Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan)		100	SatPolPP
			IS.15. Indeks Resiko Bencana (Kategori/poin)	poin	Sedang (117,20)	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana,	%	100	BPBD
							Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan	%	100	BPBD



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
							Kesiapsiagaan terhadap bencana,			
							Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana	%	100	BPBD
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	%	86	BPBD
						Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	Bakesbang pol
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	100	Bakesbang pol



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial	%	100	Bakesbang pol
						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang dibina	%	100	Bakesbang pol
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina	%	71	Bakesbang pol
3										
	A Peningkatan jaminan dan perlindungan social	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IS.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	5,12	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	%	100	Dinas Sosial



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
			IS.17. PDRB Perkapita (Juta rupiah)	%	35,54	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	persentase koperasi aktif	%	1	Dinas KUMKM Perindag
			IS.18. Pengeluaran Per Kapita (Juta rupiah)		10,424	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	6	Dinas KUMKM Perindag
			IS.19. Indeks Gini (Poin)		0,365	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang kompeten	%	25	Dinas KUMKM Perindag
			IS.20. Inflasi (%)		2,47	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang diberdayakan	%	25	Dinas KUMKM Perindag
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	2	Dinas KUMKM Perindag
						Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	5	Dinas KUMKM Perindag
						Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				Dinas KUMKM Perindag



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
						Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	100 %	Dinas KUMKM Perindag
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	%	70 %	Dinas KUMKM Perindag
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	%	40 %	Dinas KUMKM Perindag
						Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	%	1 %	Dinas KUMKM Perindag
						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang berterasa sah	%	80 %	Dinas KUMKM Perindag
						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya	%	10 %	Dinas KUMKM Perindag



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
						Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase implementasi pencapaian sasaran rencana pembangunan industri	%	5	Dinas KUMKM Perindag
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri	%	100	Dinas KUMKM Perindag
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terdaftar di sistem informasi industri nasional	%	5	Dinas KUMKM Perindag
						Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	Unit	1	DKP-3
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	110,7	DKP-3



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
							Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	125	DKP-3
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kelurahan rentan pangan yang ditangani	%	15	DKP-3
						Program pengawasan Keamanan pangan	Persentase pengawasan keamanan pangan	%	100	DKP-3
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	10000	DKP-3
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap/Tahun	22,25	DKP-3
							Produksi produk olahan perikanan	Ton	300	DKP-3
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak	%	1	DKP-3



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
							Produksi Hortikultura dan perkebunan	Ton	5.900	DKP-3
							Produksi Tanaman Pangan	Ton	70.000	DKP-3
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Angka Produksi Hasil peternakan	Ton	10.350	DKP-3
							Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha	62,9	DKP-3
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan kejadian kasus penyakit hewan menular	%	100	DKP-3
						Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	%	75	DKP-3
						Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	ijin	3	DKP-3



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah			
						Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	4.5	DKP-3			
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	59,18	Disporabu dpar			
						Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	443.505	Disporabu dpar			
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	53,33	Disporabu dpar			
	B	Pemberdayaan masyarakat miskin	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja			IS.21. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	7,35	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu ke rencana tenaga kerja	Lemba ga	4	Dinas Tenaga Kerja
						IS.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	8.002,90	Program Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Orang	5	Dinas Tenaga Kerja
									Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam	Persen	27	Dinas Tenaga Kerja



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
							dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota			
						Program Hubungan Industrial	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Orang	54,25	Dinas Tenaga Kerja
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	100	DPMPTSP
						Program Promosi Penanaman Modal	Nilai penanaman modal daerah dari PMA dan PMDN yang masuk	Milyar	1242	DPMPTSP
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Capaian penerbitan perijinan terpadu	%	100	DPMPTSP



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah	
							tepat waktu sesuai SOP				
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	100	DPMPTSP	
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengelolaan basis data potensi Penanaman Modal sesuai SOP	%	25	DPMPTSP	
							Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP	%	75	DPMPTSP	
4											
	A	Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat	S9. Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas	IS.23. Indeks Persentase kemantapan jalan (poin)	%	12,10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Presentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	%	25	Dinas PUTR
				IS.24. Indeks kawasan permukiman layak huni (Poin)	%	2,77	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Jalan dalam kondisi baik	%	18,10	Dinas PUTR
				IS.25. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal		100	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun,	%	66,77	Dinas PUTR



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
			Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)				direhabilitasi dan direkonstruksi			
			IS.26. Indeks Pencapaian Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman (%)		100	Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani	%	32,46	PUTR
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	71	PUTR
						Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya	%	16,67	PUTR
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan	%	42,37	PUTR
						Program Pengembangan Permukiman	Persentase sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik	%	25	PUTR



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prosentase KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum	%	56,67	PUTR
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase KK/RT Yang berakses SPLD	%	61,63 %	PUTR
						Program Penatagunaan Tanah	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	%	100	PUTR
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	%	100	Disperwaki m
							Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani	%	100	Disperwaki m
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	%	25	Disperwaki m
						Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang	%	20	Disperwaki m



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
							ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
							Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	8,56	Disperwaki m
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	1,36	Disperwaki m
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	%	57,14	Dishub



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
							Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	%	77,32	Dishub
	B Peningkatan kualitas permukiman	S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	poin	57,94	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	20	Disperwas kim
							Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	8,56	Disperwas kim
			IS. 28. Persentase Pengelolaan sampah (%)	%	99	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah;	%	27	Dinas LH
							Persentase Penanganan Sampah	%	72	Dinas LH



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	Dinas LH
			IS.29. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	%	98	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air;	Poin	53,70	Dinas LH
							Indeks Kualitas Udara	Poin	80	Dinas LH
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH yang dikelola;	%	100	Dinas LH
							Indeks Kualitas Lahan	Poin	24,36	Dinas LH
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaporan Pengendalian B3 dan LB3	%	100	Dinas LH
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan	Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang	%	100	Dinas LH



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah	
						Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	dinilai dan diawasi Implementasinya				
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Capaian Pelatihan, Penyuluhan, dan Kampanye Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	100	Dinas LH	
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Capaian Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat	%	100	Dinas LH	
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100	Dinas LH	
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	71	PUTR	
5											
	A	Percepatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi	S11. Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang	IS.30. Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin/Kategori)	Poin	83,32 (baik)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi RKPD terhadap RPD/ RPJMD	%	100	Bappelitbangda



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
		inovatif dan berbasis teknologi informasi;								
			IS.31. Indeks Inovasi Daerah (Poin/Kategori)	Poin	46,43 (inovatif)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berpredikat minimal baik	%	80	Bappelitbangda
							Prosentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RKPD	%	100	Bappelitbangda
			IS.32. Indeks SPBE (Kategori/Poin)	Poin	Baik (2,68)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA)	buah	10	Bappelitbangda
							Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang direkomendasikan	%	85	Bappelitbangda



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
			IS.33. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (Opini)	Opini	WTP	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	%	Informatif (80%)	Diskominfo
							Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	%	100	Diskominfo
			IS.34. Nilai Evaluasi SAKIP (Kategori/Poin)	Kategori	72,50-75,00 (BB)	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60	Diskominfo
			IS.35. Nilai Evaluasi LPPD (kategori)	Kategori	Sangat Tinggi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	Diskominfo



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
			IS.36. Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	%	41	Diskominfo
						Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	%	97	Disdukcapil
						Program Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	99,03	Disdukcapil
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	Disdukcapil
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	Disdukcapil
						Program Pengelolaan Arsip	Persentase kesesuaian kinerja kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah	%	37,48	Dispusipda
							Persentase Perangkat Daerah	%	77,78	Dispusipda



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
							dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup			
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	BPKAD
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar	%	100	BPKAD
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian PAD bukan pajak daerah	%	100	Bapenda
							Capaian Pajak Daerah	%	100	Bapenda
						Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkatkan	%	100 %	Setda



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
							Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	%	100	Setda
							Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	%	100	Setda
						Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indek Kematangan UKPBJ	Level	3	Setda
							Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100	Setda
							Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	%	100	Setda
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD	%	100	Set.DPRD



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
							Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD	%	100	Set.DPRD
							Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD	%	100	Set.DPRD
							Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD	%	100	Set.DPRD
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Pemenuhan Elemen Praktek Akuntabilitas Manajemen Kinerja	level	2	Inspektorat
							Level Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi	level	2	Inspektorat



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
							Level Pemenuhan Elemen praktek Pengelolaan SDM	level	2	Inspektorat
							Level Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan	level	2	Inspektorat
							Level Pemenuhan Elemen Praktek Profesional	level	2	Inspektorat
							Level Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola	level	2	Inspektorat
							% Penanganan kasus	%	100	Inspektorat
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	persentase pemenuhan kebijakan teknis bidang pengawasan	%	100	Inspektorat
							Skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	level	3	Inspektorat



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
						Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang diangkat sesuai dengan formasi	%	100	BKPSDM
							Persentase capaian pelayanan kepegawaian	%	100	BKPSDM
							Persentase penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin	%	100	BKPSDM
							Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	7	BKPSDM
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	17	BKPSDM
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	%	100	Kecamatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan	%	100	Kecamatan



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Perangkat Daerah
							Masyarakat Desa dan Kelurahan			
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	%	100	Kecamatan
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	Kecamatan
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	Seluruh PD



#### 4.2.5. Keselarasan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kota Tasikmalaya, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9.  
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2023  
dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 2. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 3. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Parawisata	3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Pengembangan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 3. Gerakan Membangun Desa	1. Pengurangan kemiskinan dan permasalahan sosial
3. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan 2. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	2. Peningkatan Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan 2. Pendidikan Agama dan tempat Ibadah Juara	2. Peningkatan Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing



Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Pengembangan Infrastruktur konektivitas wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4. Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1. Pengembangan Infrastruktur konektivitas wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Resiko Bencana	4. Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Reformasi sistem Perlindungan Sosial 2. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	5. Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi,

Sumber: hasil analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2022.

Keterkaitan sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya tahun 2023, sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dengan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 disajikan pada tabel 4.xx. Selain itu dukungan program prioritas daerah Kota Tasikmalaya tahun 2023 terhadap prioritas nasional yang dilaksanakan melalui kegiatan prioritas nasional Tahun 2023 disajikan dalam tabel 4.xx dibawah in



Tabel 4.10

Keselarasn antara Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2023, Sasaran Prioritas Daerah RKPD Jawa Barat Tahun 2023 dengan Sasaran Prioritas Daerah RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Sasaran RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2023		Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S1	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	S7	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
		S2	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat		
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S2	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	S8	Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja
		S15	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S9	Meningkatnya layanan infrastruktur kota yang berkualitas
S3	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	S3	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	S7	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
		S12	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	S1	Menurunnya tingkat kemiskinan
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S4	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	S4	Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender
				S11	Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S5	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S1	Menurunnya tingkat kemiskinan



Sasaran RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2023		Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023	
S6	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	S6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	S2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat
		S9	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda			S4	Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender
				S5	Meningkatnya pembinaan dan aspirasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah
S8	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S8	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S1	Menurunnya tingkat kemiskinan
S9	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S9	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S10	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	S6	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S11	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	S5	Meningkatnya pembinaan dan aspirasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S12	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S6	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib



Sasaran RKP Tahun 2023		Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2023		Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023	
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S13	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S6	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S14	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S6	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib

Sumber: hasil analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2022

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan daerah harus mendukung pembangunan nasional. Prioritas pembangunan daerah harus dapat mendukung program prioritas nasional dan kegiatan prioritas nasional sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.11

Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Masing-Masing Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2023

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
<b>PN.01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>				
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan		
		2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati		
		3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi		



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		4. Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi		
		5. Peningkatan pemenuhan energi domestik		
		6, Pengembangan industri pendukung EBT		
2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Penyediaan air untuk pertanian	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		2. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		3. Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau		
		4. Pengembangan waduk multiguna		1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar 4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian 5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional		1. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan  1. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian  1. Program Penyuluhan Pertanian
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	1. Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan 2. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya 3. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  1. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan  1. Program Penyuluhan Pertanian
5	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi	1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar  2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM  1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
			Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	2. Program Pengembangan UMKM
		3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		4. Peningkatan penciptaan <i>start-up dan peluang usaha</i>	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Promosi Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pelayanan Penanaman Modal 6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan	1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
	investasi di sector riil, dan industrialisasi	2. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Program Pemasaran Pariwisata 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Promosi Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pelayanan Penanaman Modal 6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 8. Program Penempatan Tenaga Kerja
		4. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM
		5. Pengembangan industri halal	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pengembangan Ekspor
		2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor		2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		3. Pengelolaan impor	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif		2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		5. Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan desinasi branding, dan produk kreatif		1. Program Pengembangan Ekspor
				2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
				3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				4. Program Pengembangan UMKM
				1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				3. Program Pemasaran Pariwisata
8		1. Peningkatan pendalaman sektor keuangan		



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	
	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
3. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga		Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		
4. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata		Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		
<b>PN.02 Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>					
1		Pembangunan Wilayah Sumatera			
2		Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	1. Pengembangan Kawasan strategis	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
					2. Program Pemasaran Pariwisata
					3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		2. Pengembangan sektor unggulan	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		3. Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi)		
		4. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)		
		5. Kelembagaan dan keuangan daerah	Percepatan implementasi birokrasi	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 4. Program Informasi Dan Komunikasi Publik



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				5. Program Aplikasi Informatika 6. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 7. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 10. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 11. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 13. Program Penataan Organisasi 14. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 15. Program Penatagunaan Tanah
3	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara			
4	Pembangunan Wilayah Kalimantan			
5	Pembangunan Wilayah Sulawesi			
6	Pembangunan Wilayah Maluku			
7	Pengembangan Wilayah Papua			



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
<b>PN.03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b>				
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan	Percepatan implementasi birokrasi	1. Program Pendaftaran Penduduk
		2. Integrasi sistem administrasi kependudukan	Percepatan implementasi birokrasi	1. Program Pencatatan Sipil 2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		3. Pendampingan layanan terpadu		
		4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk		
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	1. Sistem jaminan sosial nasional	Kemiskinan dan Permasalahan Sosial	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran		2. Program Rehabilitasi Sosial
		3. Perlindungan sosial adaptif		
		4. Kesejahteraan sosial		
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat		
		3. Peningkatan pengendalian penyakit		
		4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)		
		5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan		
4		1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran		1. Program Pengelolaan Pendidikan



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		3. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan		3. Program Pengembangan Kurikulum
		4. Penjaminan mutu pendidikan		4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
		5. Peningkatan tata kelola pendidikan		
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak		
		2. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan		
		3. Kualitas pemuda		
6	Pengentasan kemiskinan	1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Kemiskinan dan Permasalahan Sosial	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial		2. Program Rehabilitasi Sosial
		3. Reformasi agraria		
		4. Perhutanan sosial		
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Pengelolaan Pendidikan
				2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				3. Program Pengembangan Kurikulum
				4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
		2. Prestasi olahraga		
<b>PN.04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>				



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti		
		2. Revolusi mental dalam tata kelola		
		3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter		
		4. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila		
		5. Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme		
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan mempertahankan jati diri bangsa,	1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Peningkatan Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Pengembangan Kebudayaan
		2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat		2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
	meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	3. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif 4. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan		3. Program Pengembangan Sejarah 4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
3	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	1. Peningkatan budaya literasi 2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra 3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta 4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Peningkatan Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Pengelolaan Perputakaan 1. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 1. Program Pengelolaan Pendidikan 1. Program Pembinaan Perpustakaan
<b>PN.05 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>				
1	Infrastruktur pelayanan dasar	1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau 2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) 4. Program Pengelolaan Persampahan 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 2. Program Pengelolaan Persampahan



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		3. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.
		4. Keselamatan dan keamanan transportasi	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		5. Ketahanan kebencanaan infrastruktur	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Penanggulangan Bencana
		6. Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)
2	Infrastruktur ekonomi	1. Konektivitas jalan	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		2. Konektivitas darat	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3	Infrastruktur perkotaan	1. Transportasi perkotaan	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		2. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan		
		3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Kawasan Permukiman



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		4. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Kawasan Permukiman</li> <li>2. Program Pengembangan Perumahan</li> <li>3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU)</li> </ol>
4	Transformasi digital	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penuntasan infrastruktur TIK</li> <li>2. Pemanfaatan infrastruktur TIK</li> <li>2. Fasilitas pendukung transformasi digital</li> </ol>		
<b>PN.06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>				
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</li> <li>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> <li>6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li> </ol>



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup  4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)  7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah  8. Program Pengelolaan Persampahan
		3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup  2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup  4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat  2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat  3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	1. Penanggulangan bencana	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Penanggulangan Bencana
				2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		2. Peningkatan ketahanan iklim	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Penanggulangan Bencana
				2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
3	Pembangunan rendah karbon	1. Pembangunan energi berkelanjutan	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		2. Pemulihan lahan berkelanjutan	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
				2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		3. Pengelolaan limbah	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program Pengelolaan Persampahan
				2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		4. Pengembangan industri hijau		
<b>PN.07 Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>				



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
1	Konsolidasi Demokrasi	1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan		Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik		Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Program Aplikasi Informatika 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
2		Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Penguatan Integrasi NKRI dan Perlindungan WNI di luar Negeri	
2. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional				
3. Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global				
3	Penegakan Hukum Nasional	1. Penataan Regulasi		
2. Perbaikan Sistem Hukum dan Perdata				
3. Penguatan Sistem Anti Korupsi				
4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan				
4		1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN		1. Program Kepegawaian Daerah



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola		Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		2. Transformasi Pelayanan	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		3. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
				2. Program Pengelolaan Arsip
				3. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			4. Program penelitian dan pengembangan daerah	
			5. Program pengembangan sumber daya manusia	
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
				4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		2. Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)		
		3. Penguatan Keamanan Laut		
		4. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
		5. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber		



#### 4.2.5.3. Standar Pelayanan Minimal

Prioritas pembangunan selanjutnya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, ada 6 (enam) jenis SPM yang terdiri dari :

##### 1. SPM Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan

##### 2. SPM Kesehatan;

Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif

##### 3. SPM Pekerjaan umum

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas :



- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

4. SPM Perumahan rakyat

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

5. SPM Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

6. SPM Sosial

Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian SPM :

1. Dalam rangka pencapaian pencapaian SPM Pendidikan dialokasikan anggaran khusus yang dialokasikan untuk pemenuhan indikator SPM bidang pendidikan. pemenuhan capaian SPM melalui program kegiatan yang memuat indikator serta sasaran yang bertujuan untuk PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan pemenuhan standar pendidikan yang telah ditetapkan yaitu



pemenuhan sarana dan prasarana peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan. Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas data sasaran SPM bidang pendidikan.

2. Untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam pemenuhan pelayanan terhadap 12 kelompok penerima layanan kesehatan;
3. Untuk pemenuhan SPM bidang perumahan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam penyediaan infrastruktur perumahan korban bencana dan program pemerintah;
4. Untuk pemenuhan SPM bidang Pekerjaan umum, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam peningkatan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik;
5. Peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban umum Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran melalui peningkatan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban umum. Adapun untuk pemenuhan dalam sub bidang kebencanaan dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan informasi pengurangan risiko bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
6. Peningkatan Pemenuhan SPM bidang Sosial, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran yang dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

#### **4.2.5.4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)**

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka



melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelerasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD.

Keselarasan pelaksanaan SDGs ke dalam RKPD Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.12  
Keterkaitan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs

SDGs	RKPD 2023		
	Program	Indikator	PD
<b>Tujuan 1.</b> Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase KK berakses layanan air minum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan



SDGs	RKPD 2023		
	Program	Indikator	PD
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Dinas Pendidikan
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	Disdukcapil
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	Dinas Sosial
	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Prosentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	
		Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	
<b>Tujuan 2</b> Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	
<b>Tujuan 3</b> Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase penduduk memiliki jaminan kesehatan	
<b>Tujuan 4</b> Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan



SDGs	RKPD 2023		
	Program	Indikator	PD
kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	
<b>Tujuan 5</b> Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah Yang Responsif Gender	Dinas PPKBP3A
<b>Tujuan 6</b> Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase KK/RT berakses layanan air minum	Dinas PUTR
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sumber daya air dalam kondisi baik	Dinas PUTR
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tercapainya Indeks Kualitas Air	Dinas LH
<b>Tujuan 7</b> Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	-	-	-
<b>Tujuan 8</b> Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Tenaga Kerja



SDGs	RKPD 2023		
	Program	Indikator	PD
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil	Disporabudpar
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil	Disporabudpar
		Jumlah Wira Usaha Baru subsektor ekonomi kreatif dan jasa usaha Pariwisata	Disporabudpar
<b>Tujuan 9</b> Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas KUMKM Perindag
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas KUMKM Perindag
<b>Tujuan 10</b> Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	-	-	-
<b>Tujuan 11</b> Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Program Pengembangan Permukiman	Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase drainase pemukiman dalam kondisi baik	Dinas PUTR



SDGs	RKPD 2023		
	Program	Indikator	PD
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Dinas PUTR
<b>Tujuan 12</b> Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Capaian Produksi hasil peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Capaian Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Capaian produksi hasil perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	persentase peningkatan populasi ternak	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Capaian Produksi Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Capaian produksi hortikultura dan perkebunan	
<b>Tujuan 13</b> Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	-	-	-
<b>Tujuan 14</b> Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	-	-	-



SDGs	RKPD 2023		
	Program	Indikator	PD
<b>Tujuan 15</b> Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Capaian tersedianya dokumen pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	Dinas LH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Lokasi taman yang ditangani	Dinas LH
<b>Tujuan 16</b> Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesbang
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial.	Badan Kesbang
<b>Tujuan 17</b> Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan	Badan Pendapatan Daerah



SDGs	RKPD 2023		
	Program	Indikator	PD
		Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
		Persentase peningkatan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan	
		Persentase peningkatan pajak parkir, pajak air tanah, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak penerangan jalan	
		Persentase peningkatan PAD bukan pajak daerah	
	Program Informasi Dan Komunikasi/Publik	Persentase Pengelolaan Saluran Informasi	Dinas Kominfo
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Domain dan Sub Domain yang dikelola	Dinas Kominfo

#### 4.3. Inovasi Pembangunan Daerah

Inovasi Pembangunan Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Dalam konteks kebijakan inovasi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut:



peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan gagasan, ide atau inisiatif-inisiatif baru untuk meningkatkan daya saing daerah yang berdasarkan potensi lokal melalui kajian/penelitian yang bersifat terapan. Salah satu strategi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif adalah melalui inovasi. Inovasi merupakan salah satu pendekatan pembangunan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupaya memberikan nilai tambah (value added). Inovasi bukan lagi alternatif tetapi menjadi jalan utama yang harus ditempuh untuk meningkatkan daya saing.

Untuk itu inovasi di daerah perlu terus didorong dan dikembangkan karena inovasi di daerah akan menunjang peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan Daya Saing Daerah.

Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada prinsip-prinsip :

1. Peningkatan Efisiensi;
2. Perbaikan efektivitas;
3. Perbaikan kualitas pelayanan;
4. Tidak ada konflik kepentingan;
5. Berorientasi pada kepentingan umum;
6. Dilakukan secara terbuka;
7. Memenuhi nilai-nilai kepatutan;
8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam bentuk :

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah; meliputi inovasi tata laksana internal dalam fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen seperti e-planning, e-budgetting dsb.
2. Inovasi Pelayanan Publik; meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat; seperti pelayanan perijinan, pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Pelayanan social dsb.
3. Inovasi Daerah Lainnya; meliputi inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, seperti ; urusan pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian dsb.

Pada pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah. Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Adapun penilaian Inovasi Daerah yang dilaksanakan antara lain

- 1) Inovation Government Award (IGA);
- 2) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD);



- 3) Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), dan
- 4) Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB)

Pada Tahun 2021 Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah pada *Innovation Government Award* (IGA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021), Kota Tasikmalaya berada pada peringkat 64 dari 93 Kota di Indonesia dengan skor 36,43 dengan kategori INOVATIF. Secara kategori terjadi peningkatan dari semula Kurang Inovatif pd tahun 2020.

Sebagai wujud kepedulian terhadap Inovasi Daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan terobosan baru dengan memberikan suatu apresiasi dan penganugerahan terhadap pelaku inovasi yang ada di Kota Tasikmalaya dengan melaksanakan *Lomba Inovasi dan Teknologi Kota Tasikmalaya*, yang akan dilaksanakan setiap tahun.

Maksud dari penyelenggaraan Lomba Inovasi dan Teknologi Kota Tasikmalaya setiap tahun adalah sebagai upaya mendorong peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dengan memberdayakan semaksimal mungkin sumber daya IPTEK yang ada di Kota Tasikmalaya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi masalah-masalah yang dihadapi daerah dan sekaligus membantu pengembangan potensi daerah.

Dalam perkembangannya Inovasi inovasi yang lahir dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya masih memerlukan dukungan dan pembinaan, karena secara kuantitas masih sangat kurang jumlahnya dan inovasi yang dihasilkan belum berkualitas dan masih belum matang. Inovasi yang diciptakan banyak yang belum didukung oleh data data yang memadai. Dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk berkomitmen memperbaiki dan meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasinya. Dengan semakin banyak jenis inovasi dari perangkat daerah dengan kualitas inovasi yang matang, akan meningkatkan Indeks Inovasi Daerah.

Komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan Indeks Inovasi Daerah adalah:

1. Agar setiap Perangkat Daerah minimal mempunyai satu inovasi sesuai urusannya atau One Agent One Innovation;
2. Menetapkan Indeks Inovasi Daerah sebagai target kinerja dalam RPD Tahun 2023 – 2026.

Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan dan berikut ini beberapa inovasi yang dilaksanakan adalah:

#### **1. PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya)**

Inovasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) merupakan inovasi berbasis teknologi yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya dan mulai dikembangkan pada tahun 2019. Inovasi ini mendukung salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. Juga mendukung Tujuan dan Sasaran



Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya yaitu Tujuan 5: Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi, dan sasaran 11 yaitu: Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi.

Inovasi PROTASIK dilatabelakangi oleh kurang optimalnya penggunaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya. Permasalahan tersebut antara lain lokasi keberadaan tanah yang hanya bisa diketahui dengan cara survey lapangan, dokumentasi bukti kepemilikan berupa sertifikat masih dilakukan secara manual, sulitnya menentukan pemanfaatan tanah dengan nilai terbaik dan penggunaan terbaik (*highest and best use*) serta sulitnya melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan pemanfaatan tanah. PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) merupakan sebuah inovasi terkait pengelolaan BMD berupa tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan menggunakan Teknologi Informasi. PROTASIK menyajikan informasi peta sebaran, data lokasi, titik koordinat, data kepemilikan, kondisi foto lokasi serta scan sertifikat dan perjanjian pemanfaatan. PROTASIK juga dapat menghitung potensi, target dan realisasi pendapatan dari hasil pemanfaatan tanah. Tujuan dari inovasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) adalah untuk menyajikan informasi identitas, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi berbasis Web, informasi realisasi pendapatan hasil pemanfaatan tanah secara realtime, serta menjadi salah satu sumber informasi bagi Pengguna Barang, Pengelola Barang dan Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Regulasi yang harus dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi ini adalah:

- 1) Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur tentang penggunaan Teknologi Informasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 2) Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penggunaan Aplikasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 3) Keputusan Walikota Tasikmalaya tentang Tim Pengelola Aplikasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya).

Bentuk Inovasi PROTASIK termasuk pada Bidang Pelayanan Masyarakat yang berjenis digital. Teknologi yang digunakan untuk mendukung inovasi ini adalah:

- 1) Web Platform;
- 2) Cloud Computing System

Aplikasi PROTASIK dapat diakses dimana saja oleh berbagai platform dan tidak memerlukan instalasi desktop. Software berupa aplikasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) berbasis Web yang terintegrasi dengan Simda BMD. Dan Hardware berupa PC. Unit/Laptop dan Global Positioning System (GPS). PROTASIK telah memanfaatkan teknologi Google Maps Source sehingga PROTASIK dapat menentukan titik koordinat tanah secara akurat melalui citra satelit google maps. PROTASIK juga telah terintegrasi dengan Simda BMD yaitu aplikasi yang digunakan



Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah sehingga data yang disajikan adalah data yang akurat dan akuntabel sesuai dengan aplikasi Simda BMD. Inovasi PROTASIK ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan sulitnya mendapatkan informasi lokasi, kondisi, penggunaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Untuk mendukung Inovasi PROTASIK telah dialokasikan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan untuk mendukung inovasi ini baik Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Administrator; Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna; dan Tim Pengembang Aplikasi (Programmer).

Proses Inovasi untuk melaksanakan inovasi ini adalah:

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 2) Progres Pelaksanaan Kegiatan Inovasi

Implementasi Inovasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya. Keluaran langsung dari inovasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) adalah Aplikasi PROTASIK berbasis Web. PROTASIK dapat diakses melalui alamat <http://protasik-tasikmalayakota.simdacloud.id>.

Dampak jangka panjang yang diharapkan dari adanya inovasi PROTASIK adalah berupa terciptanya tertib administrasi pengelolaan BMD secara khusus pada siklus penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah. Sedangkan dampak jangka pendek adalah meningkatnya realisasi pendapatan dari hasil pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Manfaat dari penggunaan aplikasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) adalah menyajikan informasi identitas, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi Pengguna Barang, Pengelola Barang dan Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Harapan perubahan dari inovasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) adalah transformasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya dari yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi digital memanfaatkan Teknologi Informasi secara maksimal.

Evaluasi kegiatan Inovasi :

- 1) Per bulan dilaksanakan evaluasi antara Administrator dan Pengurus Barang Pengguna sebagai User;
- 2) Per enam bulan dilaksanakan evaluasi antara Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran dan Administrator;
- 3) Per enam bulan dilaksanakan evaluasi antara Administrator dan Programmer.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Inovasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) adalah:

- 1) Identifikasi lokasi bidang tanah pada proses survey & pengambilan titik koordinat;



- 2) Inventarisasi dokumen perjanjian pemanfaatan tanah antara Pengguna Barang dan Mitra Pemanfaatan;
- 3) Terdapat beberapa bidang tanah yang diperlukan koreksi pada Kartu Inventaris Barang (KIB) karena terdapat perbedaan antara pencatatan dengan kondisi di lapangan.

Objek inovasi ini adalah Barang Milik Daerah berupa Tanah yang ada di semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. PROTASIK dapat menyajikan informasi berupa peta sebaran tanah, data lokasi tanah, titik koordinat tanah, data kepemilikan, kondisi tanah, foto lokasi serta scan sertifikat dan scan perjanjian pemanfaatan secara up to date. Melalui implementasi Inovasi PROTASIK, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dapat melakukan pemantauan terhadap potensi, target dan realisasi pendapatan dari hasil pemanfaatan tanah secara digital, mudah dan cepat.

## **2. BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps)**

Inovasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya sejak tahun 2021.

Teknologi Informasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah namun hanya sebatas pada penatausahannya belum melakukan pencocokan fisik barang dan pencatatan pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Inovasi BISMA ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan sulitnya melakukan identifikasi pencocokan antara fisik BMD dengan pencatatannya pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Melalui implementasi Inovasi BISMA, Pengurus Barang Pengguna dapat melakukan pencocokan antara pencatatan BMD pada Kartu Inventaris Barang dengan fisik barang secara digital, mudah dan cepat.

Objek inovasi ini adalah Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan dan Barang Bercorak Kebudayaan) yang ada di semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. BISMA dapat menyajikan informasi berupa foto, kode barang, nama barang, tahun perolehan, merk/type, nilai perolehan, usia, nilai akumulasi penyusutan dan nilai buku barang secara instan. BISMA dapat diintegrasikan dengan aplikasi Simda BMD yaitu aplikasi yang banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah sehingga data yang disajikan adalah data yang akurat dan akuntabel sesuai dengan aplikasi Simda BMD.

Tujuan dari inovasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) adalah mengurangi kesalahan entri data, menghindari ketergantungan pengelolaan BMD kepada Pengurus Barang Pengguna secara personal dan meningkatkan akuntabilitas data BMD (data yang disajikan berdasarkan kondisi yang sebenarnya). Dengan BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) kontrol inventaris menjadi lebih baik karena lebih tepat dan cepat dalam mengidentifikasi BMD.



Regulasi yang harus dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi ini adalah:

- 1) Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur tentang penggunaan Teknologi Informasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 2) Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penggunaan Aplikasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 3) Keputusan Walikota Tasikmalaya tentang Tim Pengelola Aplikasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps).

Bentuk Inovasi BISMA untuk mendukung inovasi ini adalah:

- 1) QR Code Technology;
- 2) Web & Android Platform.

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung inovasi ini adalah:

- 1) Software berupa aplikasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) berbasis Web dan Android yang terintegrasi dengan Simda BMD;
- 2) Hardware berupa Server, Printer Barcode dan Ponsel Android;
- 3) Barang Pakai Habis berupa Label Barcode.

Untuk mendukung Inovasi BISMA telah dialokasikan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan untuk mendukung inovasi ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Administrator; Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna; dan Tim Pengembang Aplikasi (Programmer). Proses Inovasi antara lain :

- 1) Pembuatan Mock Up dan Wireframe Aplikasi
- 2) Reviu Mock Up dan Wireframe Aplikasi
- 3) Pengembangan Aplikasi
- 4) Uji coba Aplikasi
- 5) Soft Launching dan Sosialisasi Aplikasi
- 6) Labelling Barcode
- 7) Evaluasi Kegiatan

Keluaran langsung dari inovasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) adalah:

- 1) Aplikasi BISMA berbasis Web;
- 2) Aplikasi BISMA berbasis Android;
- 3) Label Barcode; Merupakan label BMD dengan memberikan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang telah disesuaikan dengan penambahan QR Code yang merupakan output dari aplikasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps).

Dampak dari inovasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) dalam jangka panjang adalah terciptanya tertib administrasi pengelolaan BMD secara khusus pada siklus penatausahaan dan



pengamanan BMD. Selain itu adalah untuk mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Manfaat dari penggunaan aplikasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) adalah meningkatnya kinerja Pengurus Barang Pengguna dalam mengelola BMD. Dengan memanfaatkan keunggulan inovasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps), Pengurus Barang Pengguna dapat bekerja dengan lebih cepat, mudah dan akuntabel.

Harapan perubahan dari inovasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) adalah transformasi pengelolaan BMD dari yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi digital memanfaatkan Teknologi Informasi secara maksimal.

Evaluasi kegiatan Inovasi

- 1) Per bulan dilaksanakan evaluasi antara Administrator dan Pengurus Barang Pengguna sebagai User;
- 2) Per enam bulan dilaksanakan evaluasi antara Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran dan Administrator;
- 3) Per enam bulan dilaksanakan evaluasi antara Administrator dan Programmer.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Inovasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) adalah:

- 1) Sulitnya penyesuaian field data antara BISMA dan SIMDA BMD;
- 2) Sulitnya sinkronisasi Database antara BISMA dan SIMDA BMD;
- 3) Proses rechecking BMD dalam rangka labeling barcode BISMA.

### **3. LAYAR KUSUMAH (Layanan Antar Sampai ke Rumah)**

Inovasi LAYAR KUSUMAH (Layanan Antar Sampai ke Rumah) dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dan telah berjalan sejak Maret 2021. Inovasi Layar Kusumah dibuat untuk membantu meringankan beban para Pemerlu Layanan Permasalahan Sosial dalam kelangsungan hidupnya.

Inovasi ini dilatarbelakngi oleh tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Tasikmalaya perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Masyarakat Miskin, Penyandang Disabilitas dan Orang Terlantar. Permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin dan penyandang disabilitas adalah kesulitan dalam mendapatkan pelayanan jaminan sosial di bidang kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Sedangkan permasalahan yang sering dihadapi oleh orang terlantar adalah sulitnya mendapatkan pelayanan transportasi gratis. Kenyataan dilapangan saat ini masyarakat miskin dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan jaminan sosial di bidang kesehatan selalu menggunakan jasa orang lain karena beranggapan bahwa untuk mendapatkan pelayanan sangatlah susah. Hal ini terjadi disebabkan masyarakat miskin buta informasi dan transportasi sehingga oknum para penyedia jasa sangat mudah memanipulasi informasi.

Untuk penanganan terhadap ketiga permasalahan maka dikeluarkanlah Program Inovasi LAYAR KUSUMAH (Layanan Antar Sampai ke Rumah) yang



menjadi solusi dalam penanganan masalah yang terjadi dan meminimalisir oknum para penyedia jasa.

Tujuan dari Inovasi LAYAR KUSUMAH bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial serta terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan orang terlantar. Inovasi dalam memberikan pelayanan sosial bagi warga miskin yang memerlukan bantuan pelayanan, baik layanan sosial maupun layanan kesehatan, dan kebutuhan transportasi berupa layanan antar jemput masyarakat kurang mampu yang membutuhkan.

Regulasi yang harus dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi ini adalah:

- 1) Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 460/kep.17.1-Dinsos/2021 tentang Bantuan Sosial Kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kota Tasikmalaya;
- 2) Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Nomor : 460/Kep-149 Dinsos/2020 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Tasikmalaya;
- 3) Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Nomor : 520/036/Sekre tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya;
- 4) Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya 460/ /Dinsos/2021;
- 5) Perjanjian Kerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kota Tasikmalaya Nomor : 460/440/Dinsos/2021 tentang Peminjaman Kendaraan Ambulance dan Fasilitas Donor Darah;
- 6) Perjanjian kerjasama dengan Rumah Singgah Al-Fatih Nomor : 460/441/Dinsos/2021 tentang Fasilitas Pasien Rujukan Ke Rumah sakit Bandung.

Bentuk Inovasi LAYAR KUSUMAH termasuk pada inovasi pelayanan publik. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung inovasi ini adalah alat tulis kantor, perangkat komputer, kendaraan roda dua untuk verifikasi kelayakan, roda empat ambulance untuk rujukan, kendaraan roda 4 untuk penjemputan, handphone, kamera digital untuk visualisasi dan media pengaduan masyarakat.

Untuk Inovasi LAYAR KUSUMAH telah dialokasikan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 303 Orang yang terdiri dari Tim Reaksi Cepat (TRC) 40 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 69 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 10 orang, Karang Taruna sebanyak 69 orang dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 115 orang.

Proses pelaksanaan kegiatan dimulai dari adanya laporan langsung dari masyarakat atau adanya usulan pemerlu layanan dari kelurahan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, TKSK dan pendamping PKH untuk diusulkan ke Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Setelah proses usulan selesai Tim Reaksi Cepat (TRC) memverifikasi kelayakan calon penerima layanan, setelah diketahui kondisi dan kebutuhannya serta dianggap layak untuk menjadi penerima bantuan maka masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan sosial



kesehatan, penyandang disabilitas yang memerlukan terapi dan orang terlantar yang memerlukan bantuan, pelayanan pertama yang diberikan adalah bantuan transportasi dengan cara menjemput dari rumah atau lokasi kejadian dan didampingi hingga pemerlu layanan sampai kembali ke rumah. Tidak hanya sampai disitu tim yang terlibat dalam Program Inovasi LAYAR KUSUMAH juga membantu mengurus administrasi yang diperlukan sehingga penerima layanan tidak memikirkan masalah administrasi, biaya, termasuk tidak memikirkan untuk membayar para penyedia jasa.

Keluaran dari inovasi ini adalah :

- 1) Masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan orang terlantar mendapatkan kemudahan dalam menempuh proses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan bantuan transportasi tanpa memikirkan biaya.
- 2) Meringankan beban hidup serta memberikan rasa aman pada saat menjadi penerima layanan.

Perlu diingat bahwa masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan orang terlantar sangat tergantung pada bantuan dari Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam masalah kesehatan karena bagi mereka biaya kesehatan saat ini sangatlah tinggi dan tidak mungkin terjangkau. Melalui pelayanan Inovasi LAYAR KUSUMAH masyarakat mengetahui bahwa untuk mendapatkan bantuan kesehatan dan bantuan transportasi sangatlah mudah sehingga merasakan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah mereka yang sangat membutuhkan.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan dampak dari pelaksanaan kegiatan Inovasi LAYAR KUSUMAH serta melakukan penilaian terhadap kinerja Sumber Daya Manusi yang terlibat, demi tercapainya peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan orang terlantar.

Pada pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan sesuai harapan, selalu ada halangan dan rintangan yang merupakan seni dilapangan dalam optimalisasi pelayanan. Kendala yang sering terjadi adalah:

- 1) adanya halangan dari pihak-pihak yang terganggu kepentingannya;
- 2) terlambatnya penjemputan karena kekurangan kendaraan operasional seperti tidak memiliki kendaraan ambulance, bahkan untuk membuat masyarakat supaya tidak menunggu lama penjemputan sering menggunakan kendaraan jabatan yang tersedia di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

#### **4. KAKAREN KARAMAT (Kampung KB dan Kampung Ramah Anak Terpadu)**

Program Inovasi KAKAREN KARAMAT (Kampung KB dan Kampung Ramah Anak Terpadu). Bentuk dari inovasi ini adalah Kampung KB bersinergi dan terintegrasi dengan Kampung Ramah Anak. Inovasi KAKAREN KARAMAT dimulai pada tahun 2021.

Latar belakang inovasi ini adalah Peningkatan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan upaya percepatan pelaksanaan reformasi yaitu fasilitas pembangunan kampung KB yang sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan di daerah dalam mewujudkan Kampung KB berkualitas di setiap



RW, sejalan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019.

Pembentukan Kampung KB salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara dengan mewujudkan keluarga kecil berkualitas, serta penguatan program Bangga Kencana yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Kampung Ramah anak adalah pembangunan yang berbasis dari RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya local, masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan. Pada pelaksanaannya saat ini pengembangan kedua program ini masih terpisah dan berjalan masing-masing, sehingga pencapaian dan pemanfaatan program masih belum maksimal dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu sangat dibutuhkan kampung KB dan kampung ramah anak berintegrasi untuk mendukung akselerasi program Bangga Kencana. Dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, DPPKBP3A Kota Tasikmalaya membuat inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengimplementasikan program di masyarakat untuk mencapai tujuan dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di suatu wilayah tersebut.

Tujuan dari “KAKAREN KARAMAT” dapat menciptakan kemudahan baru untuk kehidupan manusia dengan Pengembangan dan penyelarasan Program Bangga Kencana di Kampung KB dan Kampung Ramah Anak dengan memaksimalkan 8 fungsi Keluarga dan pemenuhan hak anak, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tercapai yang dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat setempat dengan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Diharapkan percepatan dan peningkatan kualitas keluarga dan generasi berencana melalui sinergitas Kampung KB dan Kampung Ramah Anak.

Regulasi yang harus dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi ini adalah Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor: 476/Kep.932-DPPKBP3A/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Advokasi Lintas Sektor Program Bangga Kencana serta Pengembangan Kampung KB Berkualitas di Kota Tasikmalaya.

Akselerasi Program Bangga Kencana terutama dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Pengembangan dan penyelarasan Program Bangga Kencana di Kampung KB dan Kampung Ramah Anak dengan memaksimalkan 8 Aspek Keluarga dan pemenuhan hak anak sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tercapai. Percepatan dan peningkatan kualitas keluarga dan generasi berencana melalui sinergitas Kampung KB dan Kampung Ramah Anak.

Inovasi “KAKAREN KARAMAT” mempunyai keunikan dan nilai tambah dalam penyelesaian masalah, hal ini dapat digambarkan dengan pembauran kedua



program dalam konteks wilayah yang didominasi pada kawasan perkotaan, padat penduduk dan kemiskinan. Inovasi dalam konteks wilayah terdapat 2 (dua) kriteria dalam pembentukan Kampung KB yaitu:

- 1) Kriteria program terdiri dari:
  - a) Jumlah Keluarga Pra KS diatas rata-rata tingkat desa dimana kampung KB tersebut berada.
  - b) Jumlah Peserta KB dibawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa dimana kampung tersebut berlokasi.
- 2) Kriteria Wilayah: kumuh, pesisir/nelayan, daerah aliran sungai, kawasan miskin, (termasuk kawasan miskin perkotaan, terpencil, perbatasan, kawasan industri dan kepadatan penduduk.

Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD, APBN (DAK BOKB), Swadaya Masyarakat, CSR. Sedangkan Lurah, ketua RW, Ketua RT, PLKB, TPD, PKK tingkat kelurahan, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Pos KB dan Sub Pos KB)/ kader, Tokoh Masyarakat, Remaja, pegawai Dinas PPKBP3A dan Lintas Sektor.

a. Proses Inovasi

- 1) Persiapan kegiatan inovasi adalah dengan menentukan lokus yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada program kampung KB dan kampung ramah anak dan yang tidak kalah pentingnya yaitu keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk mensejahterakan dan mengembangkan serta memberdayakan masyarakat wilayah setempat, diiringi dengan partisipasi masyarakat setempat.
- 2) Pembentukan kampung KB dan Kampung Ramah Anak secara terpadu, didukung oleh pemerintah daerah setempat (Camat, Lurah), RT, RW diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat, kader, masyarakat setempat.
- 3) Pemahaman pokja kampung KB dan kampung ramah anak, pengaktifan semua pokja dengan rencana kerjanya yang langsung dilaksanakan dari, dan, oleh masyarakat setempat (pemberdayaan masyarakat), serta pengaktifan poktan-poktan.
- 4) Pelaporan dan pencatatan yang tepat dilaporkan supaya termonitoring capaian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerjanya.
- 5) Evaluasi hasil kegiatan.
- 6) Pembinaan secara rutin baik internal maupun eksternal.
- 7) Menjalin mitra kerja dengan pihak lain atau instansi lain (lintas sektor) guna mengembangkan kegiatan (poktan) masyarakat yang dilakukan (implementasi 8 fungsi keluarga) dan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- 8) Pengembangan dan pembuatan sarana prasarana baik dari swadaya masyarakat maupun bantuan-bantuan dari pemerintah atau swasta, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang mendukung program inovasi kakaren karamat.
- 9) Mendorong adanya inisiatif / inovatif yang bersumber dari masyarakat, sebagai solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



Hasil/keluaran yang didapat dari kegiatan atau pelayanan yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat diantaranya adalah:

- 1) Jumlah keluarga Sejahtera, jumlah keluarga Sejahtera 1 dan jumlah keluarga pra KS.
- 2) Jumlah Peserta KB Aktif (Cpr), partisipasi penduduk usia sekolah, jumlah peserta metode kontrasepsi jangka panjang *unmet need*, partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan genre melalui PIK-R.
- 3) Jumlah warga yang berkomitmen terhadap pentingnya pemenuhan hak anak.
- 4) Jumlah warga yang memiliki dan yang belum memiliki KIA dan Akta lahir.
- 5) Jumlah ruangan untuk forum kegiatan anak.
- 6) Jumlah kegiatan pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum
- 7) Jumlah kasus pernikahan dini.
- 8) Jumlah kegiatan penanganan anak berkebutuhan khusus/ disabilitas.
- 9) Jumlah/persentase partisipasi masyarakat di posyandu.
- 10) Jumlah bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif.
- 11) Jumlah tempat Kawasan bebas asap rokok.
- 12) Jumlah sarana prasarana untuk menunjang Pendidikan.
- 13) Jumlah masyarakat setempat yang paham akan pentingnya hak anak.
- 14) Jumlah kasus aksi bulliying bagi anak.
- 15) Jumlah orang tua yang paham tentang pola asuh anak.

Sasaran penerima manfaat inovasi secara langsung adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, ibu hamil, bayi, anak-anak usia sekolah, remaja dan lansia, sasaran tidak langsung adalah pelaksana dan pengelola KB dengan tujuan, menurunkan tingkat kelahiran, melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.

Outcome yang diharapkan dari inovasi ini adalah :

- 1) Tersedianya data dan peta keluarga yang bersumber dari pendataan keluarga di setiap RT/RW, sehingga dapat diketahui jumlah keluarga Sejahtera, jumlah keluarga Sejahtera 1 dan jumlah keluarga pra KS.
- 2) Tersedianya data Keluarga Berencana yang meliputi data jumlah Peserta KB Aktif (Cp r), partisipasi penduduk usia sekolah, jumlah peserta metode kobtrasepsi jangka panjnag unmet need, partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan genre melalui PIK-R.
- 3) Adanya komitmen warga terhadap pentingnya pemenuhan hak anak.
- 4) Terdatanya warga yang memiliki dan yang belum memiliki KIA dan Akta lahir.
- 5) Tersedianya ruangan untuk forum kegiatan anak.
- 6) Adanya pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum.
- 7) Terdatanya kasus pernikahan dini.



- 8) Adanya penanganan anak berkebutuhan khusus/ disabilitas.
- 9) Meningkatnya partisipasi masyarakat di posyandu.
- 10) Meningkatnya cakupan ASI Eksklusif.
- 11) Meningkatnya Cakupan Kawasan bebas asap rokok.
- 12) Tersedianya sarana prasarana untuk menunjang Pendidikan.
- 13) Meningkatnya pemahaman masyarakat setempat akan pentingnya hak anak.
- 14) Turunnya kasus aksi bulliying bagi anak.
- 15) Meningkatnya pemahaman orang tua tentang pola asuh anak.

Dalam rangka meningkatkan kualitas inovasi dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Evaluasi Internal:
  - Setiap 3 bulan sekali melaksanakan Rapat Koordinasi untuk mengetahui capaian CPR/TFR dan perkembangan kegiatan di kampung sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebagai manfaat kegiatan yang ada di kampung, serta kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target pelaksanaan kegiatan/indikator kinerja.
  - Setiap bulan dilaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait, rapat internal dilaksanakan melalui briefing bidang, pembinaan terhadap para koordinator PLKB dan TPD dan untuk menampung dan membahas kendala/hambatan di lapangan serta mencari solusi yang akan dilaksanakan dengan brain storming.
- 2) Evaluasi eksternal :
  - Melakukan monitoring dan evaluasi oleh mitra kerja seperti Perguruan Tinggi. Evaluasi dari DP3AKB Jawa Barat dengan jarak waktu satu tahun satu kali, rapat koordinasi oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk review kegiatan Kota pada setiap triwulan.
  - Indikator keberhasilan merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui kondisi ataupun perkembangan pencapaian prestasi dalam hidup. Oleh karena itu dapat kita bandingkan data sebelum inovasi dan sesudah inovasi supaya dapat terlihat perkembangan pencapaian keberhasilan inovasi tersebut.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Inovasi Kakaren Karamat adalah:

- 1) Ketidakterediaan dana atau low budgeting.
- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan secara partisipatif.
- 3) Kesadaran masyarakat untuk mematuhi prokes / 5M masih rendah.
- 4) Dukungan lintas sektor belum optimal.

## **5. BERANDA SAKOTA (Terbebas Dari Asap Rokok Di Semua Area Kota Tasikmalaya)**

Tingginya jumlah perokok usia remaja, menurut Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada tahun 2009 hingga angkanya mencapai 30,4%. Perokok pada usia muda dapat berpengaruh negatif terhadap bonus



demografi yang akan mengalami puncaknya pada tahun 2030. Dampak rokok terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit yang berhubungan dengan merokok atau tobacco related disease (TRD), diantaranya menyerang paru-paru, yaitu bronkitis, pneumonia, emfisema dan kanker paru.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menindaklanjuti UU kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Daerah No.11 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sebagai perwujudannya, Berbagai upaya pencegahan dampak rokok telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Kesehatan meluncurkan inovasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat yaitu lembaga swasta termasuk generasi muda untuk melakukan gerakan Terbebas Dari Asap Rokok Di Semua Area Kota Tasikmalaya atau BERANDA SAKOTA. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan cakupan Tidak Merokok di dalam rumah menjadi 65%.

Regulasi tentang pelaksanaan inovasi BERANDA SAKOTA masih mengacu pada Peraturan Daerah kota Tasikmalaya No.11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. BERANDA SAKOTA merupakan sebuah kampanye anti rokok yang target utamanya adalah pelajar atau usia remaja. Kampanye ini dilakukan melalui media yang dekat dengan gaya hidup remaja saat ini, yaitu vlog dan media sosial.

Untuk mendukung Inovasi BERANDA SAKOTA telah dialokasikan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Adapun stakeholder yang terlibat dalam BERANDA SAKOTA meliputi:

- 1) Lembaga swasta seperti retail, Rumah Sakit, Pabrik, Hotel, Tempat wisata, Perguruan Tinggi, Rumah Makan/Restoran, Cafe, Tempat Hiburan, Perbankan, BUMN, dan BUMD.
- 2) Pelajar SMA/ sederajat.
- 3) Masyarakat kota Tasikmalaya

Adapun proses inovasi BERANDA SAKOTA yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Diseminasi BERANDA SAKOTA melalui Radar TV Tasikmalaya.
- 2) Lomba Kreasi Duta Anti Rokok (Lomba Kreasi Vlog Duta Anti Rokok dan Pemilihan Bintang BERANDA SAKOTA) bertempat di Mayasari Plaza Tasikmalaya. Peserta adalah pelajar SMA/ sederajat. Masing-masing peserta membuat video (vlog) berdurasi 1-3 menit dengan tema "Terbebas Dari Asap Rokok di Semua Area Kota Tasikmalaya". Sedangkan untuk calon peserta Bintang, harus mempersiapkan video presentasi berdurasi 10 menit dengan tema yang sama.
- 3) Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Tingkat Kota Tasikmalaya yang meliputi upacara peringatan, talkshow di radio BEM Poltekes, pelayanan terapi berhenti merokok oleh parasefter, himbuan di seluruh lampu merah melalui ATCS dan ditandai dengan bunyi sirine tepat jam 10.



Output dari inovasi ini adalah tersosialisasikannya inovasi BERANDA SAKOTA bagi lembaga swasta, pelajar SMA/ sederajat, dan masyarakat Kota Tasikmalaya

Melalui kegiatan BERANDA SAKOTA diharapkan tumbuh partisipasi Lembaga swasta seperti retail, Rumah Sakit, Pabrik, Hotel, Tempat wisata, Perguruan Tinggi, Rumah Makan/Restoran, Cafe, Tempat Hiburan, Perbankan, BUMN, dan BUMD, Pelajar SMA/ sederajat serta masyarakat kota Tasikmalaya, sehingga capaian PHBS kota Tasikmalaya meningkat hingga 70%

Evaluasi kegiatan BERANDA SAKOTA dilakukan secara informal atau belum menggunakan instrumen khusus.

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi inovasi BERANDA SAKOTA tidak mudah untuk menyamakan kepentingan bersama, terutama karena menyangkut upaya pemberdayaan.

## **6. SIPEJAL (sistem informasi perlengkapan jalan)**

SIPEJAL (sistem informasi perlengkapan jalan) adalah sistem aplikasi database pengelolaan perlengkapan jalan (PJU, Rambu dan perlengkapan jalan lainnya)

Aplikasi SIPEJAL merupakan aplikasi yang user friendly atau mudah digunakan, aplikasi ini berbasis web based dengan leaflet (plug-in) dan OSM (Open Street Map), dimana keunggulannya adalah gratis selamanya seberapa banyakpun akses yang dilakukan (Hit), bisa dikombinasikan dengan Streetview googlemaps secara gratis dan bisa ditambahkan layer jalan apabila memiliki layer jalan, kecamatan, kelurahan, jembatan, dan lainnya. Fitur yang disediakan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan baik oleh pengelola perlengkapan jalan dan pengambil kebijakan. Fitur lainnya adalah dengan adanya fitur pengaduan masyarakat. Dimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui gadget/hp serta dapat menyampaikan masukan/kritik/saran mengenai pelayanan perlengkapan jalan kepada perangkat daerah.

Inovasi ini dilatabelakangi oleh salah satu isu strategis di Kota Tasikmalaya yaitu belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas yang mana salah satunya adalah manajemen perlengkapan jalan yang masih perlu mendapatkan perhatian. Upaya kearah itu, dititik beratkan kepada bagaimana perlengkapan jalan terkelola dengan baik dan tetap berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu alat keselamatan lalu lintas di jalan.

Terkait dengan upaya tersebut, selain pembenahan perlengkapan jalan secara fisik, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya juga sedang berupaya melaksanakan pembenahan secara administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Teknologi informasi tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pengelolaan perlengkapan jalan dan mampu memberikan pelayanan



kepada masyarakat terkait pengaduan perlengkapan jalan menjadi lebih baik lagi.

Atas dasar itulah, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya membangun suatu aplikasi yang kami namakan SIPEJAL (Sistem Informasi Perlengkapan Jalan) yaitu suatu sistem informasi database perlengkapan jalan yang mencakup informasi spesifikasi, foto, kondisi, alamat, peta lokasi dan sebagainya.

Tujuan inovasi ini adalah :

- 1) Mewujudkan tata kelola perlengkapan jalan yang tertib administrasi.
- 2) Menyediakan informasi perlengkapan jalan yang ada dalam wilayah administratif Kota Tasikmalaya.
- 3) Memudahkan petugas pengelola perlengkapan jalan dalam melaksanakan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi perlengkapan jalan.
- 4) Memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan perlengkapan jalan yang ada di wilayahnya.
- 5) Menghimpun partisipasi masyarakat melalui pemberian masukan/saran/kritik tentang pelayanan perlengkapan jalan.

Selanjutnya, manfaat aplikasi SIPEJAL Bagi Perangkat Daerah:

- 1) Memudahkan dalam penyediaan data/informasi perlengkapan jalan yang ada di Wilayah Kota Tasikmalaya.
- 2) Memudahkan verifikasi / pengujian tagihan listrik lampu PJU, Traffic Light.
- 3) Membantu kemudahan dalam penyusunan perencanaan penganggaran kebutuhan perlengkapan jalan baik pengadaan/pemeliharaan.
- 4) Memudahkan verifikasi dalam penyusunan laporan aset pada kelompok aset jaringan jalan-irigasi.
- 5) Memudahkan petugas pemeliharaan perlengkapan jalan, khususnya lampu PJU menemukan lokasi lampu PJU yang kondisinya harus memerlukan pemeliharaan dan/atau perbaikan. Baik atas inisiatif petugas maupun atas informasi dari masyarakat.
- 6) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan perlengkapan jalan.
- 7) Mewujudkan tertib administrasi pengaduan masyarakat.

Dan manfaat bagi masyarakat adalah masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung melalui aplikasi dengan menggunakan gadget/hp dan secara tepat menentukan titik lokasi perlengkapan jalan yang diadukannya. Serta dapat memberikan masukan/saran/kritik kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan perlengkapan jalan.

Regulasi tentang pelaksanaan inovasi SIPEJAL mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya.

Sipejal adalah sebuah aplikasi sistem informasi perlengkapan jalan berbasis web based dengan leaflet dan OSM yang dapat bermanfaat bagi:



- 1) Petugas pengelola perlengkapan jalan sebagai alat bantu kerja yang dapat memudahkan pelaksanaan mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 2) Masyarakat dengan melalui fitur pengaduan masyarakat dimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung melalui aplikasi dengan menggunakan gadget ataupun hp. Serta dapat memberikan masukan/saran/kritik kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan perlengkapan jalan.

Adapun keunggulan dari aplikasi ini adalah penggunaannya yang mudah (user friendly), informasi data yang disediakan lebih lengkap, sebagai pengamanan data aset perangkat daerah dapat memberikan kemudahan pengaduan masyarakat.

Fitur yang disediakan pada aplikasi Sipejal tersebut antara lain dapat memberikan informasi meliputi data lokasi (titik ordinat), peta lokasi, spesifikasi perlengkapan jalan, tahun pengadaan, dan waktu pelaksanaan pemeliharaan. Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi para petugas pengelola serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan perlengkapan jalan dan pengelolaan aset dinas di bidang perlengkapan jalan.

Untuk mendukung Inovasi SIPEJAL telah dialokasikan anggaran di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Adapun stakeholder yang terlibat dalam BERANDA SAKOTA Pegawai pada Unit Kerja Fasilitas Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Adapun proses penggunaan inovasi SIPEJAL adalah :

1. melengkapi master data meliputi : master lampu, master Daya PJU, Jenis, Jalan, Rangkaian PJU, master Rambu, jenis pemeliharaan dan lain-lain;
2. Pengadaan dan survey
3. Verifikasi data;
4. Pemeliharaan perangkat

Output inovasi tersebut adalah tersedianya database perlengkapan jalan meliputi:

- 1) Data master (induk) perlengkapan jalan.
- 2) Data master monitoring kondisi dan lokasi perlengkapan jalan terpasang.
- 3) Posisi / titik ordinat dan peta lokasi perlengkapan jalan terpasang.
- 4) Pengamanan aset.

Sedangkan capaian jangka panjang (out come) dari implementasi inovasi ini adalah mewujudkan manajemen perlengkapan jalan dan pelayanan masyarakat yang handal. Dengan memberikan dampak efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan perlengkapan jalan dan layanan masyarakat, antara lain:

- 1) Terwujudnya tata laksana pengelolaan perlengkapan jalan yang tertib administratif dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya efektifitas pelayanan masyarakat, melalui penyediaan manajemen pengaduan masyarakat dan menghimpun saran/kritik/masukan dari masyarakat yang dapat dijadikan informasi bagi pengelola dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan dapat diandalkan.



Secara umum aplikasi system perlengkapan jalan (Sipejal) telah dapat dipergunakan dan dimanfaatkan. Namun untuk optimalisasi penggunaan aplikasi tersebut perlu dilakukan survey inventarisasi perlengkapan jalan se-Wilayah Kota Tasikmalaya.

Masalah utama dalam pelaksanaannya adalah penyediaan data master (induk) perlengkapan jalan, hal ini perlu dilakukan survey inventarisasi perlengkapan jalan se-Wilayah Kota Tasikmalaya. Sehingga diperlukan dukungan anggaran dalam pelaksanaannya.



## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Usulan rencana kebutuhan pembangunan untuk tahun 2023 yang tertuang dalam program dan kegiatan disusun dengan sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota serta sumber lainnya. Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, politik, atas bawah (*top down*), bawah atas (*bottom up*) dan partisipatif melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional, kemudian diverifikasi dan disepakati sebagai usulan prioritas program dan kegiatan untuk tahun 2023.

Penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas disusun dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran pembangunan melalui prioritas dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023.

Rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 sebanyak 201 program, 661 kegiatan dan 2.661 sub kegiatan dengan total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.010.071.292.102.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah tersaji dalam tabel 5.1, sedangkan matrik rencana program dan kegiatan secara terperinci disajikan dalam tabel 5.2. sebagai berikut :



## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcome* atau *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKK merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. Selain penetapan IKU dan IKK, Pemerintah Kota Tasikmalaya, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan sebagaimana disajikan pada table 6.1. berikut.

Tabel 6.1.  
Proyeksi Capaian Indikator Makro Kota Tasikmalaya  
Tahun 2023

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Point	<b>73,31</b>	<b>73,95</b>	<b>73,95</b>
	Indeks Pendidikan	Point	69,12	68,50	70,04
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,52	9,70	9,76
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,54	13,50
	Indeks Kesehatan	Point	80,52	81,65	80,88
	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,34	73,15	72,57
	Indeks Daya Beli	Point	70,78	59,63	71,40
	Pengeluaran per Kapita	Juta Rp	10,213	9,86	10,424
2.	PDRB Perkapita	Juta Rp	31,56	32,46	33,40
3.	PDRB ADH Berlaku	Triliyun RP	22,85	23,61	24,40
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,57	5,0	5,15
5.	Inflasi	%	1,17	2,00	2,47
6.	Indeks gini	Point	0,414	0,39	0,390
7.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,81	0,20	0,71
8.	Tingkat Kemiskinan	%	13,13	11,50	12,33
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,66	7,02	7,35



Tabel 6.1.  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Tasikmalaya

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	Angka kemiskinan	(%)	Persentase Angka Kemiskinan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,13	11,50	12,33
2	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	poin	capaian indikator SPM bidang sosial/jumlah total SPM bidang sosial	100	100	90
3	Rata-rata Lama Sekolah	(%)	Persentase Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,52	9.70	9,76
4	Harapan Lama Sekolah	Poin	Harapan Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,46	13,54	13,50
5	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	poin	capaian indikator SPM bidang pendidikan/jumlah total SPM bidang Pendidikan	69,12	100	72
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	Usia Harapan Hidup yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	72,34	73,15	72,57
7	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	poin	capaian indikator SPM bidang Kesehatan/jumlah total SPM bidang Kesehatan	48,09	100	75
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,81	0,20	0,71
9	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	Indeks Pemberdayaan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	59,51	62,96	60,00
10	Indeks Pembangunan Gender	Poin	Indeks Pembangunan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	91,74	91,54	91,84



NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
11	Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	poin	capaian indikator SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat/jumlah total SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	98,47	100	100
12	Indeks Resiko Bencana	Poin	Tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana, dan dikeluarkan oleh BNPB	Sedang (117,37)	-	Sedang (117,15)
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	3,57	5,0	5,15
14	PDRB Perkapita	Juta / Tahun/Kapita	Persentase PDRB Per kapita berdasarkan hasil penghitungan dikeluarkan oleh BPS	31,56	32,46	33,40
15	Pengeluaran Per Kapita	Juta / Tahun/Kapita	Pengeluaran Per Kapita berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	10,213	9,86	10,424
16	Indeks Gini	Poin	Indeks Gini berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	0,414	0,39	0,390
17	Inflasi	%	Inflasi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	1,17	2,00	2,47
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat Penangguran terbuka berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	7,66	7,02	7,35
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku	(milyar)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	7.573,28	-	8.002,90
20	Indeks kemantapan jalan	Poin	Indeks dari Jalan dalam kondisi mantap/total panjang jalan x 100%	-	-	59,23
21	Indeks kawasan permukiman layak huni	Poin	Indeks dari kawasan permukiman layak huni/total kawasan permukiman x 100%	-	-	15,88



NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
22	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	poin	capaian indikator SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/jumlah total SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58,71	100	91,07
23	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan rakyat	Poin	capaian indikator SPM bidang Perumahan Rakyat/jumlah total SPM bidang Bidang Perumahan rakyat	100	100	100
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$		74,40	57,93
25	Persentase Pengelolaan Sampah	%	Persentase sampah yang dikelola + persentase sampah pengurangan	77,86	83,45	99
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori/Poin	Hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah	Baik (83,32)	Baik (77-88)	Baik (83,32 - 85,80)
27	Indeks Inovasi Daerah	Kategori/Poin	Indeks inovasi yang dihitung dan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri	Inovatif (36,43)	-	Inovatif (46,43)
28	Indeks SPBE	Kategori/Poin	Capaian Indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB	Baik (2,68)	Sangat Baik (3,00)	Baik (2,9)
29	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	(Opini)	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh BPK	WTP	WTP	WTP
30	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/Poin	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh KemenPANRB	BB (70,81)	81-90 (A)	BB (72,50- 75,00)
31	Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Hasil Evaluasi LPPD yang dikeluarkan oleh Kemendagri	Sangat Tinggi	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	Sangat Tinggi
32	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Hasil penilaian SPIP oleh BPKP	2,83	3	3



**Tabel 6.3.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>					
1.1.	Pertumbuhan PDRB (%)	%	Angka Pertumbuhan PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	3,57	5,15
1.2.	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (%)	%	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	2,97	4,59
1.3.	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian (%)	%	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	1,91	3,71
1.4.	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%)	%	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,28	0,45
1.5.	Laju inflasi Kota (%)	%	Angka Inflasi daerah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	1,17	2,47
1.6.	♦ Indeks Gini (point)	point	Indeks gini yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,414	0,390
1.7.	♦ Indeks Pembangunan Manusia/ IPM (point)	point	Angka IPM yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	73,95	73,95
1.7.1	♦ Indeks Kesehatan	point	Indeks kesehatan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	80,52	80,88
1.7.2	♦ Indeks Pendidikan	point	Indeks kesehatan dan dikeluarkan oleh BPS	69,12	70,04
1.7.3	♦ Indeks Daya Beli	point	Indek daya beli yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	70,78	71,40
<b>Fokus Kesejahteraan Masyarakat</b>					
1.	<b>Pendidikan</b>				
1.1.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Point	Angka RLS yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,52	9,76



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
2.	<b>Kesehatan</b>				
2.1.	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Point	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	8,5	8,6
2.2.	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Point	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	312,5	303,8
2.3.	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	Realisasi jaminan kesehatan daerah masyarakat miskin terhadap masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100		84
2.4.	Prevalensi Stunting (%)	%	Jumlah kasus stunting/ Jumlah anak x 100	14,8	14,8
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>					
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
1.	<b>Pendidikan</b>				
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	Jumlah Siswa TK/RA/KB/SPS/TPA dibagi Penduduk usia 3-6 thn X 100	25,77	25,78
1.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (	%	Jumlah Siswa SD/MI/Paket A usia 7-12 thn dibagi Penduduk usia 7-12 thn X 100	89,78	89,79
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 thn dibagi Penduduk usia 13-15 thn X 100	78,64	78,65
1.4	Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	%	Jumlah Warga Belajar yang lulus dan mendapatkan sertifikat / Jumlah seluruh Warga Belajar yang mengikuti pelatihan x 100	100,00	100,00
1.5	Indeks Capaian SPM Bidang Pendidikan	%	Jumlah Peserta Didik PAUD, dan Pendidikan Dasar yang terlayani SPM / Jumlah Seluruh Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Dasar x 100		72
1.6	Persentase Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik (...%)	%	Persentase Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar Bersertifikat Pendidik	51,45	51,55
1.7	Persentase PAUD Terakreditasi B	%	Jumlah PAUD Terakreditasi B dibagi Jumlah seluruh PAUD	n/a	35,76



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
1.8	Persentase SD Terakreditasi A	%	Jumlah SD Terakreditasi A dibagi Jumlah seluruh SD	n/a	60,26
1.9	Persentase SMP Terakreditasi A	%	Jumlah SMP Terakreditasi A dibagi Jumlah seluruh SMP	n/a	58,19
1.10	Persentase Non Formal /Kesetaraan Terakreditasi B	%	Jumlah Non Formal/kesetaraan Terakreditasi B dibagi Jumlah seluruh Non Formal/kesetaraan	n/a	51,85
1.11	Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	%	Jumlah Ruang Kelas SD,SMP,PAUD dan Non Formal/Kesetaraan Kondisi Baik dibagi seluruh Ruang Kelas SD,SMP,PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	n/a	67,38
1.12	Persentase capaian pengembangan kurikulum	%	Jumlah peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan kurikulum dibagi Jumlah seluruh peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum	100	100
1.13	Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	%	Jumlah pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar yang bersertifikat pendidikan dibagi seluruh pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	51,45	51,45
1.14	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	%	Jumlah prestasi siswa Pendidikan Dasar yang diraih di tingkat provinsi dibagi Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan ke tingkat provinsi	30	25,03
2.	<b>Kesehatan</b>				
2.1	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Point	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	8,5	8,4
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Point	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	312,5	303,8
2.3	Prevalensi Stunting (%)	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100	14,8	14,8
2.4	Indeks Pencapaian SPM kesehatan	%	Rata-rata capaian SPM Kesehatan masyarakat	65,58	75
2.5	Indeks Pencapaian SPM kesehatan masyarakat	%	Rata-rata capaian SPM Kesehatan masyarakat		75
2.6	Indeks Pencapaian SPM Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	%	Rata-rata capaian SPM PM dan PTM		75
2.7	Indeks Keluarga Sehat			0,16	0,30
2.8	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%	Jmlah tenaga kesehatan yang tersertifikasi dibagi jumla tenaga kesehatan dikali 100	88,1	91



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
2.9	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	Jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman sesuai standar dibagi jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman yang diperiksa	66,60	77
2.10	Persentase Keluarga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	Jumlah Keluarga ner-PHBS dibagi jumlah keluarga dikali 100	25,77	25,78
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
3.1	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik (bobot 70%) + panjang drainase dalam kondisi baik (bobot 30%) / total panjang jalan dan jembatan * 100%	52,88	53,49
3.2	Prosentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	%	rosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani (70%) + Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya (10%) + persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan (20%)		32,86
3.3	Persentase Permukiman yang Layak Huni	%	Permukiman yang Layak Huni/ Luas Permukimanx 100%		25
3.4	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	Target capaian RT yang berakses SPALD dan RT yang berakses Air Minum tahun exsisting / target pertahun capaian RT yang berakses SPALD dan RT yang berakses Air Minum (100%)		100
3.5	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi	%	panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi / total panjang jalan dan jembatan *100%	68,25	68,66
3.6	Persentase Drainase Jalan dalam kondisi baik	%	Panjang drainase dalam kondisi baik / total panjang drainase	17,01	18,10
3.7	Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani	%	Jumlah bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani/ total bangunan gedung yang menjadi kewenangan pemda (114 gedung)	15,79 ( 18 gedung)	32,46
3.8	Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya	%	Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya/ Jumlah Kawasan x 100%		16,67
3.9	persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan	%	jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan / jumlah badan usaha di kota tasikmalaya (236 badan usaha * 100%)		42,37



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
3.10	Persentase sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik	%	Jumlah sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik / jumlah target sistem jaringan sarana prasarana permukiman akan ditangani (800 untuk 4 th)		25
3.11	Prosentase KK/RT Yang berakses SPLD	%	KK/RT Yang berakses SPLD/jumlah KK/RT x 100%		61,62
3.12	Prosentase KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum	%	KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum/Jumlah KK/RT x 100%		56,67
3.13	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		90
<b>4.</b>	<b>Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>				
4.1	Persentase Perumahan yang Layak huni	%	Persentase PSU yang diverifikasi+yang diserahterimakan+yang dikelola dibagi 3		25
4.2	Indeks Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	%	Jumlah unit penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan rekolasi program yang ditangani terhadap target	100	100
4.3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	Luas penanganan kawasan kumuh/total kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (82, 68 Ha)		2,42
4.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	Jumlah penanganan RTLH (didalam kawasan kumuh+diluar kawasan kumuh) dibagi total RTLH se Kota ( 9081 unit)		9,24
4.5	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	%	Jumlah unit penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang ditangani terhadap target	100	100
4.6	Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani	%	Jumlah rumah korban relokasi program yang difasilitasi terhadap target	100	100
4.7	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	%	Persentase PSU yang diverifikasi+yang diserahterimakan+yang dikelola dibagi 3		25
4.8	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	Luas penanganan kawasan kumuh/total target kawasan kumuh yang ditangani		20



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
4.9	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	Jumlah unit RTLH yang ditangani di dalam kawasan kumuh/total RTLH di dalam kawasan kumuh (1.752 Unit)		8,56
4.10	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	Jumlah unit RTLH yang ditangani di dalam kawasan kumuh/total RTLH di dalam kawasan kumuh (7329 Unit)		1,36
5.	<b>Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>				
5.1	Presentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di selesaikan	%	Jumlah pengaduan yang ditangani/Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%	80	100
5.2	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%	86	93
5.3	Tingkat Penyelesaian pelanggaran keamanan, ketertiban dan Keindahan (K3)	%	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di selesaikan/jumlah gangguan x 100%	80	100
5.4	Persentase Pengawasan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/Jumlah Pelanggaran x 100%	86	93
5.5	Presentase PPNS yang dibina	%	Jumlah PPNS yang dibina/jumlah total PPNS x 100%		80
5.6	Indeks Katahanan Daerah	Poin	Tercapainya Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0,34	0.34
5.7	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	%	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran		86
5.8	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana	%	<i>Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana/ Seluruh</i>	100	100



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
			<i>penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i> $\times 100\%$		
5.9	Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	%	<i>Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai jenis ancaman bencana /Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i> $\times 100\%$	100	100
5.10	Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana	%	<i>Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi/ Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana</i> $\times 100\%$	100	100
5.11	'Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	Poin	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	86	86
6.	<b>Sosial</b>				
6.1	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PPKS	%	Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial/ Data PPKS $\times 100$		10
6.2	Persentase Capaian Jaminan Sosial terhadap PPKS	%	Jumlah PPKS yang mendapatkan Jaminan sosial/ Jumlah Data DTKS $\times 100$		78
6.3	Persentase Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial	%	Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang di tangani/ Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial $\times 100$		100
6.4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PPKS	%	Jumlah PSKS yang diberdayakan/ Jumlah Data PSKS $\times 100$		25



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
6.5	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Daerah Asalnya/ Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan X 100	100	100
6.6	persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	Jumlah Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial/ Jumlah Target X 100	100	100
6.7	Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	Jumlah PPKS yang Menerima Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Target X 100	100	100
6.8	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	%	Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang di tangani/ Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial X 100	100	100
6.9	Persentase PSKS Aktif	%	Jumlah PSKS aktif/Target X 100	100	100
6.10	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	Jumlah TMP yang Dikelola / Jumlah TMP X 100	100	100
	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>				
<b>7.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>				
7.1	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / jumlah perusahaan x 100 %	53,75	54,23
7.2	persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	3,61	4,98
7.3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x 100%	0	4
7.4	persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	jumlah pencaker yang ditempatkan / jumlah pencaker yang terdaftar x 100 %	24,96	27



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
8.	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	91,74	91,84
8.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	59,51	60,00
8.3	Persentase Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	Penyelesaian Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak / Jumlah Pengaduan x 100	100	100
8.4	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Poin	Realisasi Jumlah Skor dari indikator tingkatan Kota Layak Anak	756	758
8.5	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	%	Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak/Jumlah Pengaduan x100	100	100
8.6	Persentase Capaian PUG SKPD/Lembaga/Organisasi yang Responsif Gender	Persen	Jumlah SKPD/Lembaga/Organisasi yang responsif gender / Jumlah SKPD/lembaga/Organisasi x 100	20	100
8.7	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Keluarga	Persen	Jumlah Keluarga yang dibina / Jumlah Keluarga Sasaran x 100	100	100
8.8	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Persen	Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak/Jumlah Pengaduan x100	100	100
8.9	Cakupan Sistem Data Gender dan Anak	Persen	Jumlah Gender dan Anak yang didata/dibina / Jumlah Total Gender dan Anak yang ada x 100	100	100
8.10	Persentase Penanganan Kasus Anak	Persen	Jumlah Kasus yang ditangani/jumlah kasus x 100	100	100
9.	<b>Ketahanan Pangan</b>				
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	PPH = % angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	91,3	91,4



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
9.2	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	unit	Jumlah infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	0	1
9.3	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	Persentase Angka Kecukupan Energi	110,6	110,7
9.4	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	Persentase Angka Kecukupan Protein	124,9	125
9.5	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani (%)	%	Jumlah kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani/Jumlah kelurahan rentan warga	10,3	15
9.6	Persentase pengawasan keamanan pangan	%	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi/Total sampel pangan yang diawasi	100	100
10.	<b>Pertanahan</b>				
10.1	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	%	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	100	100
11.	<b>Lingkungan Hidup</b>				
11.1	Indeks kualitas Air	poin	$IPj = [\sqrt{(Ci/Lij)^2_M + (Ci/Lij)^2_A}] / 2$	65,75	53,7
11.2	Indeks kualitas Udara	Poin	$IKU = 100 - [(50/0,9 \times Ieu - 0,1)]$	83,45	80,00
11.3	Persentase Penanganan Sampah	%	Persentase capaian kinerja penanganan sampah	-	72
11.4	Persentase Pengurangan Sampah	%	Persentase capaian kinerja Pengurangan sampah	-	27
12.	<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>				
12.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	Dokumen Pendaftaran penduduk + Dokumen pencatatan sipil/2 x 100%	92	94
12.2	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Jumlah Lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan/jumlah lembaga yang telah melakukan perjanjian kerjasama x 100%	100	100



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
12.3	Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	%	Jumlah kepemilikan KTP + kepemilikan KIA + kepemilikan KK/3 x 100%	96,1	98
12.4	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	Kepemilikan Akte Kelahiran + kepemilikan Akte Kematian + kepemilikan Akte Perceraian dan Perkawinan + kepemilikan Akte lainnya/4 x 100%	99	93
12.5	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	Jenis Sistem Informasi/Jumlah system informasi x 100%	100	100
12.6	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	Data kependudukan dan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan/2*100%	100	100
13.	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				
13.1	Cakupan Anggota BKB yang Ber KB	Persen	Jumlah Anggota BKB yang ber KB/Jumlah Anggota BKB x 100	82,03	82,53
13.2	Cakupan Anggota BKR yang Ber KB	Persen	Jumlah Anggota BKR yang ber KB/Jumlah Anggota BKR x 100	76,11	76,61
13.3	Cakupan Anggota BKL yang Ber KB	Persen	Jumlah Anggota BKL yang ber KB/Jumlah Anggota BKL x 100	74,47	74,97
13.4	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	1	1
13.5	Persentase Kebersertaan KB MKJP	Persen	Realisasi pelayanan Kb MKJP/Target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM KB) x100	336,15	100
13.6	Persentase Kebersertaan Un Meet Need	Persen	Unmeet need (ingin anak ditunggu (iat)+ tidak ingin anak lagi (tial)/PUS x 100	14	13,50
14.	<b>Perhubungan</b>				
14.1	Prosentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	%	Rata-rata prosentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	66,09	67,23
14.2	Persentase Layanan Lalu Lintas Berkeselamatan	%	Jumlah realisasi ruas jalan berkeselamatan / ruas jalan kota	58,93	61,07



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
14.3	Persentase Angkutan Lalu Lintas Bekerkeselamatan	%	Jumlah realisasi angkutan berkeselamatan/ Jumlah angkutan yang di targetkan	76,82	77,32
15.	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				
15.1	Capaian Predikat Indeks SPBE	Poin	Capaian Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	2,68	2,90
15.2	Capaian Predikat Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	Capaian Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 yang 15.3 diselenggarakan oleh Komisi Informasi	80	80
15.3	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Jumlah Layanan SPBE yang dilakukan secara online dan terintegrasi/ Jumlah Layanan SPBE yang ada*100	60	60
15.4	Persentase Layanan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	%	Akumulasi hasil penilaian seluruh kriteria/ indikator untuk kualifikasi predikat keterbukaan informasi dan komunikasi publik.. Penilaian : PPID 10%, SLIP 20%, Berkala 30%, Setiap Saat 20%, Serta Merta 20%	N/A	Informatif (80%)
16.	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>				
16.1	Persentase koperasi yang memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi)	%	Jumlah Koperasi yang bersertifikat NIK/ Jumlah Koperasi Aktif x 100%	63	64
16.2	Persentase usaha mikro yang bersertifikat	%	Jumlah usaha mikro yang bersertifikat/ jumlah total usaha mikro x 100%	2	2
16.3	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	%	Jumlah koperasi yang diberi rekomendasi/ jumlah koperasi pemohon rekomendasi x 100%	100	100
16.4	persentase koperasi aktif	%	Jumlah Pertumbuhan koperasi aktif/ total Koperasi Aktif x 100%	1	1
16.5	Persentase Koperasi Sehat	%	Jumlah KSP/USP sehat/ Jumlah total KSP/USP x 100%	2	6
16.6	Persentase SDM koperasi yang kompeten	%	Jumlah SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi/ Jumlah SDM koperasi yang dibina x 100%	25	25



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
16.7	Persentase koperasi aktif yang diberdayakan	%	Jumlah koperasi aktif yang diberdayakan/ Jumlah total koperasi aktif x 100%	25	25
16.8	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan / Jumlah usaha mikro x 100%	2	2
16.9	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	Jumlah usaha mikro yang dibina / Jumlah usaha mikro x 100%	5	5
17.	<b>Penanaman Modal</b>				
17.1	Nilai penanaman modal daerah dari PMA dan PMDN yang masuk	Rp./Milyar	Jumlah nilai PMA dan PMDN yang masuk yang tercatat di Dinas PMPTSP	1.242	1.304
17.2	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	%	Persentase capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap	100	100
17.3	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	Realiasi RUPM/ Jumlah tahapan dalam RUPM x 100%	0	20
17.4	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	Jumlah investor yang dibina/ Jumlah total investor x 100%	0,13	1
17.5	Persentase pengelolaan basis data potensi Penanaman Modal sesuai SOP	%	Jumlah basis data potensi penanaman modal yg dikelola sesuai SOP/ Jumlah total basis data potensi investasi x 100%	0	25
17.6	Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP	%	Jumlah data perijinan yang dikelola sesuai SOP/ Jumlah total data perijinan x 100%	80	100
18.	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>				
18.1	Persentase prestasi pemuda tingkat provinsi (%)	%	Jumlah prestasi kepemudaan tingkat provinsi / jumlah OKP terdaftar x 100	3,30	2,20
18.2	Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi (%)	%	Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi / jumlah cabor x 100	N/A	34,15
18.3	Persentase OKP yang dibina	%	Jumlah OKP yang dibina / Jumlah OKP x 100	28,57	29,67
18.4	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	Perolehan medali tingkat provinsi / jumlah cabang olahraga * 100	60,00	34,15%



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
19.	<b>Statistik</b>				
19.1	Persentase data dan informasi statistik sektoral	%	Jumlah realisasi kelompok data pada statistik sektoral terhadap jumlah kelompok data statistik sektoral. Berdasarkan Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang SIPD terdapat 3 Kelompok Data : Kelompok Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan dasar dan Non Dasar, Kelompok Urusan Pemerintahan Pilihan dan Kelompok Data Umum.	100	100
19.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dlm penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah/Jumlah OPD yang ada di Pemerintah Kota*100	100	100
20.	<b>Persandian</b>				
20.1	Capaian penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	%	Realisasi Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah terhadap total Area Pengendalian Sistem Manajemen Keamanan Informasi	40,00	41,00
20.2	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	%	Jumlah Nilai per Area Keamanan/Jumlah Area Keamanan*100	41,00	41,00
21.	<b>Kebudayaan</b>				
21.1	Persentase Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	%	Jumlah OPK yang dilestarikan / Jumlah OPK x 100	57,97	63,73
21.2	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	OPK yang dikembangkan /Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) x 100	57,97	63,73
21.3	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	Jumlah grup kesenian yang dibina / jumlah grup kesenian tercatat x 100	20,23	25



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
21.4	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan/jumlah target x 100%	50,00	25
21.5	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	Cagar budaya yang dipelihara / jumlah cagar budaya terdaftar x 100	35,38	46,15
22.	<b>Perpustakaan</b>				
22.1	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	Jumlah penambahan pengunjung pada tahun berkenaan / Jumlah pengunjung tahun lalu X 100%	N/A	0,3
22.2	Persentase pembinaan perpustakaan	%	Jumlah perpustakaan yang dibina /Jumlah Perpustakaan yang yang seharusnya dibina X 100%	5,53	4,42
22.3	Persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan	%	Rata-rata persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan	N/A	38
22.4	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	Jumlah Calon Naskah Kuno dan koleksi etnis nusantara yang dilestarikan /Jumlah keseluruhan naskah kuno dan koleksi etnis nusantara yang direncanakan pada akhir periode renstra X 100%	N/A	23,81
23.	<b>Kearsipan</b>				
23.1	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	Rata-rata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Seluruh Perangkat Daerah, dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)	51,58	52,43
23.2	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal, dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan)	23,96	44,80



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
			b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)		
23.3	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	%	Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Pengawasan Kearsipan minimal Kategori Cukup /Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan X 100%	63,89	77,78
23.4	Persentase kesesuaian kinerja kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah	%	Total Nilai Perolehan pada Laporan Pengawasan Eksternal /Jumlah komponen pada aspek penilaian X 100%	21,45	37,48
<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>					
1	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				
1.1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	9.990,39	10.000
1.2	Produksi produk hasil olahan perikanan	Ton	Jumlah produksi produk hasil olahan perikanan	312,78	300
1.3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ Tahun	Jumlah Ikan yang Dikonsumsi dibagi jumlah pendudukn	22,95	22,25
2	<b>Pariwisata</b>				
2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah occupancy hotel	483.569	443.505
2.2	Persentase peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	%	Objek pariwisata dipelihara/objek pariwisata terdaftar di RIPDA x 100%	55,10	59,18
2.3	Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	%	Jumlah usaha pariwisata dan sub sektor ekonomi kreatif yang dibina/jumlah Jumlah usaha pariwisata dan sub sektor ekonomi kreatif	46,15	53,33



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
<b>3</b>	<b>Pertanian</b>				
3.1	Produksi pertanian dan perikanan	Ton	Jumlah produksi pertanian dan perikanan	70.000	75.000
3.2	Persentase peningkatan populasi ternak	%	$\frac{\text{Jumlah populasi ternak tahun } n - \text{Jumlah populasi ternak tahun } n-1}{\text{jumlah populasi ternak } n-1} \times 100$	-1,59	1
3.3.	Produksi Tanaman Pangan	Ton	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	85.384	85.500
3.4	Produksi Hortikultura dan Perkebunan	Ton	Jumlah Produksi Hortikultura dan Perkebunan	5.834	5.900
3.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha	Produksi padi/luas panen hektar	62,9	62,9
3.6	Produksi Hasil Peternakan	Ton	Jumlah Produksi Hasil Peternakan	10.347	10.350
3.7	Persentase penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	$\frac{\text{jumlah kejadian/kasus yang ditangani}}{\text{jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular yang terjadi}}$	100	100
3.8	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	%	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi (Ha)}}{\text{Luas Area Terkena Bencana}}$	73,56	75
3.9	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	$\frac{\text{Jumlah kelompok tani yang naik kelas}}{\text{jumlah kelompok tyani}} \times 100$	4,35	4,5
3.10	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	izin	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	0	3
<b>4.</b>	<b>Perdagangan</b>				
4.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	$\frac{\text{(PDRB sector perdagangan } n - \text{PDRB sector perdagangan } n-1)}{\text{PDRB sector Perdagangan } n-1} \times 100 \%$	2,97	4,59
4.2	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekpor	%	$\frac{\text{(Nilai eskpor tahun } n - \text{nilai ekpor tahun } n-1)}{\text{nilai ekpor tahun } n-1} \times 100 \%$	2	2



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
4.3	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	Jumlah perusahaan yang difasilitasi/Jumlah total perusahaan pemohon x 100%	100	100
4.4	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	%	Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik / Jumlah total pasar rakyat x 100%	70	70
4.5	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	%	Jumlah bapakting yang harganya stabil/Jumlah total bapakting x 100%	40	40
4.6	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya	%	Jumlah peningkatan pelaku usaha produk unggulan yang mengikuti even/Jumlah IKM leseluruhan x 100%	10	10
4.7	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	%	Jumlah pelaku usaha yg berorientasi ekspor/Jumlah total pelaku usaha x 100%	1	1
4.8	Persentase alat UTTP yang bertera sah	%	Jumlah alat UTTP yang bertera sah/ Jumlah total alat UTTP x 100%	80	80
<b>5.</b>	<b>Perindustrian</b>				
5.1	Persentase pertumbuhan industri	%	Jumlah pertumbuhan industri/ total industri x 100%	2	4
5.2	Persentase implementasi pencapaian sasaran rencana pembangunan industri	%	Jumlah realisasi sasaran RPIK/Jumlah total sasaran dalam RPIK x 100%	5	5
5.3	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri	%	Jumlah Izin Usaha Industri yang dipantau dan diawasi/ jumlah total Izin Usaha Industri yang diterbitkan x 100%	100	100
5.4	Persentase IKM yang terdaftar di sistem informasi industri nasional	%	Jumlah IKM yang Terdaftar/ jumlah total IKM x 100%	5	5
	<b>Layanan Pendukung dan Penunjang Pemerintahan</b>				
1.	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>				
1.1	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Hasil Evaluasi SAKIP Kota	Nilai	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Hasil Evaluasi SAKIP Kota	10,69	11,00



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
1.2	Persentase Nilai IKM Perangkat Daerah Berkategori sangat Baik	Kategori	(Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah berkategori sangat baik/ Jumlah Perangkat Daerah) X 100%	38,89	40,00
1.3	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang Meningkatkan	Kategori	Nilai LPPD dari Kemendagri	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
1.4	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron Dengan Peraturan Perundang-undangan	%	(Jumlah Produk Hukum yang Direvisi / Jumlah Produk Hukum yang harus direvisi) 100%	100	100
1.5	Indek Tata Kelola Barang dan Jasa	%	Hasil Evaluasi dari LKPP		40
1.6	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkatkan	%	Capaian IKK Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkatkan X 100%	100	100
1.7	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	%	Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik/ Jumlah Kecamatan dan Kelurahan x 100%	100	100
1.8	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	%	Produk Hukum Daerah yang Diundangkan/ Jumlah Target x 100%	100	100
1.9	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	"Capaian IKK Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Meningkatkan X 100% Seluruh Jumlah IKK Bidang Perekonomian dan Pembangunan"	100	100
1.10	Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	%	Perbandingan Target Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah	100	100
1.11	Indek Kematangan UKPBJ	%	Dihitung oleh LKPP		3
1.12	Persentase hasil pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	%	Target fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD/Realisasi fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD x 100%	100	100
2	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				
1	<b>Perencanaan Pembangunan</b>				
1.1	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	Poin	Jumlah variable pada komponen perencanaan kinerja SAKIP Kota Tasikmalaya	25,17	25,20 - 25,30



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
1.2	Nilai Pengukuran Kinerja dalam penilaian SAKIP	Poin	Jumlah variable pada komponen pengukuran kinerja SAKIP Kota Tasikmalaya	17,58	17,65 - 17, 85
1.3	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Daerah berpredikat minimal baik	%	Jumlah indicator kinerja daerah berpredikat minimal baik/jumlah indicator kinerja daerah x 100%	N/A	80
<b>2</b>	<b>Keuangan</b>				
2.1	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	OPini	Opini BPK atas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
2.2	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	%	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah/Target x 100%	100	100
2.3	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar	%	Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar/standar x 100%	100	100
2.4	Persentase peningkatan pajak daerah	%	Capaian pajak tahun berkenaan /capaian pajak tahun lalu (n-1) x 100%	14,06	2,31
2.5	Persentase peningkatan PAD bukan pajak daerah	%	Capaian PAD tahun berkenaan /capaian PAD tahun lalu (n-1) x 100%	59,35	-1,24
2.6	Capaian Pajak Daerah	%	Capaian Pajak Daerah/target x100%	100	100
2.7	Capaian PAD bukan pajak daerah	%	Capaian PAD bukan Pajak Daerah/target x100%	100	100
<b>3</b>	<b>Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>				
3.1	Indeks Merit Sistem	Poin	Indeks Merit Sistem	120,5/ Buruk	175/ Kurang



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
3.2	Persentase ASN yang diangkat sesuai dengan formasi	%	ASN yang diangkat sesuai dengan formasi/Jumlah ASN x 100%	100	100
3.3	Persentase capaian pelayanan kepegawaian	%	capaian pelayanan kepegawaian/jumlah layanan kepegawaian x 100%	100	100
3.4	Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	PNS yang terpetakan kompetensinya/jumlah PNS x 100%	7	12
3.5	Persentase penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin	%	penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin	100	100
3.6	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi/Jumlah ASN x 100%		17
4	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>				
4.1	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	Hasil kajian yang direkomendasikan/jumlah kajian yang dihasilkan dalam periode 1 tahun berjalan x 100%	80	85
4.2	Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA)	Buah	Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA)	9	10
5	<b>Unsur Pengawasan Pemerintahan</b>				
5.1	Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level	capaian kapabilitas APIP dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3
5.2	Tingkat Maturitas SPIP Kota	Level	Tingkat Maturitas SPIP dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3
5.3	Pemenuhan Elemen Praktek Profesional	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Profesional dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2
5.4	Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2
5.5	Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2



NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
5.6	Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2
<b>6. Unsur Kewilayahan</b>					
6.1	Tingkat Kinerja Kecamatan	Kategori	Tingkat Kinerja Kecamatan hasil penilaian Setda	Baik	Baik
6.2	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban UmumLingkungan	%	Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani/jumlah gangguan x 100%	100	100
6.3	Persentase Kelurahan dengan kategori "Cepat Berkembang"	%	Jumlah kelurahan kategori "Cepat berkembang"/ jumlah kelurahan x 100%	100	100
6.4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	%	Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	100	100
6.5	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	Capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100
6.6	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	%	Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	100
6.7	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	Capaian pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100
<b>7. Urusan Pemerintahan Umum</b>					
7.1	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	%	Jumlah potensi konflik social yang diselesaikan/jumlah potensi konflik x 100%	100	100
7.2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dikeluarkan oleh KPU	-	-
7.3	Persentase ormas yang aktif	%	Jumlah ormas aktif/jumlah ormas x 100%	64	65
7.4	Persentase capaian pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	Jumlah peserta yang dibina/target x 100%	100	100



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2021	2023
7.5	Persentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	Jumlah peserta yang dibina/target x 100%	100	100
7.6	Persentase penanganan konflik sosial	%	Jumlah potensi konflik social yang ditangani/jumlah potensi konflik x 100%	63	64
7.7	Persentase parpol yang dibina	%	Jumlah parpol yang dibina/jumlah parpol x 100%	100	100
7.8	Persentase ormas yang dibina	%	Jumlah ormas yang dibina/jumlah parpol x 100%	71	71



## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023 merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026. Dokumen memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta RKPD Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya prioritas dan sasaran daerah serta untuk terwujudnya sinergitas dan tercapainya target kinerja pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Kota Tasikmalaya, melaksanakan RKPD Tahun 2023 secara sinergis, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. RKPD Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota/APBD Provinsi/APBN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang RKPD Tahun 2023, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2023.
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi secara proporsional.
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, potensi sumber daya dari masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD tahun 2023, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan, serta melaporkannya secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Bappelitbangda.
7. Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian, evaluasi, dan analisis lebih lanjut terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2023. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2023 menjadi bahan dasar penyusunan RKPD tahun berikutnya.



Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang direncanakan dalam RKPD tahun 2023, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya hendaknya melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap asumsi, target, sasaran, program dan kegiatan serta kondisi lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALI KOTA TASIKMALAYA

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF